WALI KOTA TASIKMALAYA

PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 12 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 104 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tasikmalaya.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya.
5. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menegah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029.
7. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi yang selanjutnya disebut RKPD Provinsi adalah dokumen perencanaan Pemerintah Jawa Barat untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Pemerintah Kota Tasikmalaya untuk periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Kebijakan umum anggaran pendapatan dan belanja Daerah yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
13. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

(1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan Kota Tasikmalaya.

(2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:

a. mewujudkan pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Daerah yang tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029;
b. mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan Daerah, baik antar Daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan;
c. mewujudkan keselarasan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan Daerah; dan
d. mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efektif, efisien, berkeadilan dan berkelanjutan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

a. sistematika, isi dan uraian;
b. penyusunan RKPD; dan
c. Pengendalian dan evaluasi.

BAB IV

SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN

Pasal 4

(1) Sistematika penulisan RKPD disusun dengan ketentuan sebagai berikut:
   a. bab I pendahuluan;
   b. bab II gambaran umum kondisi Daerah;
   c. bab III kerangka ekonomi daerah dan keuangan Daerah;
   d. bab IV sasaran dan prioritas pembangunan Daerah;
   e. bab V rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. bab VI kinerja penyelenggaraan pemerintahan Daerah; dan
   g. bab VII penutup.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e memuat program, kegiatan, dan sub kegiatan serta pendanaan indikatif.

(3) Isi dan uraian sistematika RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 5

(1) RKPD menjadi pedoman untuk penyusunan Renja Perangkat Daerah dan penyusunan Rancangan KUA dan PPAS.

(2) Dalam hal terjadi penambahan kegiatan dan sub kegiatan pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, disusun berita acara kesepakatan antara Wali Kota dengan Pimpinan DPRD, untuk selanjutnya dituangkan dalam Peraturan Wali Kota tentang Perubahan RKPD Tahun 2026.

(3) Penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terjadi kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.

BAB V

PENYUSUNAN RKPD

Pasal 6

(1) RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD 2025-2029.

(2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus selaras

dan konsisten dengan prioritas, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RPJMD 2025-2029, mempedomani RKPD Provinsi, RKP dan program strategis nasional.

(3) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan.

Pasal 7

(1) Perangkat Daerah menyusun rancangan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada RKPD dan Renstra Perangkat Daerah.

(2) Rancangan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan untuk diverifikasi dan diselaraskan dengan RKPD.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

(1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan melakukan pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026.

(2) Pengendalian dan evaluasi RKPD Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:

a. pengendalian kebijakan;

b. pengendalian pelaksanaan; dan

c. evaluasi hasil.

(3) Tata cara pengendalian dan evaluasi RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

(1) Dalam rangka pengendalian dan evaluasi, Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan.

(2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan menghimpun dan mengevaluasi kinerja pelaksanaan rencana pembangunan dari setiap Perangkat Daerah.

(3) Hasil evaluasi menjadi bahan bagi penyusunan RKPD tahun

berikutnya.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 juli 2025
WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 11 Juli 2025
SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 15

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 12 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyusunan RKPD merupakan upaya dalam menjaga kesinambungan pembangunan terencana dan sistematis yang dilaksanakan oleh masing-masing maupun seluruh pemangku kepentingan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif, transparan dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Penyusunan RKPD merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyatakan bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Dokumen perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

RKPD disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam tahapan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) yang diawali dengan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). Bagi Perangkat Daerah, RKPD merupakan pedoman untuk menyempurnakan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dalam rangka mempersiapkan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD).

Maka berdasarkan hal tersebut, dokumen RKPD mempunyai kedudukan, peran dan fungsi yang sangat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat:

1. Secara substansial, memuat arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, rencana program, kegiatan, indikator kinerja, pagu indikatif, kelompok sasaran, lokasi kegiatan, prakiraan maju, dan Perangkat Daerah penanggung jawab yang wajib dilaksanakan pemerintahan daerah dalam 1 (satu) tahun;
2. Secara normatif, menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang akan diusulkan oleh kepala daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD);
3. Secara operasional, memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan dibidang pelayanan dan pemberdayaan masyarakat serta Pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab masing-masing Kepala

Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah; dan

4. Secara faktual, menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah merealisasikan program dan kegiatan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

RKPD Tahun 2026 merupakan transisi dalam perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya, dimana RKPD Tahun 2026 merupakan tahun keempat pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 sekaligus merupakan tahun pertama perencanaan dari wali kota dan wakil wali kota terpilih yang akan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029 sehingga akan ada penyesuaian dalam tahapan penyusunan selanjutnya.

Gambar 1.1
Proses Pelaksanaan Penyusunan RKPD Tahun 2026

RKPD Tahun 2026 pada tahap rancangan awal ini merupakan penjabaran dari RPD Kota Tasikmalaya tahun 2023-2026. Namun seiring dengan telah terpilihnya kepala daerah hasil pemilukada tahun 2024, dalam tahapan penyusunan selanjutnya akan berpedoman pada RPJMD Tahun 2025-2029 yang didalamnya memuat visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih dimana penyusunannya akan dilaksanakan setelah pelantikan kepala daerah terpilih.

Penyusunan RKPD Tahun 2026 dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan partisipatif, teknokratik, politis, *top-down* dan *bottom-up*, holistik, tematik, integratif, dan spasial, serta kebijakan anggaran belanja berdasarkan *money follows program* dengan cara memastikan hanya program yang benar-benar bermanfaat dan mendongkrak pencapaian kinerja yang akan didanai dan bukan sekedar untuk melaksanakan tugas fungsi perangkat daerah bersifat rutinitas semata. Hal ini mengisyaratkan bahwa pencapaian prioritas pembangunan daerah memerlukan adanya koordinasi dari seluruh pemangku kepentingan, melalui pengintegrasian prioritas daerah, program prioritas dan kegiatan prioritas yang dilaksanakan dengan berbasis kewilayahan.

Gambar 1.2
Proses dan Tahapan Pelaksanaan Penyusunan RKPD Tahun 2026

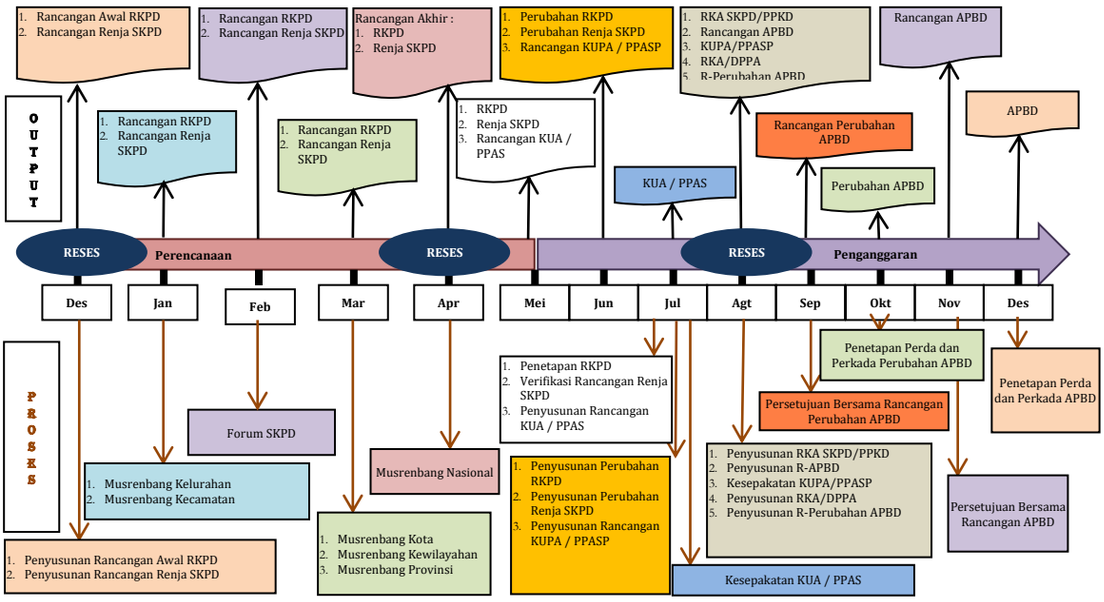

Penyusunan RKPD berpedoman pada arah kebijakan pembangunan nasional, arah kebijakan pembangunan daerah, tahapan dan tatacara penyusunan, tahapan dan tata cara penyusunan perubahan, pengendalian dan evaluasi, serta konsistensi perencanaan dan penganggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tahapan dalam penyusunan RKPD dimulai dari tahap persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD dan penetapan RKPD.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang tentang Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembar Negara Nomor 6856);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
14. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
15. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
16. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
25. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 264);
26. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
27. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022;
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
29. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 286);
30. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024-2026 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2023 Nomor 25);
31. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
32. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89);

33. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 12 Tahun 2008 tentang Tata Cara Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 93);
34. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2012 Nomor 133);
35. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 170);
36. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178);
37. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 7) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 7);
38. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 Nomor 5);
39. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 48 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2021 Nomor 48);
40. Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2022 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 39 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Nomor 13 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 Nomor 39);

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Sebagai dokumen perencanaan tahunan daerah, RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen-dokumen perencanaan lainnya. Adapun hubungan antara RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 dengan dokumen perencanaan lainnya adalah sebagai berikut:

1. RKPD Tahun 2026 mengacu dan mendukung RKP dan Program Startegis Nasional Tahun 2026;
2. RKPD Tahun 2026 mengacu dan mendukung RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026;
3. RKPD Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029;
4. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan hasil pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024;
5. RKPD Tahun 2026 mempertimbangkan arah pembangunan kewilayahan yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya;

6. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyempurnakan dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) Tahun 2026. Proses penyusunan RKPD dengan Renja PD dilakukan secara simultan dan sifatnya saling melengkapi; dan
7. RKPD Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan KUA dan PPAS serta penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Tasikmalaya Tahun 2026.

Hubungan keterkaitan antara RKPD dengan dokumen perencanaan dan penganggaran lainnya dapat digambarkan sebagai berikut.

Gambar 1.3.

Hubungan Keterkaitan antara RKPD dengan Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Lainnya

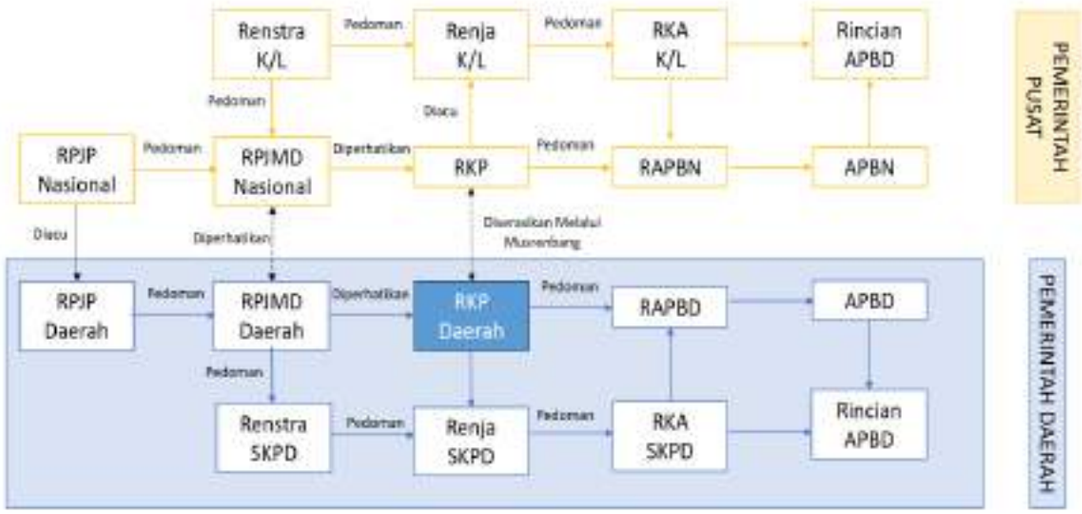

1.4. Maksud dan Tujuan

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan maksud sebagai pedoman perencanaan dan penganggaran tahunan daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 – 2029 serta menjadi pedoman bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renja Tahun 2026 dan digunakan sebagai pedoman dalam proses penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. Adapun tujuan RKPD Tahun 2026 adalah:

1. Mewujudkan pencapaian tujuan, sasaran dan program pembangunan daerah Kota Tasikmalaya;
2. Menetapkan prioritas pembangunan, strategi, arah kebijakan, serta program dan kegiatan Tahun 2026;
3. Mewujudkan sinergitas, sinkronisasi dan keterpaduan perencanaan pembangunan daerah baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintahan maupun antar tingkat pemerintahan mulai dari pusat, provinsi dan kota.
4. Mewujudkan keselarasan, keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan.
5. Meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan lainnya dalam pembangunan.

6. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

1.5. Sistematika Dokumen RKPD

Dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 disusun sesuai dengan sistematika yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, meliputi:

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan mengenai latar belakang, landasan hukum, hubungan antar dokumen, maksud dan tujuan dan sistematika dokumen RKPD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Menyajikan gambaran umum kondisi daerah, evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu menguraikan tentang hasil evaluasi RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan serta permasalahan pembangunan.

BAB III KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Memuat penjelasan tentang kondisi ekonomi tahun lalu dan perkiraan tahun berjalan, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi permasalahan ditingkat daerah dan nasional.

BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana (RKPD) dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat.

BAB VI KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Menyajikan penetapan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah bertujuan untuk memberi panduan dalam pencapaian kinerja tahunan yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) maupun Indikator Kinerja Daerah (IKD) pada akhir tahun perencanaan.

BAB VII PENUTUP

Menyajikan kesimpulan dan kaidah pelaksanaan RKPD.

BAB II
GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Kondisi Umum Kondisi Daerah

2.1.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1.1. Letak Geografis dan Kondisi Administrasi Kota

Kota Tasikmalaya terletak antara 108^{0}08'38" BT-108^{0}24'02" BT dan antara 7^{0}10' LS-7^{0}26'32" LS, berada di bagian tenggara Provinsi Jawa Barat, berjarak ± 105 km dari Kota Bandung dan ± 255 km dari Kota Jakarta. Batas wilayah administrasi Kota Tasikmalaya diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya pasal 6 ayat (1) bahwa Kota Tasikmalaya mempunyai batas-batas wilayah:

a. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Cisayong dan Kecamatan Sukaratu Kabupaten Tasikmalaya, Kecamatan Cihaurbeuti dan Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis;
b. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya;
c. Sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Jatiwaras dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya; dan
d. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Singaparna, Kecamatan Sukarame dan Kecamatan Sukaraja Kabupaten Tasikmalaya.

Batas Daerah Kota Tasikmalaya diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat. Hal tersebut, menjadi dasar untuk menghitung luas wilayah Kota Tasikmalaya sebagaimana tertuang dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau Tahun 2021 yaitu seluas 183,94 Km^2 (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi *Cylindrical Equal Area*) atau 184,22 Km^2 (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi Unit *Transverse Mecator*).

Saat ini Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2012 tentang Batas Daerah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat sedang dalam proses perubahan karena adanya Berita Acara Kesepakatan Batas Daerah antara Pemerintah Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Tasikmalaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Barta Nomor: 53/BAD II/VII/2023 tanggal 20-22 Juli 2023. Adapun hasil dari perhitungan luas berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2012 tentang Batas Daerah

Kota Tasikmalaya dengan Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat dan Berita Acara tersebut diatas, maka luas wilayah Kota Tasikmalaya adalah 182,9638 Km2 (dihitung menggunakan Sistem Proyeksi Cylindrical Equal Area/CEA).

Kota Tasikmalaya terbagi menjadi 10 kecamatan dan 69 kelurahan, untuk lebih jelasnya mengenai letak orientasi dan pembagian wilayah administrasi dapat dilihat pada gambar 2.1. dan terperinci dalam tabel 2.1.

Gambar 2.1.
Peta Orientasi dan Pembagian Wilayah
Kota Tasikmalaya

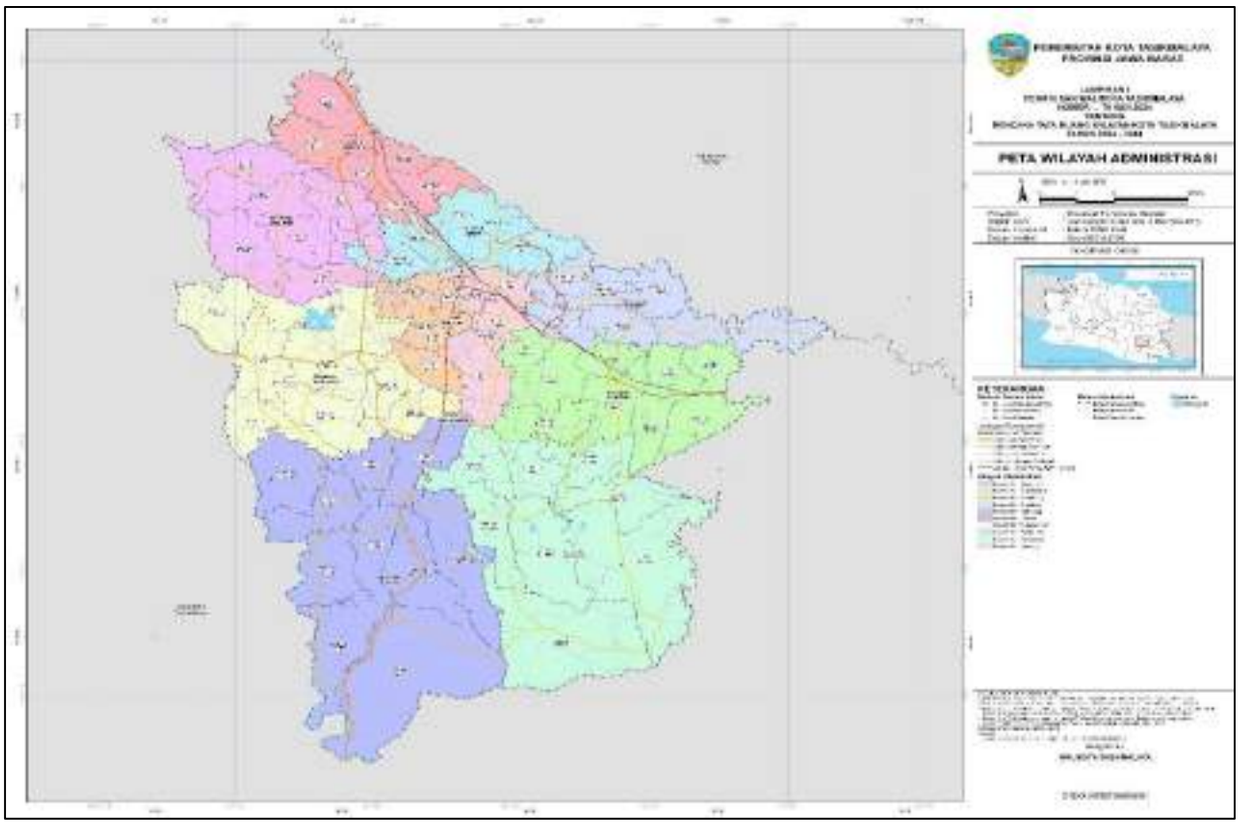

Sumber: Rancangan Perda RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024-2044

Tabel 2.1.
Kecamatan dan Kelurahan di Kota Tasikmalaya

No.	Kode Wilayah	Kecamatan	Kelurahan
1	32.78.01	Cihideung	Argasari
2			Cilembang
3			Nagarawangi
4			Tugujaya
5			Tuguraja
6			Yudanagara
7	32.78.02	Cipedes	Cipedes
8			Nagarasari
9			Panglayungan
10			Sukamanah
11	32.78.03	Tawang	Cikalang
12			Empangsari
13			Kahuripan
14			Lengkongsari
15			Tawangsari
16	32.78.04	Indihiang	Indihiang
17			Panyingkiran
18			Parakannyasag
19			Sirnagalih
20			Sukamaju Kaler
21			Sukamaju Kidul
22	32.78.05	Kawalu	Cibeuti
23			Cilamajang
24			Gunung Gede
25			Gunung Tandala
26			Karanganyar
27			Karsamenak
28			Leuwiliang
29			Talagasari
30			Tanjung
31			Urug
32	32.78.06	Cibeureum	Awipari
33			Ciakar
34			Ciherang
35			Kersanagara
36			Kota Baru
37			Margabakti
38			Setiajaya
39			Setianagara
40			Setiaratu
41	32.78.07	Tamansari	Mugarsari
42			Mulyasari
43			Setiamulya
44			Setiawargi
45			Sukahurip
46			Sumelap
47			Tamanjaya
48			Tamansari
49	32.78.08	Mangkubumi	Cigantang
50			Cipari
51			Cipawitra
52			Karikil
53			Linggajaya
54			Mangkubumi
55			Sambongjaya
56			Sambongpari
57	32.78.09	Bungursari	Bantarsari
58			Bungursari
59			Cibunigeulis
60			Sukajaya
61			Sukalaksana
62			Sukamulya
63			Sukarindik
64	32.78.10	Purbaratu	Purbaratu
65			Singkup
66			Sukaasih
67			Sukajaya
68			Sukamenak
69			Sukanagara

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Tasikmalaya, 2025

Kota Tasikmalaya dalam Wilayah Pengembangan (WP) Priangan Timur-Pangandaran menjadi bagian dari Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) yang memiliki peran penting dalam perekonomian daerah, terutama dalam sektor perdagangan dan jasa. Posisi geografis yang strategis sebagai penghubung antar daerah di Jawa Barat bagian selatan, dengan jalur transportasi yang menghubungkan kota-kota besar di sekitar Jawa Barat, Jakarta dan Jawa Tengah, didukung oleh infrastruktur jalan yang cukup baik menjadikan Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan dan jasa bagi daerah sekitarnya. Selain itu, Kota Tasikmalaya berperan dalam pengembangan sektor pendidikan di Jawa Barat bagian selatan. Terdapat sejumlah perguruan tinggi dan sekolah yang menarik mahasiswa dari luar daerah. Sebagai kota yang berkembang, Kota Tasikmalaya juga berperan dalam memberikan kontribusi sosial dan budaya bagi daerah-daerah sekitar.

2.1.1.2. Topografi

Berdasarkan bentang alamnya, Kota Tasikmalaya berada pada ketinggian antara 201 sampai dengan 503 meter di atas permukaan laut (mdpl) dan mempunyai dataran dengan kemiringan relatif kecil. Daerah tertinggi berada di

Gambar 2.2.
Peta Topografi Kota Tasikmalaya

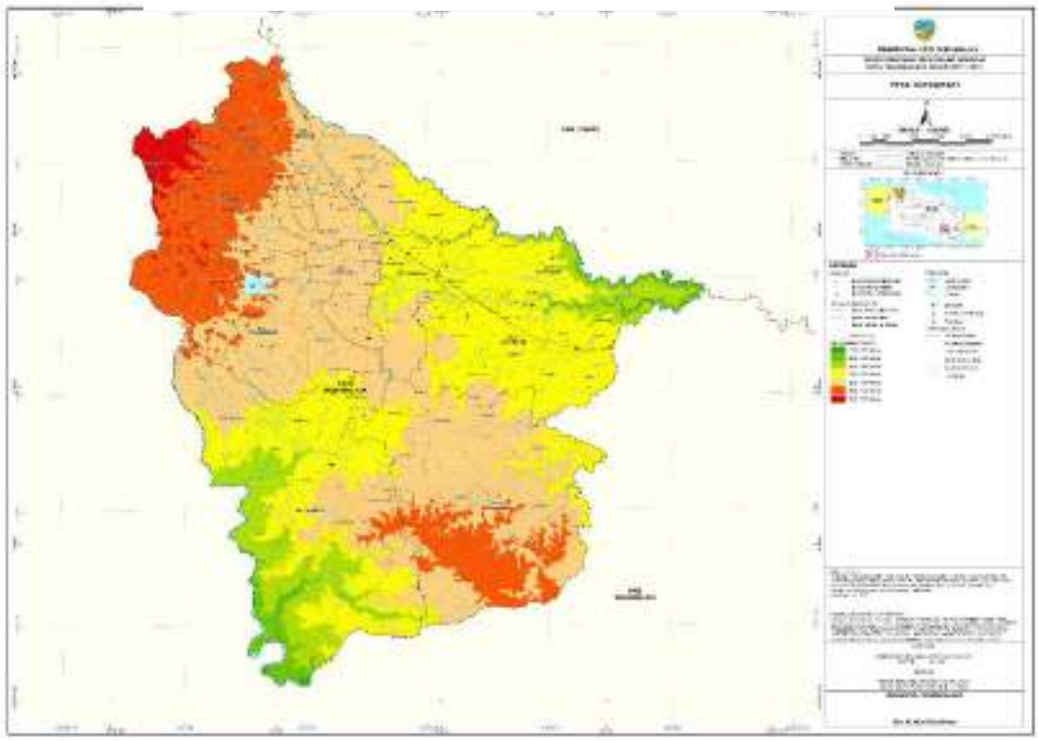

Kelurahan Bungursari Kecamatan Bungursari (kaki Gunung Galunggung) yaitu 503 mdpl sedangkan terendah berada di Kelurahan Urug Kecamatan Kawalu yaitu 201 mdpl.

Sumber: Data BIG (diolah), 2017.

Ditinjau dari segi fisiografi wilayah, sebagian besar tempat tertinggi Kota Tasikmalaya terdapat di bagian barat dan selatan, kemudian menurun ke tengah di sekitar pusat kota menuju utara, serta sebagian kecil dari timur ke tengah dan utara Kota Tasikmalaya. Pada bagian selatan wilayah Kota Tasikmalaya, di sekitar Kecamatan Kawalu dan Tamansari, kondisinya cenderung berbukit-bukit dengan ciri hutan dan kebun campuran.

Kondisi Rupa Bumi (geomorfologi) seperti ini membagi dua wilayah Kota Tasikmalaya menjadi arah Barat Laut dan arah Selatan Kota Tasikmalaya (lihat Gambar 2.3). Kondisi fisik bentang alam ini sangat terkait dengan kondisi hidrologi, selain itu juga dipengaruhi oleh kondisi topografi dan kemiringan lerengnya. Dari kondisi ini Kota Tasikmalaya terbagi kedalam dua daerah aliran sungai (DAS), yaitu di sebelah Utara hingga Timur Laut merupakan DAS Citanduy dengan aliran air menuju kearah Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. Sedangkan di sebelah Barat hingga Barat Daya merupakan DAS Ciwulan dimana aliran air menuju kearah Kecamatan Sukaraja dan Tanjung Jaya di Kabupaten Tasikmalaya. Tabel 2.2 memperlihatkan kondisi kemiringan lahan di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.2.
Kondisi Kemiringan Lahan Kota Tasikmalaya

Kelas Lereng	Luas (Km2)	% Luas
< 8 %	147,787	80,773974
8 % - 15 %	29,8046	16,289904
16 % - 25 %	5,35193	2,9251332
26 % - 40 %	0,020107	0,0109896
Total	182,9636	100

Sumber: Data BIG dan Hasil Pengolahan, 2017.

Gambar 2.3.
Peta Morfologi Kota Tasikmalaya

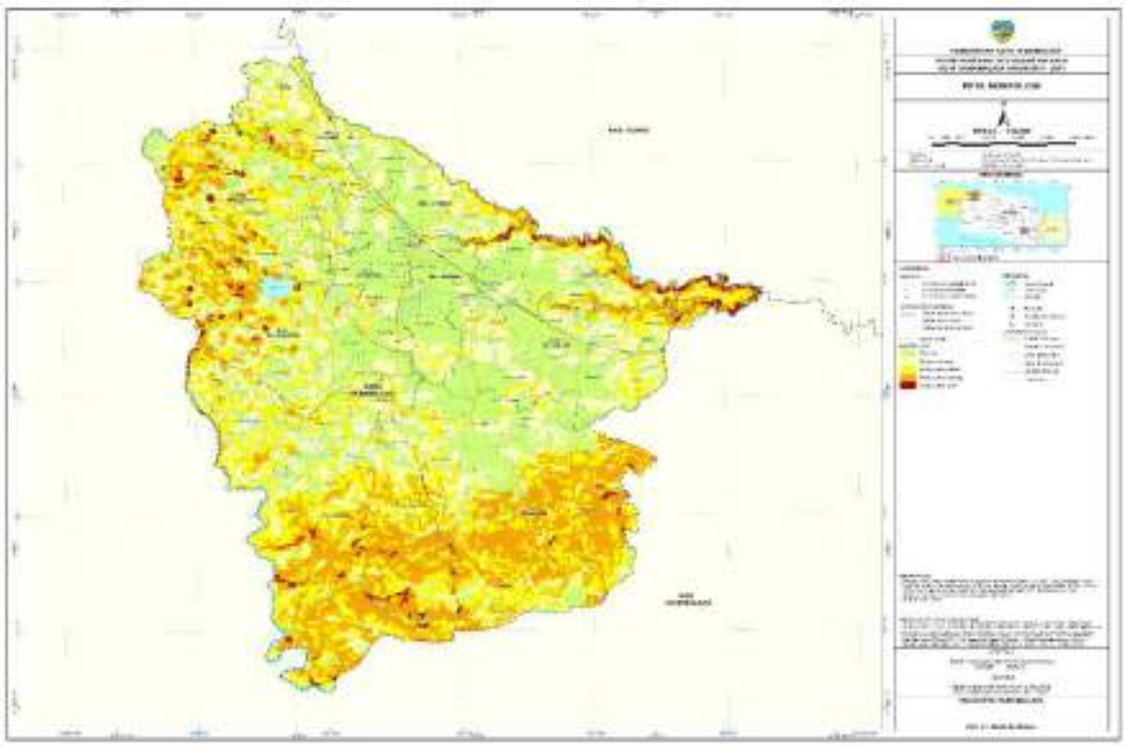

Sumber: Data BIG (diolah), 2017.

2.1.1.3. Geologi

Berdasarkan hasil kajian peta geologi lembar Tasikmalaya (T. Budhitrisna, 1982), struktur geologi Kota Tasikmalaya terbentuk dari material dasar berupa batuan induk vulkanik, yaitu susunan batuan yang terdiri dari breksi vulkanik termampat lemah dengan bongkah lava andesit yang dihasilkan pada tingkat gunung api tua. Batuan ini tersebar merata, menutupi hampir seluruh wilayah Kota Tasikmalaya. Pada tingkatan gunung api muda, susunan batuan yang dihasilkan mulai dari breksi gunung api, lahar, tufa berlapis, batuan andesit sampai basal yang tersebar secara terbatas di bagian tenggara. Sedangkan pada bagian utara, tengah dan selatan terdapat sesar normal, sesar naik, serta lipatan berupa antiklin dan siklin.

Pola struktur sesar normal akan menimbulkan pemotongan pada bagian tubuh batuan dan umumnya membentuk gawir, sedangkan sesar naik disamping dapat membentuk gawir juga perlapisan batuan menjadi berlipat-lipat dan hancur, bidang pemotongan ini merupakan bidang lemah yang biasanya membentuk gawir-gawir curam dan terjal dimana proses gerakan tanah ini dapat berkembang, hal ini sering terlihat pada bantaran sungai akibat pengikisan dan penyempitan.

Gambar 2.4.
Peta Geologi Kota Tasikmalaya

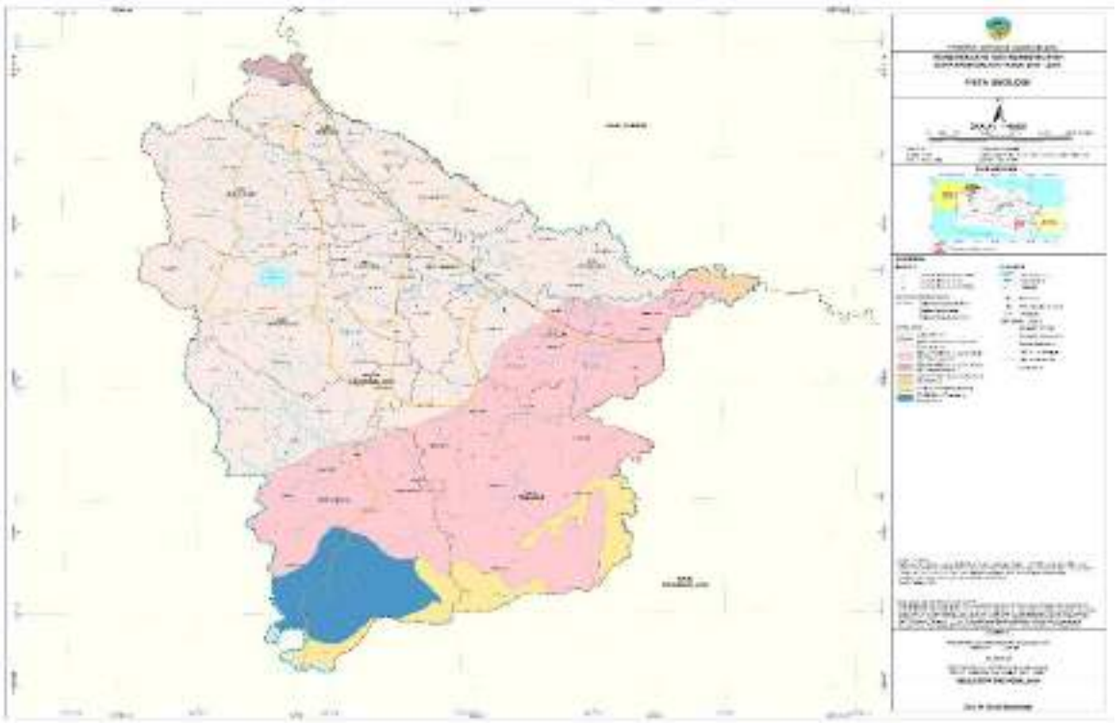

Sumber: Data BIG (diolah), 2017.

2.1.1.4. Hidrologi dan Hidrogeologi

Potensi sumber daya air dari air permukaan di Kota Tasikmalaya meliputi sungai dan air dalam cekungan (danau/situ). Di wilayah Kota Tasikmalaya mengalir 51 Daerah Irigasi yang termasuk dalam 2 (dua) Daerah Aliran Sungai (DAS) yaitu DAS Citanduy dan DAS Ciwulan. DAS Citanduy memiliki limpasan air sungai rata-rata bulanan sebesar 17 m^3/detik atau rata-rata harian sekitar 5,5 m^3/detik, sedangkan DAS Ciwulan memiliki limpasan air sungai rata-rata harian sebesar 13,7 m^3/detik. Jumlah kedua limpasan adalah 1.658.880 m^3/hari.

Sedangkan waduk/situ di Kota Tasikmalaya mempunyai potensi menyediakan air sebesar 1.646.750 m3. Situ-situ tersebut adalah Situ Gede di Kecamatan Mangkubumi (6.000 m3/detik), Situ Cibeureum, Situ Cibanjaran, Situ Malingping, Situ Bojong dan Situ Cicangri di Kecamatan Tamansari (6.000 m3/detik).

Selain potensi air permukaan, Kota Tasikmalaya memiliki potensi kandungan air tanah yang relatif dangkal, karena air tanah dapat diperoleh dari sumur dengan kedalaman antara 3,00-10,00 m. Kedalaman sumur gali untuk bisa keluar air cukup dangkal, antara 1,50-7,00 m. Sumber air tanah dalam bentuk mata air yang terdapat di Kecamatan Mangkubumi, Bungursari, Kawalu dan Tamansari.

Ditinjau dari kondisi hidrogeologi, Kota Tasikmalaya dikategorikan sebagai daerah akuifer, alirannya didasarkan melalui celahan dan ruang antara butir yang merupakan ciri dari lereng gunung api strato. Sistem akuifer di Kota Tasikmalaya yang dapat dimanfaatkan untuk pengambilan air dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu; sistem akuifer tunggal pada unit vulkanik, sistem akuifer pada

celahan-celahan batuan sedimen tersier serta sistem akuifer rekahan-rekahan yang dibentuk oleh batu gamping.

Gambar 2.5.
Peta Hidrologi Kota Tasikmalaya

Sumber: Data BIG (diolah), 2017.

2.1.1.5. Klimatologi

Pada tahun 2024 suhu udara rata-rata di Kota Tasikmalaya mencapai 25,2^{0}C. dengan suhu terendah 20,0^{0}C yang terjadi pada bulan Mei dan tertinggi 34,0^{0}C yang terjadi pada bulan Februari dengan kelembaban udara rata-rata 79,3%. Rata-rata suhu dan kelembaban udara pada tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.3.
Rata-rata Suhu dan Kelembaban Udara Tahun 2024

Bulan ***Month***	**Suhu/*Temperature* (^{0}C)**			**Kelembaban/*Humidity* (%)**		
	Minimum	**Rata-rata** ***Average***	**Maksimum** ***Maximum***	**Minimum**	**Rata-rata** ***Average***	**Maksimum** ***Maximum***
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
Januari/*January*	21,3	25,0	30,8	56,0	89,0	100,0
Februari/*February*	20,4	26,6	34,0	52,0	83,0	100,0
Maret/*March*	21,7	26,7	32,3	44,0	80,0	100,0
April/*April*	22,1	26,9	31,9	49,0	80,0	100,0
Mei/*May*	22,0	27,0	31,0	56,0	79,0	100,0
Juni/*June*	21,9	25,4	30,3	52,0	82,0	100,0
Juli/*July*	20,8	24,2	29,0	49,0	83,0	100,0
Agustus/*August*	20,0	23,8	28,8	52,0	82,0	100,0
September/*September*	20,9	24,8	30,3	41,0	79,0	100,0
Oktober/*October*	22,1	26,1	31,6	40,0	78,0	100,0
November/*November*	22,8	20,1	32,0	40,0	57,0	100,0

Bulan *Month*	Suhu/*Temperature* (°C)			Kelembaban/*Humidity* (%)		
	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*	Minimum	Rata-rata *Average*	Maksimum *Maximum*
Desember/*December*	22,4	25,5	31,3	48,0	79,0	100,0
Rata-rata/*Average*	**21,5**	**25,2**	**31,1**	**48,3**	**79,3**	**100,0**

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Tahun 2025.

Curah hujan paling tinggi selama tahun 2024 terjadi pada bulan April yaitu 639,3 mm dan paling rendah terjadi pada bulan Agustus yaitu 10,3 mm. Sedangkan hari hujan paling banyak terjadi pada bulan Desember sebanyak 23 hari. Secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.4.
Jumlah Curah Hujan dan Hari Hujan Menurut Bulan
di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Bulan *Month*	Jumlah Curah Hujan (mm/bulan) *Number of Precipitation (mm/bulan)*	Jumlah Hari Hujan (hari) *Number of Rainy Days (day)*
(1)	(14)	(15)
Januari/*January*	434,2	17,0
Februari/*February*	452,0	19,0
Maret/*March*	573,0	18,0
April/*April*	639,3	20,0
Mei/*May*	65,9	7,0
Juni/*June*	89,8	17,0
Juli/*July*	40,3	7,0
Agustus/*August*	10,3	6,0
September/*September*	74,2	15,0
Oktober/*October*	30,5	12,0
November/*November*	130,4	21,0
Desember/*December*	142,0	23,0
Rata-rata/*Average*	**223,5**	**15,2**

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS 2025

Gambar 2.6.
Peta Klimatologi Kota Tasikmalaya

Sumber: Data BIG (diolah), 2017.

2.1.1.6. Penggunaan Lahan dan Tutupan Lahan

Penggunaan lahan Kota Tasikmalaya didominasi lahan sawah sebesar 32,6826 % atau 59,79725 Km², permukiman sebesar 30,0186% atau 54,9232 Km² dan hutan sebesar 17,1509% atau 31,37991 Km². Berikut rincian penggunaan lahan kota Tasikmalaya.

Tabel 2.5.
Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

Penggunaan Lahan	Luas	
	Km²	%
Bangunan Industri	0,582869	0,3186
Bangunan Pemerintahan	0,106877	0,0584
Danau/Situ	0,580077	0,3170
Empang	3,570127	1,9513
Fasilitas Peribadatan	0,008342	0,0046
Hutan	31,37991	17,1509
Kawasan Pariwisata	0,047688	0,0261
Ladang	5,478715	2,9944
Lahan Tidak Terbangun	5,244455	2,8664
Lapangan	0,175453	0,0959
Pasar	0,141952	0,0776
Pemakaman	0,257374	0,1407
Permukiman	54,92324	30,0186
Sawah	59,79725	32,6826
Semak Belukar	18,55152	10,1394
Sungai	1,113487	0,6086
Terminal	0,076273	0,0417
Jumlah	**182,9638**	**100,00**

Sumber: Draft RTRW Kota Tasikmalaya 2024 - 2044

Gambar 2.7.
Peta Penggunaan Lahan Kota Tasikmalaya

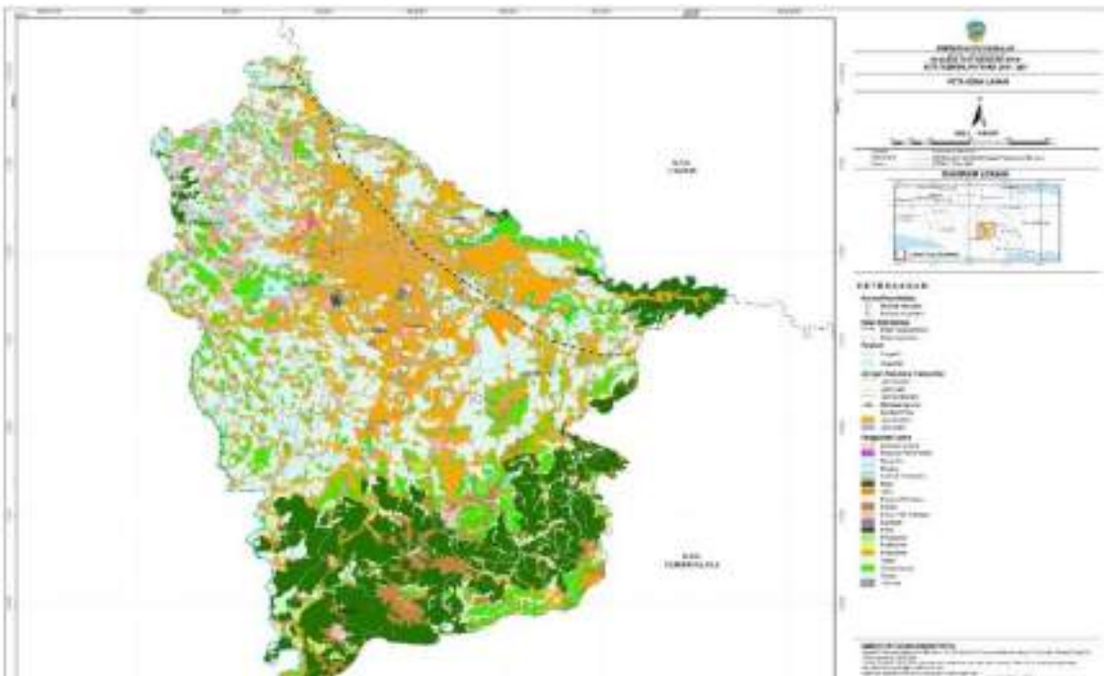

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.1.7. Potensi Pengembangan Wilayah

Berdasarkan deskripsi karakteristik wilayah, dapat diidentifikasi wilayah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan budidaya seperti perikanan, pertanian, pariwasata, industri, pertambangan dan lain-lain dengan berpedoman pada rencana tata ruang wilayah.

Rencana pola ruang wilayah kota merupakan rencana distribusi peruntukan ruang dalam wilayah kota yang meliputi rencana peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan rencana peruntukan ruang untuk fungsi budidaya.

Rencana pola ruang wilayah kota berfungsi:

1. Sebagai alokasi ruang untuk berbagai kegiatan sosial ekonomi masyarakat dan kegiatan pelestarian lingkungan dalam wilayah kota;
2. Mengatur keseimbangan dan keserasian peruntukan ruang;
3. Sebagai dasar penyusunan indikasi program utama jangka menengah lima tahunan untuk 20 (dua puluh) tahun; dan
4. Sebagai dasar pemberian izin pemanfaatan ruang pada wilayah kota.

Rencana pola ruang wilayah kota dirumuskan berdasarkan kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung wilayah kota, kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait.

Rencana pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya dirumuskan dengan kriteria:

1. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRWN beserta rencana rincinya;
2. Merujuk rencana pola ruang yang ditetapkan dalam RTRW Provinsi Jawa Barat beserta rencana rincinya;
3. Memperhatikan rencana pola ruang wilayah kabupaten/kota yang berbatasan;
4. Memperhatikan mitigasi bencana pada wilayah kota;
5. Memperhatikan kepentingan pertahanan dan keamanan dalam wilayah kota;
6. Menyediakan ruang terbuka hijau (RTH) minimal 30 % dari luas wilayah kota;
7. Menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal;
8. Menyediakan ruang terbuka non hijau (RTNH) untuk menampung kegiatan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat kota;
9. Jelas, realistis, dan dapat diimplementasikan dalam jangka waktu perencanaan pada wilayah kota bersangkutan;
10. Merujuk pada rekomendasi hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya, dimana terdapat beberapa materi terkait rencana pola ruang yang harus diperhatikan secara daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Mengacu pada klasifikasi pola ruang wilayah kota yang terdiri atas kawasan lindung dan kawasan budi daya, maka berdasarkan urutan prioritas pada masing-masing kawasan adalah sebagai berikut:

a) Kawasan lindung yang meliputi:
   1. Badan Air

2. Kawasan Perlindungan Setempat
3. Ruang Terbuka Hijau (RTH)

b) Kawasan budidaya yang meliputi:

1. Badan Jalan
2. Kawasan Hutan Produksi
3. Kawasan Perkebunan Rakyat
4. Kawasan Pertanian
5. Kawasan Peruntukan Industri
6. Kawasan Permukiman
7. Kawasan Perdagangan dan Jasa
8. Kawasan Perkantoran
9. Kawasan Transportasi
10. Kawasan Pertahanan dan Keamanan
11. Kawasan Ruang Terbuka Non-Hijau

Rencana pola ruang di Kota Tasikmalaya serta luasan masing-masing kegiatan yang akan dikembangkan hingga tahun 2044 dapat dilihat pada Tabel 2.6. dan Gambar 2.8 Rencana Pola Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2044 berdasarkan kajian daya dukung dan daya tampung pada KLHS Revisi RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.6.
Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya

No	Peruntukan Pola Ruang	Draft RTRW 2024-2044	
		Luas (Km²)	%
Kawasan Lindung			
	Badan Air	1,908557	1,0431
	Kawasan Perlindungan Setempat	0,743803	0,4065
	Kawasan Cagar Budaya	0,030972	0,0169
	Pemakaman	1,192297	0,6517
	Taman Kota	0,095583	0,0522
	Taman RW	0,038392	0,0210
Kawasan Budidaya			
	Kawasan Fasilitas Umum dan Fasilitas Sosial	2,156137	1,1784
	Kawasan Hutan Produksi Tetap	3,719547	2,0329
	Kawasan Infrastruktur Perkotaan	0,569424	0,3112
	Kawasan Perdagangan dan Jasa	29,14258	15,9281
	Kawasan Perikanan Budi Daya	0,035412	0,0194
	Kawasan Perkantoran	0,331077	0,1810
	Kawasan Perkebunan	18,61987	10,1768
	Kawasan Pertahanan dan Keamanan	2,791515	1,5257
	Kawasan Perumahan	95,95517	52,4449
	Kawasan Peruntukan Industri	9,655579	5,2773
	Kawasan Peruntukan Pertambangan Batuan	0,34118	0,1865

No	Peruntukan Pola Ruang	Draft RTRW 2024-2044	
		Luas (Km²)	%
	Kawasan Peternakan	0,467299	0,2554
	Kawasan Ruang Terbuka Non Hijau	0,023261	0,0127
	Kawasan Tanaman Pangan	15,03516	8,2176
	Kawasan Transportasi	0,111005	0,0607
TOTAL		**182,9638**	**100,00%**

Sumber: Draft RTRW Kota Tasikmalaya 2024 - 2044

Gambar 2.8.
Peta Rencana Pola Ruang Kota Tasikmalaya

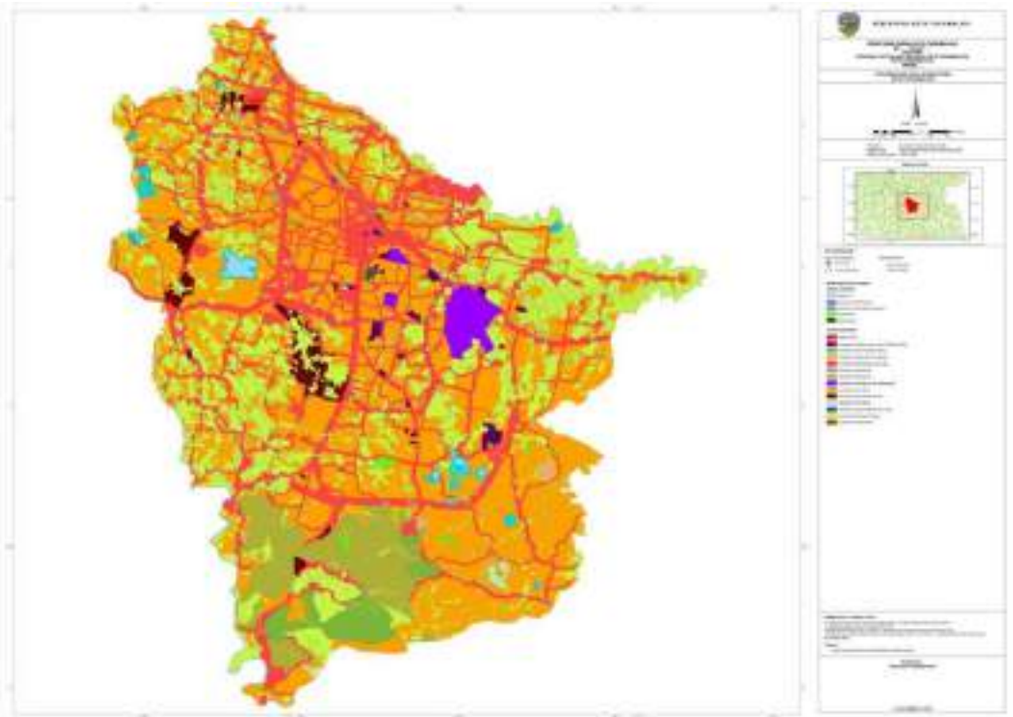

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022

2.1.1.8. Wilayah Rawan Bencana

Potensi rawan bencana di Kota Tasikmalaya, diantaranya adalah bencana gempa bumi dan ikutannya, bencana alam geologi aliran lahar dan rawan gerakan tanah skala menengah.

Intensitas suatu guncangan gempa bumi pada suatu peristiwa gempa bumi pada suatu daerah atau wilayah tertentu tidak hanya tergantung pada kekuatan gempa bumi yang terjadi dan jarak daerah atau wilayah terhadap pusat gempa bumi, tetapi juga sangat dipengaruhi oleh kondisi geologi setempat. Lapisan-lapisan sedimen lunak permukaan dapat memperkuat atau mengamplifikasi gelombang gempa bumi dan menjadi lebih kuat dibandingkan dengan daerah sekitarnya yang disusun oleh batuan keras.

Di wilayah Kota Tasikmalaya untuk potensi bencana gempa bumi berdasarkan kajian Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada tahun 2019 terdapat 3 zona potensi bencana gempa bumi dan ikutannya di Kota Tasikmalaya, yaitu sebagai berikut:

1. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan I,** meliputi sebagian kecil wilayah Kecamatan Cibeureum, Tamansari, Kawalu dan Mangkubumi;
2. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan II**, meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 65% wilayah Kecamatan Cipedes, 60% wilayah Kecamatan Tawang, 75% wilayah Kecamatan Cihideung, 45 % wilayah Kecamatan Cibeureum dan 50% wilayah Kecamatan Kawalu;
3. **Zona Potensi Bencana Gempa bumi dan Ikutan III,** meliputi 50% wilayah Kecamatan Indihiang, 35% wilayah Kecamatan Cipedes, 40% wilayah Kecamatan Tawang, 25% wilayah Kecamatan Cihideung, 40% wilayah Kecamatan Cibeureum dan 25% wilayah Kecamatan Kawalu.

Potensi bencana gerakan tanah di Kota Tasikmalaya akan terjadi di sepanjang aliran sungai yang memiliki tebing sungai yang cukup terjal >45°. Sungai-Sungai yang terdapat di Kota Tasikmalaya dan sekitarnya, memiliki ciri lembah berbentuk V, menunjukan bahwa sungai-sungai tersebut memiliki karakter erosi makan ke hulu dan ke dasar lembah. Potensi gerakan tanah yang dapat terjadi diantaranya runtuhan tanah penutup, jatuhan bongkah tanah dan bongkah batuan beku. Potensi gerakan tanah di kota ini dapat juga terjadi di bukit-bukit/gunung-gunung yang telah ditambang atau digali, sehingga menyisakan bukit-bukit berlereng terjal. Mengingat batuan penyusun bukit-bukit ini yang terdiri dari campuran breksi, lava, dan tufa yang bersifat lepas antara satu dengan lainnya dan tidak terkompaksi secara baik, sangat besar potensi terjadinya gerakan tanah jenis jatuhan atau runtuhan bongkah breksi dan lava.

Potensi bencana gunungapi sebagai potensi bencana ikutan yang mungkin dapat terjadi pada peristiwa gempa bumi kuat berdasarkan peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Galunggung, Jawa Barat berskala 1 : 50.000 (Direktorat Vulkanologi/PVMBG, 1983). Potensi bencana gunungapi tersebut diantaranya berupa potensi lontaran batu pijar dan hujan abu lebat pada radius 1,5 km dari pusat erupsi. Potensi terlanda lontaran batu pijar terdapat pada radius 4 km dari pusat erupsi dan potensi terlanda hujan abu vulkanik dan terkena lontaran batu pijar pada radius 8 km dari pusat erupsi. Selain itu gunungapi ini juga mempunyai daerah yang selalu berpotensi terancam aliran awan panas, lava dan gas beracun (arsir kotak-kotak), zona potensi terlanda aliran awan panas (arsir tegak), lava dan lahar hujan serta daerah potensi terlanda aliran lahar hujan (arsir mendatar).

Gambar 2.9.
Peta Rawan Bencana Kota Tasikmalaya

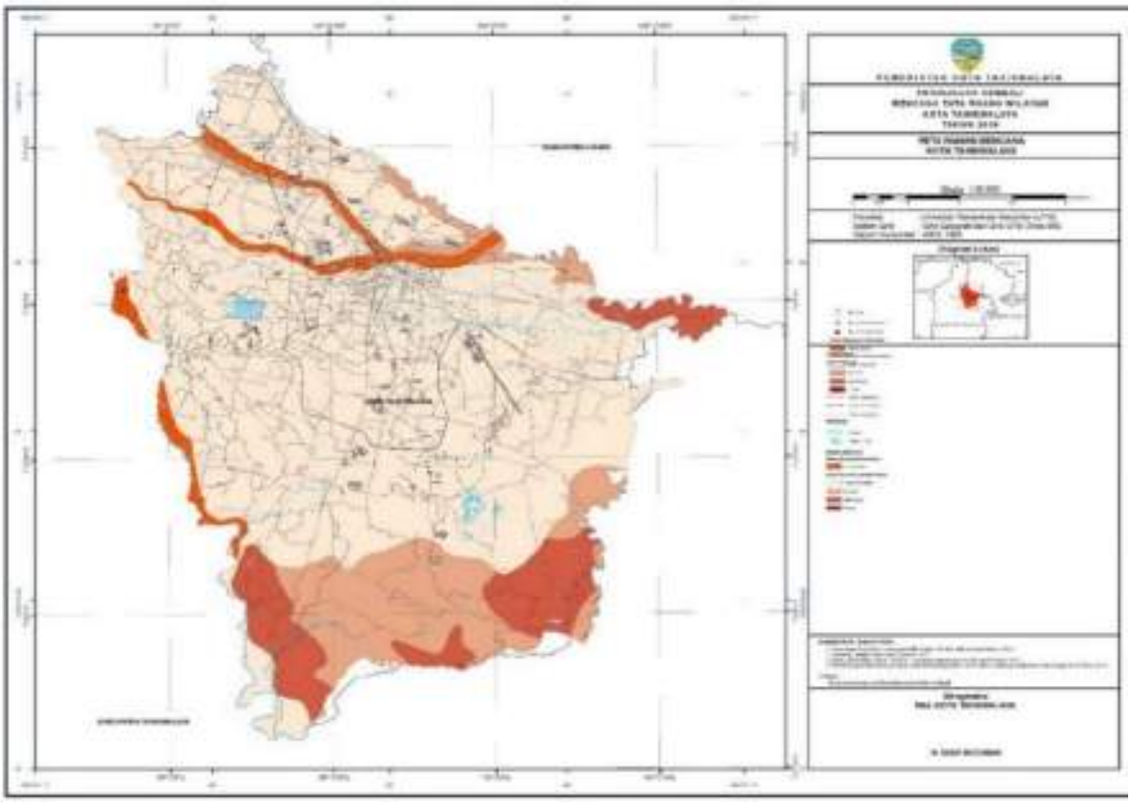

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2022.

2.1.1.9. Ketahanan dan Kerentanan Pangan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan atau *Food Security and Vulnerability Atlas* (FSVA) merupakan instrumen untuk mengidentifikasi tingkat kerentanan terhadap terjadinya rawan pangan di wilayah secara komprehensif. FSVA disusun dalam upaya menyediakan informasi ketahanan pangan yang akurat, komprehensif, dan tertata dengan baik untuk mendukung upaya pencegahan dan penanganan kerawanan pangan dan gizi, sehingga dapat memberikan arah dan rekomendasi kepada pembuat keputusan dalam penyusunan program.

Klasifikasi kelompok ketahanan pangan dan gizi berdasarkan pada tingkat keparahan dan penyebab dari situasi ketahanan pangan dan gizi yaitu:

a) Prioritas 1 merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat kerentanan pangan wilayah yang paling tinggi (sangat rentan).
b) Prioritas 2 menggambarkan tingkat kerentanan pangan sedang.
c) Prioritas 3 menggambarkan tingkat kerentanan pangan rendah.
d) Prioritas 4 menggambarkan tingkat ketahanan pangan rendah.
e) Prioritas 5 menggambarkan tingkat ketahanan pangan sedang.
f) Prioritas 6 menggambarkan tingkat ketahanan pangan tinggi (sangat tahan).

Kelurahan yang berada pada prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam kondisi rentan rawan pangan, sebaliknya wilayah pada prioritas 6 tidak berarti semua penduduknya tahan pangan

Gambar 2.10.
Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan Komposit Kota Tasikmalaya
Tahun 2024

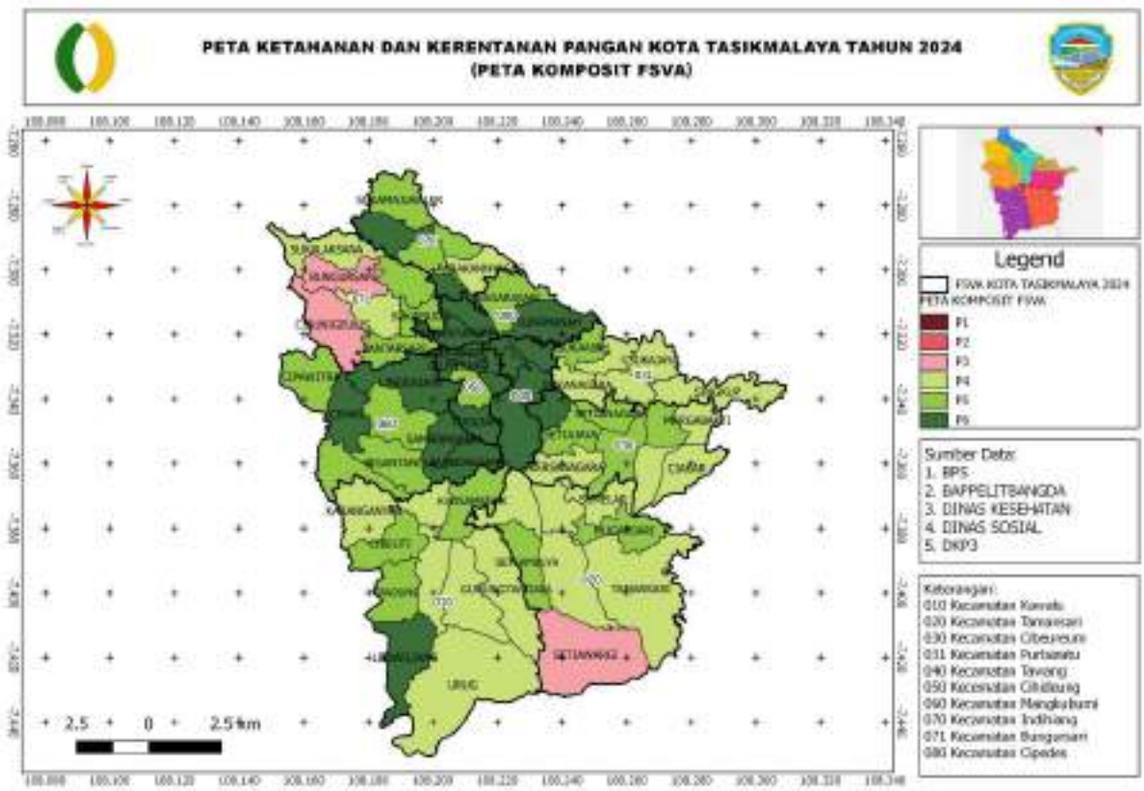

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

Hasil analisis FSVA 2024 menunjukkan bahwa dari 69 kelurahan di Kota Tasikmalaya terdapat 0 (tidak ada) kelurahan masuk dalam prioritas 1 (0 %), 0 kelurahan prioritas 2 (0%), 3 kelurahan prioritas 3 (4.35%), 23 kelurahan prioritas 4 (33,33%), 22 kelurahan prioritas 5 (31,88%) dan 21 kelurahan prioritas 6 (30,43%). Adapun sebaran kelurahan berdasarkan Skala Prioritas sebagai berikut:

a. Prioritas 1: -
b. Prioritas 2: -
c. Prioritas 3:
   - Kecamatan Tamansari: Kelurahan Setiawargi
   - Kecamatan Bungursari: Kelurahan Bungursari dan Kelurahan Cibunigeulis
d. Prioritas 4:
   - Kecamatan Kawalu: Kelurahan Urug, Kelurahan Gunungtandala, Kelurahan Gununggede, Kelurahan Talagasari, Kelurahan Karanganyar dan Kelurahan Cilamajang.
   - Kecamatan Tamansari: Kelurahan Tamansari, Kelurahan Tamanjaya, Kelurahan Mulyasari, Kelurahan Sukahurip dan Kelurahan Sumelap.
   - Kecamatan Cibeureum: Kelurahan Ciherang, Kelurahan Ciakar, Kelurahan Margabakti dan Kelurahan Kersanagara.
   - Kecamatan Purbaratu: Kelurahan Sukanagara, Kelurahan Sukamenak, Kelurahan Purbaratu, Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Singkup.
   - Kecamatan Indihiang: Kelurahan Parakannyasag.
   - Kecamatan Bungursari: Kelurahan Sukajaya dan Kelurahan Sukalaksana.
e. Prioritas 5:
   - Kecamatan Kawalu: Kelurahan Tanjung, Kelurahan Cibeuti dan Kelurahan Karsamenak.

- Kecamatan Tamansari: Kelurahan Setiamulya dan Kelurahan Mugarsari.
- Kecamatan Cibeureum: Kelurahan Awipari, Kelurahan Kotabaru, Kelurahan Setiajaya dan Kelurahan Setianagara.
- Kecamatan Purbaratu: Kelurahan Sukaasih.
- Kecamatan Cihideung: Kelurahan Tuguraja.
- Kecamatan Mangkubumi: Kelurahan Karkil, Kelurahan Cigantang, Kelurahan Mangkubumi dan Kelurahan Cipawitra.
- Kecamatan Indihiang: Kelurahan Sirnagalih, Kelurahan Indihiang dan Kelurahan Sukamajukaler.
- Kecamatan Bungursari: Kelurahan Sukamulya, Kelurahan Sukarindik dan Kelurahan Bantarsari.
- Kecamatan Cipedes: Kelurahan Nagarasari.

f. Prioritas 6:
- Kecamatan Kawalu: Kelurahan Leuwiliang.
- Kecamatan Cibeureum: Kelurahan Setiaratu.
- Kecamatan Tawang: Kelurahan Kahuripan, Kelurahan Cikalang, Kelurahan Empangsari, Kelurahan Tawangsari dan Kelurahan Lengkongsari.
- Kecamatan Cihideung: Kelurahan Tugujaya, Kelurahan Nagarawangi, Kelurahan Yudanagara, Kelurahan Cilembang dan Kelurahan Argasari.
- Kecamatan Mangkubumi: Kelurahan Sambongjaya, Kelurahan Sambongpari, Kelurahan Linggajaya dan Kelurahan Cipari.
- Kecamatan Indihiang: Kelurahan Panyingkiran dan Kelurahan Sukamajukidul.
- Kecamatan Cipedes: Kelurahan Panglayungan, Kelurahan Cipedes dan Kelurahan Sukamanah.

Kelurahan rentan terhadap kerawanan pangan Prioritas 1-3 secara umum disebabkan oleh: (1) Masih banyaknya keluarga dengan kondisi tidak sejahtera, (2) Masih banyaknya rumah tangga tidak memiliki air bersih, (3) kurangnya sarana dan prasarana penyedia pangan (4) kurangnya tenaga kesehatan di wilayah tersebut.

2.1.1.10. Kondisi Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 sebanyak 770.839 jiwa dengan pertumbuhan penduduk sebesar 0,38%. Jumlah dan pertumbuhan penduduk di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 – 2024 dapat dilihat pada gambar dan tabel berikut.

Gambar 2.11.
Jumlah Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024

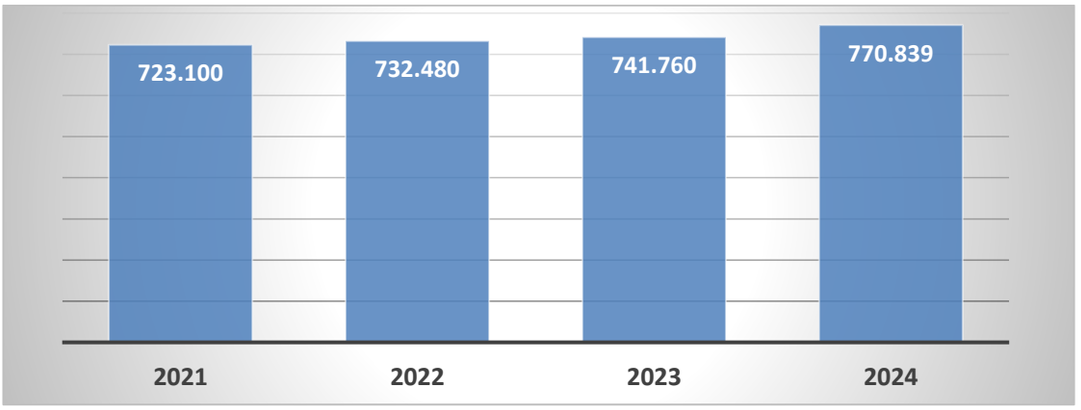

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS 2025

Perkembangan jumlah penduduk pada kurun waktu tahun 2021 - 2024 mengalami peningkatan dengan laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya seperti ditunjukkan dalam gambar berikut ini:

Tabel 2.7.
Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Pertumbuhan (%)	1,32	1,30	1,27	0,38

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Tahun 2025.

Berdasarkan data dari BPS, komposisi penduduk Kota Tasikmalaya terdiri dari laki-laki sebanyak 391.746 jiwa dan perempuan sebanyak 379.093 jiwa dengan kepadatan penduduk 4.209 jiwa/km2. Kecamatan Cihideung merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terbesar yaitu 13.839 jiwa/km2 dan Kecamatan Tamansari merupakan wilayah dengan kepadatan penduduk terkecil yaitu 2.312 jiwa/km2. Data sebaran penduduk Kota Tasikmalaya Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8.
Jumlah Penduduk, Distribusi Persentase Penduduk dan Kepadatan Penduduk
Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Kecamatan	**Penduduk (Ribu Jiwa)**	**Persentase Penduduk**	**Kepadatan Penduduk per km2**
(1)	(2)	(3)	(4)
Kawalu	104.944	13,61	2.523
Tamansari	84.994	11,03	2.312
Cibeureum	74.314	9,64	3.993
Purbaratu	47.549	6,17	3.910
Tawang	65.296	8,47	9.463
Cihideung	75.422	9,78	13.839

Kecamatan	Penduduk (Ribu Jiwa)	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km2
(1)	(2)	(3)	(4)
Mangkubumi	104.072	13,50	4.306
Indihiang	62.569	8,12	5.746
Bungursari	65.865	8,55	3.749
Cipedes	85.814	11,13	9.493
Kota Tasikmalaya	**770.839**	**100,00**	**4.209**

Sumber: Kota Tasikmalaya Dalam Angka, BPS Tahun 2025.

Berdasarkan kepadatannya, sebagian besar penduduk Kota Tasikmalaya terkonsentrasi di 3 (tiga) kecamatan yang berada di pusat kota. Hal ini terlihat dari kepadatan penduduknya yang lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan-kecamatan lainnya, yaitu Kecamatan Cihideung 13.839 jiwa/km², Kecamatan Cipedes 9.493 jiwa/km² dan Kecamatan Tawang 9.463 jiwa/km². Sedangkan 7 (tujuh) kecamatan lainnya memiliki kepadatan penduduk yang berkisar antara 2.312 jiwa/km² hingga 5.746 jiwa/km². Hal ini berarti terdapat ketimpangan sebaran penduduk yang mencolok antara 3 kecamatan kawasan pusat kota dan 7 kecamatan lainnya.

2. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Struktur Usia

Ditinjau dari jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat diketahui bahwa Kota Tasikmalaya memiliki jumlah penduduk dengan perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan (sex ratio) setiap tahunnya berkisar antara 102,65 sampai dengan 103,34 untuk kurun waktu tahun 2021-2024. Hal ini berarti dari 100 penduduk perempuan di Kota Tasikmalaya terdapat 103 penduduk laki-laki. Tabel berikut memperlihatkan jumlah penduduk di Kota Tasikmalaya menurut jenis kelamin.

Tabel 2.9.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024

Tahun	Jenis Kelamin				Laki-laki +Perempuan	Sex Rasio
	Laki-laki		Perempuan			
	Jumlah	%	Jumlah	%		
2021	367.563	50,77	356.358	49,22	723.921	103,14
2022	372.285	50,76	361.182	49,24	733.467	103,07
2023	375.737	50,65	366.023	49,35	741.760	102,65
2024	391.746	50,82	379.093	49,18	770.839	103,34

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah 2025.

Data Penduduk Kota Tasikmalaya tahun 2024 menurut jenis kelamin per kelompok umur adalah sebagai berikut:

Tabel 2.10.
Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kota Tasikmalaya
Tahun 2024

Kelompok Umur *Age Group*	*Jenis Kelamin/Sex*		Jumlah *Total*
	Laki-laki *Male*	Perempuan *Female*	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	28.915	27.158	56.073
5–9	32.918	30.668	63.586
10–14	33.449	31.349	64.798
15–19	31.829	30.133	61.962
20–24	33.754	32.389	66.143
25–29	31.958	30.180	62.138
30–34	29.433	27.807	57.240
35–39	27.958	26.184	54.142
40–44	29.230	28.116	57.346
45–49	26.690	25.397	52.087
50–54	23.728	23.285	47.013
55–59	19.498	19.985	39.483
60–64	15.329	15.931	31.260
65–69	11.282	11.954	23.236
70–74	7.894	8.353	16.247
75+	7.881	10.204	18.085
Kota Tasikmalaya	**391.746**	**379.093**	**770.839**

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa komposisi penduduk Kota Tasikmalaya yang berada pada usia produktif lebih tinggi dari usia non produktif. Hal tersebut menjadi modal dasar pembangunan yang sangat potensial. Sumber Daya Manusia yang berkualitas adalah motor penggerak utama pembangunan.

2.1.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

2.1.2.1. Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Tabel 2.11.
Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2021 - 2024

NO.	INDIKATOR	Satuan	2021	2022	2023	2024
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,31	74,84	75,47	76,03
	Indeks Pendidikan	Poin	69,12	69,18	69,27	69,60
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,53	9,54	9,63
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,47	13,49	13,5
	Indeks Kesehatan	Poin	83,88	84.31	84.74	85,09
	Usia Harapan Hidup	Tahun	74,52	74,80	75,08	75,31
	Indeks Daya Beli	Poin	70,78	71,85	73,22	74,22
	Pengeluaran per Kapita	Rp. Juta	10,213	10,578	11,063	11,431
2	PDRB Perkapita ADH Berlaku	Rp. Juta	31,59	34,10	36,95	39,45
3	PDRB Perkapita ADH Konstan	Rp. Juta	22,08	22,88	23,97	24,27
4	PDRB ADH Berlaku	Rp.Trilyun	22,85	24,97	27,41	29,61
5	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,01	5,96	5,22
6	Inflasi	%	1,17	6,65	2,84	1,94
7	Indeks gini	Poin	0,414	0,405	0,428	0,359
8	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	1,45	1,32	1,27	0,38
9	Angka Kemiskinan	%	13,13	12,72	11,53	11,10
10	Tingkat Pengangguran terbuka	%	7,66	6,62	6,55	6,49

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Data diolah, 2025.

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indeks komposit yang dibentuk dari 3 indeks yang digabung menjadi indeks tunggal yaitu Umur panjang dan hidup sehat (Indeks Harapan Hidup), Pengetahuan dalam bentuk Indeks Pendidikan serta Standar hidup layak dengan Indeks Daya Beli. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Sebagai ukuran kemajuan pembangunan manusia, IPM dapat digunakan untuk mengkaji kemajuan pembangunan manusia dalam dua aspek, yaitu: posisi wilayah relatif terhadap wilayah lainya yang berdekatan dan mengkaji kemajuan pencapaian beragam program yang telah dilakukan.

Capaian IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar berikut:

Gambar 2.12.
Target & Realisasi Indeks Pembangunan Manusia Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024 (Point)

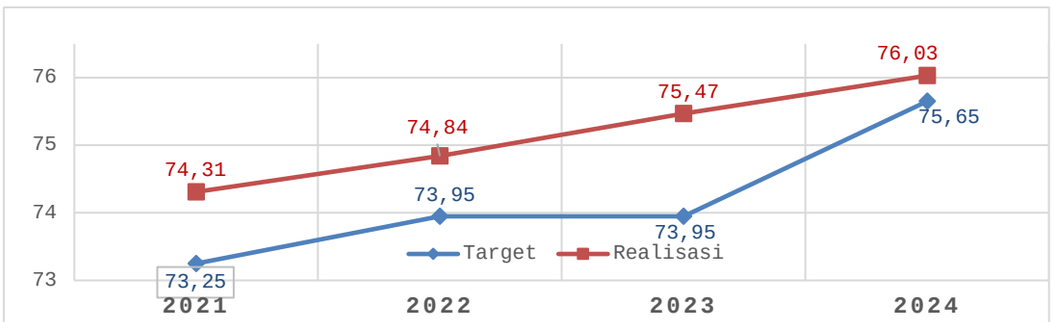

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya. 2025

Gambar 2.13.
Perkembangan IPM Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024

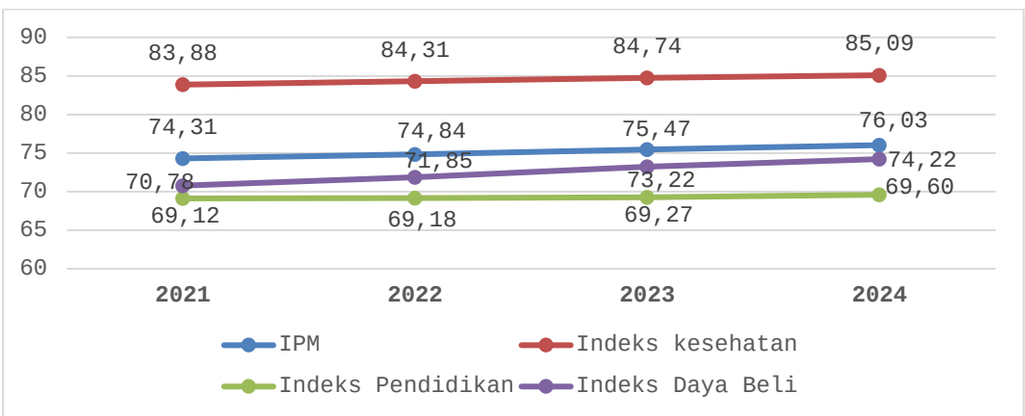

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya. 2025

Pada tahun 2024, seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, bayi yang lahir pada 2024 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 85,09 tahun, meningkat 0,23 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya. Dimensi pengetahuan yang diukur dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata – rata Lama Sekolah (RLS) mengalami peningkatan secara indeks sebesar 0,33. Peningkatan tertinggi secara Indeks berada di Indeks Daya Beli yaitu sebesar 1,00 menggambarkan dimensi standar hidup layak yang diukur oleh rata – rata pengeluaran riil perkapita tingkat pendapatan penduduk Kota Tasikmalaya meningkat.

Keterbandingan nilai IPM antar wilayah terdekat (priangan timur) dan dibandingkan dengan capaian IPM provinsi dan nasional, capaian IPM Kota Tasikmalaya tahun 2024 lebih tinggi dari capaian nasional, provinsi Jawa Barat dan daerah lainnya di priangan timur, seperti pada gambar dibawah ini:

Gambar 2.14.
Perbandingan IPM Kota Tasikmalaya, Nasional, Jawa Barat dan Daerah di Priangan Timur

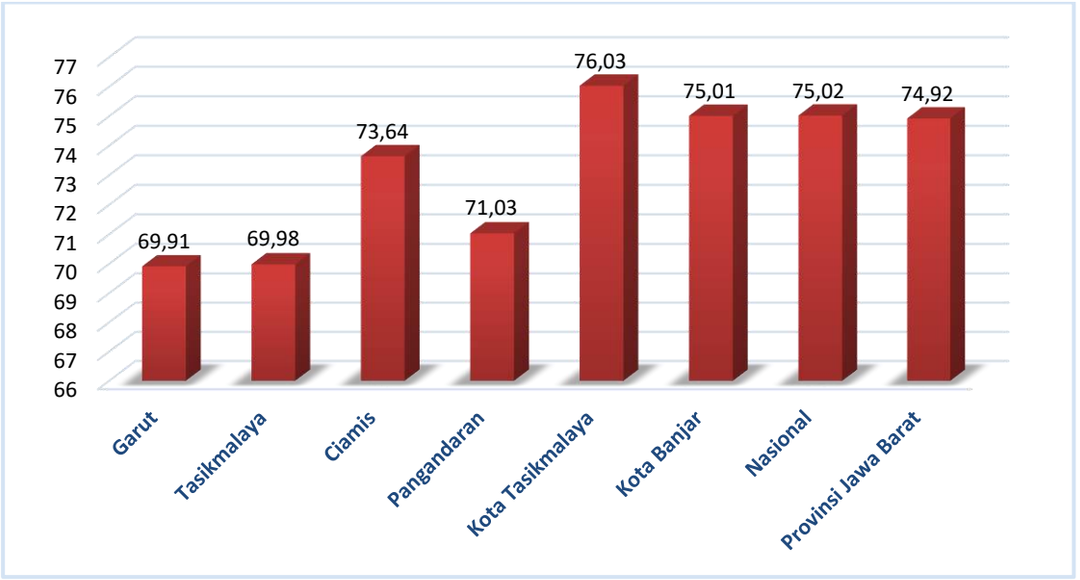

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2025

2. Kemiskinan

Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan (2.100 kilo kalori) dan bukan makanan. Konsep yang dipakai oleh pemerintah (BPS) dan juga beberapa negara lain dalam menentukan kemiskinan adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Penduduk dikatakan miskin jika penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita perbulan di bawah garis kemiskinan. Sedangkan garis kemiskinan adalah rupiah yang diperlukan agar penduduk dapat hidup layak secara minimum yang mencakup pemenuhan kebutuhan minimum akan makanan (2.100 kkal/kapita/hari) dan bukan makanan.

Tabel 2.12.
Data Kemiskinan Kota Tasikmalaya 2021 - 2024

Indikator	2021	2022	2023	2024
Tingkat Kemiskinan (%) (P0)	13,13	12,72	11,53	11,10
Penduduk Miskin (ribu orang)	89,46	87,13	79,37	76,71
Garis Kemiskinan (Rp/bulan/kapita)	480.341	498.711	537.497	565,377
Kedalaman Kemiskinan (P1)	2,41	2,34	1,62	1,35
Keparahan Kemiskinan (P2)	0,69	0,65	0,32	0,26

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2025

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa pada tahun 2024 tingkat kemiskinan Kota Tasikmalaya mengalami penurunan menjadi 11,10%, namun masih berada

pada angka yang masih tinggi, di atas tingkat kemiskinan nasional dan Provinsi Jawa Barat.

Gambar 2.15.
Target & Realisasi Angka Kemiskinan Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024
(Persen)

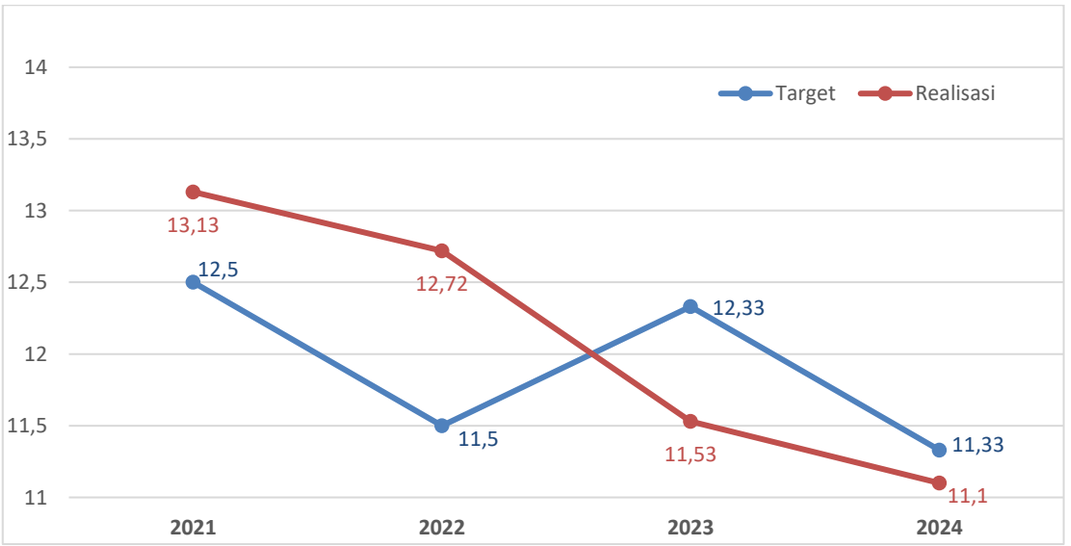

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2025

Gambar 2.16.
Kemiskinan Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional

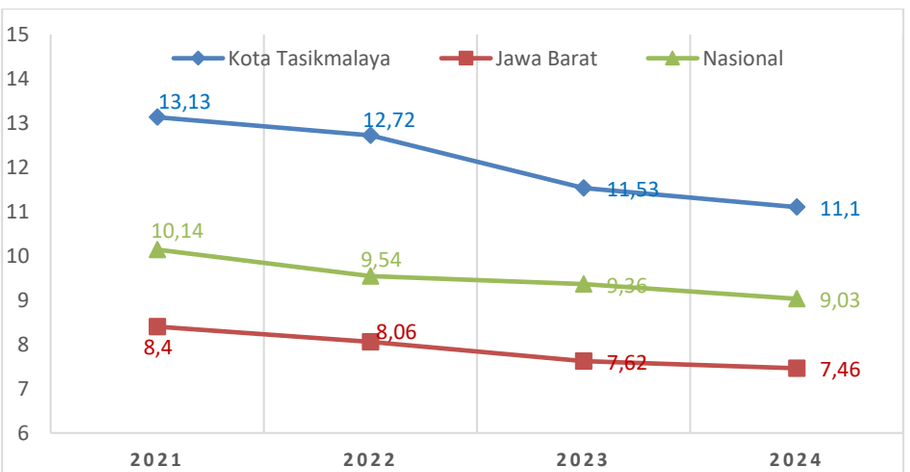

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Kemiskinan Kota Tasikmalaya bila dibandingkan dengan tingkat kemiskinan daerah lainnya di provinsi Jawa Barat selama periode yang cukup lama menjadi daerah kategori kota/kabupaten dengan jumlah penduduk miskinnya secara persentase tertinggi, namun sejak tahun 2022 kondisi tersebut berubah menjadi peringkat 3 (tiga) terbawah secara persentase kemiskinan. Pada tahun 2024 kemiskinan secara makro ini menurun 0,43 persen dari tahun sebelumnya tetapi tidak menurunkan peringkat kemiskinan jika dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya.

Keberhasilan menurunkan kemiskinan merupakan usaha terpadu seluruh tingkatan lembaga, masyarakat dan seluruh aspek yang berkepentingan serta kebijakan – kebijakan yang terselenggara baik yang tercatat maupun tidak guna memperbaiki kesejahteraan secara umum di Kota Tasikmalaya. (Tercatat Perda

Kemiskinan No 3 Tahun 2022 tentang Pengentasan Kemiskinan di Kota Tasikmalaya telah terbentuk).

Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.13.
Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Jawa barat

Nama Wilayah	Persentase Penduduk Miskin (P0) Menurut Kabupaten/Kota (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
JAWA BARAT	8,40	8,06	7,62	7,46
Bogor	8,13	7,73	7,27	7,05
Sukabumi	7,70	7,34	7,01	6,87
Cianjur	11,18	10,55	10,22	10,14
Bandung	7,15	6,80	6,4	6,19
Garut	10,65	10,42	9,77	9,68
Tasikmalaya	11,15	10,73	10,28	10,23
Ciamis	7,97	7,72	7,42	7,39
Kuningan	13,10	12,76	12,12	11,88
Cirebon	12,30	12,01	11,2	11
Majalengka	12,33	11,94	11,21	10,82
Sumedang	10,71	10,14	9,36	9,1
Indramayu	13,04	12,77	12,13	11,93
Subang	10,03	9,75	9,52	9,49
Purwakarta	8,83	8,70	8,46	8,41
Karawang	8,95	8,44	7,87	7,86
Bekasi	5,21	5,01	4,93	4,8
Bandung Barat	11,30	10,82	10,52	10,49
Pangandaran	9,65	9,32	8,98	8,75
Kota Bogor	7,24	7,10	6,67	6,53
Kota Sukabumi	8,25	8,02	7,5	7,2
Kota Bandung	4,37	4,25	3,96	3,87
Kota Cirebon	10,03	9,82	9,16	9,02
Kota Bekasi	4,74	4,43	4,1	4,01
Kota Depok	2,58	2,53	2,38	2,34
Kota Cimahi	5,35	5,11	4,66	4,39
Kota Tasikmalaya	**13,13**	**12,72**	**11,53**	**11,1**
Kota Banjar	7,11	6,73	6,14	5,8

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025.

Gambar 2.17.
Kemiskinan Jawa Barat

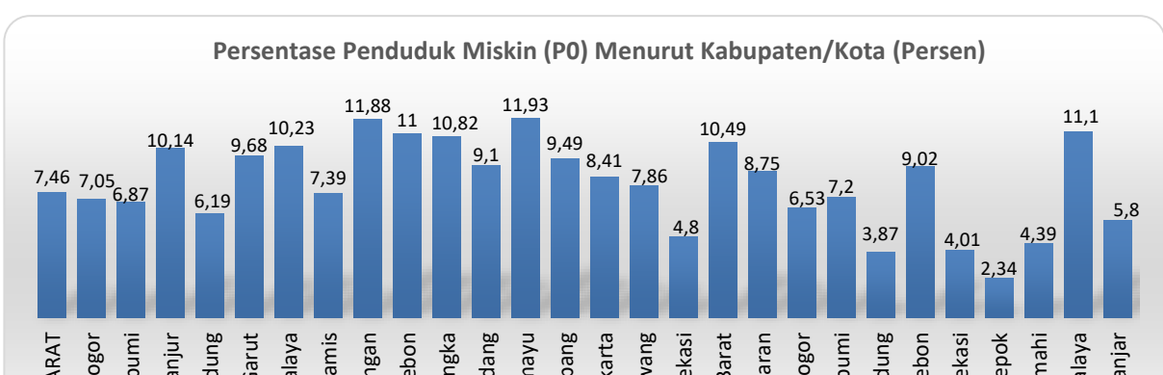

Sumber: BPS Jawa Barat, 2025.

Sejak tahun 2022, peringkat kemiskinan Kota Tasikmalaya menduduki tempat ke 25 dimana sebelumnya sejak tahun 2008 Kota Tasikmalaya menjadi wilayah dengan persentase penduduk miskin tertinggi di Jawa Barat, sejalan dengan pembangunan yang dilaksanakan melalui program penanggulangan kemiskinan, pada tahun 2024 Kota Tasikmalaya telah berhasil menurunkan angka kemiskinan menjadi 11,10 persen sehingga Kota Tasikmalaya tidak lagi menjadi wilayah termiskin di Jawa Barat.

Berkaitan dengan penanggulangan kemiskinan ekstrem, jumlah penduduk miskin ekstrem di Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 sebanyak 6.590 jiwa.

Tabel 2.14.
Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem menurut Kabupaten/Kota di Jawa Barat

Kabupaten/Kota	**Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Ribu Jiwa)**		
	2021	**2022**	**2023***
Bogor	107,25	146,12	47,22
Sukabumi	24,61	19,90	24,05
Cianjur	57,04	36,16	11,89
Bandung	66,96	56,43	46,81
Garut	30,32	82,17	9,55
Tasikmalaya	28,24	15,74	27,12
Ciamis	5,51	17,90	1,32
Kuningan	24,03	31,89	15,70
Cirebon	64,44	81,89	36,64
Majalengka	43,84	24,13	10,64
Sumedang	31,71	36,82	6,37
Indramayu	75,82	53,05	38,55
Subang	57,51	35,44	34,61
Purwakarta	18,58	16,93	10,19
Karawang	28,22	64,02	17,89
Bekasi	56,00	25,82	19,82
Bandung Barat	28,25	33,59	15,04
Pangandaran	5,61	5,93	2,65
Kota Bogor	13,59	14,45	4,93
Kota Sukabumi	9,98	4,49	2,54
Kota Bandung	24,79	25,37	9,14
Kota Cirebon	13,06	5,32	1,09
Kota Bekasi	33,25	61,75	0,00
Kota Depok	9,44	17,57	0,00
Kota Cimahi	8,34	2,63	2,98
Kota Tasikmalaya	**27,17**	**23,88**	**6,59**
Kota Banjar	2,08	2,49	0,08
Provinsi Jawa Barat	895,64	941,86	403,38

Sumber: BPS Jawa Barat, 2023.
**Estimasi dihitung oleh Satgas data P3KE*

3. PDRB Menurut Lapangan Usaha

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mengalami peningkatan dari 22.844,02 Milyar pada tahun 2021 dan menjadi 29.612,77 Milyar pada tahun 2024. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.15.

Tabel 2.15.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021-2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha / *Industry*		Tahun			
		2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.100,18	1.202,36	1.319,55	1.490,28
B	Pertambangan dan Penggalian	1,91	1,99	2,00	1,97
C	Industri Pengolahan	3.159,59	3.450,78	3.669,23	3.971,11
D	Pengadaan Listrik dan Gas	2,99	3,15	3,30	3,51
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	96,31	97,44	100,96	116,53
F	Konstruksi	3.700,54	3.975,54	4.397,55	4.498,26
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	4.954,11	5.416,72	5.929,52	6.290,01
H	Transportasi dan Pergudangan	2.070,97	2.320,07	2.763,40	3.213,26
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.209,65	1.440,33	1.650,46	1.854,29
J	Informasi dan Komunikasi	978,57	1.038,06	1.121,25	1.217,91
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2.396,31	2.596,50	2.708,69	3.025,16
L	Real Estat	397,89	438,12	472,71	487,02
M,N	Jasa Perusahaan	240,39	288,50	321,67	357,48
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	921,48	918,53	954,97	960,66
P	Jasa Pendidikan	511,52	534,79	592,35	629,26
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	547,86	605,46	669,84	690,61
R,S,T,U	Jasa Lainnya	553,75	646,33	733,97	805,46
Produk Domestik Bruto		**22.844,02**	**24.974,68**	**27.411,43**	**29.612,77**

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Jika dilihat pada tiap lapangan usaha, penyumbang terbesar ada pada lapangan usaha perdagangan besar dan eceran; reparasi mobil dan sepeda motor, diikuti lapangan usaha konstruksi lalu industri pengolahan. Masing-masing memberikan sumbangan sebesar 21,24 persen, 15,19 persen dan 13,41 persen. Selain PDRB Atas Dasar Harga Berlaku juga dilakukan penghitungan PDRB berdasarkan Harga Konstan sebagaimana pada tabel berikut:

Tabel 2.16.
Produk Domestik Regional Bruto Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Konstan, Tahun 2021 - 2024 (Milyar Rupiah)

Lapangan Usaha / *Industry*		Tahun			
		2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	660,75	690,75	718,53	769,27
B	Pertambangan dan Penggalian	1,36	1,38	1,33	1,33
C	Industri Pengolahan	2.194,62	2.312,87	2.390,38	2.520,90
D	Pengadaan Listrik dan Gas	1,68	1,74	1,80	1,91
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	63,01	63,00	64,65	70,42
F	Konstruksi	2.475,68	2.577,18	2.762,86	2.804,99
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	3.681,31	3.841,48	4.042,74	4.170,43
H	Transportasi dan Pergudangan	1.439,41	1.542,85	1.715,00	1.972,89
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	771,50	879,72	961,19	1.034,95
J	Informasi dan Komunikasi	932,45	989,33	1.067,95	1.160,38
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.552,58	1.539,33	1.574,86	1.678,90
L	Real Estat	319,77	341,52	361,79	369,79
M,N	Jasa Perusahaan	168,53	193,83	207,36	216,55
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	591,46	591,23	605,12	608,58
P	Jasa Pendidikan	314,93	321,55	343,77	346,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	386,04	416,11	442,76	444,65
R,S,T,U	Jasa Lainnya	425,66	477,17	519,85	537,82
Produk Domestik Bruto		**15.980,75**	**16.781,04**	**17.781,93**	**18.709,87**

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

4. Struktur Perekonomian

Dari besaran PDRB, dapat digambarkan kontribusi nilai tambah setiap kategori dalam pembentukan PDRB atau distribusi persentase kategorial terhadap pembentukan PDRB sehingga terlihat struktur perekonomiannya. Semakin besar persentase suatu kategori semakin besar pengaruh kategori tersebut dalam perkembangan ekonomi suatu daerah, sehingga akan tampak kategori-kategori yang menjadi pemicu pertumbuhan di wilayah bersangkutan. Lengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.17.

Tabel 2.17.
Peranan Kategorial dalam PDRB Kota Tasikmalaya
Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2021 - 2024 (Persen)

Lapangan Usaha / *Industry*		Tahun			
		2021	2022	2023*	2024**
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	4,82	4,81	4,81	5,03
B	Pertambangan dan Penggalian	0,01	0,01	0,01	0,01
C	Industri Pengolahan	13,83	13,82	13,39	13,41
D	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01	0,01	0,01	0,01
E	Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	0,42	0,39	0,37	0,39
F	Konstruksi	16,20	15,92	16,04	15,19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	21,69	21,69	21,63	21,24
H	Transportasi dan Pergudangan	9,07	9,29	10,08	10,85
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5,29	5,77	6,02	6,26
J	Informasi dan Komunikasi	4,28	4,16	4,09	4,11
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	10,49	10,40	9,88	10,22
L	Real Estat	1,74	1,75	1,72	1,64
M,N	Jasa Perusahaan	1,05	1,16	1,17	1,21
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	4,03	3,68	3,48	3,24
P	Jasa Pendidikan	2,24	2,14	2,16	2,12
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,40	2,42	2,44	2,33
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2,42	2,59	2,68	2,72
Produk Domestik Bruto		**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Selama empat tahun terakhir (2021 - 2024) struktur perekonomian Kota Tasikmalaya didominasi oleh kategori lapangan usaha: Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Konstruksi; dan Industri Pengolahan. Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor dari tahun 2021 s.d. 2024 menduduki peringkat pertama kontribusinya terhadap PDRB Kota Tasikmalaya. Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya tahun 2021 s.d 2024 dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2.18.
Empat Besar Peranan Kategori PDRB Kota Tasikmalaya, 2021-2024 (Persen)

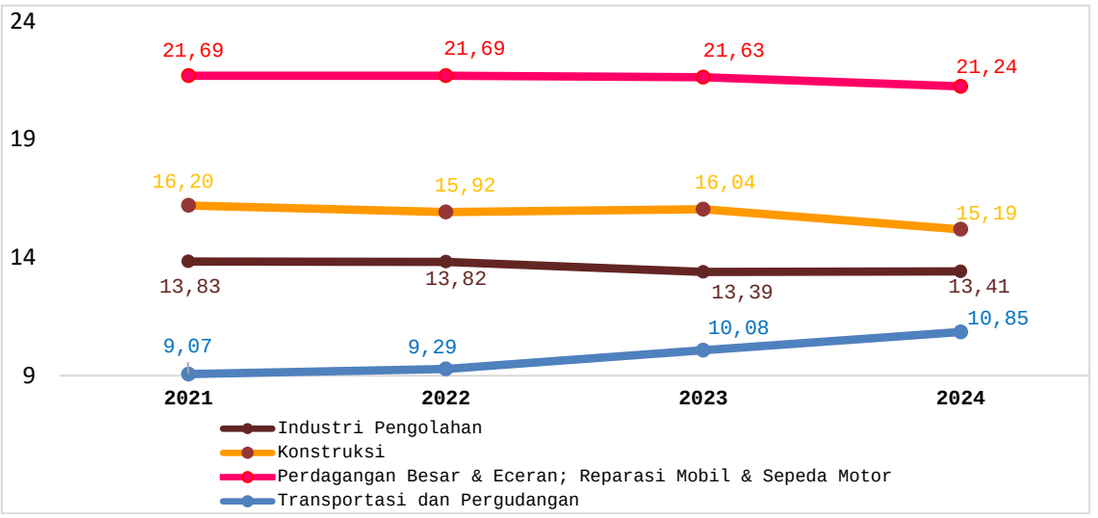

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Empat besar kontribusi kategori lapangan usaha terhadap PDRB Kota Tasikmalaya pada tahun 2024, antara lain Kategori Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 21,24 persen, kemudian disusul oleh Kategori Konstruksi sebesar 15,19 persen, dan Kategori Industri Pengolahan sebesar 13,41 persen serta Transportasi dan Pergudangan sebesar 10,85 persen.

5. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang dapat menggambarkan kinerja perekonomian di suatu wilayah. Umumnya, laju pertumbuhan ekonomi (LPE) diukur dengan laju pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan. LPE Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 mengalami penurunan dari 5,96 persen pada tahun 2023, menjadi 5,22 persen. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.19.
Target & Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Kota Tasikmalaya
2021 - 2024 (Persen)

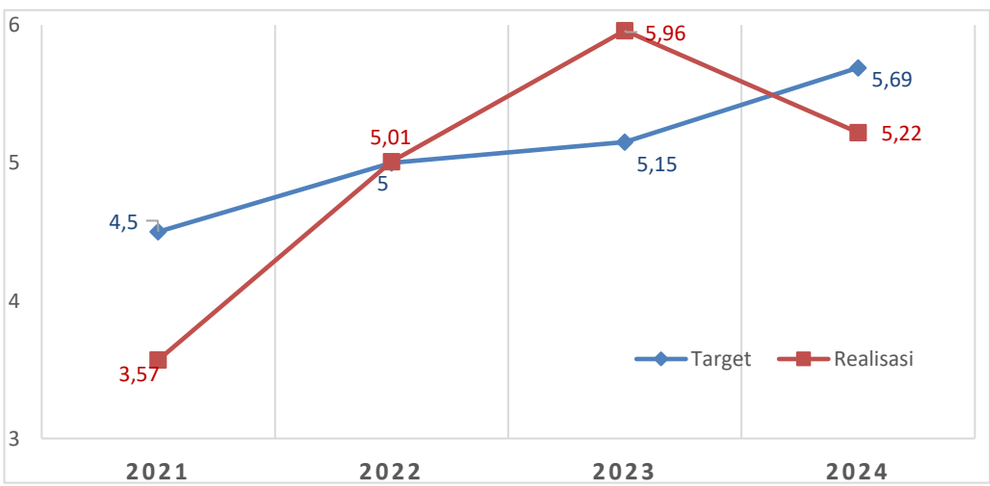

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Bila dibandingkan dengan LPE Jawa Barat dan Nasional, LPE Kota Tasikmalaya tahun 2024 lebih tinggi. Berikut gambaran perbandingan LPE Kota Tasikmalaya dengan LPE Jawa Barat dan LPE Nasional.

Gambar 2.20.
LPE Kota Tasikmalaya, Jawa Barat dan Nasional Tahun 2021 – 2024 (persen)

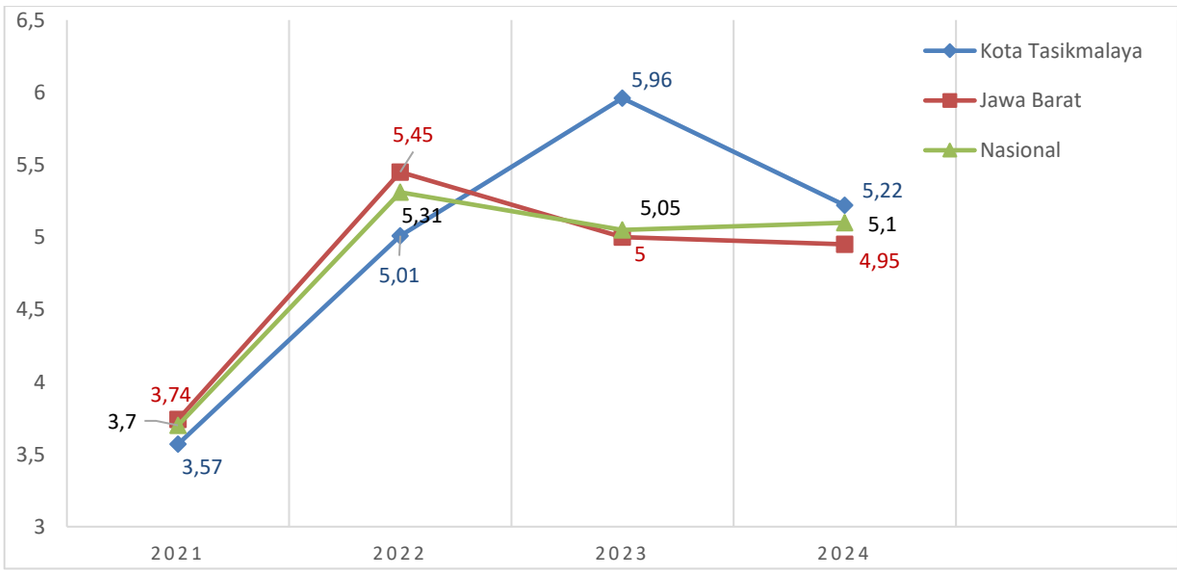

Sumber: BPS, 2025

Apabila dibandingkan dengan daerah tetangga, LPE Kota Tasikmalaya berada di atas LPE Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis seperti dapat dlihat pada gambar berikut.

Gambar 2.21.
LPE Kota Tasikmalaya, Kabupaten Tasikmalaya dan Kabupaten Ciamis
Tahun 2021 - 2024

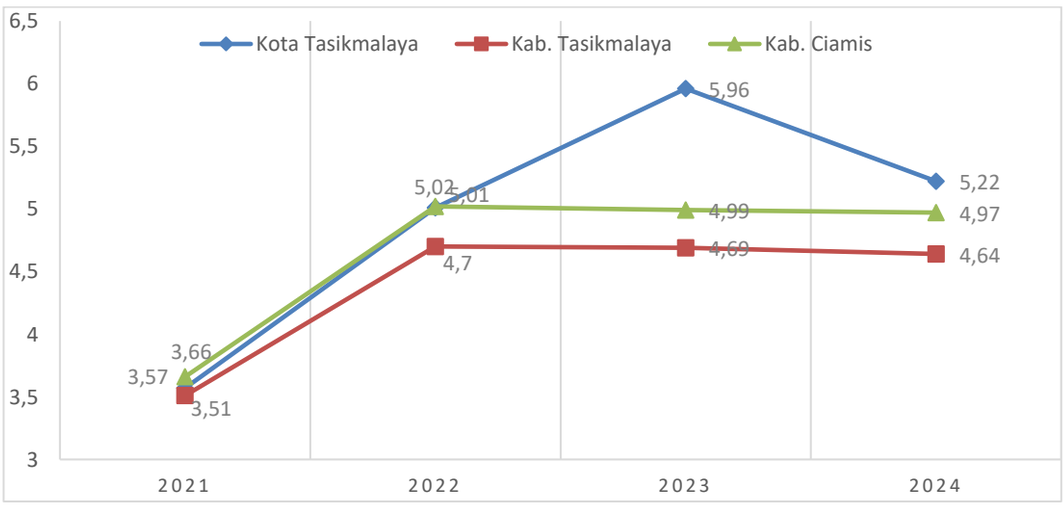

Sumber: BPS, 2025

6. PDRB Menurut Pengeluaran

Kontribusi PDRB atas dasar harga berlaku menurut pengeluaran dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.18.
PDRB menurut pengeluaran Tahun 2021 - 2024

Komponen PDRB Pengeluaran	Distribusi PDRB Seri 2010 Menurut Pengeluaran (Persen)			
	2021	2022	2023	2024
Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	69.67	69.84	70,99	71,93
Pengeluaran Konsumsi LNPRT	2.29	2.21	2,43	2,38
Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	10.87	10.26	10,15	9,38
Pembentukan Modal Tetap Bruto	33.15	32.32	32,72	30,65
Perubahan Inventori	-0.65	-0.22	-0,20	0,16
Net Ekspor Impor Antar Daerah	-15.32	-14.41	-16,08	-14,51
Produk Domestik Regional Bruto	100.00	100.00	100,00	100,00

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, Tahun 2025

Dari sisi pengeluaran, konsumsi rumah tangga pada tahun 2024 memberikan kontribusi tertinggi terhadap PDRB pengeluaran yaitu 71,93 persen atau naik sebesar 0,94 persen dari tahun 2023. Adapun pembentukan modal tetap bruto mengalami penurunan dari 32,72 persen pada tahun 2023 menjadi 30,65 persen pada tahun 2024.

7. PDRB Perkapita

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. PDRB per kapita merepresentasikan rata-rata "pendapatan" yang diperoleh satu individu dari keseluruhan aktivitas ekonomi di wilayah tertentu. Oleh karenanya, PDRB per kapita umumnya digunakan sebagai pendekatan untuk mengindikasikan standar hidup di wilayah tertentu. Data PDRB per kapita Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku dibandingkan dengan PDRB Jawa Barat disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.22.
PDRB per Kapita Atas Dasar Harga Berlaku Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

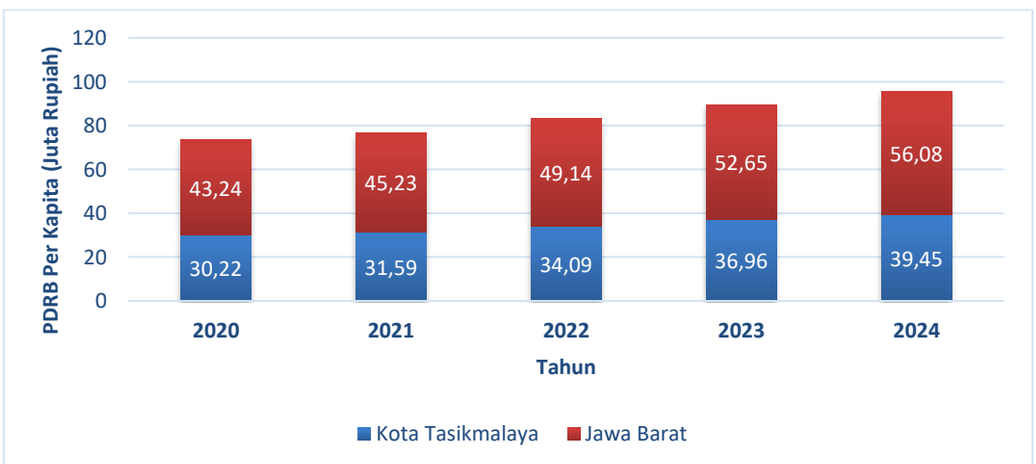

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2020-2025.

Berdasarkan grafik di atas, diketahui bahwa sepanjang kurun waktu tahun 2020 hingga 2024, PDRB per kapita Kota Tasikmalaya masih berada di bawah PDRB per kapita Provinsi Jawa Barat. Secara umum, PDRB per kapita terus mengalami peningkatan, meskipun terjadi penurunan pada tahun 2020 akibat pandemic COVID-19. PDRB per kapita pasca pandemi sudah

menunjukkan pemulihan. Peningkatan PDRB Perkapita ini merupakan indikasi bahwa pemulihan ekonomi dan kinerja perekonomian di Kota Tasikmalaya semakin membaik.

8. Inflasi

Inflasi Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 tercatat relatife rendah dan terkendali yaitu 1,17 persen, namun pada tahun 2022 inflasi Kota Tasikmalaya tercatat 6,65 persen, hal ini dampak dari kenaikan harga BBM, kenaikan harga Bahan Bakar Rumah Tangga (Gas) dan kenaikan harga telor ayam ras yang terjadi pada tahun 2022. Inflasi Kota Tasikmalaya semakin terkendali, tercatat 2,84 persen pada tahun 2023 dan 1,94 persen pada tahun 2024. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Gambar 2.23.

Gambar 2.23.
Target & Realisasi Inflasi Kota Tasikmalaya, 2021-2024 (Persen)

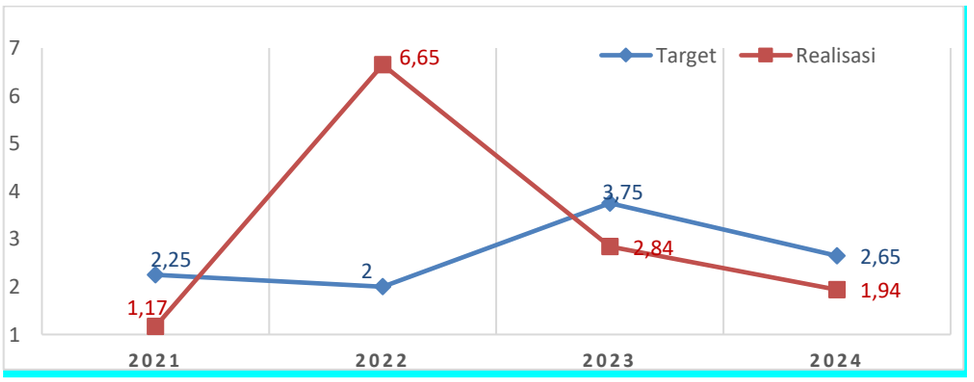

Sumber: RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024.
BPS Kota Tasikmalaya, 2025

9. Tingkat Pengangguran Terbuka

Gambar 2.24.
Target & Realisasi Tingkat Pengangguran Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024 (Persen)

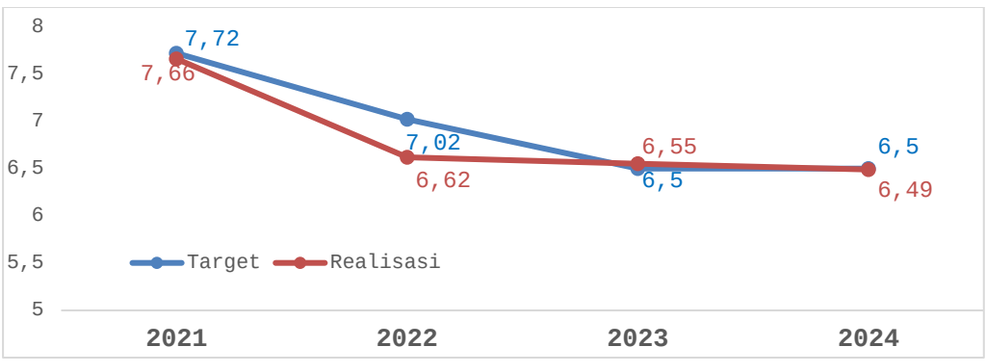

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Menurut data Survey Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS) BPS, pada tahun 2024 jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya sebanyak 573.652 orang, dari jumlah tersebut yang termasuk dalam Angkatan Kerja sebanyak 395.357 orang atau 68,92 persen, sedangkan yang Bukan Angkatan Kerja adalah sebanyak 178.295 orang. Data lebih lengkap dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.19
Perbandingan Capaian Tingkat Pengangguran Terbuka
Kota Tasikmalaya, Provinsi, dan Nasional

Tahun 2022-2024
(Persen)

	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nasional	5,86	5,86	5,3-6,0	5,32	5,0-5,7	4,91
Provinsi Jawa Barat	10,16	8,31	8,13	7,44	7,4	6,75
Kota Tasikmalaya	7,02	6,62	6,5	6,55	6,5	6,49

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

Jika dibandingan dengan target dan realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka pada tingkat Provinsi Jawa Barat, sejak tahun 2022 sampai tahun 2024, Kota Tasikmalaya selalu berada di atas realisasi Provinsi Jawa Barat. Sebaliknya pada tingkat Nasional, realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya belum bisa melampaui realisasi tingkat Nasional.

Tabel 2.20
Perbandingan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya
dengan Kab/Kota di Provinsi Jawa Barat
Tahun 2020-2024
(Persen)

No	**Kabupaten / Kota**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1	Pangandaran	3,25	1,56	1,52	1,58
2	Ciamis	5,06	3,75	3,52	3,37
3	Tasikmalaya	6,16	4,17	3,89	3,74
4	Majalengka	5,71	4,16	4,12	4,01
5	Kota Banjar	6,09	5,53	5,43	5,44
6	Cianjur	9,32	8,41	7,71	5,99
7	Sumedang	9,18	7,72	6,94	6,16
8	Indramayu	8,30	6,49	6,46	6,25
9	Kota Depok	9,76	7,82	6,97	6,27
10	Kota Cirebon	10,53	8,42	7,66	6,29
11	Bandung	8,32	6,98	6,52	6,36
12	Kota Tasikmalaya	7,66	6,62	6,55	6,49
13	Bandung Barat	11,65	9,63	8,11	6,70
14	Subang	9,77	7,77	7,65	6,73
15	Cirebon	10,38	8,11	7,65	6,74
16	Garut	8,68	7,60	7,33	6,96
17	Sukabumi	9,51	7,77	7,32	7,11
18	Bogor	12,22	10,64	8,47	7,34
19	Purwakarta	10,70	8,75	7,72	7,34
20	Kota Bandung	11,46	9,55	8,83	7,40
21	Kuningan	11,68	9,81	9,49	7,78
22	Kota Bekasi	10,88	8,81	7,90	7,82
23	Karawang	11,83	9,87	8,95	8,04
24	Kota Bogor	11,79	10,78	9,39	8,13
25	Kota Sukabumi	10,78	8,83	8,53	8,34
26	Bekasi	10,09	10,31	8,87	8,82
27	Kota Cimahi	13,07	10,77	10,52	8,96
	Jawa Barat	**9,82**	**8,31**	**7,44**	**6,75**

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025

Berdasarkan data BPS Provinsi Jawa Barat, jika dibandingkan dengan Kabupaten/Kota di Jawa Barat, Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2024 di Kota Tasikmalaya berada pada urutan ke 12. Jika dilihat pertumbuhan pada setiap tahunnya Tingkat Pengangguran Terbuka di Kota Tasikmalaya selalu mengalami penurunan.

Tabel 2.21.
Jumlah Penduduk Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kategori Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya
Tahun 2021-2024

Kategori	Tahun			
	2021	2022	2023	2024
Angkatan Kerja	342.585	347.063	369.778	395.357
1. Bekerja	316.349	324.099	345.544	369.713
2. Pengangguran Terbuka	26.236	22.964	24.234	25.644
Bukan Angkatan Kerja	178.418	178.909	195.315	178.295
Jumlah	**521.003**	**525.972**	**565.093**	**573.652**
Persentase Penduduk yang Bekerja Terhadap Angkatan Kerja	92,34	93,38	93,45	93,51
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Terhadap Penduduk Usia Kerja	65,75	65,98	65,44	68,92
Tingkat Pengangguran Terbuka	7,66	6,62	6,55	6,49

Sumber: Data Sakernas BPS, 2025

10. Indeks Gini

Salah satu ukuran kesenjangan ekonomi yang biasa digunakan adalah Koefisien Gini (Indeks Gini). Kesenjangan ekonomi diukur dengan seberapa besar perbandingan distribusi dari pengeluaran dengan distribusi pemerataan ideal (uniform) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Koefisien Gini yang lebih besar dari 0,50 menunjukkan ketimpangan distribusi pendapatan yang cukup serius.

Indeks Gini di Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2024 dapat dilihat pada grafik berikut.

Gambar 2.25.
Target & Realisasi Indeks Gini Kota Tasikmalaya, 2021-2024 (Point)

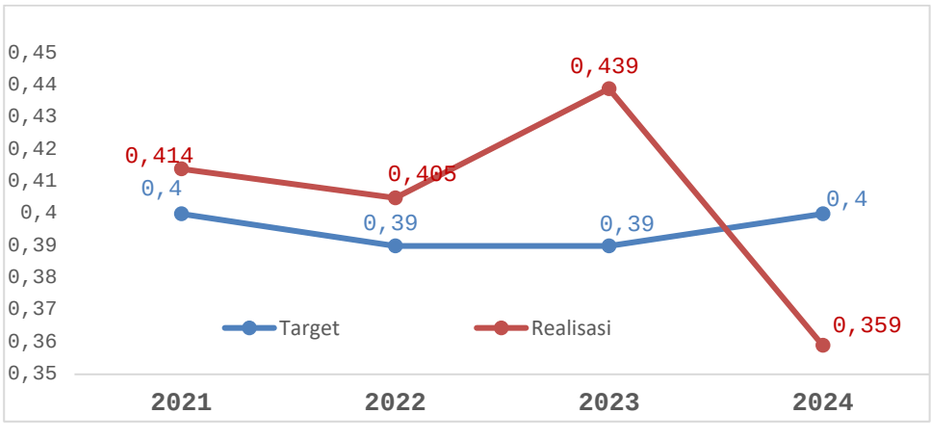

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Tabel 2.22
Perbandingan Capaian Indeks Gini
Kota Tasikmalaya, Provinsi, dan Nasional
Tahun 2022-2024
(Poin)

	2022		2023		2024	
	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi
Nasional	0,376 - 0,378	0,381	0,375- 0,378	0,388	0,374- 0,377	0,381
Provinsi Jawa Barat	0,4	0,412	0,396	0,425	0,408	0,428
Kota Tasikmalaya	0,39	0,405	0,39	0,439	0,4	0,359

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

Angka indeks gini Kota Tasikmalaya pada tahun 2022-2024 tergolong tinggi jika dibandingkan dengan indeks gini Provinsi Jawa Barat dan Nasional. Perkembangan indeks gini Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir berkembang secara fluktuatif, dengan posisi terakhir pada tahun 2024 mencapai 0,359. Hal ini berarti ketimpangan pendapatan pendudukan Kota Tasikmalaya cenderung menurun dibandingkan tahun 2023.

2.1.2.2. Kesejahteraan Sosial

2.1.2.2.1. Pendidikan

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2021 hingga 2024 terus mengalami peningkatan setiap tahun, yang menunjukkan perbaikan dalam akses pendidikan. Pada tahun 2021 capaian rata-rata lama sekolah penduduk di Kota Tasikmalaya sebesar 9,52 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,63 tahun pada tahun 2024 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya telah bersekolah selama 9,63 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga setingkat dengan kelas I SMA. Kota Tasikmalaya memiliki nilai RLS yang lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Jawa Barat yang mencapai 8,87 tahun, hal ini menunjukkan pencapaian pendidikan yang relatif lebih baik, seperti dukungan program pendidikan dan fasilitas pendidikan. Perkembangan Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021-2024 dapat dilihat pada gambar dibawa ini.

Gambar 2.26.
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah Tahun 2021 - 2024

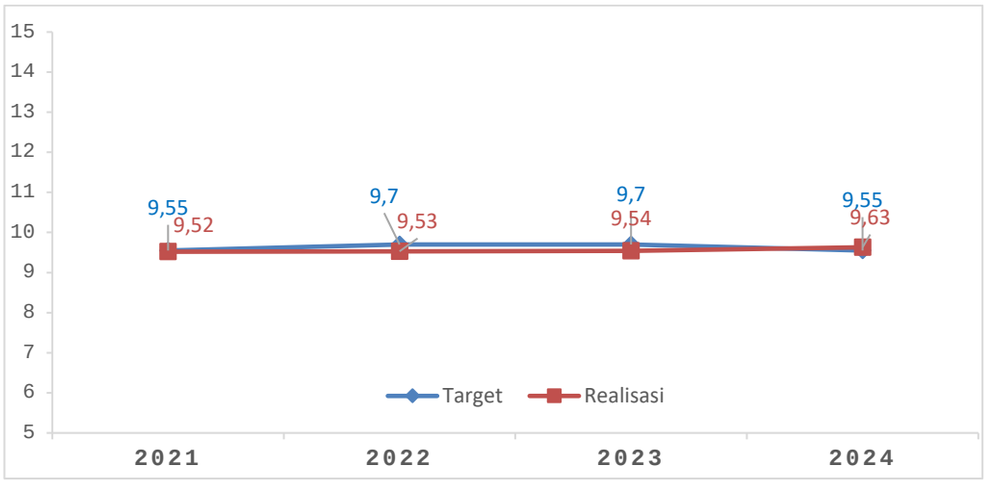

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

2. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2021-2024 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2021 adalah 13,46 dan meningkat setiap tahun hingga pada tahun 2024 mencapai angka 13,50 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.27.
Capaian Harapan Lama Sekolah Tahun 2021 - 2024

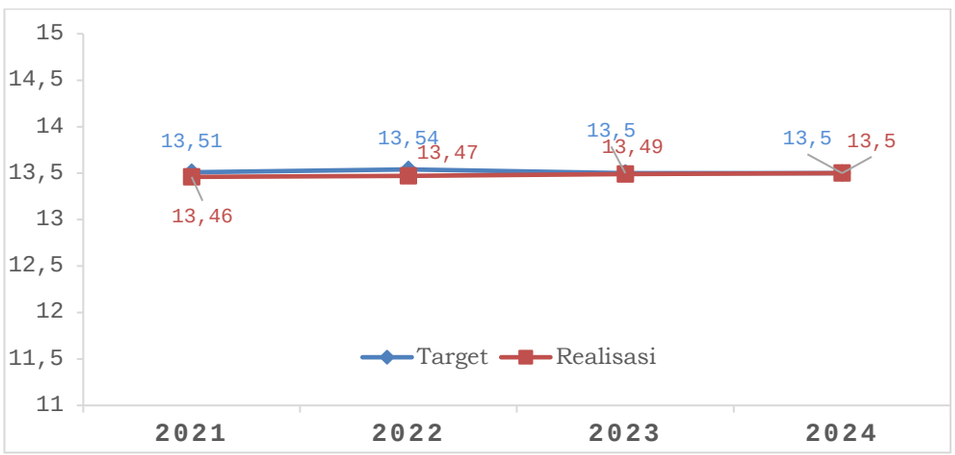

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.2.2.2. Kesehatan

Gambaran umum indikator makro kesehatan Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu 2021-2024 adalah sebagaimana gambar berikut:

Gambar 2.28.
Indikator Makro Kesehatan Kota Tasikmalaya

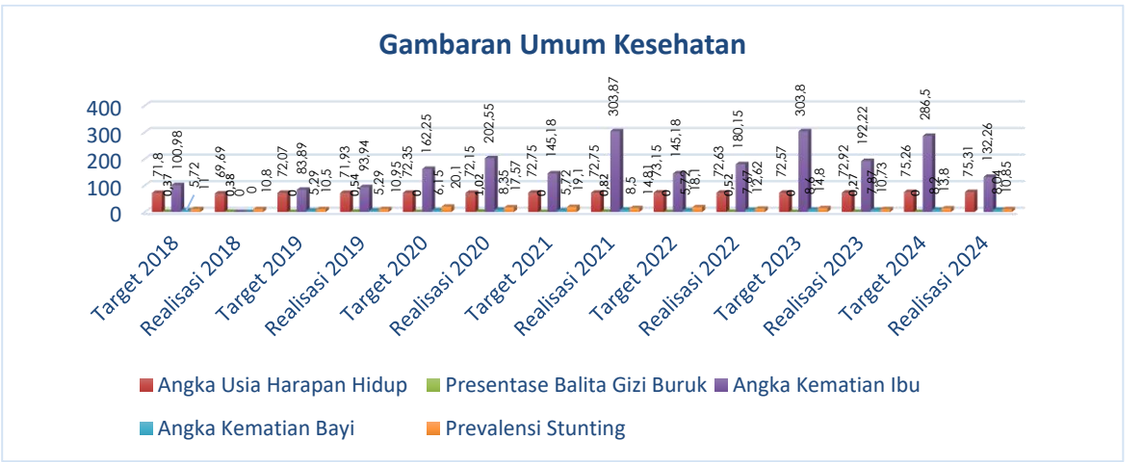

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Angka kematian Ibu (AKI) per 100.000 KH pada Tahun 2024 terealisasi 132,26 dari target 286,5. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2023 dimana Angka Kematian Ibu mencapai 192,22. Angka kematian Bayi (AKB) per 1.000 KH terealisasi 8,04 persen dari target 8,2 persen. Angka tersebut mengalami kenaikan dari tahun 2023 dimana AKB tercatat sebesar 7,87 persen. Sedangkan untuk persentase balita gizi buruk yang ditargetkan sebesar 0 persen, masih saja terdapat 0,98 persen di tahun 2024 atau kenaikan dari tahun 2023 sebesar 0,71 persen. Permasalahan tersebut disebabkan oleh masih rendahnya derajat kesehatan ibu hamil, rendahnya kesadaran ibu hamil memeriksakan kehamilan, masih adanya pernikahan dini dan masih adanya proses kelahiran diluar fasilitas kesehatan.

Stunting merupakan salah satu isu strategis pembangunan sumber daya manusia di Kota Tasikmalaya yang menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Masalah stunting tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga memengaruhi perkembangan kognitif dan produktivitas jangka panjang. Oleh karena itu, upaya percepatan penurunan stunting dilakukan melalui pendekatan konvergensi program lintas sektor dengan menyasar rumah tangga berisiko stunting, intervensi pada kelompok 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), serta penguatan peran kader, TPPS, dan organisasi masyarakat.

Tren prevalensi stunting di Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) dan Survei Kesehatan Indonesia (SKI), prevalensi stunting tercatat sebesar 24,75% pada tahun 2019, meningkat menjadi 28,9% pada tahun 2021, kemudian turun menjadi 22,4% pada tahun 2022. Namun, pada tahun 2023 terjadi peningkatan kembali menjadi 27,1%, sebelum akhirnya menurun signifikan menjadi 19,6% pada tahun 2024. Penurunan tersebut merupakan hasil dari penguatan intervensi spesifik dan sensitif, pemanfaatan data by name by address melalui aplikasi E-PPGM, serta implementasi berbagai inovasi seperti Gerakan Masyarakat Cegah Stunting (GENTING), Dapur Masyarakat Khusus Stunting (DAMASKUS), dan Gerakan One ASN One Stunting (OAOS). Keberhasilan ini menjadi pijakan penting bagi Kota Tasikmalaya dalam merancang kebijakan jangka menengah yang lebih terarah, inklusif, dan berkelanjutan untuk mencapai target nasional prevalensi stunting di bawah 14% pada akhir periode RPJMD.

2.1.2.2.3. Ketenagakerjaan

Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari Tingkat Pengangguran Terbuka dan Partisipasi Angkatan Kerja. Capaian hal tersebut di Kota Tasikmalaya tahun 2021 - 2024 dapat dilihat dari gambar berikut:

Gambar 2.29.
Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024 (persen)

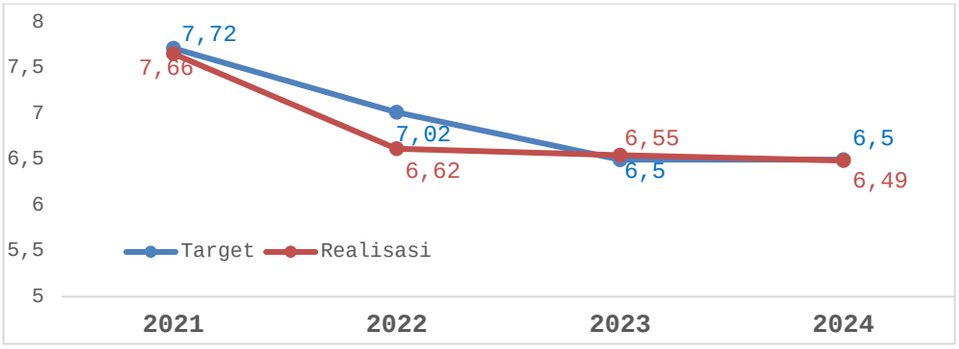

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Dari grafik di atas menunjukkan bahwa pada tahun 2024 Tingkat Pengangguran di Kota Tasikmalaya mengalami penurunan sebesar 0,06 persen, yaitu dari 6,55 persen pada tahun 2023 menjadi 6,49 persen pada tahun 2024. Hal ini merupakan salah satu dampak dari berbagai program dan kegiatan terkait ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Gambar 2.30.
Partisipasi Angkatan Kerja Kota Tasikmalaya Tahun 2021-2024 (persen)

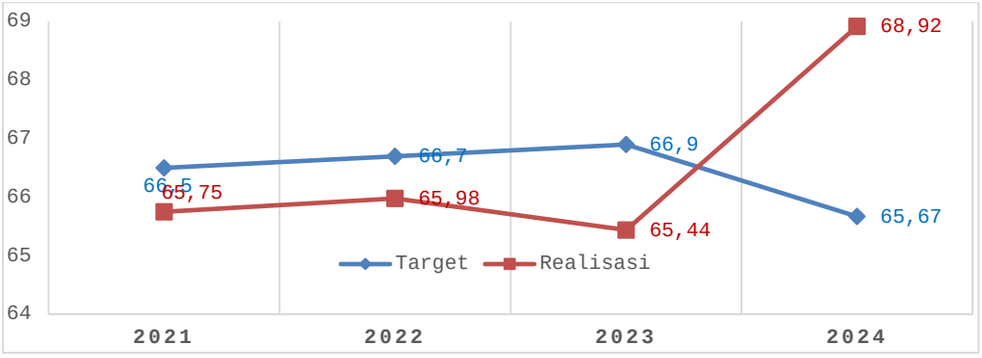

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025

Partisipasi Angkatan Kerja di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat 68,92 persen, mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2023 yang tercatat 65,44 persen.

2.1.2.3. Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan bidang seni, budaya dan olahraga sangat terkait erat dengan kualitas hidup manusia dan masyarakat. Seni budaya merupakan wujud kearifan lokal yang keberadaannya harus dipertahankan masyarakat dan pemerintah daerah.

Tabel 2.23.
Jumlah Grup dan Gedung Seni Budaya
Tahun 2021 - 2024

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah grup kesenian (buah)	173	173	173	173

Uraian	2021	2022	2023	2024
Jumlah gedung (unit)	1	1	1	1

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2025.

Sementara itu aktivitas masyarakat dalam menjaga kebugaran tubuhnya dan bersosialisasi, salah satunya ditunjukkan dengan banyaknya lapangan olahraga. Berikut adalah jumlah lapangan olahraga milik Pemerintah Kota Tasikmalaya yang masih aktif sampai tahun 2024.

Tabel 2.24.
Jumlah Sarana dan Prasarana Olah Raga di Kota Tasikmalaya sampai dengan tahun 2024

No.	Kecamatan	Lapangan Sepakbola / Futsal	Lapangan Basket	Lapangan Volly	Bulungtangkis (terbuka/ Tertutup)	Kolam Renang
1	Mangkubumi	10	3	18	33	5
2	Purbaratu	2	4	1	26	-
3	Indihiang	4	6	8	25	1
4	Bungursari	9	3	-	17	6
5	Kawalu	4	3	1	35	-
6	Cihideung	4	6	5	28	11
7	Cipedes	6	6	6	33	5
8	Tamansari	7	9	10	23	-
9	Tawang	6	9	3	37	3
10	Cibeureum	-	1	3	31	5
	TOTAL	**52**	**50**	**55**	**288**	**36**

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan, 2025.

2.1.3. Aspek Pelayanan Umum

2.1.3.1. Penyelenggaraan Urusan Wajib

Penyelenggaraan Urusan Wajib Pelayanan Dasar terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan yakni pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, ketenteraman ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, serta sosial. Penyelenggaraan Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar terdiri atas 17 (tujuh belas) bidang urusanpemerintahan, yakni tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan pelindungan anak, pangan, pertanahan, lingkungan hidup, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, perhubungan, komunikasi dan informatika, koperasi, usaha kecil, dan menengah, penanaman modal, kepemudaan dan olahraga, statistik, persandian, kebudayaan, serta perpustakaan dan kearsipan.

1. Urusan Wajib Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan urusan wajib pelayanan dasar terdiri dari 6 (enam) urusan, yaitu

1) Urusan Pendidikan

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pendidikan sebagai berikut:

Tabel 2.25.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pendidikan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Rata-rata Lama Sekolah (RLS)	Nilai Jumlah tahun belajar penduduk usia 15 tahun keatas yang telah diselesaikan dalam	Tahun	9,55	9,63

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
	pendidikan formal (tidak termasuk tahun yang mengulang) Yang di Hitung Oleh BPS			
Harapan Lama Sekolah (HLS)	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang Yang di Hitung Oleh BPS	Tahun	13,50	13,50
Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Jumlah Siswa TK/RA/KB/SPS/TPA dibagi Penduduk usia 3-6 thn X 100	%	42,55	42,60
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A usia 7-12 thn dibagi Penduduk usia 7-12 thn X 100 (Nilai Yang di Hitung Oleh BPS)	%	89,8	90,03
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B usia 13-15 thn dibagi Penduduk usia 13-15 thn X 100 (Nilai Yang di Hitung Oleh BPS)	%	78,66	83,57
Tingkat Partisipasi Pendidikan Kesetaraan	Jumlah Warga Belajar yang lulus dan mendapatkan sertifikat / Jumlah seluruh Warga Belajar yang mengikuti pelatihan x 100	%	100	100
Indeks Pencapaian SPM Bidang Pendidikan	Jumlah Peserta Didik PAUD, dan Pendidikan Dasar yang terlayani SPM / Jumlah Seluruh Peserta Didik PAUD dan Pendidikan Dasar x 100	%	95,80	98,47*
Angka Putus Sekolah SD	Jumlah Siswa SD/MI/Paket A yang putus sekolah dibagi Jumlah seluruh Siswa SD/MI/Paket A	%	0,10	0
Angka Putus Sekolah SMP	Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B yang putus sekolah dibagi Jumlah Siswa SMP/MTs/Paket B	%	59,73	0,18
Nilai Mutu PAUD/PNF	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	%	0,50	88,35
Nilai Mutu Sekolah Dasar	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	%	55,56	60,18
Nilai Mutu Sekolah Menengah Pertama	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	%	63,45	53,41
Persentase sekolah yang menggunakan kurikulum muatan lokal	Jumlah sekolah yang menggunakan kurikulum muatan local di bagi Seluruh sekolah	%	100	100
Persentase guru bersertifikat pendidik	Jumlah guru bersertifikat pendidik di bagi Seluruh guru	%	47,40	44,34
Persentase prestasi siswa pendidikan dasar	Jumlah Peserta Didik yang berprestasi di tingkat Provisi dibagi jumlah Peserta Didik yang mengikuti Perlombaan	%	25,01	46,15

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Tasikmalaya, 2025

2) Urusan Kesehatan

Adapun target dan realisasi capaian kinerja penyelenggaraan Urusan Kesehatan sebagai berikut:

Tabel 2.26.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kesehatan (pada Dinas Kesehatan)

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Kesehatan	Hasil Penilaian RB Oleh Kemenpan RB	Poin	60	Belum Rilis
Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000 KH	Poin	286,5	132,26
Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu /Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	Poin	8,2	8,04
Prevalensi Stunting (%)	Jumlah kasus stunting/Jumlah anak x 100	%	16,1	10,85
Indeks Keluarga Sehat	Jumlah Keluarga Sehat/Jumlah Seluruh Keluarga Yang Dinilai	Poin	0,12	0,12
Indeks Pencapaian SPM kesehatan	Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima	%	100	
Persentase SPM kesehatan Masyarakat	Rata-rata capaian SPM Kesehatan masyarakat	%	100	98,30
Persentase SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	Rata-rata nilai capaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	100	103,13
Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	Jmlah tenaga kesehatan yang tersertifikasi dibagi jumla tenaga kesehatan dikali 100	%	94	
Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persayaratan HS	Rata-rata Nilai Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persayaratan Higiene Sanitasi	%	79,8	
Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	Jumlah Keluarga ber-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	%	55	

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Tasikmalaya, 2025.

3) Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pekerjaan umum dan tata ruang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.27.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Tingkat Kemantapan Jalan	Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik Dan Sedang / Panjang Jalan Total Kewenangan Kota Dikali 100	%	89.62	91.52
Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang terdampak oleh irigasi	Luas sawah yang terdampak / luas sawah total kewenangan kota tasikmalaya (1749 Ha)	%	23.72	26.80
Persentase Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis	Jumlah Bangunan Gedung Yang Memenuhi Standar Teknis / Jumlah Bangunan Gedung Dikali 100	%	18.01	18.01
Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik + Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik /2	%	65.15	67.02
Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	Capaian Pelaksanaan Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang	%	100.00	100.00
Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap Rencana Tata Ruang	luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana pola ruang / luas lahan yang diberikan KKPR*100 % Luas Wilayah Kota Kali 100	%	98.50	98.83
Persentase peningkatan jaringan jalan	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / total panjang jalan kota *100%	%	2,25	2,99
Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	Jumlah pemilik ijin yang menerapkan ketentuan ijin bangunan/jumlah bangunan berijin *100%	%	99,373	99,322
Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan*100%	%	33,66	32,43
Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan permukiman kumuh dalam kondisi baik	Panjang drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang drainase lingkungan permukiman *100%	%	65,01	66,85

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	Panjang jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang jalan lingkungan permukiman *100%	%	51,97	67,19
Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya * 100%	%	57,26	58,31
Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi	Jumlah rumah yang memiliki akses pengolahan berupa cubluk + jumlah rumah yang lumpur tinjanya telah diolah di PLT+ jumlah rumah yang memiliki sambungan rumah dan air limbahnya diolah di IPALD dibagii Jumlah Proyeksi rumah tangga di Kota Tasikmalaya*100%	%	62,05	63,14
IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	Nilai IKM	Kategori	83	83,54
Persentase kepatuhan Pemanfaatan Ruang terhadap KKPR yang telah diterbitkan	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR *100%	%	98	98
Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai*100%	%	23,76	25,44
Persentase Panjang jaringan irigasi kondisi baik	Panjang jaringan irigasi kondisi baik / panjang total jaringan irigasi kewenangan Pemerintah Kota Tasikmalaya	%	38,19	41,41

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025.

4) Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan perumahan dan kawasan permukiman dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.28
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perumahan Rakyat Dan Kawasan Permukiman

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Perumahan yang Layak huni	Persentase PSU yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 2	%	50	75

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat	Jumlah unit penyediaan/rehabiliasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	%	100	100
Persentase Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	%	15,11	15,57
Cakupan Ketersediaan Rumah Layak Huni	Jumlah penanganan RTLH (didalam kawasan kumuh+diluar kawasan kumuh) dibagi total RTLH se Kota (9081 unit)	%	12,23	15,34
Persentase Rumah Korban Bencana dan Relokasi Program Kab/Kota yang Tertangani	Jumlah unit penyediaan/rehabiliasi rumah bagi korban bencana dan rekolasi program yang ditangani terhadap target	%	100	100
Persentase Perumahan yang Sesuai dengan Standar Bangunan dan Perumahan	Persentase kesesuaian layanan penyediaan rekomendasi dan persetujuan site plan	%	100	100
Persentase PSU Perumahan yang dimanfaatkan	Persentase PSU yang diserahterimakan+yang dikelola dibagi 2	%	50	75,00
Persentase Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 (sepuluh) Ha) yang Tertata	Luas penanganan kawasan kumuh/total kawasan kumuh dengan luas di bawah 10 Ha (82, 68 Ha)	%	15,11	15,57
Persentase Penurunan Rumah Tidak Layak Huni di Luar Kawasan Kumuh	Jumlah unit RTLH yang ditangani di luar kawasan kumuh/total RTLH di luar kawasan kumuh (7329 Unit)	%	7,76	12,66

Sumber : Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025

5) Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Berikut diuraikan pelaksanaan urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat:

A. Satuan Polisi Pamong Praja

Pagu anggaran Satuan Polisi Pamong Praja adalah sebesar Rp.17.050.561.103,00 dengan realisasi sebesar Rp.16.726.697.774,00 atau 98,10% dengan rincian terlampir pada buku lampiran LKPJ 2024. Adapun capaian kinerja urusan keamanan dan ketertiban umum adalah sebagai berikut :

Tabel 2.29.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
(pada Satpol PP)

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Penurunan Gangguan	(Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n-1 dikurangi Gangguan	%	3	6,17

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh Satpol PP pada Tahun n-1 dikali 100 %			
Persentase penurunan pelanggar Perda dan Perkada yang memuat Sanksi	(Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikali100%	%	4,5	4,8

Sumber : Satuan Polisi Pamong Praja, 2025.

B. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)

Adapun capaian kinerja urusan keamanan dan ketertiban umum pada BPBD adalah sebagai berikut :

Tabel 2.30.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketentraman, Ketertiban Umum Dan Perlindungan Masyarakat
(pada BPBD)

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Berdasarkan Assessment dan Review dari BNPB	Kelas	0,51	0,52
Persentase Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Sesuai Respon Time	Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran yang Sesuai Respon Time / Jumlah Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran x 100%	%	86	70,12
Indeks Reformasi Birokrasi BPBD	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi BPBD dari Evaluator Tingkat kota	Kategori	B	BB

Sumber : Badan Penanggulangan Bencana Daerah, 2025.

6) Urusan Sosial

Adapun capaian kinerja urusan sosial adalah sebagai berikut :

Tabel 2.31.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Sosial

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Penurunan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)	Perolehan Capaian Kinerja Bidang / Target Capaian Kinerja x 100%	%	100	99,65
Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	Jumlah PSKS aktif dan mendapatakan bimbingan teknis / Jumlah PSKS x 100	%	100	100
Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	Jumlah PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial / Jumlah Pengaduan PPKS X 100	%	100	99,66
Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat	Jumlah penerima bantuan yang diverifikasi / jumlah data	%	100	98,59

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Sasaran	pengaduan X 10			
Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	Jumlah korban bencana yang mendapatkan perlindungan sosial / Jumlah laporan korban bencana X 100	%	100	100
Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	Jumlah Makam Pahlawan yg dikelola dan terstandar / Jumlah Makam Pahlawan x100	%	100	100
Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Sosial dari Evaluator Tingkat Kota	Kategori	B	B

Sumber : Dinas Sosial Kota Tasikmalaya, 2025.

2. Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar

Penyelenggaraan urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri dari 17 (tujuh belas) urusan, yaitu:

1) Urusan Tenaga Kerja

Adapun capaian kinerja urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.32.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Tenaga Kerja

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan terjaganya hubungan industrial yang harmonis	jumlah perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak dan perselisihan yang diselesaikan/ jumlah perusahaan x 100 %	%	67,25	71,07
Persentase pencari kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	jumlah pencari kerja dan tenaga kerja yang memiliki sertifikat kompetensi / jumlah pencari kerja & tenaga kerja keseluruhan x 100%	%	19,70	19,8
Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja daerah	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu ke RTKD / jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/kota x 100%	%	5	3,04
Persentase Pencari Kerja yang bekerja	jumlah pencaker yang bekerja/ jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %	%	29	48,15
Persentase perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS ketenagakerjaan)	Jumlah perusahaan yang menerapkan peraturan ketenagakerjaan (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan BPJS ketenagakerjaan) / jumlah Perusahaan x 100	%	54,50	65,76

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial	Jumlah perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan / jumlah kasus perselisihan x 100	%	100	100

Sumber: Dinas Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, 2025.

2) Urusan Pemberdayaan Perempuan Dan Pelindungan Anak

Adapun capaian kinerja urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah sebagai berikut:

Tabel 2.33.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Pembangunan Gender (IPG)	Indeks Pembangunan Gender (IPG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	Poin	93,0	101,16
Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	Poin	60,10	
Prevalensi Kekerasan Terhadap Perempuan (KtP)	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan Usia 15-64 Tahun / Jumlah Penduduk Perempuan Usia 15-64 Tahun x 100	%	0,024	0,017
Prevalensi Kekerasan terhadap Anak (KtA)	Jumlah Anak Usia 13-17 Tahun yang pernah Mengalami setidaknya satu bentuk kekerasan sepanjang Hidup / jumlah anak Usia 13-17 Tahun x 100	%	0,10	52,63
Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	Cakupan OPD yang Menjalankan Program PUG Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan ARG / Jumlah Perangkat Daerah x 100	%	100	100
Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	Cakupan Keluarga yang Mengikuti Pelatihan PUG Jumlah Keluarga yang Aktif dalam Pengarusutamaan Gender / Jumlah keluarga x 100	%	100	100
Persentase data terpilah yang dimanfaatkan	Jumlah Data Terpilah yang dimanfaatkan / Jumlah Data Terpilah yang ada x 100	%	100	
Persentase kasus yang tertangani	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti / Jumlah laporan/pengaduan yang masuk x 100	%	100	100

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2025

3) Urusan Pangan

Adapun capaian kinerja urusan pangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.34.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Ketahanan Pangan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	PPH = % angka kecukupan gizi (AKG) x bobot masing-masing kelompok pangan	poin	91,5	95,1
Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	Persentase Angka Kecukupan Energi	%	104	106
Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	Persentase Angka Kecukupan Protein	%	116,8	136,9
Persentase penurunan daerah rawan pangan	Jumlah daerah rawan pangan tahun berjalan - Jumlah daerah rawan pangan tahun sebelumnya / Jumlah daerah rawan pangan tahun sebelumnya x 100%	%	15	25
Persentase pengawasan keamanan pangan	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/Total sampel pangan yang diawasi	%	100	100

Sumber: Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025.

4) Urusan Pertanahan

Capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan pertanahan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.35.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pertanahan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase PKKPR Tanah Aset Pemkot Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang / luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR*100%	%	100.00	100.00

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kota Tasikmalaya, 2024.

5) Urusan Lingkungan Hidup

Adapun capaian indikator kinerja urusan lingkungan hidup dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.36.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Lingkungan Hidup

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Dinas Lingkungan Hidup dari Evaluator Internal Kota	Kategori (Point)	B (62)	B (66,74)
Indeks Kualitas Air	IPj=[√(Ci/Lij)2 M + (Ci/Lij)2 A)]/2	Point	48,6	39,33

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Kualitas Udara	IKU = 100 – [(50/0,9 x Ieu – 0,1)]	Point	81,18	86,64
Indeks Kualitas Lahan	IKL = 100 – ((84,3 – ((LTL/LW) – DKK) x 100)) x 50/54,3	Point	31,96	39,45
Persentase Pengurangan Sampah	Persentase capaian kinerja Pengurangan sampah	%	28	17,49
Persentase Penanganan Sampah	Persentase capaian kinerja penanganan sampah	%	71	68,64
Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dimanfaatkan	Rata-rata persentase pemenuhan dokumen lingkungan hidup pada tahun berjalan	%	100	100
Persentase Penurunan Pencemaran	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dkurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik(70) dikali 100)	%	0,15	2,72
Persentase Peningkatan RTH	Rata-rata persentase capaian kinerja pengelolaan keanekaragaman hayati	%	100	100
Persentase Pelaku Usaha/ Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Lingkungan	Jumlah Pelaku Usaha/Kegiatan yang memenuhi ketentuan lingkungan pada tahun berjalan dibagi target pelaku Usaha/Kegiatan yang dinilai dan diawasi pada tahun berjalan dikali 100	%	100	100
Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Terselesaikan	Jumlah pengaduan lingkungan hidup yang tertangani pada tahun berjalan dibagi target jumlah pengaduan lingkungan hidup dikali 100	%	100	433

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Tasikmalaya, 2024.

6) Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Adapun capaian indikator kinerja urusan Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.37.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Masyarakat yang Memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran penduduk + Persentase Kepemilikan Dokumen pencatatan sipil/2	%	98	98,5
Persentase PemanfaatanData Kependudukan	Jumlah Lembaga yang telah memanfaatkan data kependudukan/jumlah lembaga yang telah melakukan perjanjian kerjasama x 100%	%	100	100
Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Kependudukan yang terlayani sesuai standar	Jumlah kepemilikan KTP + kepemilikan KIA + kepemilikan KK/3 x 100%	%	98	98,93
Persentase Kepemilikan Dokumen Permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian dan Perkawinan + kepemilikan Akte lainnya/4 x 100%	%	99,07	99,69
Persentase Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	Jenis Sistem Informasi/Jumlah system informasi x 100%	%	100	98,14
Jumlah Dokumen Kependudukan yang dihasilkan sesuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	Jumlah Dokumen yang dihasilkan	Dokumen	3	3

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tasikmalaya, 2025.

7) Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Adapun capaian indikator kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana pada Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.38.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Cakupan Anggota BKB yang Ber KB	Jumlah Anggota BKB yang ber KB/Jumlah Anggota BKB x 100	%	83,03	67,06

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Cakupan Anggota BKR yang Ber KB	Jumlah Anggota BKR yang ber KB/Jumlah Anggota BKR x 100	%	77,22	44,79
Cakupan Anggota BKL yang Ber KB	Jumlah Anggota BKL yang ber KB/Jumlah Anggota BKL x 100	%	75,47	42,78
Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Jumlah Dokumen Laporan Pemutakhiran Data Kependudukan	Dokumen	1	1
Persentase Kepersertaan KB MKJP	Realisasi pelayanan Kb MKJP/Target Perkiraan Permintaan Masyarakat (PPM KB) x100	%	73	72,5
Persentase Kepersertaan Un Meet Need	Unmeet need (ingin anak ditungu (iat)+ tidak ingin anak lagi (tial)/PUS x 100	%	13,25	12,05

Sumber: Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Tasikmalaya, 2025.

8) Urusan Perhubungan

Adapun capaian indikator kinerja urusan perhubungan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.39.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perhubungan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Kelancaran Lalu Lintas	Jumlah VC Ratio / Jumlah Ruas Jalan	LoS	0,36	0,35
Rasio Konektivitas kab/Kota	(Jumlah Trayek x Bobot Trayek)/Kebutuhan Trayek	Poin	0,64	0,62
Persentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	Rata-rata prosentase layanan lalu lintas dan angkutan berkeselamatan	%	68,63	69,14
Persentase Layanan Lalu Lintas Berkeselamatan	Jumlah realisasi ruas jalan berkeselamatan / ruas jalan kota	%	58,93	59,46
Persentase Angkutan Lalu Lintas Berkeselamatan	Jumlah realisasi angkutan berkeselamatan/Jumlah angkutan yang di targetkan	%	78,32	78,82

Sumber: Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya, 2024

9) Urusan Komunikasi Dan Informatika

Adapun capaian indikator kinerja penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, hasil dari pelaksanaan program dan kegiatan diatas adalah sebagai berikut:

Tabel 2.40.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Komunikasi dan Informatika

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Capaian Predikat Indeks SPBE	Capaian Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	Poin	3,6	3,96
Capaian Predikat Keterbukaan Informasi dan Komunikasi Publik	Capaian Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No 1 tahun 2021 yang 15.3 diselenggaraan oleh Komisi Informasi	%	92	94,08
Persentase Layanan SPBE yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	Jumlah Layanan SPBE yang dilakukan secara online dan terintegrasi/Jumlah Layanan SPBE yang ada x 100	%	65	62,5
Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE	Realisasi Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang terpenuhi/Jumlah Total Dokumen Evidence Penilaian SPBE yang harus dipenuhi x 100	%	100	100
Persentase Layanan Penyebarluasan Informasi dan Komunikasi Publik	Jumlah media Komunikasi Publik yang digunakan/Jumlah Media Komunikasi Publik sesuai permenkominfo nomor 8 tahun 2019 pasal 8 ayat 2	%	100	100
Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	Nilai yang dihasilkan pada indikator penilaian indeks keterbukaan informasi publik	Poin	92	94,08

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025

10) Urusan Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah adalah sebagai berikut:

Tabel 2.41.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Koperasi Usaha Kecil Dan Menengah

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Bersertifikat	Jumlah Usaha Mikro yang bersertifikat / Jumlah total Usaha Mikro x 100%	%	5,57	3,17
Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi	Jumlah SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi / Jumlah total pengurus koperasi x 100%	%	8,25	33,33
Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	Jumlah volume usaha tahun n - tahun n-1/	%	2,5	8

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
	Jumlah volume usaha tahun n-1 x 100%			

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kota Tasikmalaya, 2025.

11) Urusan Penanaman Modal

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan Penanaman Modal adalah sebagai berikut:

Tabel 2.42.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Penanaman Modal

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Nilai penanaman modal daerah dari PMA dan PMDN yang masuk	Jumlah nilai PMA dan PMDN yang masuk yang tercatat di Dinas PMPTSP	M/Rp	1.369	2.138
Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	%	100	100
Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total data perijinan x 100%	%	100	100

Sumber: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tasikmalaya, 2025.

12) Urusan Kepemudaan Dan Olah Raga

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan Kepemudaan dan Olahraga adalah sebagai berikut:

Tabel 2.43.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kepemudaan Dan Olahraga

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Peningkatan Prestasi Pemuda di Tingkat Provinsi	Jumlah prestasi kepemudaan tingkat provinsi / jumlah OKP terdaftar x 100	%	40	44,44
Persentase Cabang Olahraga Berprestasi Tingkat Provinsi	Jumlah cabang olahrga berprestasi tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga) x 100	%	36,59	53,66
Persentase Pemuda Terbina Keorganisasian Yang Aktif Dalam Organisasi Kemasyarakatan	(Jumlah pemuda yang aktif pada organisasi kepemudaan / Jumlah pemuda di kota Tasikmlaya) x 100	%	67,71	76,55
Persentase Pemuda Terbina Wirausaha Yang Berwirausaha	Perolehan medali tingkat provinsi / jumlah cabang olahraga x 100	%	33,24	38,43
Persentase Medali yang Diperoleh Dalam Event Provinsi	(Jumlah cabor berprestasi tingkat provinsi / jumlah cabor) x 100	%	37	53,66

Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan. dan Pariwisata Kota Tasikmalaya. 2025.

13) Urusan Statistik

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan statistik adalah sebagai berikut:

Tabel 2.44.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Statistik

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	Poin	3	3,01
Persentase Peningkatan pengunjung web open data	Jumlah Pengunjung Tahun Sekarang-Jumlah Pengunjung Tahun Kemarin/Jumlah Pengunjung Tahun KemarinTahun Kemarin x 100	%	20	25,81
Persentase data prioritas yang tersusun	Jumlah Data Prioritas yang tersusun/Jumlah Daftar Data x 100	%	50	50

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya Kota Tasikmalaya. 2025.

14) Urusan Persandian

Urusan ini dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika melalui dengan uraian program 1 (satu) program yaitu Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi dan 1 (satu) kegiatan yaitu Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dengan rincian terlampir pada buku lampiran LKPJ 2024. Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan Persandian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.45.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Persandian

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001 (Nilai Hasil Indeks KAMI/Jumlah Total Nilai Indeks KAMI x 100)	%	45	45,74
Nilai kelengkapan pengamanan informasi	Nilai yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	Poin	291	295
Tingkat Kematangan Pengamanan Informasi	Nilai yang dihasilkan berdasarkan Laporan Hasil Tingkat Maturitas Penanganan Insiden (TMPI)	Level	3	3

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya. 2025.

15) Urusan Kebudayaan

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan kebudayaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.46.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kebudayaan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Objek Pemajuan Kebudayaan yang	(Jumlah OPK yang dilestarikan : jumlah OPK	%	68,63	68,69

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
dilindungi, dikembangkan, dibina dan dimanfaatkan	terdaftar) x 100			
Persentase Peningkatan Kebudayaan Daerah	(Jumlah OPK yang dilestarikan : jumlah OPK terdaftar) x 100	%	68,63	68,69
Persentase Peningkatan Kesenian Tradisional	(Jumlah OPK yang dilestarikan : jumlah OPK terdaftar) x 100	%	25	25

Sumber: Dinas Kepemudaan. Olahraga. Kebudayaan. dan Pariwisata. 2025.

16) Urusan Perpustakaan

Adapun capaian indikator kinerja daerah urusan perpustakaan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.47.
Capaian Indikator Kinerja
Penyelenggaraan Urusan Perpustakaan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	Nilai TGM yang berasal dari Perpusnas RI	Nilai	69	82,09
Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Nilai IPLM yang berasal dari Perpusnas RI	Poin	76,5	72,84
Jumlah Kunjungan Masyarakat	Kunjungan Masyarakat dalam 1 tahun ke Perpustakaan Umum Daerah	Orang	20.736	20.741
Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	Keterlibatan Masyarakat DalamKegiatan Sosialisasi dalam 1 tahun	Orang	530	600

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 2025.

17) Urusan Kearsipan

Adapun capaian indikator kinerja daerah Urusan Kearsipan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.48.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Kearsipan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Indeks Kinerja Penyelenggaraan Kearsipan	Jumlah (60% x Nilai Pengawasan Eksternal + 40% x Nilai Pengawasan Internal)	Indeks	55.14	63,93
Nilai Pengawasan Kearsipan Internal	Rata-rata Nilai Pengawasan Kearsipan Internal Seluruh Perangkat Daerah	Nilai	60	62,59

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai Pengawasan Kearsipan Eksternal	Nilai	62	64,82
Nilai aspek kebijakan	Nilai aspek kebijakan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	19,5	11,32
Nilai aspek pembinaan	Nilai aspek pembinaan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	13,6	15,66
Nilai aspek pengelolaan arsip statis	Nilai aspek pengelolaan arsip statis hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	15,9	24,52
Nilai aspek sumber daya kearsipan	Nilai aspek sumber daya kearsipan hasil dari Laporan Pengawasan Kearsipan Eksternal Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Jawa Barat	Nilai	13	13,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah. 2025.

2.1.3.2. Penyelenggaraan Urusan Pilihan

Penyelenggaraan Urusan Pilihan Pemerintahan terdiri atas 6 (enam) bidang urusan pemerintahan, yakni kelautan dan perikanan, pariwisata, pertanian, perdagangan, perindustrian, dan transmigrasi. Adapun Penyelenggaraan Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan terdiri atas 5 (lima) bidang urusan yakni perencanaan, keuangan, kepegawaian pendidikan dan pelatihan, serta fungsi penunjang urusan lainnya. Penyelenggaraan urusan pemerintahan pilihan Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

1) Urusan Perikanan

Adapun capaian kinerja urusan Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.49.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perikanan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah produksi Perikanan Budidaya	Ton	10.000	9.989,71
Produksi produk hasil olahan perikanan	Jumlah produksi produk hasil olahan perikanan	Ton	310	373,42
Persentase peningkatan produksi olahan ikan	Jumlah produksi olahan ikan tahun berjalan- Jumlah produksi olahan ikan tahun sebelumnya / Jumlah produksi olahan ikan tahun sebelumnya x 100%	%	5	11,30

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Angka Konsumsi Ikan	Angka konsumsi ikan yang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik	Kg/Kapita/ Tahun	44	43,95
Persentase pembudidaya ikan yang produktif	Jumlah kelompok pembudidaya ikan yang produktif / Jumlah total kelompok pembudidaya ikan x 100%	%	80	59,17
Persentase peningkatan produksi benih ikan	Jumlah produksi benih ikan tahun berjalan - Jumlah produksi benih tahun lalu / Jumlah produksi benih ikan tahun lalu x 100%	%	5	5
Persentase sarana dan prasarana perikanan yang dimanfaatkan	Jumlah sarana dan prasarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana dan prasarana yang disediakan x 100%	%	100	100
IKM Pelayanan Pasar Ikan	Indeks Kepuasan Masyarakat UPTD PPI	Kategori (Indeks)	Baik (84)	Baik (85,19)

Sumber : Dinas Ketahanan pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025

2) Urusan Pariwisata

Adapun capaian kinerja urusan Pariwisata adalah sebagai berikut:

Tabel 2.50.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pariwisata

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase peningkatan wisatawan	(Jumlah wisatawan tahun n – jumlah wisatawan thn n-1) x 100	%	3,82	7,78
Persentase Peningkatan wisatawan yang Mengakses Informasi Pariwisata	((Jumlah akses terhadap media promosi tahun N-jumlah akses Tahun N-1) / Jumlah akses tahun N-1) x 100	%	13,35	13,45
Persentase kebutuhan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Profesional Yang Terpenuhi	(Jumlah jenis usaha pariwisata atau sub sektor ekraf yang dibina/ jumlah usaha pariwisata atau sub sektor ekraf) x 100	%	56,67	61,54

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kota Tasikmalaya, 2025.

3) Urusan Pertanian

Adapun capaian kinerja urusan Pertanian adalah sebagai berikut:

Tabel 2.51.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Pertanian

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan	Ton	75.000	61.364,40

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Jumlah Produksi Hortikultura dan Perkebunan	Ton	6.000	5.587,81
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	Produksi padi/luas panen hektar	Kw/Ha	62,65	61,52
Produksi Hasil Peternakan	Jumlah Produksi Hasil Peternakan	Ton	10.400	13.148
Persentase sarana peternakan yang dimanfaatkan	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	%	100	100
Persentase sarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	Jumlah sarana yang dimanfaatkan / Jumlah sarana yang disediakan x 100%	%	100	100
Persentase penyakit hewan yang tertanggulangi	jumlah penyakit hewan yang ditanggulangi / Jumlah penyakit hewan yang terjadi x 100%	%	100	100
Persentase bencana TPH yang terdeteksi dini dan tertanggulangi	Jumlah area bencana yang tertanggulangi (Ha) / Jumlah Areal Terkena Bencana x 100%	%	75	100
Persentase peningkatan kelas kelompok tani	Jumlah kelompok tani yang naik kelas dibagi jumlah kelompok tani x 100	%	5	5,68
IKM Pelayanan Rumah Potong Hewan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) UPTD RPH	Kategori (Indeks)	Baik (84)	Baik (85,19)
Persentase prasarana Tanaman Pangan, Hortikultura dan perkebunan yang dimanfaatkan	Jumlah prasarana yang dimanfaatkan/Jumlah prasarana yang disediakan x 100%	%	100	100

Sumber : Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan Kota Tasikmalaya, 2025

4) Urusan Perdagangan

Adapun capaian kinerja urusan Perdagangan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.52.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perdagangan

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase pertumbuhan PDRB sektor perdagangan	(PDRB sector perdagangan n – PDRB sector perdagangan n-1)/ PDRB sector Perdagangan n-1 x 100%	%	5,86	3,16
Persentase Pertumbuhan Nilai Ekpor	(Nilai eskpor tahun n – nilai ekpor tahun n-1)/ nilai ekpor tahun n-1 x 100 %	%	2	-36,06
Nilai Ekspor non migas	Nilai ekspor tahun n - tahun n-1)/ nilai ekspor tahun n-1 x 100%	(Juta)US$	33	19,8
Laju Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n	%	80	85

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
	- tahun n-1 / jumlah sarana perdagangan dalam kondisi baik tahun n-1) x 100%			
Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	Jumlah rekomendasi hasil pemantauan yang ditindaklanjuti/ jumlah rekomendasi hasil pemantauan x 100%	%	10	10
Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal	Jumlah konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu/ jumlah konsumen yang mengajukan pelayanan x 100%	%	80	100

Sumber : Dinas KUMKM, Perindag Kota Tasikmalaya, 2025.

5) Urusan Perindustrian

Adapun capaian kinerja urusan Tenaga Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 2.53.
Capaian Indikator Kinerja
Urusan Perindustrian

Indikator	Formulasi	Satuan	Target	Realisasi
Persentase Dokumen Perencanaan Industri yang Dimanfaatkan	Jumlah dokumen perencanaan industri yang dimanfaatkan / jumlah total dokumen perencanaan industri pada PPIK x 100%	%	100	100
Persentase Peningkatan Industri	Jumlah Industri tahun n - tahun n-1 / jumlah industri tahun n-1) x 100%	%	100	46

Sumber : Dinas KUMKM, Perindag Kota Tasikmalaya, 2025.

2.1.3.3. Regulasi dan Tata Kelola yang berintegrasi dan adaptif

1. Reformasi Hukum

Reformasi hukum bertujuan untuk mewujudkan sistem pemerintahan yang lebih baik, transparan dan tanggap terhadap peran publik dalam pengambilan keputisan atau kebijakan. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan penyusunan regulasi, baik dari sisi koordinasi, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan data base peraturan perundang- undangan. Indeks Reformasi Hukum merupakan instrumen untuk mengukur reformasi hukum dengan melakukan identifikasi dan pemetaan regulasi, reregulasi dan deregulasi aturan, dan penguatan sistem regulasi. Variabel yang diukur dalam penilaian Indeks Reformasi Birokrasi adalah 1). Tingkat koordinasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk melakukan harmonisasi regulasi/memperkuat koordinasi untuk melakukan harmonisasi regulasi; 2). Kompetensi ASN sebagai perancang peraturan perundangundangan (legal drafter) pusat yang berkualitas; 3). Kualitas re-regulasi atau deregulasi berbagai peraturan perundang-undangan berdasarkan

hasil reviu; 4). Penataan Database Peraturan Perundang-undangan. Berikut Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 dan 2024.

Gambar 2.31.
Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2024

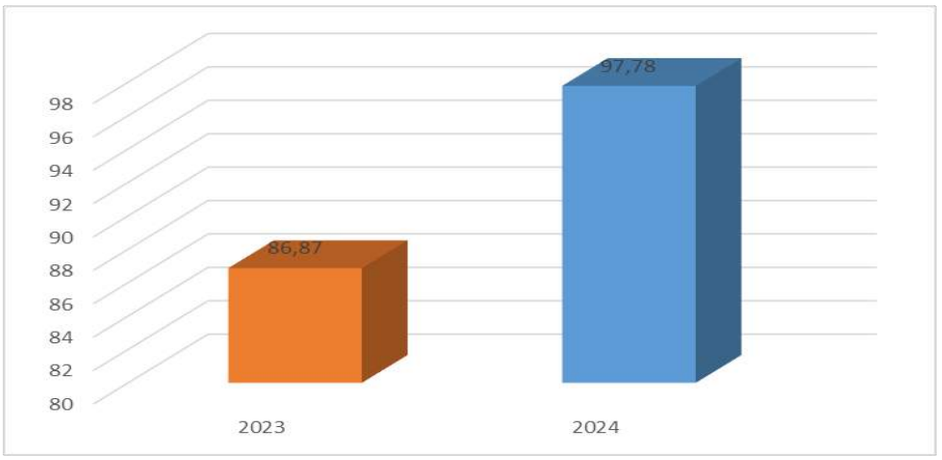

Sumber: Kementerian Hukum dan HAM, 2024

2. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada pengguna SPBE. Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan manajemen SPBE yang komprehensif melalui : penerapan manajemen resiko, keamanan informasi, manajemen data dan aset TIK, peningkatan kompetensi SDM, manajemen pengetahuan dan perubahan, serta penguatan layanan SPBE. Jenis layanan SPBE yang telah dimiliki oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya terdiri dari layanan administrasi dan layanan publik.

a. Layanan administrasi, meliputi layanan perencanaan, penganggaran, keuangan, pengadaan barang dan jasa, kepegawaian, kearsipan dinamis, pengelolaan barang milik daerah, pengawasan internal pemerintah, akuntabilitas kinerja organisasi, serta kinerja organisasi.
b. Layanan publik, meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, data terbuka, Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH), pendidikan dan komunikasi serta administrasi kelurahan.

Capaian Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2024 mencapai nilai 3,96 poin dengan predikat Sangat Baik, menunjukkan kemajuan besar dalam transformasi digital Pemerintah Kota Tasikmalaya dan konsisten peningkatan dari tahun ke tahun. Dan ini menunjukkan komitmen yang kuat terhadap penerapan prinsip-prinsip good governance melalui teknologi informasi. Berikut ini Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.54
Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai SPBE				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	-	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)	3,96 (SB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

3. Pelayanan Publik

Pelayanan publik merujuk pada beragam layanan yang disediakan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Pelayanan publik meliputi proses, ketersediaan, kualitas, dan aksesibilitas layanan yang memengaruhi kesejahteraan dan kepuasan masyarakat. Memahami esensi pelayanan publik menjadi penting dalam upaya meningkatkan efisiensi, transparansi, serta responsivitas instansi pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan harapan warga negara. Pelayanan publik di Kota Tasikmalaya terus mengalami perbaikan, hal ini dapat dilihat dari capaian Indeks Pelayanan Publik (IPP) sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.55

Indeks Pelayanan Publik Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Nilai IPP				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pelayanan Publik	3,63	3,67	4,18	3,47	4,40

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

IPP Kota Tasikmalaya menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun 2020 hingga 2022, namun menurun di tahun 2023, dan kembali meningkat di tahun 2024. Hal ini menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam beberapa aspek pelayanan publik seperti kebijakan pelayanan, profesionalisme Sumber Daya Manusia, sarana dan prasarana, sistem informasi pelayanan publik, konsultasi dan pengaduan, serta inovasi dalam layanan sesuai standar pelayanan publik yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

4. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) adalah serangkaian langkah yang dirancang untuk mengamankan akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. SAKIP berfungsi sebagai alat penilaian kinerja yang mendorong transparansi dan pertanggungjawaban dari kinerja serta fungsi Pemerintah Kota Tasikmalaya kepada masyarakat. Ini tercermin dalam laporan yang disampaikan, menjadi salah satu bentuk keterbukaan atas pencapaian dan pelaksanaan tugas.

Tabel 2.56
Nilai SAKIP Kota Tasikmalaya Tahun 2020 - 2024

Uraian	Nilai SAKIP				
	2020	2021	2022	2023	2024
SAKIP	70,84 (BB)	71,63 (BB)	70,73 (BB)	71,82 (BB)	71,11 (BB)

Sumber: Setda Kota Tasikmalaya, 2025.

Kinerja Pemerintah Kota Tasikmalaya dievaluasi berdasarkan indikator Kinerja Utama (IKU), yang mencerminkan keberhasilan dalam mencapai target pembangunan sesuai yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Secara umum, hasil penilaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) atau SAKIP Kota Tasikmalaya mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020 dan 2022 dimana terjadi penurunan. Penilaian SAKIP pada tahun 2022 mengalami penurunan dikarenakan terdapat komponen penilaian yang dihilangkan, dari 5

(lima) komponen perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaiaan sasaran kinerja, menjadi 4 (empat) komponen yakni perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal.

2.1.3.4. Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial

Konsep tersebut merupakan tiga pilar utama dalam membangun negara yang kuat, adil, dan demokratis. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang ketiga konsep tersebut. Hukum yang berkeadilan adalah hukum yang dapat menjamin keadilan dan kesetaraan bagi semua warga negara. Hukum ini harus dapat melindungi hak-hak asasi manusia, menghukum pelanggaran hukum, dan menjamin kepastian hukum. Keamanan nasional yang tangguh adalah kemampuan negara untuk melindungi keamanan dan keselamatan warga negara, serta menjaga kedaulatan dan integritas wilayah negara. Keamanan nasional ini harus dapat diwujudkan melalui kerja sama antara lembaga keamanan, pemerintah, dan masyarakat. Demokrasi substansional adalah demokrasi yang tidak hanya berfokus pada proses demokratis, tetapi juga pada hasil yang dicapai. Demokrasi ini harus dapat menjamin partisipasi aktif warga negara dalam proses pengambilan keputusan, serta menjamin bahwa keputusan yang diambil benar-benar mencerminkan kepentingan dan aspirasi warga negara.

Dengan demikian, ketiga konsep tersebut saling terkait dan harus diwujudkan secara simultan untuk mencapai tujuan negara yang kuat, adil, dan demokratis. Terdapat 3 Indikator dari Hukum Berkeadilan, Keamanan Nasional yang Tangguh, dan Demokrasi Substansial adalah sebagai berikut:

1. Indeks Pembangunan Hukum Disesuaikan dengan karakteristik daerah, dalam rumpun Arah Pembangunan (IE) yang sama

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melakukan berbagai upaya untuk melakukan perbaikan penyusunan regulasi, baik dari sisi koordinasi, peningkatan kualitas SDM, dan pengelolaan data base peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan kondisi Kota Tasikmalaya, yang digunakan dalam pengukuran adalah penanganan perkara di lingkungan Kota Tasikmalaya dan bantuan hukum untuk masyarakat miskin dari tahun 2020 s.d. 2024 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.57
Indeks Reformasi Hukum Kota Tasikmalaya Tahun 2023 - 2024

No.	Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Jumlah Perkara yang ditangani	5	8	8	7	4
2.	Jumlah Bantuan Bagi Masyarakat Misin	0	34	25	25	25

Sumber: Sekretariat Daerah, 2025

2. Keamanan, kententraman dan ketertiban umum

Pengukuran proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya (%) hanya sampai Provinsi , sesuai dengan keadaan Kota Tasikmalya tersebut yang digunakan adalah Jumlah tindakan kriminalitas di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019-2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.58
Jumlah Kasus Kriminalitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2024

No.	Uraian	Tahun					
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1	Kasus Narkoba	0	5	87	72	87	83
2	Kasus Pembunuhan	1	3	1	2	2	1
3	Kasus seksual	26	35	32	1	68	7
4	Kasus Penganiayaan	43	39	4	38	109	44
5	Kasus Pencurian	77	69	70	4	90	80
6	Kasus Penipuan	96	105	67	88	207	70
7	Kasus Pemalsuan Uang	1	0	1	0	0	1
8	Pidana Lainnya	98	122	120	109	0	179
Jumlah Tindak Kriminal selama 1 tahun		366	376	327	246	1.079	465

Sumber: Polresta Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

3. Indeks Demokrasi Indonesia

Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk mengukur tingkat perkembangan demokrasi berdasarkan kebebasan sipil,hak-hak politik dan Lembaga demokrasi, indeks Demokrasi Indonesia (IDI) untuk Kota Tasikmalaya tidak secara spesifik disebutkan dalam data yang saya temukan. Namun, Provinsi Jawa Barat yang meliputi Kota Tasikmalaya memiliki nilai IDI yang berfluktuasi dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2021, nilai IDI Provinsi Jawa Barat adalah 79,72, meningkat menjadi 83,34 di tahun 2022, dan kemudian menurun menjadi 83,04 di tahun 2023.

Berkaitan dengan impelementasi nilai demorasi yaitu bagaimana Tingkat partisipasi pemilih pada pelaksanaan pemilihan umum. Angka Partisipasi Pemilu (APP) adalah persentase jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilu dibandingkan dengan jumlah warga negara yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) atau jumlah pemilih yang memiliki hak pilih pada pemilu tersebut. Antusiasme masyarakat dalam memberikan suaranya pada Pemilu di Kota Tasikmalaya dapat dikatakan sangat baik, hal ini terlihat dari jumlah partisipasi pemilih yang persentasenya diatas 80 persen. Berikut adalah partisipasi Pemilih dalam Pemilu di Kota Tasikmalaya:

Tabel 2.59
Partisipasi Pemilu Kota Tasikmalaya

No.	Pemilu	Partisipasi Pemilih
1.	Pemilu Legislatif 2014	82,82%
2.	Pemilu Presiden 2014	81,05%
3.	Pilkada Kota Tasikmalaya 2017	81,65%
4.	Pemilu Jabar 2018	81,05%
5.	Pemilu Tahun 2019	87,49%
6.	Pemilu Legislatif Tahun 2024	86,08%
7.	Pilkada Tahun 2024	76,90%

Sumber : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Tasikmalaya, 2025

2.1.3.5. Ketangguhan Diplomasi dan Pertahanan Berdaya Gentar Kawasan

1. Daya Saing Daerah

Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kota Tasikmalaya memiliki skor tinggi dari Sumber Daya Manusia dan Pasar. Komponen yang belum mendaptkan nilai optimal di lingkungan pendukung dan ekosistem inovasi. Lebih rinci dapat melihat tabel berikut:

Tabel 2.60
Komponen IDSD Kota Tasikmalaya

Komponen IDSD	Score
Lingkungan Pendukung	3,66
Sumber Daya Manusia	3,88
Pasar	3,74
Ekosistem Inovasi	3,33

Sumber: BRIN, 2025

Selain itu nilai IDSD Kota Tasikmalaya jika dibandingkan dengan Nasional, dan Kota-Kota Provinsi Jawa Barat, Kota Tasikmalaya memiliki nilai yang cukup baik (lihat Gambar A.). Dimana nilai IDSD Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 lebih tinggi dibandingkan dengan Nasional. Namun jika dibandingan nila Provinsi Jawa Barat nilai lebih rendah.Dapat diliat dari nilai IDSD kota-kota di Jawa Barat umumnya lebih tinggi di bandingkan di Kota Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya diperingkat ke-5 dari 9 Kota-Kota di Jawa Barat. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Tasikmalaya yang harus segera diperbaiki untuk meningkatkan daya saing daerah, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya. Dengan hasil pembahasan sebelumnya Pemerintah Kota Tasikmalaya harus meningkatkan pilar lingkungan pendukung terutama infrastruktur dan stabilitas ekonomi makro serta kapabilitas inovasi.

Namun jika melihat perkembangan IDSD Kabupaten Kota sekitar Priangan Timur, Kota Tasikmalaya lebih unggul dibandingkan dengan daerah sekitarnya (lihat Gambar B.). Hal tersebut menjadi modal bagi Kota Tasikmalaya terus menjadi pusat pedagangan di Priangan Timur.

Gambar 2.31
Perbandingan Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dengan, Nasional, Jawa Barat dan Kota- Kota di Jawa Barat

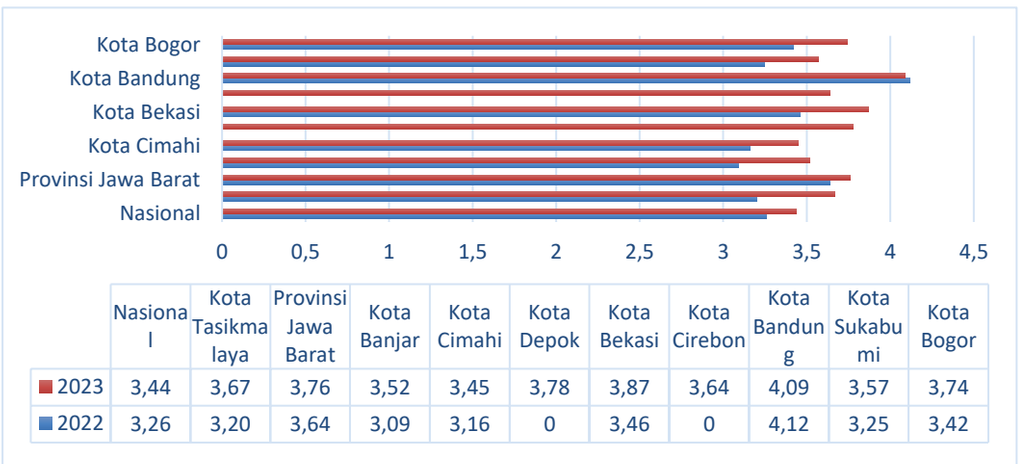

	Nasional	Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	Kota Cimahi	Kota Depok	Kota Bekasi	Kota Cirebon	Kota Bandung	Kota Sukabumi	Kota Bogor
2023	3,44	3,67	3,76	3,52	3,45	3,78	3,87	3,64	4,09	3,57	3,74
2022	3,26	3,20	3,64	3,09	3,16	0	3,46	0	4,12	3,25	3,42

Sumber : Bapelitbangda Diolah, 2025

Gambar 2.32
Perbandingan Nilai IDSD Kota Tasikmalaya dengan, Nasional, Jawa Barat dan Kota- Kota di Jawa Barat

	Nasional	Kota Tasikmalaya	Provinsi Jawa Barat	Kota Banjar	Kab. Ciamis	Kab. Tasikmalaya	Kab. Garut	Kab. Pangandaran
2023	3,44	3,67	3,76	3,52	3,51	3,32	3,37	0
2022	3,26	3,20	3,64	3,2	3,1	2,88	2,96	3,01

Sumber : Bapelitbangda Diolah, 2025

2.1.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.1.4.1. Daya Saing Sumber Daya Manusia

1. Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Capaian angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Kota Tasikmalaya dari tahun 2019 hingga 2024 terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2019 capaian rata-rata lama sekolah penduduk 15 tahun keatas di Kota Tasikmalaya sebesar 9,13 tahun meningkat perlahan setiap tahun hingga mencapai 9,54 tahun pada tahun 2023 artinya bahwa secara rata-rata penduduk Kota Tasikmalaya usia 15 tahun ke atas telah bersekolah selama 9,63 tahun, atau telah menyelesaikan pendidikan hingga kelas I SMA.

Gambar 2.33
Capaian Angka Rata-rata Lama Sekolah

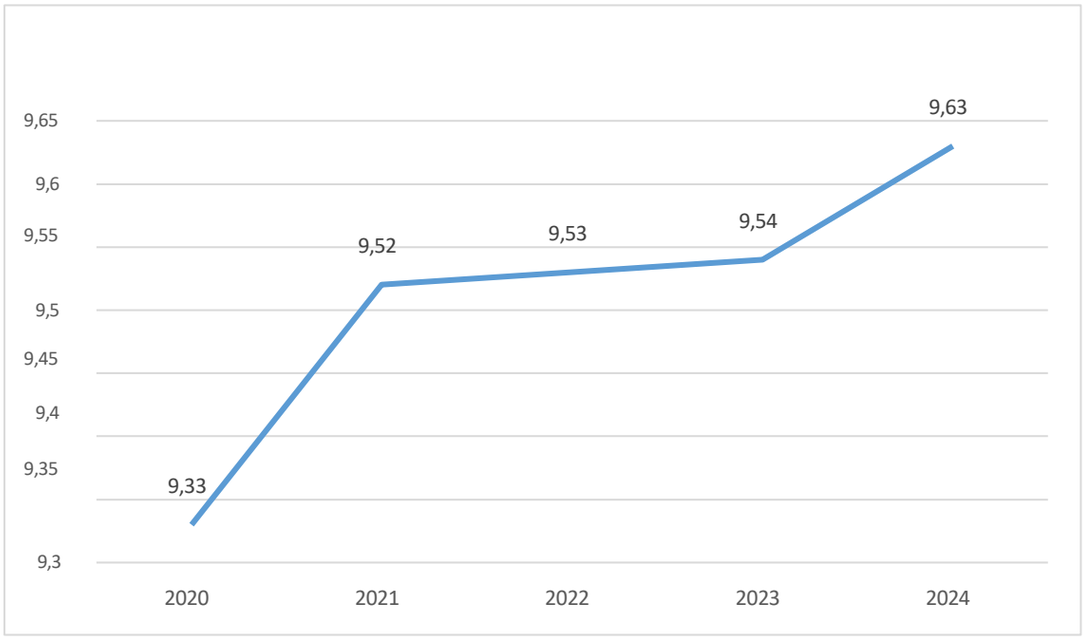

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

2. Harapan Lama Sekolah

Sesuai dengan metode penghitungan baru IPM pada Tahun 2010, ada pergantian indikator bidang pendidikan yang semula Angka Melek Huruf (AMH) menjadi Harapan Lama Sekolah (HLS). HLS didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019-2024 terus mengalami peningkatan. Angka HLS Kota Tasikmalaya pada tahun 2019 adalah 13,44 dan meningkat hingga pada tahun 2024 angka HLS ada pada angka 13,50 tahun. Dengan kata lain lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu (7 tahun) di masa mendatang memiliki peluang untuk menamatkan pendidikan mereka hingga D1 atau D2. Secara lebih rinci dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 2.34
Capaian Harapan Lama Sekolah

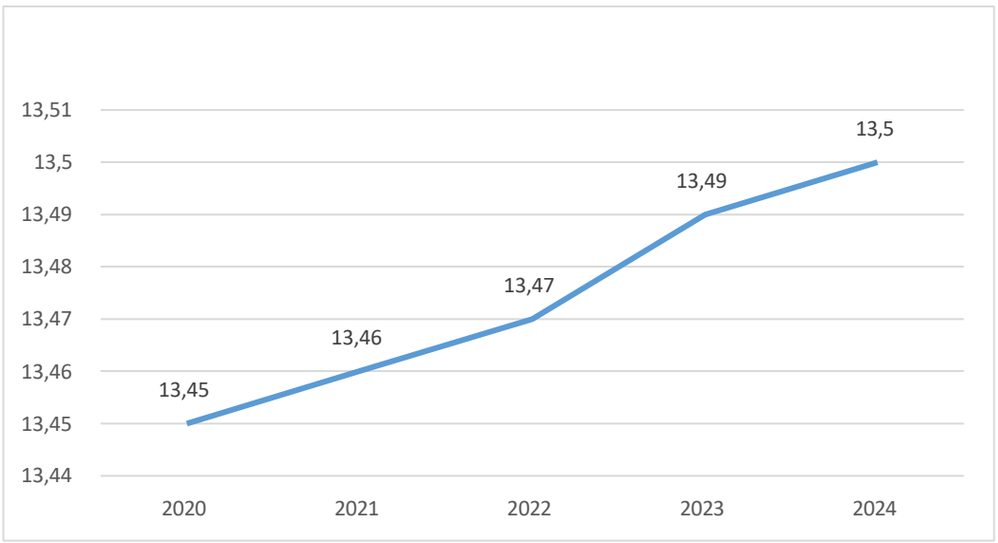

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

3. Literasi Masyarakat

Indikator untuk melihat perkembangan pembangunan litersi yakni Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM), yang terdiri dari Pemerataan Layanan Perpustakaan (UPLM 1), Ketercukupan Koleksi Perpustakaan (UPLM2), Ketercukupan Tenaga Perpustakaan (UPLM3), Tingkat Kunjungan Masyrakat per Hari (UPLM4), Perpustakaan ber-SNP (UPLM5), Keterlibatan Masyarakat dalam Kegiatan Sosialisasi (UPLM6), Anggota Perpustakaan (UPLM7). Pengukuran IPLM dilaksanakan oleh Perpustakaan Nasional RI dan mulai dihitung pada tahun 2021 dan menghasilkan nilai IPLM pada tahun 2022, Kota Tasikmalaya tercatat sebesar 79,68 dan berada di atas posisi Jawa Barat sebesar 72,73. Pada tahun 2023, IPLM di seluruh Kota Kabupaten dan Provinsi di Indonesia mengalami penurunan, namun demikian IPLM Kota Tasikmalaya masih di atas provinsi Jawa Barat dengan nilai 76,45 dan provinsi Jawa Barat sebesar 60,02.

Tabel 2.61
IPLM Kota Tasikmalaya dan Jawa Barat Tahun 2022 dan 2023

Tahun	IPLM Kota Tasikmalaya	IPLM Jawa Barat
2022	79,68	72,73
2023	76,45	60,02
2024	72,84	-

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

2.1.4.2. Iptek, Inovasi dan Produktivitas Ekonomi

1. Rasio PDRB Industri Pengolahan

Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang mencerminkan rasio hasil nilai tambah sektor industry pengolahan dengan total nilai PDRB. Semakin besar nilai PDRB yang dihasilkan oleh sektor industri pengolahan, semakin tinggi proporsinya terhadap Produk Domestik Regional Bruto per daerah. Peranan kategori Industri Pengolahan di Kota Tasikmalaya selama lima tahun terakhir terus menurun. Pada tahun 2020 perannya terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya sebesar 14,13 persen, terus menurun hingga pada tahun 2024 menjadi 13,41 persen.

Meskipun demikian, peranan kategori industri pengolahan masih berada di urutan ketiga terbesar penyumbang PDRB Kota Tasikmalaya. Pertumbuhan kategori Industri Pengolahan selama lima tahun terakhir cukup berfluktuatif. Pada tahun 2020 dengan adanya pandemi COVID-19 mengalami kontraksi (-1,94), kemudian pada tahun 2021 dan 2024 mengalami percepatan pertumbuhan.

Tabel 2.62
Pertumbuhan PDRB Kota Tasikmalaya Kategori Industri Tahun 2020 - 2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	21.589,36	22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77
PDRB Kategori Industri Pengolahan ADHB (Miliar Rupiah)	3.051,33	3.159,59	3.450,78	3.669,23	3.971,11
Peranan Kategori Industri Pengolahan (%)	14,13	13,83	13,82	13,39	13,41
Laju Pertumbuhan Kategori Industri Pengolahan	-1,94	1,91	5,39	3,35	5,46

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Industri pengolahan di Kota Tasikmalaya digerakkan oleh Industri Kecil Menengah (IKM). Industri Kecil dan Menengah (IKM) merupakan salah satu sektor usaha yang mempunyai peranan cukup strategis dalam menggerakkan perekonomian nasional. Disamping mampu menyerap tenaga kerja dan menyediakan lapangan usaha secara dominan, IKM juga memberikan kontribusi pendapatan bagi masyarakat luas. IKM Kota Tasikmalaya terus tumbuh baik unit industri maupun penyerapan tenaga kerja. Mengacu dari data NIB yang dikeluarkan oleh DPMPTS dan IUI Dinas KUKM Perindag, Unit industri Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mampu tumbuh 183,5 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Pertumbuhan unit industri ini dipacu adanya *self declare* sertifikasi halal dari Kementerian Agama.

2. Rasio PDRB Akomodasi Makanan dan Minum

Proporsi PDRB Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum adalah persen bagian PDRB regional yang dikontribusikan oleh aktivitas terkait pariwisata meliputi:

1. Penyediaan Akomodasi bagi Wisatawan
2. Penyediaan Jasa Makan dan Minum

Merujuk pada hasil analisis tipologi Klassen berdasarkan Sektor Ekonomi terhadap Provinsi, sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum menjadi ekonomi yang menjadi unggulan di Kota Tasikmalaya. Kontribusi sektor ini terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya cenderung signifikan dibandingkan dengan kontribusinya terhadap perekonomian Provinsi Jawa Barat secara umum. Selain itu, sektor ini juga memiliki laju pertumbuhan yang lebih tinggi di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan pertumbuhannya di tingkat provinsi. Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum juga menjadi Sektor Ekonomi unggulan Kota Tasikmalaya terhadap Priangan Timur.

Tahun 2024, kontribusi kategori ini terhadap PDRB Kota Tasikmalaya sebesar 1,85 triliun rupiah atau 6,26 persen. Peranannya terhadap PDRB relatif meningkat dari tahun ke tahun. Hal ini seiring dengan tumbuhnya usaha kuliner di Kota Tasikmalaya.

Laju pertumbuhan di tahun 2020 mengalami kontraksi sebesar 3,59

persen, karena adanya COVID-19 dan kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang dilakukan. Meskipun laju pertumbuhan pada tahun 2023 cukup tinggi mencapai 9,26 persen, tetapi jika dibandingkan tahun 2022 mengalami perlambatan. Hal ini karena pada tahun 2022 konsumsi masyarakat pada kategori ini sedang dalam kondisi puncak pasca dicabutnya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar).

Tabel 2.63
Pertumbuhan PDRB Akomodasi Makanan dan Minum Tahun 2020-2024

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
PDRB ADHB (Miliar Rupiah)	21.589,36	22.844,02	24.974,68	27.411,43	29.612,77
PDRB Kategori Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (Miliar Rupiah)	1.148,59	1.209,65	1.440,33	1.650,45	1.854,29
Peranan (%)	5,32	5,3	5,77	6,02	6,26
Laju Pertumbuhan	-3,59	2,39	14,03	9,26	7,67

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Peningkatan kebutuhan penyediaan akomodasi dan makan minum akan terus meningkat seiring dengan bertambahnya kunjungan wisatawan ke Kota Tasikmalaya.

3. Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif

Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi.

Menurut klasifikasi industri, di Kota Tasikmalaya terdapat 22 jenis industri. Data Tahun 2024 dari Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan menunjukan jumlah perusahaan yang terlibat dalan industri pengolahan di Kota Tasikmalaya berjumlah 9.736 perusahaan. Tenaga Kerja yang terserap di sektor industri pengolahan mencapai 17.058 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.87.559,29 miliar. Industri kreatif mendominasi industri pengolahan yang ada di Kota Tasikmalaya dari aspek jumlah perusahaan (98,8%), serapan tenaga kerja (98,2%) dan nilai investasi (98,9%). Industri kreatif yang ada di Kota Tasikmalaya ada di sub sektor kuliner, kriya dan fesyen

Tabel 2.64
Jumlah Perusahaan, Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kreatif Menurut Klasifikasi Industri di Kota Tasikmalaya, 2024

Sub Sektor Ekonomi Kreatif	Klasifikasi Industri	Perusahaan	Tenaga Kerja	Nilai Investasi
Kuliner	Makanan	8.017	12.097	61.383.114.000
	Minuman	568	868	16.489.315.000
Kriya	Kulit, Barang dari Kulit dan Alas Kaki	42	192	835.000.000
	Tekstil	56	453	361.500.000
	Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	306	547	2.480.060.000
Fesyen	Pakaian Jadi	633	2.591	5.840.600.000
Jumlah		9.622	16.748	86.589.589.000

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah)

Total perusahaan ekonomi kreatif di Tasikmalaya mencapai 9.622 usaha, dengan 16.748 tenaga kerja dan total investasi sebesar Rp86,59 miliar. Mayoritas usaha berskala mikro dan kecil, terlihat dari jumlah tenaga kerja yang relatif sedikit dibandingkan jumlah perusahaan. Nilai investasi terbesar berada di sektor kuliner, menunjukkan daya tarik yang lebih tinggi dibandingkan subsektor lainnya.

Ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan, terutama dalam subsektor kuliner dan kriya. Subsektor kuliner merupakan yang paling dominan dalam ekonomi kreatif Kota Tasikmalaya, baik dari jumlah perusahaan, tenaga kerja, maupun nilai investasi. Industri makanan mendominasi industri kreatif dengan 8.017 perusahaan yang menyerap 12.097 tenaga kerja, dan nilai investasi mencapai Rp61,38 miliar. Industri minuman memiliki skala lebih kecil, dengan 568 perusahaan, 868 tenaga kerja, dan investasi sebesar Rp16,49 miliar. Hal ini menunjukkan bahwa industri makanan dan minuman memiliki daya tarik investasi tinggi serta menjadi sektor utama dalam perekonomian kreatif Tasikmalaya.

Industri kriya, yang mencakup barang berbahan kulit, tekstil, kayu, dan anyaman, memiliki jumlah usaha yang lebih sedikit dibandingkan kuliner, tetapi tetap berkontribusi pada ekonomi lokal. Industri Kulit dan alas kaki menunjukkan skala kecil dengan 42 perusahaan dan 192 tenaga kerja, tetapi memiliki nilai investasi tinggi mencapai Rp835 juta, menunjukkan kemungkinan produk bernilai tinggi atau berbasis ekspor. Industri tekstil memiliki lebih banyak tenaga kerja (453 orang) tetapi nilai investasi lebih kecil (Rp361,5 juta), yang mungkin menunjukkan usaha skala mikro atau kecil dengan margin keuntungan lebih rendah. Industri barang dari kayu, bambu, dan rotan juga cukup signifikan, dengan 306 perusahaan, 547 tenaga kerja, dan investasi Rp2,48 miliar. Ini menunjukkan bahwa kerajinan berbahan alami masih memiliki pasar dan peluang untuk berkembang.

Subsektor Fesyen merupakan ekonomi dengan peluang besar. Industri pakaian jadi menjadi sektor yang cukup berkembang dengan 633 perusahaan, menyerap 2.591 tenaga kerja, dan memiliki nilai investasi sebesar Rp5,84 miliar. Walaupun kontribusi investasi lebih kecil dibandingkan kuliner, industri fesyen memiliki potensi untuk berkembang lebih jauh, terutama dengan pemasaran digital dan tren fesyen lokal yang semakin diminati.

Ekonomi kreatif di Kota Tasikmalaya masih didominasi oleh sektor kuliner, diikuti oleh kriya dan fesyen. Meskipun banyak usaha masih dalam skala kecil, peluang untuk berkembang tetap besar, terutama dengan dukungan inovasi digital, peningkatan keterampilan tenaga kerja, serta akses pasar yang lebih luas. Pemerintah daerah dan pelaku usaha perlu bersinergi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi kreatif ini agar lebih berdaya saing.

4. Rasio Kewirausahaan

Potensi koperasi dan UMKM di Kota Tasikmalaya cukup besar baik dari jumlah koperasi, pelaku usaha mikro kecil maupun peredaran uang di sektor ini. Sampai dengan tahun 2023. jumlah koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 641 buah koperasi dengan jumlah anggota koperasi 97.948 orang.

Koperasi berkualitas merupakan koperasi yang memiliki kinerja baik dalam bidang kelembagaan, usaha, keuangan serta bermanfaat bagi anggota sebagai badan hukum aktif dinilai dari koperasi aktif (yang melaksanakan RAT) yang meningkat volume usaha dan assetnya. Koperasi berkualitas di Kota

Tasikmalaya pada tahun 2023 baru mencapai 45 koperasi atau 37,50 persen dari koperasi yang melaksanakan RAT Tahun 2023. Berikut adalah sebaran koperasi yang berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023.

Tabel 2.65
Sebaran Koperasi Berkualitas di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

No	Kecamatan	Jumlah Koperasi Yang Meningkat Kualitasnya Berdasarkan Rat				Jumlah Koperasi Berkualitas
		RAT	Volume Usaha	Asset	Jumlah	
1	Cihideung	16	23.150.409.100,56	33.147.657.723,61	56.298.066.824,71	5
2	Cipedes	16	20.916.360.390,58	52.424.150.140,36	73.340.510.530,94	6
3	Tawang	30	60.688.558.828,84	93.810.860.527,44	154.499.419.356,28	15
4	Indihiang	17	12.325.004.156,00	18.560.872.749,33	30.885.876.905,33	6
5	Kawalu	3	6.834.283.735,00	11.339.725.040,00	18.174.008.775,00	0
6	Cibeureum	10	6.188.569.522,00	8.651.097.778,00	14.839.667.300,00	3
7	Tamansari	8	3.042.709.476,00	5.310.023.540,80	8.352.733.016,80	3
8	Mangkubumi	8	15.838.988.475,00	25.813.404.171,06	41.652.392.646,76	3
9	Bungursari	6	14.028.186.772,00	15.898.657.917,50	29.926.844.689,50	2
10	Purbaratu	6	5.027.705.584,00	7.864.622.818,00	12.892.328.402,00	2
Jumlah		120	168.040.776.039,98	272.821.072.406,10	440.861.848.447,32	45

Sumber: Dinas KUMKM Perindag Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2023 koperasi yang telah mendapatkan Nomor Induk Koperasi di Kota Tasikmalaya sebanyak 207 koperasi bertambah 10 koperasi dari tahun 2022 yang sebanyak 197 koperasi. Hasil penilaian kesehatan koperasi yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM, Perdagangan dan Perindustrian Kota Tasikmalaya Tahun 2023 mencapai 11,2 persen.

Usaha ekonomi produktif di Kota Tasikmalaya, didominasi oleh jenis usaha mikro. Pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya yang sudah mendapatkan perizinan mencapai 17.512 pelaku usaha meningkat tajam dari data tahun 2022 yang mencapai 6.370 pelaku usaha. Hal ini terjadi karena adanya program self declare sertifikasi halal dari Kemeterian Agama RI untuk pelaku usaha mikro yang mana kehalalan produk didasari pada pernyataan pelaku usaha kemudian diverifikasi oleh pendamping PPH dari organisasi kemasyarakatan Islam, lembaga keagamaan Islam, maupun perguruan tinggi (BPJPH 2021). Program self declare sertifikasi halal hanya mensyaratkan usaha mikro untuk mempunyai izin. Berbeda dengan program sertifikasi halal reguler, sertifikasi halal membutuhkan pengujian kehalalan produk oleh LPH. Hal ini menyebabkan pelaku usaha mikro berbondong-bondong mengajukan izin yang dapat dilakukan secara online. Menurut data OSS Kota Tasikmalaya pada tahun 2023 jumlah usaha mikro di Kota Tasikmalaya sebanyak 17.512 unit usaha.

Usaha mikro di Kota Tasikmalaya menyerap tenaga kerja cukup banyak. Pada tahun 2023 usaha mikro menyerap tenaga kerja sebanyak 16.562 orang yang terdiri dari 13.791 orang laki-laki dan 2.771 orang perempuan. Artinya usaha mikro ini mampu membayar buruh tetap dalam melaksanakan usahanya. Kalau jumlah orang yang berusaha dibantu buruh tetap dibandingkan dengan total angkatan kerja akan membentuk rasio kewirausahaan. Pada tahun 2023 dengan angkatan kerja sebanyak 369.778 maka rasio kewirausahaan di Kota Tasikmalaya mencapai 4,47 persen.

Pengembangan lapangan usaha unggulan dan potensial Kota Tasikmalaya perlu terus ditingkatkan untuk kesejahteraan masyarakat dan generasi mendatang. Untuk itu pengembangan lapangan usaha unggulan dan potensial serta pembangunan pada umumnya harus memperhatikan dan tidak merusak lingkungan. Pembangunan harus berkelanjutan dengan menciptakan keseimbangan antara aktivitas manusia dan alam.

Saat ini proses pengembangan usaha mikro baik sektor industri maupun pertanian dan perikanan di Kota Tasikmalaya masih menghasilkan limbah yang belum tertangani dengan baik, juga masih banyak menggunakan bahan anorganik dalam proses produksi yang berkontribusi terhadap emisi gas rumah kaca.

5. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja

Jumlah penduduk usia kerja di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 573.652 orang meningkat sebesar 8.559 orang dari tahun 2023. Dari 573.652 orang penduduk usia kerja ini, sebanyak 395.357 orang (68,92 persen) merupakan angkatan kerja, sedangkan sisanya sebesar 178.295 (31,08 persen) tergolong bukan angkatan kerja. Memperhatikan komposisi angkatan kerja Kota Tasikmalaya, sebagian besar didominasi oleh penduduk bekerja dengan persentase 93,51 persen atau 369.713 orang terdiri dari 228.642 orang laki-laki dan 141.071 orang perempuan. Sisanya adalah pengangguran dengan persentase sebesar 6,49 persen.

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kota Tasikmalaya selama 3 (tiga) tahun terakhir cenderung menurun. Penurunan TPAK Kota Tasikmalaya didorong oleh belum pulihnya ekonomi sebagai dampak pandemi Covid-19 yang mengakibatkan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) dan sulitnya mencari pekerjaan.

Gambar 2.35
TPAK Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

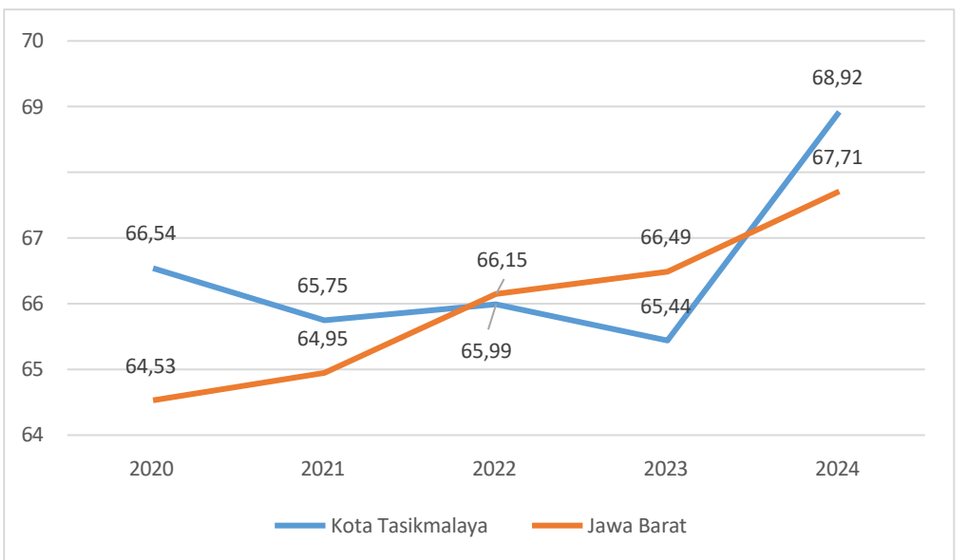

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025.

Apabila dibandingkan dengan capaian TPAK dengan provinsi Jawa Barat dan daeral lainnya di priangan timur, maka dapat dilihat pada gambar berikut.

Gambar 2.36
Perbandingan TPAK Kota Tasikmalaya dengan Kab/Kota
se-Priangan Timur Tahun 2024

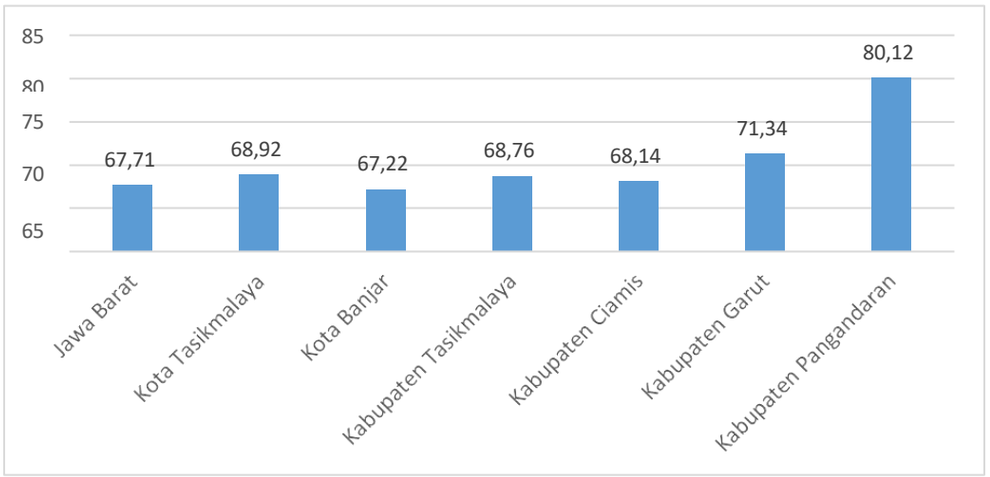

Sumber: BPS Provinsi Jawa Barat, 2025.

Berdasarkan jenis kelamin, TPAK laki-laki pada tahun 2023 mencapai 80,63 persen, sedangkan TPAK perempuan adalah 49,94 persen. Perkembangan TPAK berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada tabel di bawah ini

Tabel 2.66
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Berdasarakan Jenis Kelamin
Tahun 2020-2024

Tahun	TPAK Laki-Laki(%)	TPAK Perempuan(%)
2020	79,58	55,65
2021	79,84	51,65
2022	83,72	48,25
2023	80,63	49,94
2024	*-	*-

*Ket *- : Belum Rilis*
Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024

Pada tahun 2023 sebagian besar pekerja di Kota Tasikmalaya bekerja di sektor jasa sebanyak 217.125 orang (62,84 persen), kemudian di sektor manufaktur sebanyak 111.506 orang (32,27 persen) serta sisanya sebanyak 16.913 orang (4,89 persen) bekerja di sektor pertanian. Produktivitas tenaga kerja sektor industri/manufaktur Rp.32,91 juta/orang/tahun dan produktivitas tenaga kerja sektor jasa sebesar Rp.82,53 juta/orang/tahun.

Pada tahun 2024 dari 369.713 penduduk yang bekerja, didominasi lulusan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama 196.861 orang disusul lulusan sekolah menengah atas sebanyak 124.757 orang dan 48.095 orang lulusan perguruan tinggi. Dominasi lapangan pekerjaan utama di sektor jasa dan manufaktur sangat rentan terhadap kondisi ekonomi apalagi dengan tingkat pendidikan yang rendah.

Peningkatan kualitas pekerja dan pencari kerja merupakan pekerjaan rumah yang berat, salahsatunya disebabkan oleh belum tersedianya Balai Latihan Kerja (BLK) milik pemerintah Kota Tasikmalaya ataupun perguruan tinggi lokal yang mempunyai program vokasi. Untuk meningkatkan kapasitas calon tenaga kerja atau pencari kerja, Pemerintah Kota Tasikmalaya memberikan pelatihan baik secara mandiri maupun bekerjasama dengan 58 LPK (Lembaga Pendidikan dan Latihan) yang ada di Kota Tasikmalaya. Selain

itu menjaga stabilitas ekonomi untuk menciptakan kondusifitas usaha mikro dan kecil sangatlah penting supaya tidak terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

6. Ketergantungan Penduduk

Kota Tasikmalaya yang memiliki jumlah penduduk besar, tentunya akan semakin memiliki daya saing SDM yang baik jika rasio ketergantungannya rendah. Jika dilihat tren dalam beberapa tahun terakhir, angka ketergantungan Kota Tasikmalaya cenderung membaik dan masih di bawah angka nasional. Pada tahun 2023, angka ketergantungannya sebesar 45,30, artinya setiap 100 orang yang berusia produktif mempunyai tanggungan sebanyak 45 orang yang belum produktif atau tidak produktif lagi.

Gambar 2.37
Angka Ketergantungan Kota Tasikmalaya Tahun 2019-2023

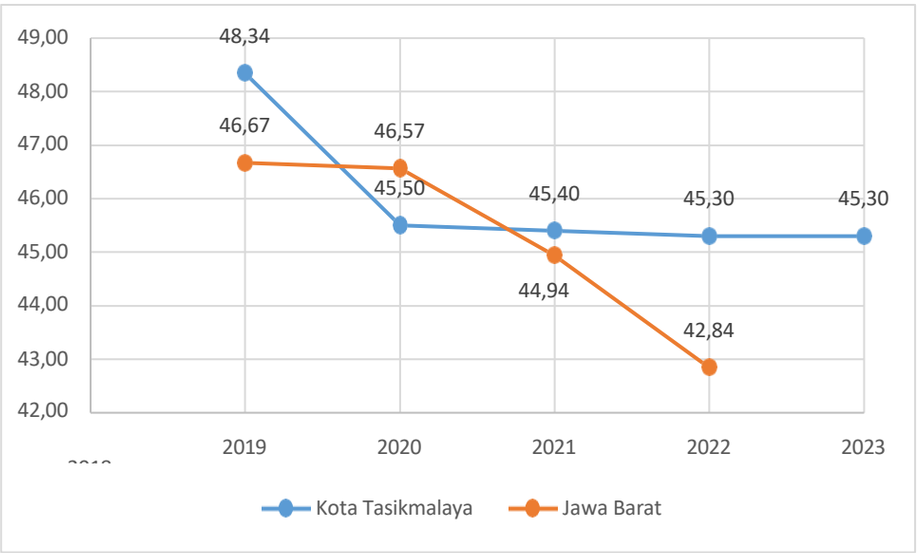

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2024.

7. Indeks Inovasi Daerah

Pemerintah Kota Tasikmalaya pun telah aktif dalam mengembangkan inovasi daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat. Tercatat bahwa Indeks Inovasi Kota Tasikmalaya terus naik dari tahun 2021-2024 sebesar 12,95, seperti tertera dalam Tabel di bawah ini

Tabel 2.67
Indeks Inovasi Kota Tasikmalaya 2021-2024

Tahun	2021	2022	2023	2024
Indeks Inovasi	36,43 (inovatif)	38,70 (inovatif)	46,70 (inovatif)	49,38 (inovatif)

Sumber: BRIN, 2025

Inovasi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya mendapatkan apresiasi baik lokal, Provinsi dan Nasional. Berikut Inovasi yang mendapatkan penghargaan.

Tabel 2.68
Inovasi yang dikembangkan pemerintah dan masyarakat Kota Tasikmalaya mendapatkan apresiasi baik / mendapatkan penghargaan

NO.	NAMA INOVASI	RUANG LINGKUP INOVASI	TAHUN	PERINGKAT	TINGKAT
1	PROTASIK Ver. 2.0 (Profil Tanah Milik Pemerintah Kota Tasikmlaya Versi 2.0)	Pengelolaan Aset Tanah	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
2	GENTING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting)	kesehatan (stunting)	2024	Juara III Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
3	Aplikasi Golden 1000, Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya	Kesehatan Anak	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
4	Box Sampah Pintar Berbasis AI dan IoT, Universitas Siliwangi	Persampahan	2024	Top 50 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
5	Vertical Sealer Sederhana	UMKM	2024	Juara II Lomba TTG Provinsi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
6	Kompos Juara: Recycle Faecal Waste Menggunakan Smart Machine Compost Sebagai Solusi Alternatif Penanganan Limbah Terpadu di UPTD Singkup	Sanitasi (Limbah Domestik)	2022	Top 45 Kompetisi Inovasi Jawa Barat	Provinsi Jawa Barat
7	Layar Kusumah (Layanan Antar Sampai Ke Rumah)	Sosial	2022	Terbaik 15 Besar Program Integrated Sustainabalitiy Indonesia Movement (I-SIM) for Cities 2022	Nasional

Sumber: Bappelitbangda, Diolah 2025

2.1.4.3. Penerapan Ekonomi Hijau dan Biru

1. Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi hijau adalah model pembangunan ekonomi untuk menunjang pembangunan berkelanjutan dengan fokus pada investasi, kapital dan infrastruktur, lapangan kerja dan keterampilan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan.

Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada prinsipnya terdapat tiga pilar namun, dengan menyesuaikan dengan kapasitas, kewenangan, akses data, dan rencana pelaporan kedepan di tingkat kabupaten/kota maka Indeks Ekonomi Hijau yang diturunkan ke kabupaten/kota adalah “Indeks Ekonomi Hijau Daerah Pada Pilar Ekonomi” artinya untuk tingkatan kabupaten/kota cukup diukur sampai dengan pilar ekonomi dengan parameter yang ditentukan oleh provinsi. Terkait pilar sosial dan pilar lingkungan tidak menjadi pilar yang dievaluasi di tingkat kabupaten/kota sehubungan hampir seluruh parameter pada 2 pilar tersebut sudah tergambarkan pada indikator tersendiri/terpisah pada dokumen perencanaan kabupaten/kota sebagai turunan indikator juga dari provinsi.

Pada tahun 2023 Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi mencapai 58,46 poin yang diklasifikasi dalam kategori Baik Tier 1. Nilai indikator pembentuk Indeks Ekonomi Hijau Kota Tasikmalaya pada pilar ekonomi adalah:

a. Produktivitas Akuakultur mencapai 14,82 ton/hektar.
b. Produktivitas Padi mencapai 5,19 ton/hektar.
c. Produktivitas Tenaga Kerja Industri mencapai Rp.32.906.121,64 per kapita.
d. Produktivitas Tenaga Kerja Jasa mencapai Rp.82.527.576,28 per kapita.
e. PDRB Perkapita mencapai 2.393,92 USD.

2. Ekonomi Biru

Ekonomi biru merupakan konsep pembangunan yang mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perairan secara berkelanjutan, dengan tetap menjaga keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Kota Tasikmalaya, meskipun bukan kota pesisir, memiliki potensi perikanan, pariwisata berbasis air, serta pengelolaan limbah yang berkontribusi terhadap pengembangan ekonomi biru.

1) Potensi Perikanan

Kota Tasikmalaya memiliki potensi perikanan budidaya dan perikanan tangkap. Areal perikanan budidaya seluas 692,27 Ha, yang terdiri dari kolam pembenihan seluas 19,49 Ha, kolam pembesaran seluas 621,23 Ha, sawah irigasi untuk minapadi seluas 51,42 Ha dan kolam air deras seluas 0,14 Ha. Berikut adalah jumlah rumah tangga dan produksi perikanan budidaya.

Tabel 2.69
Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Budidaya Menurut Kecamatan dan Jenis Budidaya di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Produksi	
	Kolam	Sawah	Kolam	Sawah
Kawalu	1.652	16	1.484,74	45,92
Tamansari	1.477	215	564,27	43,12
Cibeureum	1.826	25	1.280,11	43,74
Purbaratu	1.597	110	1.016,21	190,12
Tawang	393		190,85	
Cihideung	209		97,13	
Mangkubumi	1.262	1	1.369,01	20,85
Indihiang	1.047	19	1.070,43	74,71
Bungursari	1.276	110	1.560,28	229,29
Cipedes	999		708,95	
Kota Tasikmalaya	11.738	496	9.341,98	647,75

Sumber: BPS Tahun 2025

Rumah tangga perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya bergabung ke dalam 434 kelompok pembudidaya ikan, 16 poklahsar, 3 pokmaswas, serta 17 kelompok lainnya, dengan total anggota kelompok 6.117 orang. Hal ini menunjukan belum semua rumah tangga perikanan budidaya tergabung dan kelompok perikanan.

Perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya didominasi oleh sistem budidaya ikan di kolam, baik dari jumlah rumah tangga maupun produksi. Dari total 12.234 rumah tangga yang bergerak dalam perikanan budidaya, mayoritas (95,95%) menggunakan kolam, sementara hanya 4,05% yang memanfaatkan sawah untuk budidaya ikan. Total produksi perikanan budidaya Tahun 2024 mencapai

9.989,73 ton. Produksi ikan dari budidaya ikan di kolam sebesar 9.341,98 ton (93,51%) dari total produksi,dan di sawah sebesar 647,75 ton (6,49%).

Produktivitas per rumah tangga perikanan budidaya di kolam mencapai 796 kg/tahun sementara di sawah mencapai 1.306 kg/tahun. Walaupun kolam merupakan metode utama yang digunakan dalam budidaya ikan di Kota Tasikmalaya namun berbudidaya ikan di sawah ternyata memiliki produktivitas lebih tinggi (1,3 ton per rumah tangga) dibandingkan yang menggunakan kolam (0,8 ton per rumah tangga).

Produktivitas perikanan budidaya di kolam mencapai 14,57 ton/ha, sementara di sawah mencapai 12,59 ton/ha. Produktivitas total perikanan budidaya tahun 2024 mencapai 14,43 ton/ha. Areal perikanan tangkap di Kota Tasikmalaya berupa situ dan sungai seluas 7.698,8 Ha yang terdiri dari Situ Gede seluas 47 Ha, Situ Cibeureum seluas 10 Ha, Situ Cipajaran seluas 6 Ha, Situ Malingping seluas 2 Ha, Situ Cicangri seluas 2,5 Ha dan Sungai dengan luas total 7.631,30 Ha. Berikut adalah data rumah tangga dan produksi perikanan tangkap di Kota Tasikmalaya.

Tabel 2.70
Jumlah Rumah Tangga dan Produksi Perikanan Tangkap Menurut Kecamatan di Kota Tasikmalaya, Tahun 2023 dan Tahun 2024

Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga		Produksi	
	2023	2024	2023	2024
Kawalu	4	4	3,97	3,97
Tamansari	53	53	20,43	20,43
Cibeureum	12	12	11,92	11,92
Purbaratu	-	-	-	-
Tawang	-	-	-	-
Cihideung	-	-	-	-
Mangkubumi	73	73	46,83	46,83
Indihiang	-	-	-	-
Bungursari	17	17	16,89	16,89
Cipedes	-	-	-	-
Kota Tasikmalaya	159	159	100,04	100,04

Sumber: BPS Tahun 2025

Efisiensi produksi juga relatif sama, karena jumlah rumah tangga perikanan tidak berubah, namun produksi sedikit meningkat. Faktor yang mungkin mempengaruhi stagnasi ini bisa mencakup ketersediaan ikan, kondisi lingkungan perairan, teknologi yang digunakan, atau kebijakan perikanan yang berlaku. Produktivitas per rumah tangga perikanan tangkap tahun 2023 dan tahun 2024 mencapai 0,6 ton/tahun. Produktivitas areal perikanan tangkap tahun 2024 mencapai 0,01 ton per ha. Infrastruktur pendukung ekonomi biru di sektor perikanan berupa:

- UPTD Balai Benih Ikan (BBI)
- UPTD Pengembangan Produksi Ikan
- Unit Pelayanan Pengembangan (UPP)
- 61 Unit Pembenihan Rakyat (UPR)

Tantangan utama perikanan budidaya di Kota Tasikmalaya adalah alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta harga pakan ikan yang terus meningkat serta peningkatan konsumsi ikan yang belum optimal baru mencapai 43,95 kg/kapita/tahun.

2) Potensi Pariwisata Berbasis Air

Sektor wisata di Kota Tasikmalaya juga memiliki kaitan dengan ekonomi biru melalui wisata air, yang meliputi:

- Wisata Alam: Arung jeram di Sungai Ciwulan dan Citanduy, serta wisata situ seperti Situ Gede dan Curug Tonjong.
- Wisata Rekreasi: Teejay Waterpark, Kolam Renang Asia, Mangkubumi Water Park, Ma'arif Garden, dan Mutiara Aboh.

Wisata air dapat menjadi sumber ekonomi alternatif bagi masyarakat. Namun, tantangan seperti pengelolaan limbah wisata dan pencemaran air masih perlu diatasi.

3) Pengelolaan Limbah dan Sampah

Pengelolaan sampah di Kota Tasikmalaya masih menghadapi tantangan besar. Dengan masih tingginya timbulan sampah yang mencapai 319,11 ton/hari pada tahun 2022, baru terkelola sekitar 253,18 ton/hari (81,77%). Di lain pihak TPA Ciangir yang memiliki luas 6,5 Ha membutuhkan perluasan hingga 9,9 Ha untuk mengatasi volume sampah yang terus meningkat.

Hal yang menjadi masalah adalah TPA Ciangir masih menggunakan sistem open dumping, yang berisiko mencemari lingkungan serta keterbatasan SDM, dan infrastruktur pengelolaan limbah.

Infrastruktur pendukung ekonomi biru dalam pengelolaan sampah meliputi sarana pengangkutan sampah berupa 28 unit dump truck dengan kondisi 9 baik, 6 layak, 13 rusak; 13 unit arm roll dengan kondisi 1 baik, 8 layak, 4 rusak; 27 unit motor roda tiga dengan kondisi 11 baik, 6 layak, 10 rusak serta 1 TPA di Ciangir, yang sudah melebihi kapasitas. Infrastruktur pengelolaan limbah masih terbatas dan membutuhkan peningkatan kapasitas, diperlukan inovasi dalam pengolahan limbah untuk mendukung konsep circular economy.

Pemerintah sudah berupaya menjalankan Gerakan 3R dengan sistem bank sampah di tingkat RW hingga kecamatan, serta kolaborasi dengan pihak swasta dalam pengelolaan sampah.

Ekonomi biru di Kota Tasikmalaya memiliki potensi besar, terutama di sektor perikanan dan pengelolaan limbah. Namun, tantangan seperti alih fungsi lahan, perubahan iklim, serta keterbatasan infrastruktur harus segera diatasi melalui kolaborasi pemerintah, swasta, dan masyarakat untuk menciptakan ekosistem ekonomi biru yang berkelanjutan.

2.1.4.4. Transformasi Digital

Pemerintah Kota Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya. Penerapan SPBE di Kota Tasikmalaya meningkat dalam kurun waktu empat tahun terakhir yang ditunjukkan dengan Indeks SPBE Kota Tasikmalaya yang terus mengalami peningkatan.

Upaya yang dilakukan Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam penerapan manajemen SPBE meliputi penerapan manajemen resiko, keamanan informasi, data, aset TIK, kompetensi SDM, pengetahuan, perubahan, dan layanan SPBE. Kota Tasikmalaya memiliki layanan SPBE, yang terdiri dari:

a. Layanan administrasi, yang meliputi layanan perencanaan, layanan penganggaran, layanan keuangan, layanan pengadaan barang dan jasa, layanan kepegawaian, layanan kearsipan dinamis, layanan pengelolaan barang

milik daerah, layanan pengawasan internal pemerintah, layanan akuntabilitas kinerja organisasi, dan layanan kinerja organisasi;

b. Layanan publik yang meliputi layanan pengaduan pelayanan publik, layanan data terbuka, layanan JDIH, layanan bidang pendidikan, layanan bidang komunikasi dan layanan administrasi kelurahan.

Pada tahun 2024 Indeks SPBE Kota Tasikmalaya mencapai 3,96 poin dengan predikat Sangat Baik berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 663 Tahun 2024 tentang Hasil Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2024. Indeks SPBE Kota Tasikmalaya tahun 2021 sampai tahun 2024 tersaji pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.71
Indeks SPBE Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian		Nilai SPBE			
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks SPBE	-	2,68 (B)	2,80 (B)	3,25 (B)	3,96 (SB)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

Sebagai wujud komitmen terhadap keamanan informasi, Pemerintah Kota Tasikmalaya telah menerbitkan Kebijakan Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI) dan menerapkan kontrol-kontrol keamanan yang mengacu pada Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi SPBE dan Standar Teknis serta Prosedur Keamanan SPBE. Langkah ini selaras dengan salah satu misi BSSN Tahun 2020–2024, yaitu menyelenggarakan keamanan siber dan persandian secara efektif dan efisien demi terwujudnya kedaulatan keamanan siber nasional dan tatakelola pemerintahan yang baik. Berikut adalah Indeks KAMI Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024:

Tabel 2.72
Indeks Keamanan Informasi (KAMI) Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	31,2	33,33	45,74	48,21	45,74

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan tabel di atas, terjadi peningkatan signifikan dalam indeks KAMI dari tahun 2020 hingga 2023 meskipun terjadi sedikit penurunan di tahun 2024, nilai indeks masih mencerminkan kematangan pengelolaan keamanan informasi di tingkat daerah. Peningkatan kualitas SDM, pemutakhiran teknologi, dan penguatan kebijakan akan menjadi kunci dalam menjaga stabilitas dan peningkatan indeks KAMI.

Berpedoman pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral, BPS melaksanakan evaluasi atas penyelenggaraan statistik sektoral pada Pemerintah Kota Tasikmalaya tahun 2024. Keluaran EPSS adalah Indeks Pembangunan Statistik (IPS), yaitu suatu indikator yang menggambarkan tingkat kematangan penyelenggaraan statistik sektoral di masing-masing instansi pemerintah penyelenggara kegiatan statistik sektoral. Indeks ini, selain disajikan secara umum, juga disajikan menurut domain dan aspek. IPS merupakan salah satu indikator penilaian Reformasi Birokrasi (RB) General untuk seluruh instansi pemerintah. Berikut adalah nilai IPS Kota Tasikmalaya tahun 2020-2024:

Tabel 2.73
Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Tasikmalaya
Tahun 2020-2024

Uraian	Tahun (Poin)				
	2020	2021	2022	2023	2024
Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	0	0	2,92 (Baik)	2,47 (Baik)	3,01 (Baik)

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tasikmalaya, 2025.

Berdasarkan hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) yang dilaksanakan oleh Badan Pusat Statistik, Indeks Pembangunan Statistik (IPS) Pemerintah Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 3,01 dengan predikat "Baik". Capaian ini mencerminkan adanya perbaikan signifikan dalam kualitas penyelenggaraan statistik sektoral, terutama jika dibandingkan dengan capaian tahun sebelumnya yang mengalami penurunan.

Nilai IPS sebesar 3,01 menunjukkan bahwa sistem penyelenggaraan statistik sektoral Kota Tasikmalaya telah memasuki tahap awal kematangan (initial maturity). Meskipun demikian, masih terdapat ruang yang cukup besar untuk peningkatan, khususnya pada aspek-aspek strategis seperti integrasi data antar perangkat daerah, pelatihan SDM statistik sektoral, serta peningkatan kualitas metadata dan interoperabilitas sistem.

2.1.4.5. Integrasi Ekonomi Domestik dan Global

1) Pembentukan Modal Tetap Bruto

Gambaran umum investasi di Kota Tasikmalaya dapat diilustrasikan dengan meninjau salah satu komponen PDRB pengeluaran yaitu Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) maupun dengan meninjau penanaman modal langsung yang bersumber dari Penanaman Modal Asing (PMA) atau Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Komponen PMTB merepresentasikan pengeluaran untuk barang modal yang mempunyai umur pemakaian lebih dari satu tahun dan tidak merupakan barang konsumsi, mencakup bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal, bangunan lain seperti jalan dan bandara, serta mesin dan peralatan produksi. Berdasarkan data BPS, besaran nilai PMTB Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan rata-rata provinsi disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.38
Nilai PMTB dalam PDRB Kota Tasikmalaya 2010-2023

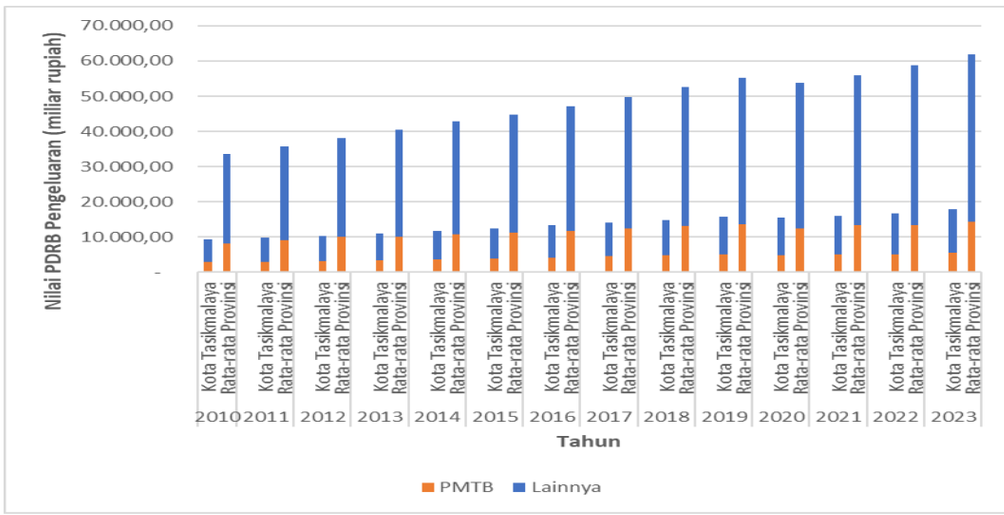

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2011-2024.

Berdasarkan data tersebut, diketahui bahwa komponen PMTB dalam PDRB Pengeluaran Kota Tasikmalaya menunjukkan peningkatan secara nominal dalam

kurun waktu tersebut, di mana pada tahun 2010 nilai komponen PMTB yang tercatat adalah sebesar Rp2,753 triliun, sedangkan pada tahun 2023 sebesar Rp5,477 triliun. Adapun secara proporsi, komponen PMTB cenderung stagnan dengan rata-rata 30,91% yang juga mengindikasikan signifikansinya yang lebih besar dibandingkan dengan rata-rata provinsi sebesar 24,51%. Adapun dari segi penanaman modal, pencapaian Kota Tasikmalaya dalam lima tahun ke belakang diketahui cenderung meningkat dengan pengecualian pada tahun 2020. Selengkapnya disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 2.74
Realisasi Investasi Kota Tasikmalaya

Uraian	2020	2021	2022	2023	2024
Jumlah nilai investasi PMA/PMDN (dalam miliar rupiah)	422,6	1.630	4.777,36	18.702	2.138

Sumber: DPMPTSP Kota Tasikmalaya, 2024.

2) Ekspor Barang dan Jasa

Net ekspor Kota Tasikmalaya terus mengalami defisit sepanjang Tahun 2020– 2024. Berdasarkan data Net Ekspor Barang dan Jasa dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Pengeluaran Kota Tasikmalaya atas dasar harga berlaku selama periode 2020–2024, terlihat bahwa nilai net ekspor selalu negatif, yang berarti impor barang dan jasa lebih besar dibandingkan ekspor. Tren Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya selama kurun Tahun 2020–2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.75
Tren Net Ekspor Barang dan Jasa Kota Tasikmalaya selama kurun Tahun 2020–2024

Tahun	Net Ekspor (Miliar Rupiah)
2020	-3.959,49
2021	-3.498,48
2022	-3.578,72
2023	-4.377,90
2024	-4.296,72

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2025.

Pada Tahun 2020, defisit net ekspor berada di angka Rp.-3.959,49 miliar. Tahun 2021 mengalami sedikit perbaikan dengan penurunan defisit menjadi Rp.-3.498,48 miliar, kemungkinan karena adanya pemulihan ekonomi pasca pandemi. Namun, pada Tahun 2022, defisit kembali meningkat menjadi Rp.-3.578,72 miliar, menunjukkan adanya kenaikan impor atau stagnasi ekspor. Tahun 2023 mencatat defisit tertinggi dalam periode ini, yaitu sebesar Rp. -4.377,90 miliar, yang bisa disebabkan oleh peningkatan konsumsi barang impor atau penurunan daya saing ekspor daerah. Tahun 2024 menunjukkan sedikit perbaikan dengan defisit sebesar Rp.-4.296,72 miliar, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan 2020-2022.

Beberapa faktor yang dapat menyebabkan defisit net ekspor ini diantaranya adalah Kota Tasikmalaya masih bergantung pada barang atau jasa dari luar daerah atau luar negeri, produk lokal Kota Tasikmalaya belum mampu bersaing baik dari segi harga maupun kualitas serta kurangnya fasilitas pendukung ekspor seperti promosi dan infrastruktur perdagangan. Defisit net ekspor yang terus berlangsung bisa mengurangi kontribusi sektor perdagangan dalam PDRB, karena lebih banyak uang yang keluar daripada yang masuk. Selain itu meningkatnya ketergantungan pada barang impor bisa berdampak pada industri lokal yang

kurang berkembang serta daya beli masyarakat dapat terpengaruh jika harga barang impor naik akibat nilai tukar atau kebijakan perdagangan.

Mempertimbangkan hal ini maka Kota Tasikmalaya perlu meningkatkan daya saing ekspor barang dan jasa melalui pengembangan industri lokal, inovasi produk, dan peningkatan kualitas produk lokal, mendorong substitusi impor dengan mengembangkan produk-produk pengganti barang impor yang bisa diproduksi di dalam daerah, meningkatkan investasi di sektor industri pengolahan, agribisnis, dan ekonomi kreatif yang memiliki potensi ekspor serta meningkatkan akses pasar ekspor dengan menjalin kerja sama dengan daerah atau negara lain. Dengan demikian diperlukan strategi penguatan industri lokal dan peningkatan daya saing produk Kota Tasikmalaya agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

2.1.4.6. Perkotaan dan Perdesaan sebagai Pusat Pertumbuhan Ekonomi

Ketersediaan infrastruktur yang memadai, seperti transportasi, air bersih, sanitasi, dan akses informasi, sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mengukur kualitas dan efektivitas infrastruktur suatu daerah, digunakan Indeks Infrastruktur dalam menilai perkembangan serta dampak infrastruktur terhadap perekonomian dan kehidupan sosial.

Lebih lanjut, indeks infrastruktur memiliki kaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, termasuk Kota Tasikmalaya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan produktivitas, daya saing, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya mendorong pertumbuhan ekonomi. Berikut adalah beberapa kaitan utama antara indeks infrastruktur dan pertumbuhan ekonomi, antara lain:

1) Peningkatan Konektivitas dan Aksesibilitas

Indeks kemantapan jalan yang tinggi menunjukkan kondisi jalan yang baik, yang memperlancar distribusi barang dan jasa. Jalan yang mantap mengurangi biaya logistik, meningkatkan efisiensi bisnis, serta menarik investasi dari luar daerah.

2) Daya Tarik Investasi

Indeks kualitas infrastruktur yang tinggi mencerminkan ketersediaan fasilitas dasar seperti tersedianya akses transportasi yang memadai, layanan air bersih, dan pengelolaan air limbah yang memadai. Infrastruktur yang baik menarik investor karena mengurangi biaya operasional serta meningkatkan efisiensi produksi.

3) Peningkatan Produktivitas Tenaga Kerja

Infrastruktur yang baik, meningkatkan akses layanan publik, mempercepat distribusi barang, dan meningkatkan produktivitas masyarakat. Hal ini berpengaruh pada produktivitas tenaga kerja karena mereka memiliki akses lebih baik ke tempat kerja, fasilitas kesehatan, dan pendidikan.

4) Mendorong Sektor Pariwisata dan Perdagangan

Tasikmalaya memiliki potensi pariwisata dan perdagangan yang besar. Kemantapan jalan dan ketersediaan infrastruktur pendukung di kawasan wisata yang baik dapat meningkatkan kunjungan wisatawan, yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan konsumsi

Secara keseluruhan, semakin tinggi tingkat indeks infrastruktur suatu daerah, semakin besar peluang pertumbuhan ekonominya. Infrastruktur yang memadai menciptakan lingkungan yang kondusif bagi bisnis, investasi, dan kesejahteraan masyarakat, yang pada akhirnya meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Indeks Infrastruktur di Kota Tasikmalaya berada dalam kondisi BAIK, sehingga dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan investasi. Namun demikian, masih perlu ditingkatkan kualitas dan capaian air minum dan sanitasi rumah tangga, serta akses internet rumah tangga.

Gambar 2.39
Tingkat Indeks Infrastruktur di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

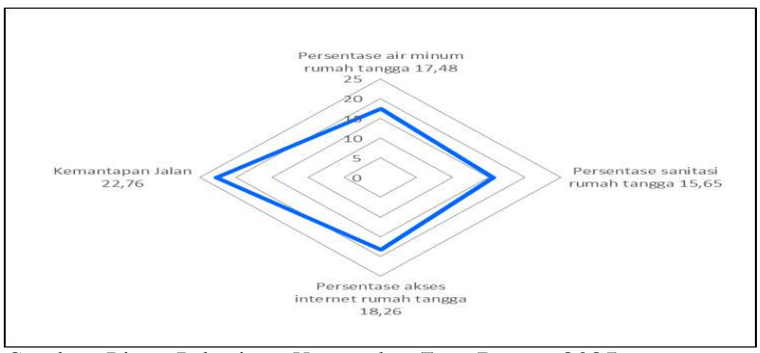

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

Pemerintah Kota Tasikmalaya telah melaksanakan pelayanan penerbitan PBG melalui Sistem Informasi Manajemen Bangunan Gedung (SIMBG) sesuai dengan regulasi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja – Mengubah ketentuan mengenai perizinan bangunan gedung, menggantikan IMB dengan PBG.
2. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan UU Cipta Kerja Sektor Bangunan Gedung – Mengatur teknis penyelenggaraan bangunan gedung, termasuk mekanisme perizinan melalui SIMBG.
3. Peraturan Menteri PUPR Nomor 27 Tahun 2021 tentang Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung, dan PBG – Menyediakan panduan teknis dalam penerbitan PBG dan SLF melalui SIMBG.
4. Peraturan Menteri PUPR Nomor 29 Tahun 2021 tentang Standar Teknis Bangunan Gedung – Mengatur standar teknis yang harus dipenuhi dalam permohonan PBG.

Adapun data rumah tangga yang telah dilengkapi PBG sebagaimana ditampilkan pada tabel berikut.

Tabel 2.76
Proporsi Rumah Tangga dengan Hunian Layak, Terjangkau, Berkelanjutan

No.	Tahun	Jumlah Rumah Tangga dengan PBG (unit)	Jumlah Kumulatif rumah tangga	Jumlah rumah tangga di kota tasikmalaya	%
1.	2020	-	-	-	-
2.	2021	-	-	-	-
3.	2022	1.261	1.261	248.468	0,51%
4.	2023	2.424	3.685	252.444	1,46%
5.	2024	3.326	7.011	257.313	2,72%

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang, 2025

Sesuai dengan data pada Tabel 2.76 jumlah total hunian yang dilengkapi dengan dokumen PBG terus meningkat dalam kurun waktu 2022 - 2024. Dengan demikian, maka persentase hunian yang layak, terjangkau, dan berkelajutan mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini selaras dengan peningkatan kesadaran masyarakat untuk memproses dokumen PBG. Lebih lanjut, persentase ini tentu saja perlu terus ditingkatkan oleh pemerintah kota tasikmalaya agar jumlah hunian yang dilengkapi dengan PBG dapat terus bertambah.

2.1.4.7. Stabilitas Ekonomi Makro

1) Rasio Pajak Daerah Terhadap PDRB

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah. Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Indonesia masih tergolong rendah. Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, rasio pajak daerah terhadap PDRB pada tahun 2022 hanya sekitar 1,3% dari Target yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan adalah sebesar 3%.

Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tasikmalaya dari tahun ke tahun mengalami fluaktif , akan tetapi pada tahun 2020 berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh DDTC Fiscal Research & Advisort Kinerja pajak daerah Kota Tasikmalaya terhadap PDRB pada tahun 2020 sebesar 0,57 %, adapun rata rata tax ratio kab/ kota di Indonesia pada 2020 berada pada angka 0,32 %, hal ini menujukan kinerja pajak daerah Kota Tasikmalaya relatif tinggi dibandingkan dengan rata rata keselurahan Kab/ Kota yang ada di Indonesia . Perkembangan selama 5 tahun data dilihat pada diagram di pada gambar dbawah ini:

Gambar 2.9
Perkembangan Rasio pajak daerah terhadap PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Kota Tasikmalaya dari 2020 sd 2024

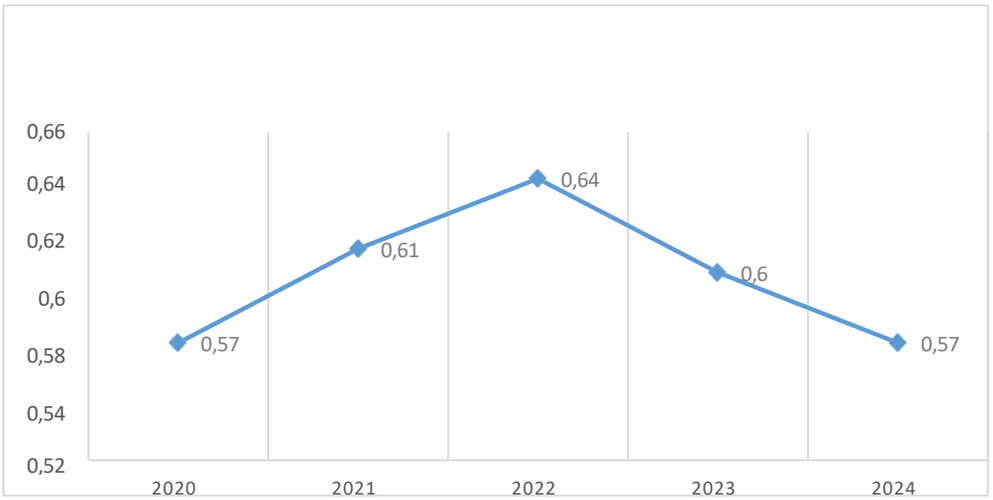

Sumber : BPS Kota Tasikmalaya, 2025 (diolah).

Rata rata lima tahun rasio pajak daerah Kota Tasikmalaya terhadap PDRB Kota tasikmalaya adalah 0,60%. Untuk meningkatkan rasio pajak daerah, pemerintah Kota Tasikmalaya perlu melakukan beberapa strategi, seperti meningkatkan kuantitas dan kualitas aparatur pemungut pajak daerah, meningkatkan sarana dan prasarana pemungutan pajak, serta meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak.

2) Tingkat Inflasi

Perkembangan laju inflasi Kota Tasikmalaya dalam kurun waktu tahun 2019- 2024 disajikan melalui grafik berikut.

Gambar 2.40
Perkembangan Laju Inflasi Kota Tasikmalaya Tahun 2020-2024

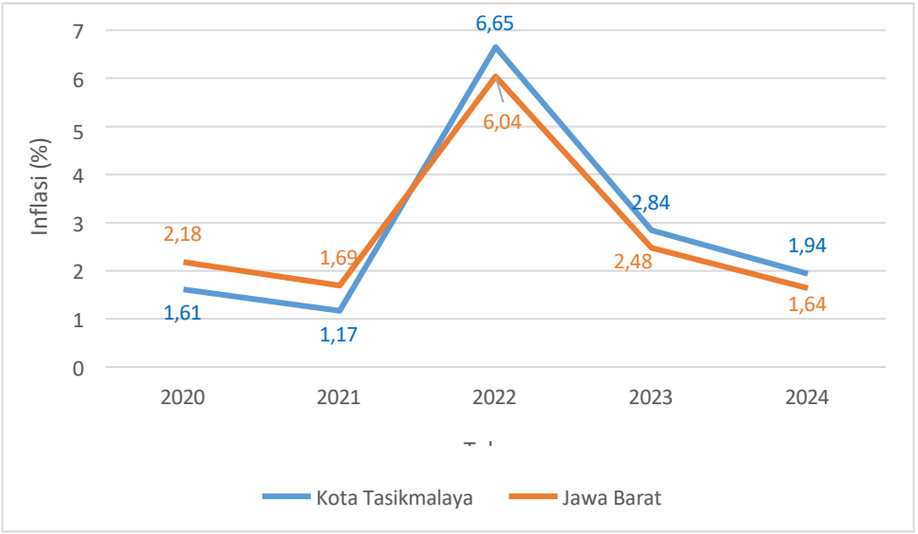

Sumber: BPS Kota Tasikmalaya, 2020-2025

Grafik tersebut menunjukkan bahwa laju inflasi cenderung fluktuatif. Jika disandingkan seperti pada grafik, pola fluktuasi yang terjadi di tingkat kota memiliki sedikit kemiripan dengan pola fluktuasi yang terjadi di tingkat provinsi. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa jika laju inflasi di kedua tingkatan tersebut dirata-ratakan selama kurun waktu 5 tahun menjadi sebuah laju inflasi tahunan, keduanya tidak menunjukkan perbedaan yang besar.

Tabel 2.77
Penduduk 15 tahun ke Atas Menurut Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan dan Jenis Kegiatan Selama Seminggu yang Lalu di Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan			<Sekolah Menengah Pertama	Sekolah Menengah Atas	Perguruan Tinggi
Angkatan Kerja	Bekerja	2022	167.830	111.226	45.043
		2023	165.473	121.921	58.150
		2024	196.861	124.757	48.095
	Pengangguran	2022	5.767	14.692	2.505
		2023	8.797	13.420	NA*
		2024	6.380	12.786	6478
	Jumlah Angkatan Kerja	2022	173.597	125.918	47.548
		2023	174.270	135.341	NA*
		2024	203.241	137.543	54573
	Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja	2022	96,17	88,33	94,73
		2023	94,95	90,08	NA*
		2024	96,04	90,7	88,13
Bukan Angkatan Kerja		2022	113.405	54.727	10.777
		2023	115.513	64.854	14.948
		2024	110.726	56.362	11.107
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)		2022	59,1	69,7	81,52
		2023	60,14	67,6	NA*
		2024	63,13	70,9	83,1

Keterangan:

NA = Data tidak dapat ditampilkan karena nilai Relative Standard Error (RSE) terlalu tinggi.*

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD

Pada tahap penyusunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026, sebagai salah satu landasan pengambilan kebijakan perencanaan pembangunan telah dilaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap RKPD. Hal ini dilaksanakan sejak tahapan persiapan sampai dengan penetapan, pelaksanaan, hingga hasil RKPD dengan tujuan untuk memastikan bahwa RKPD Kota Tasikmalaya telah disusun sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan RKPD, serta menjadi pedoman dalam penyusunan KUA/PPAS dan RAPBD.

Evaluasi dilaksanakan terhadap hasil pencapaian kinerja pembangunan daerah berdasarkan rekapitulasi hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan RKPD pada Tahun 2024. Program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024 disusun berdasarkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024 yang diperbaharui dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 13 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 12 tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2024.

Pelaksanaan RKPD Tahun 2024 dilaksanakan melalui program dan kegiatan pada APBD Tahun 2024. Capaian kinerja dan anggaran Tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.78.
Realisasi RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2024

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		(Rp.)	(Rp.)	Kinerja	Anggaran		
1	DINAS PENDIDIKAN	531,275,169,706	523,877,842,313	99.88	98.61	ST	ST
2	DINAS KESEHATAN	449,663,695,626	428,509,902,352	97.39	95.30	ST	ST
3	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG	150,747,792,414	140,478,934,113	107.33	93.19	ST	ST
4	DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN	16,057,266,938	14,320,270,087	139.44	89.18	ST	T
5	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	17,050,561,103	16,726,697,774	100.00	98.10	ST	ST
6	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	11,059,229,000	10,857,200,077	100.00	98.17	ST	ST
7	DINAS SOSIAL	23,084,554,300	22,746,155,417	99.71	98.53	ST	ST
8	DINAS TENAGA KERJA	8,284,971,522	7,800,303,023	123.22	94.15	ST	ST
9	DINAS KETAHANAN PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	33,181,510,050	31,944,821,924	115.66	96.27	ST	ST
10	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	35,928,347,007	34,763,742,367	136.62	96.76	ST	ST
11	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	10,088,057,000	10,034,583,392	100.15	99.47	ST	ST
12	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	15,398,601,000	14,489,115,011	100	94.09	ST	ST
13	DINAS PERHUBUNGAN	46,778,191,817	45,274,266,336	78.37	96.78	T	ST
14	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	18,706,862,000	18,026,394,595	93.16	96.36	ST	ST

No.	Perangkat Daerah	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Realisasi (%)		Predikat Kinerja	Predikat Anggaran
		(Rp.)	(Rp.)	Kinerja	Anggaran		
15	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	20,568,312,523	18,708,751,445	124.39	90.96	ST	ST
16	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	7,713,229,000	7,585,709,716	99.96	98.35	ST	ST
17	DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	21,040,331,857	20,413,633,199	99.18	97.02	ST	ST
18	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	7,094,435,600	6,973,129,263	100.00	98.29	ST	ST
19	SEKRETARIAT DAERAH	86,064,951,974	83,688,353,930	95.69	97.24	ST	ST
20	SEKRETARIAT DPRD	63,481,654,778	61,234,202,284	96.70	96.46	ST	ST
21	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	17,218,909,000	16,085,315,387	101.86	93.42	ST	ST
22	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	30,208,791,463	25,468,585,136	99.41	84.31	ST	T
23	BADAN PENDAPATAN DAERAH	27,480,417,156	26,178,007,264	99.58	95.26	ST	ST
24	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	13,725,644,094	13,244,238,159	108.46	96.49	ST	ST
25	INSPEKTORAT	18,839,864,911	17,004,957,103	103.21	90.26	ST	ST
26	KECAMATAN CIHIDEUNG	10,437,115,000	10,358,582,449	100.83	99.25	ST	ST
27	KECAMATAN CIPEDES	8,323,332,000	8,207,379,908	94.44	98.61	ST	ST
28	KECAMATAN TAWANG	9,474,519,970	9,387,813,230	100.00	99.08	ST	ST
29	KECAMATAN INDIHIANG	10,248,459,000	10,064,211,775	99.29	98.20	ST	ST
30	KECAMATAN KAWALU	15,379,413,000	15,292,711,753	93.33	99.44	ST	ST
31	KECAMATAN CIBEUREUM	14,272,135,000	14,165,159,996	100.00	99.25	ST	ST
32	KECAMATAN TAMANSARI	11,961,675,000	11,931,913,773	100.00	99.75	ST	ST
33	KECAMATAN MANGKUBUMI	12,354,314,000	12,250,731,070	100.00	99.16	ST	ST
34	KECAMATAN BUNGURSARI	11,677,720,000	11,603,660,473	100.00	99.37	ST	ST
35	KECAMATAN PURBARATU	9,869,175,000	9,790,202,286	96.88	99.20	ST	ST
36	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	62,766,732,530	61,109,764,012	100.00	97.36	ST	ST

Keterangan: ST = Sangat Tinggi, T = Tinggi, S = Sedang, R = Rendah, SR = Sangat Rendah.
Sumber: Evaluasi RKPD Tahun 2024

Tabel 2.79
Rekap Urusan Evaluasi Hasil terhadap RKPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2024

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
A	**URUSAN WAJIB**	**1,397,772,258,365**	**1,350,423,774,227**				
1	**Urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar**	**1,198,930,594,087**	**1,157,509,358,933**				
1.01	Pendidikan	531,275,169,706	523,877,842,313	99.88	Sangat Tinggi	98.61	Sangat Tinggi
1.02	Kesehatan	449,663,695,626	428,509,902,352	97.39	Sangat Tinggi	95.30	Sangat Tinggi
1.03	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	150,740,117,414	140,471,290,913	100	Sangat Tinggi	93.19	Sangat Tinggi
1.04	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman	16,057,266,938	14,320,270,087	100	Sangat Tinggi	89.18	Tinggi
1.05	Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat	28,109,790,103	27,583,897,851	100	Sangat Tinggi	98.13	Sangat Tinggi
1.06	Sosial	23,084,554,300	22,746,155,417	99.71	Sangat Tinggi	98.53	Sangat Tinggi
2	**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	**198,841,664,278**	**192,914,415,294**				
2.07	Tenaga Kerja	8,284,971,522	7,800,303,023	100	Sangat Tinggi	94.15	Sangat Tinggi
2.08	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	1,226,239,100	1,218,771,920	100	Sangat Tinggi	99.39	Sangat Tinggi
2.09	Pangan	18,147,212,475	17,977,588,670	100	Sangat Tinggi	99.07	Sangat Tinggi
2.10	Pertanahan	7,675,000	7,643,200	100	Sangat Tinggi	99.59	Sangat Tinggi
2.11	Lingkungan Hidup	35,928,347,007	34,763,742,367	100	Sangat Tinggi	96.76	Sangat Tinggi
2.12	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	10,088,057,000	10,034,583,392	100	Sangat Tinggi	99.47	Sangat Tinggi
2.14	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	14,172,361,900	13,270,343,091	100	Sangat Tinggi	93.64	Sangat Tinggi

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
2.15	Perhubungan	46,778,191,817	45,274,266,336	78.37	Tinggi	96.78	Sangat Tinggi
2.16	Komunikasi dan Informatika	18,211,162,000	17,532,546,482	100	Sangat Tinggi	96.27	Sangat Tinggi
2.17	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	12,701,401,900	12,422,839,105	100	Sangat Tinggi	97.81	Sangat Tinggi
2.18	Penanaman Modal	7,713,229,000	7,585,709,716	99.96	Sangat Tinggi	98.35	Sangat Tinggi
2.19	Kepemudaan dan Olahraga	16,086,429,957	15,656,254,700	99.18	Sangat Tinggi	97.33	Sangat Tinggi
2.20	Statistik	259,682,000	257,958,663	100	Sangat Tinggi	99.34	Sangat Tinggi
2.21	Persandian	236,018,000	235,889,450	100	Sangat Tinggi	99.95	Sangat Tinggi
2.22	Kebudayaan	1,906,250,000	1,902,845,916	100	Sangat Tinggi	99.82	Sangat Tinggi
2.23	Perpustakaan	6,412,504,600	6,311,830,743	100	Sangat Tinggi	98.43	Sangat Tinggi
2.24	Kearsipan	681,931,000	661,298,520	100	Sangat Tinggi	96.97	Sangat Tinggi
3	**URUSAN PILIHAN**	**25,948,860,098**	**23,107,678,177**				
3.25	Kelautan dan Perikanan	3,773,668,150	3,476,414,937	100	Sangat Tinggi	92.12	Sangat Tinggi
3.26	Pariwisata	3,047,651,900	2,854,532,583	100	Sangat Tinggi	93.66	Sangat Tinggi
3.27	Pertanian	11,260,629,425	10,490,818,317	100	Sangat Tinggi	93.16	Sangat Tinggi
3.30	Perdagangan	6,401,477,500	5,202,075,474	100	Sangat Tinggi	81.26	Tinggi
3.31	Perindustrian	1,465,433,123	1,083,836,866	100	Sangat Tinggi	73.96	Sedang
3.32	Transmigrasi						
4	**PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN**	**149,546,606,752**	**144,922,556,214**				
4.01	Sekretariat Daerah	86,064,951,974	83,688,353,930	95.69	Sangat Tinggi	97.24	Sangat Tinggi
4.02	Sekretariat DPRD	63,481,654,778	61,234,202,284	96.7	Sangat Tinggi	96.46	Sangat Tinggi
5	**PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN**	**88,633,761,913**	**80,976,145,946**				

No	Urusan Pemerintah Daerah dan SKPD	Pagu (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Fisik (%)	Predikat Fisik	Keuangan (%)	Predikat Keuangan
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8
5.01	Perencanaan	16,253,909,000	15,187,553,511	100	Sangat Tinggi	93.44	Sangat Tinggi
5.02	Keuangan	57,689,208,819	51,646,592,400	99.41	Sangat Tinggi	89.53	Tinggi
5.03	Kepegawaian	12,698,644,094	12,221,638,879	100	Sangat Tinggi	96.24	Sangat Tinggi
5.04	Pendidikan dan Pelatihan	1,027,000,000	1,022,599,280	100	Sangat Tinggi	99.57	Sangat Tinggi
5.05	Penelitian dan Pengembangan	965,000,000	897,761,876	100	Sangat Tinggi	93.03	Sangat Tinggi
6	**PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN**	**18,839,864,911**	**17,004,957,103**				
6.01	Inspektorat	18,839,864,911	17,004,957,103	100	Sangat Tinggi	90.26	Sangat Tinggi
7	**PEMERINTAHAN UMUM KEWILAYAHAN**	**113,997,857,970**	**113,052,366,713**				
7.01	Kecamatan	113,997,857,970	113,052,366,713	100	Sangat Tinggi	99.17	Sangat Tinggi
8	**URUSAN PEMERINTAHAN UMUM**	**62,766,732,530**	**61,109,764,012**				
8.01	Kesatuan Bangsa dan Politik	62,766,732,530	61,109,764,012	100	Sangat Tinggi	97.36	Sangat Tinggi

Adapun rincian realisasi RKPD Tahun 2024 untuk setiap rencana kerja perangkat daerah dapat dilihat sebagai berikut.

Tabel 2.80
Rekap Urusan Evaluasi RKPD Kota Tasikmalaya
Tahun 2024

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Dinas Pendidikan		47.260	-	531.275.169.706	44.498	523.971.308.890	94,16	98,63
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan		47.260		531.275.169.706	44.498	523.971.308.890	94,16	98,63
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		192		356.003.438.336	192	352.763.040.968	100,00	99,09
Program Pengelolaan Pendidikan		28239,00		168.579.912.639	27.589	164.678.034.765	97,70	97,69
Program Pengembangan Kurikulum	Persentase capaian pengembangan kurikulum	250		30.000.000	250	27.850.000	100,00	92,83
Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	Persentase Capaian Kualitas Pendidik PAUD dan Pendidikan Dasar	2	Dokumen	6.056.468.731	2	5.898.521.012	100,00	97,39
Program Pengelolaan Pendidikan		259		90.000.000	259	89.222.045	100,00	99,14
Program Pengelolaan Pendidikan		1067		25.000.000	1.067	25.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1053		25.000.000	1.053	25.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1035		22.000.000	1.035	22.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		948		20.000.000	948	20.000.000	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengelolaan Pendidikan		1036		20.000.000	1.036	20.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1032		20.000.000	1.032	20.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		495		21.000.000	495	21.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1040		22.000.000	1.040	22.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		986		21.000.000	986	21.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1048		25.000.000	1.048	25.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		878		20.000.000	878	20.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1041		20.000.000	1.041	20.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1039		22.000.000	1.039	22.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		1037		18.000.000	1.037	18.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		544		17.000.000	544	17.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		750		15.000.000	750	15.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		920		17.000.000	920	17.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		412		15.000.000	412	15.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		452		15.000.000	452	15.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		851		15.000.000	851	15.000.000	100,00	100,00
Program Pengelolaan Pendidikan		374		18.000.000	374	18.000.000	100,00	100,00
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan				449.663.695.626		414.810.481.743	98,43	92,25

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Dinas Kesehatan				314.973.847.089		302.841.836.351	96,87	96,15
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100,00	%	195.706.267.274		192.674.699.579	100,00	98,45
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Pencapaian SPM kesehatan	90,00	%	113.792.729.947	2.139.158	105.697.835.174	97,27	92,89
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Prosentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	100,00	%	1.957.925.526	108	1.099.004.506	89,97	56,13
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar			731.644.000	377	685.828.240	100,00	93,74
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase Perangkat Daerah yang melaksanakan kebijakan GERMAS			2.785.280.342	5.571	2.684.468.852	97,09	96,38
Rsud Dokter Soekardjo				134.689.848.537	12	111.968.645.392	100,00	83,13
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100,00	%	134.689.848.537	12	111.968.645.392	100,00	83,13
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang				150.740.117.414		140.476.090.913		93,19
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81,67	Kategori	11.041.073.744	81,67	10.911.611.115	100,00	98,83
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) DPUTR	85,00	Kategori	1.997.692.100	85,00	1.901.079.196	100,00	95,16
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal	23,76	Persen	4.171.283.000	25,44	3.695.052.250	107,09	88,58

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)	Persentase panjang jaringan irigasi kondisi baik	38,19	Persen	29.160.261.000	41,41	27.964.852.764	108,43	95,90
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	57,26	Persen	14.998.072.900	58,31	14.051.020.961	101,83	93,69
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	IKM pelayanan pengelolaan Air limbah domestik	83,00	Persen	430.000.000	83,54	424.087.260	100,65	98,62
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase kebutuhan infrastuktur Air limbah domestik yang terpenuhi	62,05	Persen	9.430.906.600	63,14	9.299.566.064	101,76	98,61
Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase infrastruktur drainase lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	65,01	Persen	10.972.517.514	66,85	9.725.783.514	102,83	88,64
Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase pemilik ijin yang menerapkan ketentuan bangunan	99,373	Persen	9.636.047.000	99,322	7.656.854.706	99,95	79,46
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase infrastruktur jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik	51,97	Persen	43.313.018.900	67,19	39.704.818.138	129,29	91,67
Program Penyelenggaraan Jalan	Persentase peningkatan jaringan jalan	2,25	Persen	14.702.319.656	2,99	14.323.554.473	132,97	97,42
Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Persentase jasa konstruksi yang bersertifikat jasa konstruksi	33,66	Persen	60.000.000	32,43	54.399.200	96,35	90,67
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Terhadap KKPR Yang Telah Diterbitkan	98	Persen	826.925.000	98,00	763.411.272	100,00	92,32
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar								
Pertanahan								

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penatagunaan Tanah	Persentase PKKPR Tanah Aset Pemkot Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial	100	Persen	7.675.000	100,00	7.643.200	100,00	99,59
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman		50,73	%	16.057.266.938	49,99	14.320.270.087	98,55	89,18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	4.932.451.100	83,28	4.747.649.868	83,28	96,25
Program Kawasan Permukiman	Persentase Kawasan Permukiman Kumuh yang ditangani dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	20,00	%	5.907.998.100	26,50	5.400.368.426	132,50	91,41
	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	8,68	%	901.584.700	10,27	900.285.200	118,42	99,86
Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase rumah tidak layak huni yang ditangani di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1,43	%	752.900.000	4,90	739.071.446	341,90	98,16
Program Pengembangan Perumahan	Persentase rumah korban bencana yang ditangani	100	%	524.705.060	100	309.983.003	100,00	59,08
	Persentase rumah korban relokasi program kabupaten/kota yang ditangani	100	%		100		100,00	
Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)	Persentase Pengelolaan PSU Perumahan	25	%	3.037.627.978	25	2.222.912.144	100,00	73,18
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		576		17.050.561.103	576	16.695.021.315	100,00	97,91
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		246		10.837.083.682	246	10.776.248.651	100,00	99,44

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum		330		6.213.477.421	330	5.918.772.664	100,00	95,26
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat		100	%	11.059.229.000	99,15	10.857.650.077	99,15	98,18
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100	%	6.781.979.000	100,00	6.666.670.267	100,00	98,30
Program Penanggulangan Bencana	Persentase Pengurangan Risiko Bencana	57,58	%	2.827.850.000	56,11	2.751.970.630	97,45	97,32
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	100	%	1.449.400.000	100,00	1.439.009.180	100,00	99,28
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial				23.084.554.300		22.728.145.497		98,46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Capaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah 2. Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73 86,5	(BB) poin (B) poin	5.057.702.000	74,61 88,30	4.982.610.197	102	98,52
Program Pemberdayaan Sosial	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	100%		1.033.300.000	100	1.010.419.360	100,00	97,79
Program Rehabilitasi Sosial	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	100	%	14.855.102.300	99,66	14.603.652.558	99,66	98,31
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	1. Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	100	%	1.045.429.000	98,59	1.042.928.242	98,59	99,76
Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	100	%	1.053.021.000	100,00	1.048.917.240	100	99,61
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	100	%	40.000.000	100	39.617.900	100	99,04

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja				8.284.971.522	-	7.782.981.524		94
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Dinas Tenaga Kerja	75	BB	4.294.983.900	75	4.246.548.857	100	99
	Nilai IKM Dinas Tenaga Kerja	85,10	Baik	1.525.312.200	89	4.246.548.857	105	278
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan dengan mengacu ke rencana tenaga kerja	100	%	77.600.000	20,00	69.959.876	20	90
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase Pencari Kerja dan tenaga kerja yang bersertifikat kompetensi	19,70	%	1.668.333.122	48,92	1.619.689.181	248	97
Program Penempatan Tenaga Kerja	persentase pencari kerja yang bekerja	55	%	188.365.100	31,5	165.823.328	57	88
Program Hubungan Industrial	persentase perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, struktur skala upah dan terdaftar perserta BPJS ketenagakerjaan)	80,29	%	530.377.200	55,61	514.285.552	69	97
0.00.01 - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	14.987.857.000	100	14.919.480.112	100,00	99,54
2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE)	110,8	%		106		104,53	#DIV/0!
2.09.03 - Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Angka Kecukupan Protein (AKP)	125,5	%	1.056.167.235	136,9	1.036.141.175	91,67	98,10
2.09.04 - Program Penanganan Kerawanan Pangan	Persentase kelurahan rentan rawan pangan yang ditangani	15	%	2.088.188.240	25	2.006.967.383	60,00	96,11

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
2.09.05 - Program Pengawasan Keamanan Pangan	Persentase pengawasan keamanan pangan	100	%	15.000.000	100	15.000.000	100,00	100,00
3.25.04 - Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Produksi Perikanan Budidaya	10100	Ton	2.156.118.150	9.989,71	2.106.735.937	101,10	97,71
3.25.06 - Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	Angka konsumsi ikan	22,50	Kg/Kap/ Tahun	1.617.550.000	43,95	1.369.679.000	51,19	84,68
3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Produksi Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan	81000	Ton	1.971.136.625	81000	1.935.673.946	100,00	98,20
3.27.02 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Persentase peningkatan populasi ternak	1	%	4.849.250.000	1	4.572.015.582	100,00	94,28
3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	63,00	Kw/Ha	377.650.000	61,52	211.407.787	102,41	55,98
3.27.03 - Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Angka Produksi Hasil peternakan	10400	Ton	285.000.000	10400	284.955.275	100,00	99,98
3.27.04 - Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100	%	2.214.450.000	100	2.201.192.183	100,00	99,40
3.27.05 - Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Persentase fasilitasi penanggulangan bencana pertanian	75	%	75.000.000	75	73.994.800	100,00	98,66
3.27.07 - Program Penyuluhan Pertanian	Persentase peningkatan kelas kelompok tani	4,5	%	1.488.142.800	4,5	1.211.578.744	100,00	81,42

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup				35.928.347.007		34.763.742.367	282,41	96,76
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Kepuasan Masyarakat Perangkat Daerah	Sangat Baik (88,62)		17.437.742.105	Sangat Baik (88,63)	17.211.805.665	100,00	98,70
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	A (80,20)			A (80,20)		100,00	
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup yang Dimanfaatkan	100		489.600.000	100	377.139.125	100	77,03
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Persentase Penurunan Pencemaran	0,15		239.985.647	2,72	236.105.460	1.813,33	98,38
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Persentase Peningkatan RTH	100		1.903.012.111	100,00	1.602.247.595	100,00	84,20
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	Persentase Pelaku Usaha/Kegiatan yang Mematuhi Ketentuan Lingkungan	100		48.000.000	100	47.512.586	100	98,98
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Persentase Peningkatan Masyarakat yang Mendapatkan Penghargaan Lingkungan Hidup	100		60.000.000	100	17.319.800	100	28,87
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup Yang Terselesaikan	100		10.800.000	433	10.079.500	433	93
Program Pengelolaan Persampahan	Persentase sampah di tps yang terangkut ke tpa sesuai standar	100		12.549.241.397	97,10	12.184.751.036	97,10	97,10
Program Pengelolaan Persampahan (Uptd Pengelolaan Sampah)	Persentase Sampah yang Ditampung di TPA	100		3.189.965.747	100,00	3.076.781.600	100,00	96,45
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi		100	%	10.088.057.000	105,81	10.071.177.190	100,15	99,83

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil								
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	9.045.490.100	125,54	9.033.638.833	100,00	99,43
Program Pendaftaran Penduduk	Persentase Pelayanan Pendaftaran Penduduk	98	%	487.566.900	104,93	487.058.955	101,68	100,50
Program Pencatatan Sipil	Persentase Pencatatan Sipil	99,07	%	265.000.000	98,59	264.176.634	99,05	99,69
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	%	260.000.000	100,00	256.449.018	100,00	98,15
Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Persentase Pengelolaan Profil Kependudukan	100	%	30.000.000	100,00	29.853.750	100,00	99,51
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				15.398.601.000	-	14.489.115.011	100,00	94,09
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana				14.172.361.900	-	13.270.343.091	100,00	93,64
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				4.747.278.800		4.679.314.648	100,00	98,57
Program Pengendalian Penduduk				294.200.000		223.615.723	100,00	76,01
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)				5.115.049.000	5.085	4.456.303.640	100,00	87,12
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)				4.015.834.100	320	3.911.109.080	100,00	97,39

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak				1.226.239.100	1	1.218.771.920	100,00	99,39
Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan				45.000.000	1	44.130.550	100,00	98,07
Program Perlindungan Perempuan				130.120.000		129.708.480	100,00	99,68
Program Peningkatan Kualitas Keluarga				760.000.000		754.941.202	100,00	99,33
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)				137.327.000		136.277.288	100,00	99,24
Program Perlindungan Khusus Anak		50		153.792.100		153.714.400	100,00	99,95
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan				46.778.191.817		45.305.721.697		96,85
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Tercapainya IKM Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	79,50 (B)	31.991.729.000	-	31.905.742.274	-	-
	Tercapainya SAKIP Perangkat Daerah	Kategori/Nilai	82,65 / A	9.938.800.817	-	9.905.237.199	-	-
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)	INDEKS KELANCARAN LALU LINTAS	VCR	0,36	4.369.990.000	-	3.170.390.274	-	-
	RASIO KONEKTIVITAS KAB / KOTA	Nilai	0,64	477.672.000	-	324.351.950	-	-
Dinas Komunikasi Dan Informatika		100		18.706.862.000,00	101,71	18.026.394.595,00	101,71	96,36
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (81 Point)	81	Poin	6.316.348.400,00	82,01	6.287.087.485,00	101,25	99,54
	Nilai IKM Diskominf (87 Point)	87	Poin		90,27	-	103,76	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Nilai pengelolaan informasi dan komunikasi publik	92	%	2.899.200.000,00	94,08	2.884.403.212,00	102,26	99,49
Program Aplikasi Informatika	Persentase Pemenuhan Dokumen Evidence Penilaian SPBE (100%)	100	%	8.995.613.600,00	100	8.361.055.785,00	100,07	92,95
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Peningkatan pengunjung web open data	20	%	259.682.000,00	20,00	257.958.663	100,00	99,34
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian		100		236.018.000,00	295,00	235.889.450	101,72	99,95
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Nilai kelengkapan pengamanan informasi	290	Poin	236.018.000,00	295,00	235.889.450	101,72	99,95
Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian Dan Perdagangan				20.568.312.523		18.328.217.035		89,11
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah				12.701.401.900		12.378.335.755		97,46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM Perangkat Daerah	85	Kategori/ point	3.055.975.429	85,04	2.942.173.743	100,05	96,28
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	79	Kategori/ point	8.600.556.471	-	8.566.824.678	0,00	99,61
Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	Persentase SDM Koperasi yang bersertifikat kompetensi	8,53	%	205.535.000	10,0	194.336.250	117,23	94,55
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	Laju Pertumbuhan Volume Usaha Koperasi	2,5	%	228.800.000	8	178.339.215	320,00	77,95
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	Persentase Peningkatan Modal Usaha Mikro	0,03	%	-	3,60		12000,00	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Persentase Peningkatan SDM Usaha Mikro yang Bersertifikat	5,56	%	610.535.000	3,17	496.661.869	57,00	81,35
Urusan Pemerintahan Pilihan				7.866.910.623		5.949.881.280		75,63
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan				6.401.477.500		4.866.044.414		76,01
Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Laju Sarana Distribusi Perdagangan	85	%	5.451.577.500	85	4.039.431.943	100,00	74,10
Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	Persentase Rekomendasi Hasil Pemantauan yang Ditindaklanjuti	10	%	162.400.000	10	162.239.336	100,00	99,90
Program Pengembangan Ekspor	Nilai Ekspor non migas	31	US$ (Juta)	575.000.000	-	455.786.761	76,52	79,27
Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	Persentase Konsumen yang dilayani dan ditangani tepat waktu pada UPTD Metrologi Legal	100	%	212.500.000	100,00	208.586.374	125,33	98,16
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian				1.465.433.123		1.083.836.866		
Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	Persentase Peningkatan Industri	6,67	%	1.465.433.123	46	1.083.836.866	461,00	73,96
Program Penunjang Urusanpemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah dan Capaian IKM Perangkat Daerah	*100*	*Persen*	7.126.382.000		6.999.945.816	99,88	98,23
Program Pelayanan Penanaman Modal	IKM Pelayanan Perzinan / Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	100	Persen	151.030.000	100	150.824.500	100,00	99,86
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Persentase pelaku usaha yang patuh terhadap ketentuan penanaman modal / Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100	Persen	435.817.000	100	434.939.400	100,00	99,80
Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan Dan Pariwisata				21.040.331.857	0	20.238.845.082		96,19 %

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				13.966.527.833	0	13.590.484.813		
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	7.167.735.283	100	7.125.536.763	100,00%	99,41 %
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Persentase Pemuda / OKP yang dibina	30,77	%	2.264.002.850	15	2.194.189.875	50,00%	96,92 %
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	36,59	%	4.534.789.700	35	4.270.758.175	95,65%	94,18 %
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan				1.906.250.000		1.902.845.916		
Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase Pengembangan Kebudayaan	68,63	%	370.000.000	69	369.172.466	100,03%	99,78 %
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Persentase Pembinaan dan Pengembangan Kesenian Tradisional	25	%	1.536.250.000	28	1.533.673.450	111,20%	99,83 %
Urusan Pemerintahan Pilihan				3.047.651.900	0	2.827.059.783		
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata				3.047.651.900	0	2.827.059.783		
Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	61,22	%	102.835.000	61	62.006.942	100,00%	60,30 %
Program Pemasaran Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	542.625	Orang	1.868.253.200	0	1.754.180.306	0,00%	93,89 %
Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	Meningkatnya Kapasitas SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	56,67	%	1.076.563.700	57	1.010.872.535	100,47%	93,90 %
Uptd Pengelola Komplek Dadaha				2.119.902.124	0	1.918.454.570		
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga				2.119.902.124	0	1.918.454.570		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	36,59	%	2.119.902.124	17	1.918.454.570	46,86%	90,50 %
Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan Daerah				7.094.435.600	20.821	6.927.612.063		97,65
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan				6.412.504.600	20.821	6.266.313.543		97,72
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	81	Poin/ Nilai	5.958.783.630	80,15	5.841.724.557	98,95	98,04
	Nilai IKM Perangkat Daerah	84	Poin/ Nilai		84		100,00	
Program Pembinaan Perpustakaan	Jumlah Kunjungan Masyarakat	20736	Orang	453.720.970	20.741	424.588.986	100,02	93,58
	Jumlah Keterlibatan Masyarakat Dalam Kegiatan Sosialisasi	530	Orang		600		113,21	
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan				681.931.000		661.298.520		96,97
Program Pengelolaan Arsip	Nilai aspek kebijakan	19,5	Poin	681.931.000	11,32	661.298.520	58,05	96,97
	Nilai aspek pembinaan	13,6	Poin		15,66		115,15	
	Nilai aspek pengelolaan arsip statis	11	Poin		18,14		164,91	
	Nilai aspek sumber daya kearsipan	13	Poin		13,33		102,54	
Sekretariat Daerah				86.064.951.974		83.688.356.930	95,69	97,24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Nilai	78,88	463.747.757	78,87	460.912.737	99,99	99,39
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	83,75	28.829.721.407	83,91	28.696.620.201	100,19	99,54
	Indeks Kepuasan Stakeholder terhadap Layanan Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya	Nilai	85	22.132.927.611	82,55	21.469.874.696	97,12	97,00
	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	83	312.767.872	82,47	307.781.651	99,36	98,41

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik	%	100	205.435.086	100	205.431.300	100	100
	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	88,31	125.850.886	88,10	124.943.067	99,76	99,28
	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	10,55	416.629.456	10,55	415.151.346	100	99,65
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	100	612.553.550	100	610.422.050	100	99,65
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	45,00	1.303.060.600	68,91	1.284.288.240	153,13	98,56
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	45,00	27.730.860.633	73,83	26.219.011.163	164,07	94,55
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	86,88	1.021.267.000	97,78	1.004.784.083	112,55	98,39
Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat.	Nilai Daerah Kabupaten / Kota Peduli HAM	Nilai	92,70	-	90,3	-	97,41	0,00
Program Perekonomian Dan Pembangunan	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	45,00	891.174.397	89,06	887.824.343	197,91	99,62
Program Perekonomian Dan Pembangunan.	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	45,00	455.328.360	79,67	449.826.398	177,04	98,79
Program Perekonomian Dan Pembangunan.	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Pembangunan yang Ditindaklanjuti	%	100	681.595.420	100	675.581.740	100	99,12
Program Perekonomian Dan Pembangunan.	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	72,74	882.031.939	68,48	875.903.915	94,14	99,31
Sekretariat Dprd				63.481.654.778	42.193	61.234.202.284	96,92	96,46
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	47.093.760.617	42.136	45.805.694.216	93,83	97,26

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd	Persentase hasil pelaksanaan fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD	100	%	16.387.894.161	57	15.428.508.068	100,00	94,15
		43,99	*Poin*	*3.721.107.200*	*43,34*	*3.394.488.990*	*98,52*	*91,22*
		Inovatif (47,20)	*Kategori (Poin)*	*965.000.000*	*49,36*	*897.761.876*	*104,58*	*93,03*
		23,95	*Poin*	*3.418.050.090*	*23,82*	*3.108.347.553,0*	*99,46*	*90,94*
		20,04	*Poin*	*303.057.110*	*19,52*	*286.141.437,0*	*97,41*	*94,42*
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	*Meningkatnya Perencanaan Kinerja Pembangunan Daerah yang berkualitas*	*25,61*	*Poin*	*1.795.142.690*	*24,43*	*1.568.352.693*	*95,39*	*87,37*
Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah	*Meningkatnya Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah yang berkualitas*	*23,98*	*Poin*	*100.964.510*	*24,16*	*92.898.577*	*100,75*	*92,01*
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkualitas*	*25,53*	*Poin*	*1.106.350.000*	*24,51*	*1.058.960.581*	*96,00*	*95,72*
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang berkualitas*	*23,89*	*Poin*	*128.650.000*	*24,29*	*126.850.660*	*101,67*	*98,60*
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan yang berkualitas*	*25,89*	*Poin*	*516.557.400*	*24,11*	*481.034.279*	*93,12*	*93,12*
Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	*Meningkatnya Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan yang berkualitas*	*24,31*	*Poin*	*73.442.600*	*23,70*	*66.392.200*	*97,49*	*90,40*
		47,20	*Poin*	*576.779.500*	49,36	*539.690.757*	*104,58*	*93,57*

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
		30,00	*Persen*	*388.220.500*	100,00	*358.071.119*	*100,00*	*92,23*
Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah	*Meningkatnya hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah*	*85*	*%*	*388.220.500*	*100,00*	*358.071.119*	*117,65*	*92,23*
		B (61)	*Kategori*	*12.410.251.800*	*B (72,46)*	*11.793.103.021*	*118,79*	*95,03*
		B (61)	*Kategori*	*12.410.251.800*	*B (72,46)*	*11.793.103.021*	*118,79*	*95,03*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*	*A (84,00)*	*Kategori (Poin)*	*8.534.496.400*	*84,25*	*8.490.277.318*	*100,30*	*99,48*
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	*Meningkatnya Pelayanan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah*	*Sangat Baik (88,87)*	*Kategori (Poin)*	*3.875.755.400*	*89,56*	*3.302.825.703*	*106,62*	*85,22*
Keuangan				30.208.791.463,00		25.400.211.886,00	100,13	84,08
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	IKM Perangkat Daerah	89,00	A	16.016.290.095,00	89,08	14.726.439.670,00	100,09	91,95
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	84,00	A		85,86		102,21	
Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	100	%	9.413.895.368,00	100	8.087.374.913,00	100,07	85,91
	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	100	%		100			
	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	100	%		100			
Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	100	%	4.778.606.000,00	100	2.586.397.303,00	98,13	54,12
Badan Pendapatan Daerah				27.480.417.156		26.178.872.900		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota				21.381.339.057		20.510.968.645		95,93
	Persentase pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah							
	Nilai SAKIP Badan Pendapatan Daerah	A(82,91)	Ktgr					
	Nilai IKM Badan Pendapatan Daerah	Sangat Baik (88,31)	Ktgr					
Program Pengelolaan Pendapatan Daerah				6.099.078.099		5.667.904.255	100,00	92,93
	Capaian Pajak Daerah							
	Capaian PAD bukan pajak daerah							
	Persentase Dokumen Target Pendapatan Asli Daerah yang Akurat	100	%					
	Persentase penerapan kebijakan teknis	100	%					
	Persentase pelayanan penerimaan pajak yang sesuai standar	100	%					
	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pendapatan yang ditindaklanjuti	100	%					
	Persentase Layanan yang memanfaatkan teknologi informasi	100	%					
Badan Kepegawaian Dan Pengembangan Sumber Daya Manusia				13.725.644.094		13.244.238.159	108,46	96,49
Kepegawaian				12.698.644.094		12.221.638.879	105,18	96,24
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang perangkat daerah	100	%	10.085.685.294		9.955.320.419	100,00	98,71
Program Kepegawaian Daerah	Meningkatnya kualitas pengadaan ASN			1.034.788.800		706.741.535	100,00	68,30
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepegawaian			224.218.500		223.337.100	100,00	99,61

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Meningkatnya cakupan pemetaan kompetensi			1.071.061.500		1.069.204.502	100,00	99,83
	Meningkatnya kualitas evaluasi kinerja dan penaganan disiplin			282.890.000		267.035.323	141,47	94,40
Pendidikan Dan Pelatihan				1.027.000.000		1.022.599.280	115,00	99,57
Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	100	%	1.027.000.000		1.022.599.280	115,00	99,57
Inspektorat				18.839.864.911		17.004.957.103	103,21	90,26
Inspektorat Daerah				18.839.864.911		17.004.957.103	103,21	90,26
(S-1) Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi General, Bidang Pengawasan Fungsional	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3	Level	16.393.415.166	3,00	14.747.707.613	100,00	
(S-3) Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Pada Inspektorat	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Baik	Katergori Point					
		62,65			-		-	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Level Kapabilitas APIP	3	Level	16.393.415.166	3,00	14.747.707.613	100,00	
	Nilai SAKIP Inspektorat Daerah	84,72	Kategori Point		84,86		100,17	
	Nilai PM maturitas penyelenggaraan SPIP Inspektorat Daerah	3,075	Point		3,47		112,85	
	Nilai IKM Inspektorat Daerah	83,50 (Baik)	Kategori		83,66		100,19	
(S-1) Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI	85,00	%		80,77		95,02	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
General, Bidang Pengawasan Fungsional								
	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3	Level		3,00		100,00	
	Hasil Survey Penilaian Integritas	74	Point		-		-	
	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	17,10	Nilai		17,22		100,70	
Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase TLHP yang diverifikasi	100	%	1.460.905.845	100,00	1.396.031.748	100,00	95,56
	Level Kapabilitas APIP	3	Level		3,00		100,00	
	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaiakn sesuai standar	100	%		100,00		100,00	
	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaiakn sesuai standar	100	%		100,00		100,00	
	Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100	%		60,00		60,00	
	Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100	%		100,00		100,00	
	Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	100	%		100,00		100,00	
(S-1) Meningkatnya Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi General, Bidang Pengawasan Fungsional	Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	3	Level		3,00		100,00	
	Manajemen Risiko Indeks (MRI)	2	Indeks		-		-	
	Nilai Hasil evaluasi Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern	3	Level (Terdefini		-		-	

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Tingkat Kota		sikan) 3,075					
	Jumlah Unit kerja yang mendapatkan Predikat WBK	1	Unit Kerja		1,00		100,00	
	Indek Efektivitas Pengendalian Korupsi (IEPK)	2	Indeks		-		-	
(S-2) Meningkatnya Pengawasan Atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi	Persentase kesesuaian antara Rencana Aksi RB dengan Roadmap RB tingkat Kota Tasikmalaya	100	%		100,00		100,00	
Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi	Level Kapabilitas APIP	3	Level	985.543.900	3,00	861.217.742	100,00	87,39
	level MRI	2	Indeks		-		-	
	capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	Level (3,075)		3,00		100,00	
	capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	3	Level (3,075)		3,00		100,00	
	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	67,00	%		100,00		149,25	
	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	100	%		100,00		100,00	
	persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	100	%		100,00		100,00	
	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	100	%		100,00		100,00	
Kecamatan Cihideung				10.437.156.200	105,66	10.360.202.107	105,66	99,26
Kecamatan		100		10.437.156.200	105,66	10.360.202.107	105,66	99,26

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Kecamatan Cihideung	81,50	kategori A	6.595.318.000	98,66	6.567.610.524	98,66	99,58
	Nilai IKM Kecamatan Cihideung	91,16	kategori	463.503.656	100,73	453.572.882	100,73	97,86
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Presentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	100,00	%	32.000.000	100,00	31.899.500	100,00	99,69
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, ekbang, pemerintahan dan tantribum	100	%	3.310.534.544	100,00	3.272.337.201	100,00	98,85
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	100	%	274.452.200	100,00	273.999.860	100,00	99,84
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	100	%	35.800.000	100,00	34.782.000	100,00	97,16
Kecamatan Cipedes				8.323.332.000	323,75	8.207.379.908	94,44	98,61
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	5.578.691.500	151,00	5.545.184.507	100,00	99,40
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	614.350.000	4,50	604.174.440	100,00	98,34
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	100	%	28.570.500	1,75	28.570.400	100,00	100,00
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	35.000.000	31,00	33.596.200	100,00	95,99
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Cipedes	100	%	45.000.000	0,25	9.100.000	50,00	20,22
Kelurahan Panglayungan				491.680.000	34,00	484.888.829	100,00	98,62

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	491.680.000	34,00	484.888.829	100,00	98,62
Kelurahan Cipedes				473.480.000	34,00	463.964.698	100,00	97,99
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	473.480.000	34,00	463.964.698	100,00	97,99
Kelurahan Nagarasari				496.780.000	35,00	485.524.850	100,00	97,73
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	496.780.000	35,00	485.524.850	100,00	97,73
Kelurahan Sukamanah				559.780.000	34,00	552.375.984	100,00	98,68
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	559.780.000	34,00	552.375.984	100,00	98,68
Kecamatan Tawang								
Kecamatan				9.474.519.970,00		9.387.813.230,00	100,00	99,08
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah	100	%	6.586.129.970,00	100,00	6.566.928.133,00	87,50	99,71
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik	100	%	19.590.000,00	100	19.565.000,00	100	99,87
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	654.400.000,00	98,75	601.367.998,00	98,75	91,90
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	%	44.000.000	100	43.999.800	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan umum	0	Kegiatan	-	0	-	0,00	0,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kelurahan Tawangsari				395.080.000		386.766.641		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	%	395.080.000	100	386.766.641	100	97,90
Kelurahan Empangsari				391.480.000		390.489.000		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	%	391.480.000	100,00	390.489.000	100	99,75
Kelurahan Lengkongsari				446.380.000		443.225.140		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	%	446.380.000	100	443.225.140	100	99,29
Kelurahan Cikalang				421.180.000		419.341.918		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	%	421.180.000	100	419.341.918	100	99,56
Kelurahan Kahuripan				516.280.000		516.129.600		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		100	%	516.280.000	100	516.129.600	100	99,97
Kecamatan Indihiang			100%	10.248.459.000	-	10.064.211.775	100,00	98,20
Kecamatan			100%	10.248.459.000	-	10.064.211.775	100,00	98,20
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP Perangkat Daerah, Capaian IKM Perangkat Daerah	A (83,00) Sangat Baik (89,50)	Point	7.243.113.625	-	7.169.239.387	100,00	98,98

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Sangat Baik (89,50)	Point	413.098.375	-	351.313.364	100,00	85,04
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	100%		71.867.000	13	69.778.200	100,00	96,91
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Indihiang	1	Dokumen	45.000.000	1	43.858.500	100,00	97,46
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan Kec. Indihiang	100%		-	-	-	-	-
Kelurahan Indihiang		90%		396.580.000	1	395.234.664	100,00	99,66
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%		396.580.000	1	395.234.664	100,00	99,66
Kelurahan Sirnagalih		90%		378.280.000	57	369.682.450	100,00	97,73
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%		378.280.000	57	369.682.450	100,00	97,73
Kelurahan Parakannyasag		90%		441.580.000	1	433.427.174	100,00	98,15
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%		441.580.000	1	433.427.174	100,00	98,15
Kelurahan Panyingkiran		90%		400.380.000	100	388.759.126	100,00	97,10
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%		400.380.000	100	388.759.126	100,00	97,10
Kelurahan Sukamajukaler		90%		443.380.000	-	435.102.490	100,00	98,13

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%		443.380.000	-	435.102.490	100,00	98,13
Kelurahan Sukamajukidul				415.180.000	1	407.816.420	100,00	98,23
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase pemberdayaan masyarakat kelurahan Kec. Indihiang	90%		415.180.000	1	407.816.420	100,00	98,23
Kecamatan Kawalu				15.379.413.000				
Kecamatan		9.318		15.379.413.000	9.153	15.294.729.722	100,00	99,45
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	CAPAIAN SAKIP PERANGKAT DAERAH	1.329		9.914.946.000	1.328	9.873.646.632	99,99	99,58
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Kategori Masyarakat (IKM)	181		1.309.967.000	181	1.301.364.897	100	99,34
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		12		20.000.000	12	19.549.400	100	97,75
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase penanganan pelanggaran Ketentraman dan Ketertiban Umum Kec. Kawalu	12		8.000.000	12	8.000.000	100,00	100,00
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase pelaksanaan fasilitasi kegiatan keagamaan	39		49.600.000	39	48.116.700	100	97,01
Kelurahan Cilamajang				388.180.000		223.678.705		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	684		388.180.000	677	386.859.464	100,00	99,66
Kelurahan Gunung Tandala				447.280.000				

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1042		447.280.000	1.024	438.979.485	100,00	98,14
Kelurahan Urug				406.480.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	802		406.480.000	798	403.406.662	100,00	99,24
Kelurahan Tanjung				371.080.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	574		371.080.000	565	370.093.600	100,00	99,73
Kelurahan Cibeuti				401.080.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	768		401.080.000	743	400.295.125	100,00	99,80
Kelurahan Karanganyar				402.580.000		167.695.025		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	780		402.580.000	692	401.193.225	100,00	99,66
Kelurahan Talagasari				352.480.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	455		352.480.000	448	346.934.694	100,00	98,43
Kelurahan Leuwiliang				386.480.000				
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	340		386.480.000	340	378.782.721	100,00	98,01
Kelurahan Gunung Gede				408.880.000		198.012.847		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	814		408.880.000	814	407.736.928	100,00	99,72
Kelurahan Karsamenak				512.380.000		218.247.586		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Fasilitasi Kegiatan Administrasi Kelurahan	1486		512.380.000	1.486	509.770.189	100,00	99,49
Kecamatan Cibeureum		100,00	%	14.272.135.000,00	100,00	14.165.163.446,00	100,00	99,25
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Hasil Penilaian SAKIP Perangkat Daerah	100,00	%	10.099.882.500,00	100,00	10.046.926.242,00	100,00	99,48
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	100,00	%	27.000.000,00	2,00	25.934.710,00	100,00	96,05
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Presentase Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan	100	%	4.074.719.550	100,00	4.022.936.644	100,00	98,73
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertban Umum	100	%	42.000.000	2	40.868.000	100,00	97,30
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Presentase Penanganan Pelanggaran Ketentraman dan Ketertban Umum	1	Kegiatan	28.532.950	2	28.497.850	100,00	99,88
Kecamatan				11.961.675.000,00		11.931.913.773,00	100,00	99,75
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah			8.467.458.250,00		8.450.596.027,00	100,00	99,80
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik	20		80.500.000,00	20	80.495.600,00	100	99,99

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	6		141.776.750,00	6,00	140.971.660,00	100,00	99,43
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	3	Laporan	42.000.000	3	41.987.000,00	100,00	99,97
Kelurahan Tamansari				386.080.000		385.704.776		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		386.080.000	4	385.704.776	100	100
Kelurahan Mugarsari				359.980.000		352.237.672		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		359.980.000	4	352.237.672	100	98
Kelurahan Tamanjaya				411.880.000		411.678.970		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		411.880.000	4	411.678.970	100	100
Kelurahan Sumelap				369.580.000		368.789.700		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		369.580.000	4	368.789.700	100	100
Kelurahan Setiawargi				458.980.000		458.482.351		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		458.980.000	4	458.482.351	100	100
Kelurahan Mulyasari				454.480.000		453.680.631		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		454.480.000	4	453.680.631	100	100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kelurahan Sukahurip				389.680.000		389.273.080		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		389.680.000	4	389.273.080	100	100
Kelurahan Setiamulya				399.280.000		398.016.306		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		399.280.000	4	398.016.306	100	100
Kecamatan Mangkubumi				12.354.314.000	#REF!	12.250.731.070	100,00	99,16
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	8.474.715.300	210,75	8.446.190.429	100,00	99,66
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	36.500.000	3,00	34.516.300	100,00	94,57
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	394.958.700	69,00	386.216.355	100,00	97,79
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Mangkubumi	100	%	66.400.000	4,00	64.347.850	100,00	96,91
Kelurahan Mangkubumi				469.180.000	25,00	448.698.375	100,00	95,63
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	469.180.000	25,00	448.698.375	100,00	95,63
Kelurahan Cigantang				404.380.000	27,00	400.005.097	100,00	98,92
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	404.380.000	27,00	400.005.097	100,00	98,92
Kelurahan Karikil				398.980.000	25,00	395.053.950	100,00	99,02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	398.980.000	25,00	395.053.950	100,00	99,02
Kelurahan Linggajaya				485.380.000	23,00	476.956.700	100,00	98,26
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	485.380.000	23,00	476.956.700	100,00	98,26
Kelurahan Cipawitra				377.680.000	26,00	371.143.191	100,00	98,27
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	377.680.000	26,00	371.143.191	100,00	98,27
Kelurahan Sambongpari				378.580.000	26,00	364.654.514	100,00	96,32
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	378.580.000	26,00	364.654.514	100,00	96,32
Kelurahan Sambongjaya				453.880.000	25,00	450.823.290	100,00	99,33
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	453.880.000	25,00	450.823.290	100,00	99,33
Kelurahan Cipari				413.680.000	24,00	412.125.019	100,00	99,62
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	413.680.000	24,00	412.125.019	100,00	99,62
Kecamatan Bungursari				11.677.720.000	434,41	11.603.660.473	100,00	99,37
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah	100	%	8.362.358.000	139,91	8.317.365.998	100,00	99,46
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase Penyelengaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	100	%	26.775.000	4,50	26.774.550	100,00	100,00

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	534.027.000	11,00	532.301.020	100,00	99,68
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan Bungursari	100	%	42.000.000	3,00	41.999.600	100,00	100,00
Kelurahan Sukamulya				363.580.000	29,00	358.136.455	100,00	98,50
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	363.580.000	29,00	358.136.455	100,00	98,50
Kelurahan Sukarindik				404.080.000	29,00	402.772.200	100,00	99,68
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	404.080.000	29,00	402.772.200	100,00	99,68
Kelurahan Bungursari				372.880.000	74,00	369.469.876	100,00	99,09
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	372.880.000	74,00	369.469.876	100,00	99,09
Kelurahan Sukajaya				374.980.000	30,00	367.446.416	100,00	97,99
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	374.980.000	30,00	367.446.416	100,00	97,99
Kelurahan Cibunigeulis				397.880.000	26,00	393.128.200	100,00	98,81
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	397.880.000	26,00	393.128.200	100,00	98,81
Kelurahan Bantarsari				432.580.000	37,00	429.072.236	100,00	99,19
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	432.580.000	37,00	429.072.236	100,00	99,19

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Kelurahan Sukalaksana				366.580.000	51,00	365.193.922	100,00	99,62
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	100	%	366.580.000	51,00	365.193.922	100,00	99,62
Kecamatan Purbaratu								
Kecamatan		131,00		9.869.175.000	34,70	9.764.769.870	99,32	96,56
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perentase Keselarasan Perencanaan Perangkat Daerah			7.114.093.400		7.060.477.905	100,00	99,25
Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik	Persentase penyelengaraan pemerintahan pelayanan Publik	2		31.980.000,00	2	31.950.000,00	100,00	99,91
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	Persentase Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	4		367.468.600,00	3,70	341.963.200,00	92,50	93,06
Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	100	Laporan	9.500.000	4	9.500.000,00	100,00	100,00
Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	1	Laporan	38.953.000	1	28.810.000,00	100,00	73,96
Kelurahan Sukanagara				419.680.000		415.999.700		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		419.680.000	4	415.999.700	100,00	99
Kelurahan Sukamenak				391.180.000		390.835.690		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		391.180.000	4	390.835.690	100,00	100
Kelurahan Sukaasih				377.980.000		374.751.700		

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		377.980.000	4	374.751.700	100,00	99
Kelurahan Sukajaya				371.080.000		369.505.113		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		371.080.000	4	369.505.113	100,00	100
Kelurahan Purbaratu				359.980.000		354.568.369		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		359.980.000	4	354.568.369	100,00	98
Kelurahan Singkup				387.280.000		386.408.193		
Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		4		387.280.000	4	386.408.193	100,00	100
Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik				62.766.732.530		61.345.318.012	100,00	97,74
Unsur Pemerintahan Umum				62.766.732.530	-	61.345.318.012	100,00	97,74
Kesatuan Bangsa Dan Politik				62.766.732.530	-	61.345.318.012	100,00	97,74
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Capaian SAKIP perangkat daerah	80	kategori	3.347.956.700	80	3.209.096.242	100,00	95,85
Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1	persen	7.482.749.000	1,0	7.060.712.858	100,00	94,36
Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai	0,55	persen	6.720.095.000	0,55	6.452.345.802	100,60	96,02

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan/Sub Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran RENJA Tahun berjalan (tahun n-1)			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RENJA yang Dievaluasi (tahun n-1)		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RENJA Tahun n-1 (%)	
		K		Rp.	K	Rp.	K	Rp.
	Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik							
Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase ormas terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	65	persen	4.213.584.180	65	4.006.886.582	100	95,09
Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	Persentase masyarakat terbina yang memiliki rencana aksi tindak lanjut di Bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	0,48	persen	4.347.750.000	0,48	4.246.113.530	100	98
Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase potensi ancaman dan gangguan yang terkendali	70	persen	36.654.597.650	70	36.370.162.998	100	99

Dari uraian capaian tersebut di atas, dapat diidentifikasi faktor pendorong dan penghambatnya. Faktor pendorong pencapaian kinerja dan anggaran antara lain:

1) Kapasitas aparatur pelaksana kegiatan.
2) Pemanfaatan Teknologi Informasi.
3) Sarana dan prasarana penunjang.
4) Komitmen pimpinan dan aparatur untuk pelaksanaaan program dan kegiatan /sub kegiatan untuk selalu normatif sesuai peraturan perundang-undangan.
5) Anggaran dapat menjadi faktor pendorong maupun penghambat, dimana Ketika anggaran yang diberikan mencukupi maka dapat mendorong ketercapaian kinerja program dan kegiatan sedangkan ketika anggaran yang diberikan kurang dari cukup, maka dapat menjadi penghambat keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
6) Manajemen pembangunan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi sudah berjalan sinergis. Hal ini dapat terlihat dari penggunaan input berupa dana pada kegiatan dapat dialokasikan secara efektif dan efisien tetapi capaian dari output sampai dengan outcome kegiatan dapat mencapai hasil yang maksimal.
7) LAKIP instansi pada tiap satuan kerja perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya telah dibuat secara periodik sebagai bentuk transparansi dan pengukuran kinerja instansi, dengan didukung oleh keselarasan dan kesesuaian indikator kinerja kegiatan dan indikator kinerja sasaran pada masing-masing satuan unit kerja sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas kinerja instansi.
8) Terlaksananya kegiatan sesuai dengan waktu yang ditentukan sesuai arahan dan bimbingan dari pimpinan yang optimal, dukungan dari staf dan bawahan, perencanaan, dukungan anggaran yang tersedia, dukungan data dan informasi yang akurat serta terjalinnya komunikasi dan koordinasi yang cukup baik.
9) Sinergitas yang baik antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
10) Dukungan stakeholder yaitu pihak yang juga memiliki kepentingan dalam keberlangsungan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, misalnya sesama Perangkat Daerah atau juga instansi-instansi lainnya. Ketika stakeholder dapat bekerjasama dengan baik, maka dapat membantu dalam ketercapaian kinerja program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
11) Paradigma pemerintah daerah dalam proses pembangunan yang menempatkan masyarakat sebagai salah satu subyek pembangunan.
12) Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam keterlibatan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
13) Adanya dokumen perencanaan dengan indikator kinerja yang terukur serta dilakukannya monitoring dan evaluasi secara berkala.
14) Tingginya komitmen Perangkat Daerah untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
15) Adanya penilaian kinerja Perangkat Daerah setiap bulannya sehingga organisasi pemerintah daerah memiliki komitmen yang tinggi untuk meningkatkan kinerja fisik dan keuangan pada masing-masing Perangkat Daerah.

Adapun faktor penghambat dalam pencapaian kinerja dan anggaran program dan kegiatan adalah:

1) Sistem pencairan baru dari sehingga perlu pelatihan serta adaptasi baru.
2) Masih adanya kendala dalam sistem informasi pemerintahan daerah dalam proses pencairan.

3) Kurangnya komitmen Pelaksana Pekerjaan terhadap jadwal kegiatan yang telah ditetapkan.
4) Kurangnya pemahaman dalam proses perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan program, kegiatan, dan sub kegiatan.
5) Banyak SDM yang juga masih belum terampil dalam mengolah data dan menyusun laporan Evaluasi Hasil Renja.
6) Tahapan dan proses pencairan dana sering mengalami keterlambatan.
7) Kurangnya koordinasi antara pimpinan dan bawahan dalam melaksanakan kegiatan.
8) Waktu pelaksanaan berkaitan erat dengan perencanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan, ketika waktu pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan tidak sesuai dengan perencanaan maka dapat menjadi faktor penghambat keberjalanan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
9) Kejadian tidak terduga merupakan kejadian yang tidak diduga akan terjadi pada tahun perencanaan, misalnya bencana alam, wabah, dan lain sebagainya yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan program, kegiatan, dan sub-kegiatan.
10) Ketersediaan data, ketersediaan data sektoral yang belum lengkap dan terpadu.
11) Lemahnya/kurangnya pemahaman para stakeholder terhadap system perencanaan pembangunan sesuai dengan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.
12) Kurangnya sarana dan prasana dalam mendukung kinerja pegawai.
13) Lemahnya tingkat koordinasi antar instansi terkait.
14) Rendahnya/terbatasnya kapasitas fiskal APBD.
15) Transisi dari sistem lama ke sistem baru yang masih perlu disosialisasikan.

2.2.1. Evaluasi Capaian Indikator Kinerja Utama Daerah

Indikator kinerja utama daerah telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Tasikmalaya Nomor 050.13/Kep.857-Bappelitbangda/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023-2026. Adapun capaian indikator kinerja utama Pemerintah Kota Tasikmalaya Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

Tabel 2.81.
Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024
Pemerintah Kota Tasikmalaya

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian s.d Tahun 2024	Target Kondisi Akhir RPD 2026	Persentase Capaian terhadap Target RPD
1.	**T1. Meningkatnya kesejahteraan sosial**		**IT.1. Angka kemiskinan**	**(%)**	**11,33**	**11,10**	**11,10**	**10,20**	**91,89%**
		S1. Menurunnya Tingkat Kemiskinan	IS.1. Angka kemiskinan	(%)	11,33	11,10	11,10	10,20	91,89%
			IS.2. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial	Poin	90	100	100	94	106,38%
2.	**T2. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas berbasis kearifan lokal**		**IT.2. Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**74,28**	**76,03**	**76,03**	**74,96**	
		S2. Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan masyarakat	IS.3. Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,89	9,63	9,63	10,16	94,78%
			IS.4. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,52	13,50	13,50	13,55	
			IS.5. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan	Poin	75			79	
		S3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	IS.6. Usia Harapan Hidup	Tahun	72,69	75,31	75,31	72,94	
			IS.7. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan	Poin	80			90	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian s.d Tahun 2024	Target Kondisi Akhir RPD 2026	Persentase Capaian terhadap Target RPD
		S4. Meningkatnya pengendalian penduduk dan pengarusutamaan gender	IS.8. Laju Pertumbuhan Penduduk	%	0,61	1,21	1,21	0,41	
			IS.9. Indeks Pemberdayaan Gender	Poin	60,10	58,81 (2023)		60,30	
			IS.10. Indeks Pembangunan Gender	Poin	91,94	92,96 (2023)		92,24	
		S5. Meningkatnya pembinaan dan apresiasi terhadap pemuda, olahraga, seni dan budaya daerah	IS.11. Persentase Capaian Prestasi Kepemudaan tingkat provinsi	%	3,30	4,40	4,40	5,49	
			IS.12. Persentase Capaian Prestasi Olahraga tingkat provinsi	%	36,59	53,66	53,66	41,46	
			IS.13. Persentase Pelesetarian Kebudayaan	%	68,63	68,69	68,69	78,43	
		S6. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang aman dan tertib	IS.14. Indeks Pencapaian SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum	Poin	100	100	100	100	
			IS.15. Indeks Resiko Bencana	Poin	Sedang (117,15)	Sedang (80,38)		Sedang (117,15)	
3.	**T.3. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang berkualitas**		**IT.3. PDRB adh Berlaku**	**Triliun**	**25,21**	**29,61**		26,83	
		S7. Meningkatnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan	IS.16. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,69	5,22		5,98	
			IS.17. PDRB Perkapita	Juta / Tahun/Kapita	34,35	39,45		36,26	
			IS.18. Pengeluaran Per Kapita	Juta / Tahun/Kapita	10,531	11,431		10,748	
			IS.19. Indeks Gini	Poin	0,380	0,359		0,360	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian s.d Tahun 2024	Target Kondisi Akhir RPD 2026	Persentase Capaian terhadap Target RPD
			IS.20. Inflasi	%	2,65	1,94	1,94	2,96	
		S8. Meningkatnya iklim penanaman modal dan kesempatan kerja	IS.21. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,18	6,49		6,53	
			IS.22. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) adh Berlaku	(milyar)	8.283,45	9.075,99		8.844,56	
4.	**T.4. Terwujudnya Infrastruktur dan Penataan Ruang yang mendukung Kota Nyaman Huni berwawasan Lingkungan**		**IT.4. Indeks kualitas infrastruktur dan Lingkungan Hidup**	**Poin**	74,48	80,92	80,92	83,62	
		S9. Meningkatnya layanan infratruktur kota yang berkualitas	IS.23. Indeks Persentase kemantapan jalan	Poin	62,05	80,45	80,45	73,67	
			IS.24. Indeks kawasan permukiman layak huni	Poin	31,77	43,70	43,70	65,36	
			IS.25. Indeks Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Poin	94,74	100	100	100	
			IS.26. Indeks Pencapaian Minimal Bidang Perumahan dan Permukiman	Poin	100	100	100	100	
		S10. Meningkatnya Kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan;	IS.27. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	Poin	58,15	58,52 (2023)	58,52	58,59	
			IS. 28. Persentase Pengelolaan sampah	%	99	99	99	100	
			IS.29. Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	80	98,7	98,7	99,5	
5.	**T5. Terwujudnya implementasi reformasi birokrasi**		**IT.5. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Kategori/Poin**	CC (57,58-60,00)	76,63		B 60,01-65,00	
		S11. Meningkatnya kualitas layanan publik dan	IS.30. Indeks Kepuasan Masyarakat	Kategori/Poin	Baik (83,32 - 85,80)	Baik (88,50)		Baik 85,80 - 88,30	

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian s.d Tahun 2024	Target Kondisi Akhir RPD 2026	Persentase Capaian terhadap Target RPD
		akuntabilitas pengelolaan keuangan dan kinerja daerah yang inovatif dan berbasis teknologi informasi;	IS.31. Indeks Inovasi Daerah	Kategori/Poin	Inovatif (52,43)	Inovatif (49,36)		Sangat Inovatif (62,01)	
			IS.32. Indeks SPBE	Kategori/Poin	Baik (3,0)	Sangat Baik (3,96)	Sangat Baik (3,96)	Baik (3,2)	
			IS.33. Opini atas laporan keuangan pemerintah daerah	(Opini)	WTP	WTP	WTP	WTP	
			IS.34. Nilai Evaluasi SAKIP	Kategori/Poin	BB (72,50-75,00)	BB (71,83) (2023)	BB (71,83) (2023)	BB (72,50- 75,00)	
			IS.35.Nilai Evaluasi LPPD	Kategori	Sangat Tinggi			Sangat Tinggi	
			IS.36. Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3		3	

Sumber: Evaluasi RKPD Tasikmalaya Tahun 2024, Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025

2.2.2. Evaluasi Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan
   Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pendidikan anak usia dini;
   b. pendidikan dasar; dan
   c. pendidikan kesetaraan.

2. SPM Kesehatan
   Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   d. pelayanan kesehatan balita;
   e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
   f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
   h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
   i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
   j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
   k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
   l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.

3. SPM Pekerjaan umum
   Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
   b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.

4. SPM Perumahan rakyat
   Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
   b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.

5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
   Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   b. pelayanan informasi rawan bencana;
   c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
   e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

6. SPM Sosial
   Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM:

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

Sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal bahwa Standar Pelayanan Minimal (SPM) merupakan pelaksanaan atas urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan merujuk pada Permendagri 59 tahun 2021. SPM disusun sebagai alat Pemerintah dan Pemerintahan Daerah untuk menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat (khusunya pada masyarakat miskin) secara merata dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa SPM adalah jenis pelayanan dasar yang pada hakekatnya merupakan hak konstitusional rakyat untuk mendapatkannya. Pelayanan dasar yang harus dipenuhi oleh pemerintah daerah terdiri dari 6 pelayanan dasar yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Lingkungan

Pemerintah Kota Tasikmalaya yakni Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan Rakyat, Keamanan dan Ketertiban Umum, dan Sosial. Berikut capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya pada Triwulan IV tahun 2024.

Tabel 2.82.
Capaian Standar Pelayanan Minimal Kota Tasikmalaya
Triwulan IV Tahun 2024

No.	Bidang Layanan	Satuan	Pencapaian SPM	
			Target 2024	Capaian Triwulan IV
1.	SPM Bidang Pendidikan	%	100,00	98,47
2.	SPM Bidang Kesehatan	%	100,00	98,30
3.	SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	%	100,00	100,00
4.	SPM Bidang Perumahan Rakyat	%	100,00	100,00
5.	SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	%	100,00	100,00
6.	SPM Bidang Sosial	%	100,00	100,00
	SPM Kota Tasikmalaya	**%**	**100,00**	**99,46**

Tabel di atas menunjukkan bahwa dari 6 (enam) SPM yang ada beberapa Target yang sudah memenuhi yaitu SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, SPM Bidang Perumahan Rakyat, SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat dan SPM Bidang Sosial. Akan tetapi ada beberapa kendala dalam penerapan SPM di Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penerapan SPM masih ada beberapa sumber daya manusia yang kurangnya pemahaman terkait teknis pelaksanaan SPM sehingga ada beberapa OPD yang Kesulitan dalam dalam pengisian;
2. Belum optimalnya kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan, misalnya pada layanan ibu melahirkan belum seluruh puskesmas dapat melayani persalinan dan perlunya peningkatan kualitas *home care*.
3. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai standar belum maksimal, pelayanan kesehatan pada usia produktif misalnya kader Posbindu PTM belum semua mendapatkan pelatihan terutama di tingkat RW, dan lain sebagainya;
4. Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum masih ada kendala keterbatasan lahan untuk pembangunan infrastruktur air minum dan air limbah serta belum adanya lembaga operator pengelola penyediaan air minum;
5. Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat masih terkendala oleh tidak adanya program relokasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya;
6. Penerapan SPM Bidang Keamanan dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat masih terkendala terbatasnya sarana dan prasarana, Selain itu belum optimalnya kelembagaan, ketatalaksanaan, maupun sumber daya manusia;
7. Penerapan SPM Bidang Sosial masih terkendala oleh sarana dan prasarana dalam pelaksanaan SPM dan belum maksimal Penanganan PPKS (Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial) yang terlantar.

2.2.3. Evaluasi Capaian Suistanable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)

Sustainable Development Goals (SDGs)/ Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) merupakan kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser ke arah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup. SDGs/TPB diberlakukan dengan prinsip-prinsip universal, integrasi dan inklusif untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan atau *"No-one Left Behind".* SDGs terdiri dari 17 Tujuan dan 169 target dalam rangka melanjutkan upaya dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir akhir pada tahun 2015 lalu. Capaian impelementasi SDGs/TPB di Kota Tasikmalaya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.83.
Capaian SDGs/TPB Kota Tasikmalaya Tahun 2023

Tujuan Pembangunan 1 Mengakhiri Kemiskinan dalam Segala Bentuk Dimanapun							
Target	Kode	Indikator	Sumber Data	Satuan	Angka Dasar (Baseline 2021)	Target SDGs	Capaian SDGs
						2023	2023
1.2	1.2.1*	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS	Persentase	13,13	11,50	11,53
1.3	1.3.1.(a)	Proporsi peserta jaminan kesehatan melalui SJSN Bidang Kesehatan.	DINKES	Persentase	80,31	100	95,42
	1.3.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	10,95	52,23	80,29
	1.3.1 (d)	Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan.	DINSOS	Jiwa	35.820		76.200
1.4	1.4.1*	Proporsi penduduk/rumah tangga dengan akses terhadap pelayanan dasar.	Dinkes, DPUTR Disperkimtan, Dishub	Persentase	PM	PM	
	1.4.1* - 2	Persentase Penduduk dengan Layanan Air Minum	DPUTR	Persentase	56,23	56,67	57,57
	1.4.1* - 3	Persentase Penduduk dengan Layanan Sanitasi	DPUTR	Persentase	61,2	61,62	62,8
	1.4.1* - 7	Indeks akses pada fasilitas penyehatan dasar	DINKES	Persentase	100,00	75%	98,12
	1.4.1.(b)	Persentase anak umur 12-23 bulan yang menerima imunisasi dasar lengkap.	DINKES	Persentase	18,43	-	-
	1.4.1.(c)	Prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,37	72,70	72,98
	1.4.1.(f)	Persentase rumah tangga kumuh perkotaan.	DISPERAWASKIM	Persentase	54,15		
1.5	1.51.*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Orang			5.375
	1.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang	2	PM	0
	1.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang	0	PM	0
	1.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang	5	PM	3
	1.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang	57	PM	33 kk
	1.5.3*	Dokumen strategi pengurangan risiko bencana (PRB) tingkat nasional dan daerah.	BPBD	Dokumen	1	1	1

Tujuan Pembangunan 2 Menghilangkan Kelaparan, Mencapai Ketahanan Pangan dan Gizi yang Baik, Serta Meningkatkan Pertanian Berkelanjutan							
	2.1.1.(a)	Prevalensi kekurangan gizi (underweight) pada anak balita.	DINKES	Persentase	5.87	0	21,69
	2.2.1*	Prevalensi stunting (pendek dan sangat pendek) pada anak di bawah lima tahun/balita.	DINKES	Persentase	14.81	14,81	10,73
	2.2.2.(c)	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan.	DKP3	Persentase	91,30	91,00	91,30
2.4	2.4.1.(a)	Proporsi luas lahan pertanian yang ditetapkan sebagai kawasan pertanian pangan berkelanjutan.	DKP3	Persentse	4,64		4,64
Tujuan Pembangunan 3 Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Seluruh Penduduk Seluruh Usia							
3.1	3.1.1*	Angka Kematian Ibu (AKI).*	DINKES	Kematian Per 100000 Kelahiran Hidup	303.87	303,8	192,22
3.2	3.2.1*	Angka Kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	1,74	8,4	7,87
	3.2.2*	Angka Kematian Neonatal (AKN) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	7.2		5,66
	3.2.2.(a)	Angka Kematian Bayi (AKB) per 1000 kelahiran hidup.	DINKES	Kematian Per 1000 Kelahiran Hidup	8,5	8,4	7,87
3.3	3.3.1.(a)	Prevalensi HIV pada populasi dewasa.	DINKES	Kasus Baru per 1000 penduduk tidak terinfeksi	0,09	-	-
	3.3.2.(a)	Insiden Tuberkulosis (ITB) per 100.000 penduduk.	DINKES	Kasus Baru per 10000 penduduk	149	-	-
	3.3.3*	Kejadian Malaria per 1.000 orang.	DINKES	API/1000 Penduduk	0,01	-	-
3.4	3.4.1.(b)	Prevalensi tekanan darah tinggi.	DINKES	Persentase	51,38	77	84,01
3.7	3.7.1.(a)	Angka prevalensi penggunaan metode kontrasepsi (CPR) semua cara pada Pasangan Usia Subur (PUS) usia 15-49 tahun yang berstatus kawin.	DPPKBP3A	Persentase	72,37		72,51
	3.7.2.(a)	Total Fertility Rate (TFR).	DPPKBP3A	Persentase	2,03	3,04	2,01
	3.8.2*	Jumlah penduduk yang dicakup asuransi kesehatan atau sistem kesehatan masyarakat per 1000 penduduk.	DINKES	Persentase	79,40		76,20
3.b	3.b.1.(a)	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas.	DINKES	Persentase	66,6	77	84,01
Tujuan Pembangunan 4 Menjamin Kualitas Pendidikan yang Inklusif dan Merata serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Sepanjang Hayat untuk Semua							
4.1	4.1.1.(a)	Persentase SD/MI berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	97,91	60,26	59,73
	4.1.1.(b)*	Persentase SMP/MTs berakreditasi minimal B.	DISDIK	Persentase	93,38	58,19	55,55

4.5	4.5.1*	Rasio Angka Partisipasi Murni (APM) pada tingkat SD/ sederajat, dan (ii) Rasio Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tingkat SMP/sederajat, SMA/ SMK/sederajat, dan Perguruan Tinggi untuk (a) perempuan/ laki-laki, (b) pedesaan/perkotaan, (c) kuintil terbawah/teratas, (d) disabilitas/tanpa disabilitas.	BPS/DISDIK	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator	Breakdown Indikator
	4.5.1* - 1b	Rasio APM SD pedesaan/perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	90,31	89,79	92,05
	4.5.1* - 2b	Rasio APK SMP pedesaan/perkotaan	BPS/DISDIK	Persentase	86,85	78,65	94,22
Tujuan Pembangunan 5 Mencapai Kesetaraan Gender dan Memberdayakan Kaum Perempuan							
5.1	5.1.1*	Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan.	DPPKBP3A	Dokumen	1	1	1
	5.2.1.(a)	Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan.	DPPKBP3A	Persentase	100	100	100
	5.2.2.(a)	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif.	DPPKBP3A	Persentase	100	100	100
5.5	5.5.1*	Proporsi kursi yang diduduki perempuan di (a) parlemen tingkat pusat dan (b) pemerintah daerah.	SETWAN	Persentase	6,67	19.32	7,14
Tujuan Pembangunan 6 Menjamin Ketersediaan serta Pengelolaan Air Bersih dan Sanitasi yang Berkelanjutan untuk Semua							
6.1	6.1.1.(a)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak.	DPUTR	Persentase	56,23	56,07	57,57
6.2	6.2.1.(b)	Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak.	DPUTR	Persentase	61,20	9,24	12,02
	6.2.1.(f)	Proporsi rumah tangga (RT) yang terlayani sistem pengelolaan air limbah terpusat.	DPUTR	Persentase	61,20	61,59	61,71
	6.3.1.(b)	Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja.	DPUTR	Persentase	15,44	PM	1,68
Tujuan Pembangunan 8 Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan, Kesempatan Kerja yang Produktif dan Menyeluruh, serta Pekerjaan yang Layak untuk Semua							
8.1	8.1.1*	Laju pertumbuhan PDRB per kapita. (ADHK)	BPS	Persentase	3,57	5,00	5,01
	8.1.1.(a)	PDRB per kapita. (ADHB)	BPS	Juta Rupiah	22,85	5,00	5,01
	8.3.1.(a)	Persentase tenaga kerja formal.	DISNAKER/BPS	Persentase	46,71	31,64	93,28
	8.3.1.(b)	Persentase tenaga kerja informal sektor pertanian.	DISNAKER/BPS	Persentase	5,50	N/A	5,49
	8.5.2*	Tingkat pengangguran terbuka berdasarkan jenis Jenis kelompok Umur	DISNAKER/BPS	Persentase	7,66		6,61
Tujuan Pembangunan 9 Membangun Infrastruktur yang Tangguh, Meningkatkan Industri Inklusif dan Berkelanjutan, serta Mendorong Inovasi							
9.2	9.2.1*	Proporsi nilai tambah sektor industri manufaktur terhadap PDB dan Perkapita	BPS	Persentase	13,83		13,82
	9.2.1.(a)	Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur.	BPS	Persentase	1,91		-16,90
Tujuan Pembangunan 10 Mengurangi Kesenjangan Intra- dan Antarnegara							

10.1	10.1.1.(a)	Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan nasional, menurut jenis kelamin dan kelompok umur.	BPS/DINSOS	Persentase	13,13	11,50	11,53
10.3	10.3.1.(b)	Jumlah penanganan pengaduan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).	SETDA	Kasus/ Aduan	34	-	-
10.4	10.4.1.(b)	Proporsi peserta Program Jaminan Sosial Bidang Ketenagakerjaan.	DISNAKER	Persentase	62,92	51,04	52,23
Tujuan Pembangunan 11 Menjadikan Kota dan Permukiman Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan							
11.5	11.5.1*	Jumlah korban meninggal, hilang dan terkena dampak bencana per 100.000 orang.	BPBD	Jiwa			5.375
	11.5.1* - 1	Korban Meninggal	BPBD	Orang	2	PM	1
	11.5.1* - 2	Korban Hilang	BPBD	Orang	0	PM	0
	11.5.1* - 3	Korban Terluka	BPBD	Orang	5	PM	9
	11.5.1* - 4	Korban Mengungsi	BPBD	Orang	57	PM	225 kk
11.6	11.6.1.(a)	Persentase rumah tangga di perkotaan yang terlayani pengelolaan sampahnya	DLH	Persentase	71,45	72	66,21
Tujuan Pembangunan 12 Menjamin Pola Produksi dan Konsumsi yang Berkelanjutan							
12.4	12.5.1.(a)	Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.	DLH	Persentase	73,86	83,45	81,77
	12.8.1.(a)	Jumlah fasilitas publik yang menerapkan Standar Pelayanan Masyarakat (SPM) dan teregister.	DLH	Persentase	25	-	-
Tujuan Pembangunan 15 Melindungi, Merestorasi dan Meningkatkan Pemanfaatan Berkelanjutan Ekosistem Daratan, Mengelola Hutan Secara Lestari, Menghentikan Penggurunan, Memulihkan Degradasi lahan, serta Mengehentikan Kehilangan Keanekaragaman Hayati							
15.1	15.1.1.(a)	Proporsi tutupan hutan terhadap luas lahan keseluruhan.	DLH	INDEKS	23,35		
16.3	16.3.1.(b)	Jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi.	SETDA	Perkara	34	30	30
16.6	16.6.1.(a)	Persentase peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/ Kota).	BPKAD	WTP	WTP	WTP	WTP
	16.6.1.(b)	Persentase instansi pemerintah dengan SAKIP > B	INSPEKTORAT	Persentase	33,33	73	71,63
	16.6.1.(c)	Persentase instansi pemerintah dengan Indeks RB > B	INSPEKTORAT	Nilai (Kategori)	58,33	70%	86,42%
	16.7.1.(a)	Persentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).	SETWAN	Persentase	6,67	19.32	7,14
	16.7.1.(b)	Persentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di lembaga eksekutif (Eselon I dan II).	BKPSDM	Persentase	6,45		3,85
16.9	16.9.1.(b)	Persentase cakupan kepemilikan akta kelahiran pada penduduk 0-17 tahun	DISDUKCAPIL	Persentase	58,33	94	98,76
Tujuan Pembangunan 17 Menguatkan Sarana Pelaksanaan dan Merevitalisasi Kemitraan Global untuk Pembangunan Berkelanjutan							
17.1	17.1.1*	Total pendapatan pemerintah sebagai proporsi terhadap PDB menurut sumbernya.	BPKAD	Persentase	10,61		7,619
	17.1.1.(a)	Rasio penerimaan pajak terhadap PDB.	Bapenda	Persentase	2,91		0,637

2.2.4. Evaluasi Capaian Kemiskinan Ekstrem

Sesuai Keputusan Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan nomor 25 tahun 2022 tentang Kabupaten/Kota prioritas percepatan pengahapusan kemiskinan ekstrem tahun 2022-2024, Kota Tasikmalaya menjadi lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem pada tahun 2022. Berdasarkan estimasi yang dihitung Satgas Data P3KE, jumlah kemiskinan ekstrim pada tahun 2023 di Kota Tasikmalaya tercatat 6,59 ribu jiwa. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, penurunan kemiskinan ekstrim di Kota Tasikmalaya sebesar 17,29 ribu jiwa atau sekitar 72,4 persen, tentunya penurunan tersebut merupakan pengaruh positif dari program dan kegiatan yang telah dijalankan untuk pengentasan kemiskinan.

2.3 Permasalahan Pembangunan

2.3.1. Permasalahan daerah yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah

Berdasarkan hasil analisis gambaran umum kondisi daerah pada subbab aspek demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan aspek daya saing daerah serta hasil evaluasi pembangunan daerah sampai dengan tahun 2024, maka rumusan permasalahan pembangunan yang perlu menjadi perhatian pada tahun 2026 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.84.
Rumusan Permasalahan Pembangunan Tahun 2026

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
1.	Aspek Geografi	1. Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Belum optimalnya pengelolaan kawasan rawan bencana; 3. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan; 4. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 5. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal; 6. Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertambahan penduduk; 7. Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH); 8. Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber; 9. Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah; 10. Kurang seimbangnya antara SDM pengangkut sampah dengan luas wilayah pengangkutan sampah dan jumlah penduduk; 11. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum; 12. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.	1. Optimalisasi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang; 2. Optimalisasi pengelolaan kawasan rawan bencana; 3. Optimalisasi pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan; 4. Optimalisasi upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup; 5. Optimalisasi Daya tampung dan debit air danau/situ; 6. Pengendalian dan konservasi sumber daya alam dan ruang; 7. Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH); 8. Sosialisasi kepada masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber; 9. Penyediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah; 10. Penambahan SDM pengangkut sampah; 11. Peningkatan pelayanan dasar air minum; 12. Peningkatan akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik.
2.	Aspek Demografi	1. Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;	1. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		2. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 3. Urbanisasi penduduk ke kawasan pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial; 4. Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio).	2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta meningkatkan pengendalian sumber daya alam dan ruang; 3. Pengendalian urbanisasi penduduk ke kawasan pusat perkotaan, dan pemenuhan kebutuhan akan sarana prasarana.
3.	Aspek Kesejahteraan Masyarakat	1. Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting; 2. Masih rendahnya daya beli masyarakat; 3. Masih rendahnya indeks ketahanan pangan; 4. Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal; 5. Terbatasnya lapangan pekerjaan; 6. Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan; 7. Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja dengan latar belakang pendidikan pencari kerja; 8. Masih tingginya AKI/ AKB; 9. Masih tingginya prevalensi stunting; 10. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal; 11. Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 12. Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular; 13. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 14. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial; 15. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 16. Belum optimalnya pemeberdayaan gender; 17. Masih rendahnya ketahanan keluarga; 18. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak; 19. Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan; 20. Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga; 21. Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga; 22. Belum optimalnya pembangunan kepemudaan; 23. Belum optimalnya capaian RLS dan HLS; 24. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian; 25. Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja; 26. Belum optimalnya link and match antara dunia Pendidikan dengan dunia kerja; 27. Masih rendahnya budaya literasi.	1. Pengendalian harga barang pokok dan penting; 2. Meningkatkan daya beli masyarakat; 3. Meningkatkan indeks ketahanan pangan; 4. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan tangguh terhadap guncangan eksternal; 5. Penciptaan lapangan pekerjaan; 6. Optimalisasi informasi ketenagakerjaan; 7. Link and Match antara Lembaga Pendidikan dengan dunia usaha; 8. Peningkatan layanan kesehatan ibu hamil dan balita; 9. Pencegahan dan penanganan balita stunting; 10. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan; 11. Pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan; 12. Pencegahan dan penanganan penyakit menular dan tidak menular; 13. Optimalisasi pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial; 14. Optimalisasi perlindungan dan jaminan sosial; 15. Peningkatan pemberdayaan fakir miskin dan PMKS; 16. Peningkatan pemberdayaan gender; 17. Peningkatan ketahanan keluarga; 18. Peningkatan perlindungan perempuan dan anak; 19. Pemajuan kesenian dan kebudayaan; 20. Penyediaan sarana dan prasarana kesenian dan olahraga; 21. Peningkatan promosi event seni budaya dan olahraga; 22. Optimalisasi pembangunan kepemudaan; 23. Peningkatan akses pendidikan; 24. Peningkatan kompetensi tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian; 25. Penciptaan lapangan kerja;

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
			26. Peningkatan budaya literasi masyarakat.
4.	Aspek Daya Saing Daerah	1. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat; 2. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi; 3. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro; 4. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 5. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro; 6. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 7. Rendahnya rasio wirausahaan (enterpreneurship); 8. Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat; 9. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 11. Belum optimalnya penataan pergudangan; 12. Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat; 13. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional; 14. Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM; 15. Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 16. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 17. Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan; 18. Krisis regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya muda; 19. Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan; 20. Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca (contoh: penggunaan pupuk dan pestisida anorganik); 21. Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan perikanan; 22. Kurangnya akses dan implementasi terhadap teknologi informasi dan digitalisasi di sektor pertanian dan perikanan; 23. Rendahnya kualitas dan kontinuitas produk pertanian dan perikanan; 24. Belum optimalnya ketersediaan sumber air irigasi; 25. Kurangnya sarana prasarana dan infrastruktur pertanian; 26. Belum optimalnya ketersediaan bahan pangan lokal; 27. Belum optimalnya akses pangan; 28. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan lokal; 29. Belum optimalnya pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan;	1. Pembinaan koperasi; 2. Peningkatan pembinaan dan pengawasan koperasi; 3. Peningkatan pemberdayaan usaha mikro; 4. Peningkatan daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk; 5. Membuka akses pasar bagi produk usaha mikro; 6. Optimalisasi pemanfaatan digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro; 7. Pendidikan wirausaha; 8. Revitalisasi pasar rakyat; 9. Pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting; 10. Penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima; 11. Penataan pergudangan; 12. Digitalisasi pasar rakyat; 13. Meningkatkan Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional; 14. Meningkatkan kualitas dan produktivitas IKM; 15. Membuka akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM; 16. Digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM; 17. Meningkatkan produktivitas pertanian dan perikanan; 18. Pembinaan generasi muda pengrajin, petani dan pembudidaya muda; 19. Meningkatkan nilai tambah usaha pertanian dan perikanan; 20. Penanganan ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan; 21. Optimalisasi pengendalian harga produk pertanian dan perikanan; 22. Peningkatan akses dan implementasi terhadap teknologi informasi dan digitalisasi di sektor pertanian dan perikanan; 23. Meningkatkan kualitas dan kontinuitas produk pertanian dan perikanan; 24. Optimalisasi ketersediaan sumber air irigasi; 25. Pemenuhan sarana prasarana dan infrastruktur pertanian; 26. Optimalisasi ketersediaan bahan pangan lokal; 27. Optimalisasi akses pangan; 28. Peningkatan diversifikasi konsumsi pangan lokal; 29. Optimalisasi pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan; 30. Pengendalian Fungsi Lahan,

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		30. Perubahan Fungsi Lahan, terutama lahan hijau dan pertanian; 31. Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang; 32. Masih rendahnya kolaborasi antar stakeholder pariwisata; 33. Belum optimalnya pengemasan industri kepariwisataan Kota Tasikmalaya; 34. Masih minimnya informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya; 35. Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh; 36. Masih terdapat rumah tidak layak huni; 37. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan; 38. Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan; 39. Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 40. Belum optimalnya pengelolaan parkir; 41. Belum terpenuhinya penyediaan perlengkapan jalan; 42. Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran; 43. Belum tersedianya pelayanan transportasi massal terintegrasi; 44. Belum optimalnya implementasi iklim investasi daerah; 45. Belum optimalnya pengelolaan data dan sistem informasi investasi daerah; 46. Belum optimalnya promosi investasi daerah; 47. Belum optimalnya pemanfaatan ruang untuk investasi daerah; 48. Belum optimalnya pelayanan dan pengendalian investasi daerah.	terutama lahan hijau dan pertanian; 31. Meningkatkan kolaborasi antar stakeholder pariwisata; 32. Optimalisasi pengemasan industri kepariwisataan Kota Tasikmalaya; 33. Peningkatan informasi kepariwisataan di wilayah Kota Tasikmalaya dan sekitarnya; 34. Penanganan kawasan permukiman kumuh; 35. Rehabilitasi rumah tidak layak huni; 36. Penyediaan bangunan pelengkap jalan; 37. Peningkatan konektivitas dan kemantapan jalan; 38. Peningkatan pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase; 39. Optimalisasi pengelolaan parkir; 40. Pemenuhan penyediaan perlengkapan jalan; 41. Optimalisasi penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran; 42. Kajian pelayanan transportasi massal terintegrasi; 43. Optimalisasi implementasi iklim investasi daerah; 44. Optimalisasi pengelolaan data dan sistem informasi investasi daerah; 45. Optimalisasi promosi investasi daerah; 46. Optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi daerah; 47. Optimalisasi pelayanan dan pengendalian investasi daerah.
5.	Aspek Pelayanan Umum	1. Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas; 2. Belum optimalnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif; 3. Belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah; 4. Pelakanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko; 5. SDM Aparatur belum sepeuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan daerah; 6. Belum optimalnya penerapan penerapan manajemen talenta, *reward and punishment* dalam pengembangan karir ASN; 7. Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasrana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 8. Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya; 9. Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan	1. Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas; 2. Optimalisasi pelayanan publik yang adaptif dan responsif; 3. Optimalisasi penggunaan TIK dalam layanan pemerintah; 4. Penerapan manajemen risiko dalam pelakanaan program dan kegiatan pemerintah; 5. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas SDM Aparatur; 6. Optimalisasi penerapan manajemen talenta, *reward and punishment* dalam pengembangan karir ASN; 7. Optimalisasi pemenuhan kualitas sarana dan prasrana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat; 8. Optimalisasi hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya; 9. Peningkatan komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas,

No	Aspek	Permasalahan	Solusi
		bangsa; 10. Belum optimalnya system inovasi daerah; 11. Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 12. Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat; 13. Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah; 14. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.	persatuan dan kesatuan bangsa; 10. Peningkatan sistem inovasi daerah; 11. Optimalisasi penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE); 12. Peningkatan Keamanan dan ketertiban umum; 13. Optimalisasi kehidupan demokrasi daerah; 14. Optimalisasi penegakan peraturan daerah.

2.3.2. Identifikasi Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintah daerah

a. Urusan Pemerintahan Wajib Pelayanan Dasar

1) Pendidikan
   a. Belum optimalnya capaian Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS);
   b. Masih Banyaknya usia 5-6 tahun yang belum bersekolah pada jenjang Pendidikan Paud;
   c. Kondisi sarana dan prasarana pendidikan yang masih belum memadai.
2) Kesehatan
   a. Masih tingginya Angka Kematian Ibu dan Angka Kematian Bayi;
   b. Masih tingginya prevalensi stunting;
   c. Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal;
   d. Masih terdapat masyarakat miskin yang belum mendapatkan pelayanan jaminan kesehatan nasional;
   e. Belum optimalnya ketersediaan obat dan pelayanan kefarmasian sesuai standar;
   f. Masih terdapatnya balita dengan kondisi gizi buruk;
   g. Belum optimalnya kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan kesehatan olahraga;
   h. Belum optimalnya kesehatan keluarga, penanganan penyakit menular dan tidak menular;
   i. Masih kurangnya tenaga kesehatan dengan kompetensi tertentu antara lain sub spesialis dan spesialis tertentu.
3) Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
   a. Jalan dalam kondisi baik masih belum optimal baru mencapai 67,69%.
   b. Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan, terutama drainase jalan baru 17,43% yang kondisinya baik ;
   c. Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses air minum (57,57%), dan memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik (62,8%);
   d. Belum optimalnya kualitas jaringan irigasi. Capaian rasio daerah irigasi kewenangan kota yang dilayani oleh jaringan irigasi baru mencapai 39,95%;
   e. Terdapat 9 gedung kantor perangkat daerah dan 14 gedung kantor kelurahan yang kondisinya rusak.
4) Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
   a. Masih terdapat kawasan permukiman kumuh yang menjadi kewenangan pemerintah kota seluas 69,81 Hektar dari 82,68 Hektar;
   b. Masih terdapat rumah tidak layak huni sebanyak 7.688 unit (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025);

c. Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum) baru mencapai 48,22% (Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, 2025).

5) Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat
   a. Masih terdapat masyarakat yang kurang patuh terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
   b. Belum optimalnya penegakan peraturan daerah;
   c. Belum optimalnya sarana dan prasarana penanggulangan bencana.
6) Sosial
   a. Belum optimalnya pengelolaan data Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS);
   b. Belum optimalnya perlindungan dan jaminan social;
   c. Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;
   d. Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PPKS.

b. Urusan Pemerintahan Wajib Non Pelayanan Dasar

1) Tenaga Kerja
   a. Masih tingginya angka pengangguran;
   b. Masih rendahnya kompetensi tenaga kerja;
   c. Belum adanya sarana Balai Latihan Kerja (BLK);
   b. Kurang optimalnya hubungan industrial, pengantar kerja dan instruktur pelatihan ketenagakerjaan;
   c. Belum optimalnya peran lembaga ketenagakerjaan;
   d. Belum optimalnya *link and match* antara dunia pendidikan dan pelatihan dengan dunia usaha;
   e. Belum optimalnya penempatan kerja bagi pencari kerja terdaftar.
2) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
   a. Belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender.
   b. Masih rendahnya ketahanan keluarga;
   c. Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak.
3) Pangan
   a. Belum optimalnya ketersediaan bahan pangan local;
   b. Belum optimalnya akses pangan;
   c. Rendahnya diversifikasi konsumsi pangan lokal;
   d. Belum optimalnya pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan;
4) Lingkungan Hidup
   a. Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan;
   b. Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup
   c. Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal;
   d. Belum optimalnya pengelolaan sampah dari hulu sampai ke hilir secara komprehensif;
   e. Belum tercapainya proporsi Ruang Terbuka Hijau.
5) Kependudukan dan Catatan Sipil
   Kurangnya kesadaran penduduk akan pentingnya memiliki dokumen kependudukan dan pencatatan sipil.
6) Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
   a. Belum optimalnya layanan keluarga berencana;
   b. Belum optimalnya capaian *Total Fertility Rate* (TFR);
   c. Masih rendahnya partisipasi keluarga dalam kegiatan BKB;
   d. Masih kurangnya wawasan reproduksi bagi remaja.
7) Perhubungan

a. Belum terpenuhinya kebutuhan penyediaan perlengkapan jalan, terlihat dari jumlah beberapa perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas yang terpasang baru 2.036 unit (75% dari kebutuhan), marka jalan yang dibuat sepanjang 6.370 m2 (73% dari kebutuhan), penerangan jalan umum (PJU) yang terpasang 13.893 unit (99% dari kebutuhan) namun hanya 12.380 unit (90%) berfungsi serta Alat Pemberi insyarat lalu lintas (APILL) yang terpasang sejumlah 27 unit sesuai kebutuhan namun yang berfungsi hanya 18 unit (67%);
b. Belum optimalnya pengelolaan parkir;
c. Kurangnya kesadaran masyarakat dan pengawasan terhadap uji kendaraan bermotor.

8) Komunikasi dan Informatika
a. Belum optimalnya penyebarluasan informasi dan komunikasi publik;
b. Belum optimalnya implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
c. Belum memadainya sarana dan prasarana teknologi informasi dan komunikasi.

9) Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil
a. Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;
b. Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi;
c. Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro;
d. Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;
e. Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro;
f. Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro;

10) Penanaman Modal
a. Belum tersedianya rencana umum penanaman modal;
b. Belum optimalnya pengendalian penanaman modal.

11) Kepemudaan dan Olahraga
a. Belum optimalnya prestasi kepemudaan dan olahraga
b. Belum optimalnya pengembangan kapasitas dan kapabilitas pemuda
c. Belum optimalnya penyediaan, pembangunan dan pemeliharaan sarana prasarana olahraga
d. Belum adanya regulasi tingkat kota tentang kepemudaan

12) Kebudayaan
a. Belum optimalnya upaya pemajuan kebudayaan daerah;
b. Belum optimalnya pembinaan dan upaaya pelestarian kesenian tradisional daerah dan cagar budaya
c. Sarana dan prasarana kebudayaan belum mampu mengakomodasi pengembangan seluruh pelaku seni budaya.

13) Perpustakaan
a. Belum optimalnya layanan perpustakaan yang memenuhi standar nasional perpustakaan;
b. Masih rendahnya budaya literasi.

14) Kearsipan
a. Belum tersedianya Depo Arsip yang memenuhi standar baku;
b. Belum optimalnya penerapan standar baku kearsipan pada perangkat daerah.

c. Urusan Pemerintahan Pilihan

1) Kelautan dan Perikanan
Belum optimalnya pemanfaatan minapolitan

2) Pariwisata

a. Belum optimalnya pengemasan industri dan promosi kepariwisataan Kota Tasikmalaya;
b. Belum optimalnya kolaborasi antar *stakeholders* pariwisata;
c. Belum optimalnya pengembangan pariwisata religi.

3) Pertanian
d. Belum optimalnya produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya;
e. Belum optimalnya kenaikan kelas kelompok tani.

4) Perdagangan
a. Belum optimalnya pengelolaan pasar rakyat dan terbatasnya jumlah pasar rakyat;
b. Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
c. Rendahnya kesadaran para pedagang dalam melakukan tera ulang alat ukur;
d. Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

5) Perindustrian
a. Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional;
b. Belum optimalnya pengendalian izin usaha industri.

d. Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang

1) Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan
a. Belum optimalnya capaian Indeks Inovasi Daerah (IID);
b. Belum optimalnya pengelolaan data perencanaan pembangunan.

2) Keuangan
Belum optimalnya penatausahaan barang dan aset daerah.

3) Kepegawaian
a. Belum optimalnya merit sistem;
b. Belum optimalnya kompetensi ASN.

e. Urusan Pemerintahan Umum

1) Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri
a. Belum optimalnya pembinaan ideologi pancasila.
b. Belum optimalnya Verifikasi hibah
c. Laporan bantuan keuangan politik (hibah) tidak tepat waktu.
d. Belum adanya monitoring dan evaluasi lapangan kepada organisasi masyarakat yang melaksanakan kegiatan hibah.

BAB III
KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEUANGAN DAERAH

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah menyatakan bahwa kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah meliputi kerangka ekonomi makro dan kerangka pendanaan yang memberikan gambaran tentang arah kebijakan ekonomi Kota Tasikmalaya Tahun 2026 dengan mempertimbangkan kondisi agregat perekonomian Jawa Barat, Nasional dan Global hingga Tahun 2025.

Kerangka pendanaan daerah memuat arah kebijakan keuangan daerah meliputi analisis terkait sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, perkiraan belanja, dan pembiayaan untuk pembangunan tahun 2026. Kerangka pendanaan menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan prinsip perencanaan anggaran berbasis kinerja. Gambaran pengelolaan keuangan daerah dimaksudkan untuk menjelaskan kinerja pengelolaan keuangan di masa lalu, perilaku data dan informasi pertanggungjawaban keuangan daerah, dan bagaimana proyeksi ketersediaan dana pembangunan pada masa 1 tahun mendatang. Dasar yuridis pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengacu pada batasan pengelolaan keuangan daerah yang tercantum dalam:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781).

Peraturan yang mendasari pengelolaan keuangan daerah bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, bertanggung jawab,

adil, patut, dan bermanfaat. Kerangka pengelolaan keuangan Pemerintah Kota Tasikmalaya secara garis besar terdiri dari penyusunan anggaran daerah, penatausahaan dan pertanggungjawaban, yang kesemuanya mengacu pada tujuan tersebut di atas.

Rancangan kerangka ekonomi daerah Tahun 2026 meliputi kerangka ekonomi secara makro dan kerangka pendanaan dalam RKPD Tahun 2026. Kerangka ekonomi makro memberikan gambaran tentang perkiraan kondisi ekonomi makro Kota Tasikmalaya baik yang dipengaruhi faktor internal serta variabel eksternalitas yang memberi pengaruh signifikan antara lain perekonomian regional, nasional maupun perekonomian global.

Kerangka ekonomi dan pendanaan ini menjadi basis kebijakan anggaran untuk mengalokasikan secara efektif dan efisien dengan perencanaan anggaran berbasis kinerja. Fakta dan analisa yang diberikan terkait rancangan kerangka ekonomi tahun 2026 diharapkan akan mampu menjembatani fungsi perencanaan dan penganggaran yang efektif dalam mengawal pencapaian target kinerja pembangunan maupun menyelesaikan permasalahan dan isu-isu strategis yang telah terindentifikasi di Kota Tasikmalaya.

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah tahun 2026 mempertimbangkan evaluasi capaian kinerja pembangunan ekonomi tahun 2024 serta prospek dan tantangan perekonomian pada tahun 2025 dan 2026. Arah kebijakan ekonomi Kota Tasikmalaya mempertimbangkan hasil analisis perkembangan ekonomi global dan nasional tahun 2025 maupun perkiraan tahun 2026, serta arah kebijakan dan target yang ditetapkan oleh Nasional untuk Provinsi Jawa Barat.

3.1.1. Kondisi dan Prospek Ekonomi Global

Perekonomian global tahun 2024 tumbuh melambat dibanding tahun 2023. Pada tahun 2024 pertumbuhan ekonomi global tercatat sebesar 3,3 persen, melanjutkan tren perlambatan dari pertumbuhan tahun 2022 dan 2023 yang masing-masing sebesar 3,6 persen dan 3,5 persen.

Ekonomi global masih menghadapi tantangan utamanya berasal dari sisi geopolitik. Kebijakan pemerintah AS telah mendorong eskalasi perang dagang. AS menaikkan tarif impor terhadap sejumlah negara mitra dagang yang memiliki surplus perdagangan dengan AS, seperti Tiongkok, Meksiko, Kanada, dan Uni Eropa. Negara-negara tersebut telah merespon kebijakan AS dengan melakukan retaliasi atas tarif impor produk AS, sehingga berpotensi menurunkan volume perdagangan bilateral dan global.

Mempertimbangkan kondisi ini, IMF melakukan pemangkasan ramalan pertumbuhan ekonomi global. Dalam dokumen World Economic Outlook (WEO) edisi April 2025, IMF telah memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia untuk tahun ini menjadi 2,8%, dari sebelumnya mereka perkirakan bisa tumbuh 3,3%. Bank Dunia memperkirakan ekonomi global tumbuh 2,7 persen pada 2025 dan 2026. Khusus kawasan Asia Timur dan Pasifik, dalam laporan Regional Economic Update 2025, Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan di kawasan Asia Timur dan Pasifik akan melambat ke angka 4% pada 2025, turun 1% dibandingkan realisasi 5% pada 2024.

Bank Dunia menjelaskan situasi global yang tidak menentu berdampak kepada kepercayaan dunia usaha dan konsumen, menghambat investasi dan konsumsi. Pembatasan perdagangan akan berdampak terhadap tingkat ekspor

Asia Timur dan Pasifik, sementara pertumbuhan global yang melambat kemungkinannya akan menurunkan permintaan eksternal lebih jauh.

Kondisi global yang tidak menentu ini ditambah dengan adanya ketegangan antara Iran dan Israel di Timur Tengah menjadi tantangan tersendiri terhadap perekonomian global. Namun demikian prospek pertumbuhan ekonomi global tahun 2025 dan 2026 utamanya masih ditopang oleh pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang. Sementara negara maju diproyeksikan tumbuh lebih lambat.

Bagi Indonesia, dengan tingginya tarif impor AS, mengingat Indonesia memiliki surplus perdagangan terhadap AS, dampak eskalasi perang dagang ini perlu segera dimitigasi.

3.1.2. Kondisi dan Prospek Ekonomi Nasional

IMF menggambarkan proyeksi perekonomian dunia pada tahun 2025 dan 2026 dengan istilah "*resilient but slow*", yang mengindikasikan bahwa ekonomi global masih tangguh, namun tumbuh secara perlahan. Bagi Indonesia, kondisi ini menjadi tantangan besar karena dunia masih diliputi oleh risiko ketidakpastian global, seperti ketegangan geopolitik dan kebijakan proteksionisme perdagangan. Meski demikian, perekonomian Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat sepanjang tahun 2024. Badan Pusat Statistik mencatat bahwa Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tumbuh sebesar 5,03 persen secara tahunan pada 2024, sedikit di bawah angka tahun sebelumnya sebesar 5,05 persen. Pertumbuhan tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga, belanja pemilu, serta investasi infrastruktur yang mencatatkan pertumbuhan tertinggi dalam enam tahun terakhir.

Dari segi capaian inflasi Indonesia pada akhir tahun 2024 masih tetap terkendali. Secara tahunan (year-on-year), inflasi mencapai 1,57 persen pada Desember 2024, masih berada dalam kisaran target Bank Indonesia sebesar 2,5 persen ±1 persen. Stabilitas harga ini membantu menjaga daya beli masyarakat, terutama menjelang masa transisi pemerintahan. Selain itu, *Purchasing Managers' Index* (PMI) Manufaktur Indonesia kembali ke zona ekspansi, mencatatkan angka 51,2 pada Desember 2024, yang mencerminkan peningkatan produksi dan optimisme pelaku industri.

Dari sisi sektoral, hampir semua sektor ekonomi tumbuh positif pada tahun 2024, termasuk sektor perdagangan, manufaktur, pertanian, konstruksi, dan transportasi. Hal ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi Indonesia bersifat menyeluruh, bukan hanya bertumpu pada satu sektor. Kinerja ekspor Indonesia memang tertekan akibat melemahnya permintaan global, namun tetap ditopang oleh harga komoditas yang relatif tinggi.

Untuk tahun 2025, sejumlah lembaga internasional telah mengeluarkan proyeksi mereka terhadap perekonomian Indonesia. IMF memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 4,7 persen pada 2025 dan tetap stabil di level yang sama pada 2026. World Bank juga memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,7 persen pada 2025, kemudian meningkat menjadi 4,9 persen pada 2026. Di sisi lain, OECD lebih optimistis dalam memproyeksikan pertumbuhan ekonomi dengan angka pertumbuhan sebesar 5,2 persen pada tahun 2025 dan 5,1 persen pada tahun 2026. Pemerintah Indonesia sendiri menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,2 persen dalam APBN Tahun Anggaran 2025, sementara Bank Indonesia

memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di kisaran antara 4,7 persen hingga 5,5 persen.

Ketahanan ekonomi Indonesia juga ditopang oleh belanja pemerintah yang masih tumbuh positif, serta investasi swasta yang meningkat di sektor energi dan manufaktur. Meskipun demikian, Indonesia tetap perlu waspada terhadap risiko eksternal seperti gejolak pasar keuangan global, perubahan arah kebijakan suku bunga The Fed, serta fluktuasi harga komoditas global. Untuk menjaga momentum pertumbuhan, Indonesia didorong untuk terus melakukan reformasi struktural, memperkuat daya saing industri, serta memperluas pasar ekspor nontradisional. OECD juga menyarankan agar efisiensi belanja publik ditingkatkan, termasuk dengan mengurangi subsidi energi yang tidak tepat sasaran.

Dengan fundamental ekonomi yang relatif kuat dan inflasi yang terkendali, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjaga stabilitas makroekonomi di tengah ketidakpastian global. Fokus pada hilirisasi industri, transformasi digital, serta keberlanjutan fiskal menjadi kunci bagi Indonesia untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif di tahun-tahun mendatang.

Pertumbuhan ekonomi yang stabil di angka 5 persen diperkirakan tidak cukup untuk mendorong Indonesia keluar dari *Middle Income Trap* sebelum 2045, sehingga diperlukan rata - rata pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6 sampai dengan 7 persen pada tahun 2025-2045. Berlandaskan pada Asta Cita, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mencapai 8 persen dalam Periode 2025-2029, yang didorong melalui transformasi perekonomian sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas untuk peningkatan output potensial dan pertumbuhan ekonomi;
2. Sumber-sumber pertumbuhan baru yang berasal dari proyek prioritas;
3. Peningkatan investasi untuk mendukung pengembangan proyek prioritas.

Dalam pencapaian target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen pada tahun 2029, pemerintah mengagendakan berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN) yang diharapkan dapat mendorong produktivitas, inovasi, dan daya saing nasional. Salah satu Proyek Strategis Nasional di Jawa Barat berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 12 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional adalah Jalan Tol Gedebage - Tasikmalaya – Cilacap. Selanjutnya pada RKP tahun 2026, pemerintah telah mengagendakan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu wilayah yang mendapatkan intervensi di Kawasan Perkotaan Tasikmalaya meliputi:

1. Pengembangan layanan unggulan kesehatan ibu-anak, kanker, jantung, stroke, dan sistem rujukan berbasis kompetensi di RSUD Provinsi dan Kab/Kota, khususnya pada RSUD dr. Soekardjo Tasikmalaya (PHTC);
2. Persiapan Pembangunan Jalan Tol Gedebage–Garut–Tasikmalaya;
3. Pembangunan jalur ganda KA Lintas Bandung-Cicalengka–Tasikmalaya–Kroya;
4. Pembangunan TPST Regional Tasikmalaya–Ciamis;
5. Pengembangan Kota Agropolitan Tasikmalaya.

3.1.3. Kondisi dan Prospek Perekonomian Provinsi Jawa Barat

Perekonomian Provinsi Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh dinamika global dan nasional, terutama melalui perdagangan barang dan jasa. Selain itu, proporsi konsumsi rumah tangga yang mencapai 66,2 persen dari PDRB, menjadikan

intervensi untuk meningkatkan daya beli masyarakat memiliki peran penting dalam mencapai pertumbuhan ekonomi Jawa Barat yang lebih tinggi. Perekonomian Jawa Barat sepanjang tahun 2024 tumbuh sebesar 4,95 persen, pencapaian tersebut lebih rendah apabila dibandingkan dengan tahun 2023 yang pertumbuhan ekonominya mencapai 5,00 persen. Kondisi ini menjadi salah satu pertimbangan dalam menetapkan target ekonomi makro pada tahun 2026.

Tabel 3.1.
Target Ekonomi Makro Jawa Barat Tahun 2025-2026

No	Indikator	Realisasi 2024 1)	Target 2025 2)	Target 2026 3)
1	LPE (%, *c-to-c*)	4,95	4,96 - 5,37	5,15-6,20
2	Laju Inflasi (%, *y-o-y*)	1,67	2,5 + 1	2,5 + 1
3	Rasio PDRB Industri Pengolahan (% PDRB)	41,39	41.15 -41.38	40,10-42,00
4	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum (% PDRB)	3,07	2,88	3,21 - 3,46
5	PMTB (% PDRB)	24,70	23,60	23,82 - 23,84
6	Rasio Ekspor Barang dan Jasa (% PDRB)	21,53	26,3	20,50 - 20,54

Sumber: 1) BPS Provinsi Jawa Barat, Februari 2025;
2) RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025, dan;
3) Hasil Perhitungan Bappeda Provinsi Jawa Barat, 2025.

Pertumbuhan ekonomi Jawa Barat diproyeksikan tumbuh sebesar 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026 yang didukung oleh stabilitas perekonomian di tengah perlambatan ekonomi global. Terkendalinya perekonomian ditunjukan oleh terkendalinya inflasi pada tingkat 2,5 + 1 persen yang dapat menjaga daya beli masyarakat. Inflasi yang terkendali juga mencerminkan tingkat produksi barang dan jasa yang terkendali seiring dengan peningkatan efektivitas produksi dan distribusi bahan pokok penting. Secara bersamaan, prospek ekonomi global dan nasional yang masih tumbuh lebih lambat juga mempengaruhi kondisi Jawa Barat. Pertumbuhan ekonomi ini tidak terlepas dari peranan industri pengolahan yang signifikan. Kontribusi industri Jawa Barat terhadap industri Nasional mencapai 27,8 persen pada tahun 2024, yang merupakan tertinggi di antara provinsi lainnya. Dengan pencapaian tersebut, Jawa Barat diperkirakan akan tetap menjadi pusat industri nasional hingga tahun 2045. Pada tahun 2026, industri Jawa Barat diharapkan dapat mendorong peningkatan output pada sektor Pertanian, Pengadaan Listrik dan Gas, Perdagangan, Transportasi, dan Real Estate. Sektor Industri Pengolahan di Jawa Barat diproyeksikan tumbuh 4,69 - 5,65 persen yang didorong oleh sub sektor industri Alat Angkutan, Barang dari Logam, Makan dan minum, dan Tekstil.

Pertumbuhan pariwisata di wilayah yang menjadi koridor pengembangan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam rancangan RPJMN, yang mencakup Bogor-Sukabumi-Cianjur dan Cekungan Bandung, pada tahun 2026 diharapkan mampu menjadi sumber pertumbuhan yang penting dalam mendorong pertumbuhan sektor Transportasi dan Pergudangan Jawa Barat sebesar 8,58 - 10,33 persen, serta sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum sebesar 7,97 - 9,59 persen. Tingginya pertumbuhan sektor transportasi didukung oleh peningkatan konektivitas antar wilayah di Jawa Barat seiring dengan pembangunan berbagai infrastruktur transportasi di wilayah perkotaan dan Jawa Barat bagian selatan.

Pertumbuhan yang solid di sektor lapangan usaha pada tahun 2026 didukung oleh tingginya pertumbuhan investasi (PMTB) sebesar 6,30 - 7,58 persen (c-to-c), dengan nilai ADHB sebesar Rp 793,36 - 804,52 T. Sementara itu nilai realisasi investasi Jawa Barat padatahun 2026 ditargetkan sebesar Rp 342 T, atau sekitar 15 persen terhadap target realisasi investasi nasional. Upaya pencapaian realisasi investasi tersebut dilakukan melalui perbaikan iklim investasi, baik melalui peningkatan kepastian hukum, ketersediaan sumber daya input, serta stabilitas ekonomi dan politik. Penerapan investasi yang berkualitas dan berkelanjutan juga menjadi penting, utamanya melalui implementasi green economy dan blue economy, ketersediaan infrastruktur dan pemerataan investasi di seluruh kabupaten/kota berdasarkan potensi masing-masing, serta hilirisasi sektor primer bernilai tambah tinggi di Jabar Selatan. Pengembangan ekonomi di Jabar Selatan melalui promosi investasi juga diharapkan dapat mengurangi ketimpangan pembangunan Jawa Barat.

3.1.4. Kondisi dan Prospek Ekonomi Kota Tasikmalaya

A. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada tahun 2024, Kota Tasikmalaya mencatat Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 5,22 persen. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dan positif dalam aktivitas ekonomi kota. Apabila dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat yang tumbuh sebesar 4,95 persen (Y-on-Y) pada Triwulan II-2024, kinerja ekonomi Kota Tasikmalaya berada di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tasikmalaya tidak hanya tumbuh secara positif, tetapi juga melampaui kinerja ekonomi provinsi secara keseluruhan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya kekuatan internal yang spesifik, efektivitas kebijakan lokal, atau komposisi sektoral yang lebih tangguh dan dinamis di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan rata-rata provinsi. Keunggulan ini menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu mesin pertumbuhan potensial di Jawa Barat.

Pada tahun 2024, sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan di atas LPE Kota Tasikmalaya terjadi di sektor transportasi dan pergudangan 15,04%, disusul sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 8,93%, informasi dan komunikasi 8,66%, penyediaan akomodasi dan makan minum 7,67%, pertanian, kehutanan dan perikanan 7,06%, jasa keuangan dan asuransi 6,61%, pengadaan listrik dan gas 6,06% dan industri pengolahan 5,46%

B. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,49 persen. Angka ini merepresentasikan perbaikan yang berkelanjutan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana TPT tercatat 7,66 persen pada tahun 2021, 6,62 persen pada tahun 2022 dan 6,55 persen pada tahun 2023. Tren penurunan TPT yang konsisten ini, beriringan dengan LPE yang positif, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Tasikmalaya semakin inklusif. Ini berarti ekspansi ekonomi berhasil menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja secara efektif, sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penurunan TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat kapital-intensif, tetapi juga mampu menghasilkan peluang kerja yang memadai bagi angkatan kerja.

C. Persentase Penduduk Miskin

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 adalah 11,10 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari 11,53 persen pada tahun 2023, melanjutkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota ini. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan pengangguran, mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya memiliki dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya. Hal ini juga menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan yang diimplementasikan oleh pemerintah daerah, seperti yang diuraikan dalam dokumen perencanaan, telah memberikan hasil yang positif. Pencapaian ini berkontribusi pada distribusi manfaat ekonomi yang lebih merata. Untuk memastikan kemajuan yang berkelanjutan, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap program-program pengentasan kemiskinan yang terbukti paling efektif, seperti program "Bageur" dan berbagai layanan sosial, guna mengoptimalkan alokasi sumber daya di masa mendatang.

D. Laju Inflasi

Pada penghujung tahun 2024, Kota Tasikmalaya mengalami laju inflasi tahunan (Desember 2024 terhadap Desember 2023) sebesar 1,94 persen. Laju inflasi tahun kalender (Januari-Desember) 2024 juga tercatat sebesar 1,94 persen. Angka ini menunjukkan stabilitas harga yang relatif rendah dan terkendali, terutama jika dibandingkan dengan inflasi tahunan 2023 yang mencapai 2,84 persen. Stabilitas inflasi ini sangat penting untuk menjaga daya beli konsumen dan menciptakan lingkungan bisnis yang dapat diprediksi, yang pada gilirannya akan mendorong investasi dan perencanaan jangka panjang. Komoditas utama penyumbang inflasi pada Desember 2024 antara lain telur ayam ras, beras, cabai rawit, bawang merah, dan sigaret kretek mesin (SKM), dengan telur ayam ras sebagai penyumbang tertinggi. Fakta bahwa komoditas pangan menjadi pendorong utama inflasi menunjukkan bahwa volatilitas harga sebagian besar dipengaruhi oleh faktor sisi pasokan yang berkaitan dengan produksi dan distribusi pertanian. Ini mengindikasikan bahwa meskipun stabilitas makroekonomi secara keseluruhan tercapai, terdapat kerentanan spesifik dalam rantai pasokan pangan yang perlu ditangani. Intervensi kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan pangan, memperbaiki produktivitas pertanian, menyederhanakan logistik komoditas esensial, dan mungkin diversifikasi sumber pangan dapat lebih lanjut menstabilkan harga dan melindungi rumah tangga rentan dari gejolak harga pangan.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,03 pada tahun 2024. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Kota Tasikmalaya telah berada di level "tinggi". Peningkatan IPM tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Umur harapan hidup (UHH) warga Kota Tasikmalaya meningkat menjadi 75,31 tahun pada tahun 2024, dan rata-rata pengeluaran riil per kapita juga meningkat menjadi Rp.11,431 Juta pada tahun 2024. Kemajuan yang berkelanjutan dan berbasis luas dalam IPM ini menandakan bahwa Kota Tasikmalaya secara efektif berinvestasi pada modal manusianya. Populasi yang lebih sehat, teredukasi, dan sejahtera membentuk fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Hal ini meningkatkan produktivitas tenaga

kerja, mendorong inovasi, dan meningkatkan daya saing kota secara keseluruhan. Peningkatan IPM juga menunjukkan bahwa manfaat pertumbuhan ekonomi telah diterjemahkan menjadi peningkatan kualitas hidup, yang dapat menciptakan siklus positif untuk pembangunan di masa depan. Untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, investasi berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas (termasuk pelatihan kejuruan), layanan kesehatan yang mudah diakses, dan program perlindungan sosial akan sangat penting sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi jangka panjang dan ketahanan kota.

Analisis struktur ekonomi Kota Tasikmalaya berfokus pada kontribusi sektor-sektor lapangan usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), memberikan gambaran mengenai komposisi dan kekuatan ekonomi kota.

A. Kontribusi Sektor Lapangan Usaha terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Struktur ekonomi Kota Tasikmalaya didominasi oleh Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memberikan kontribusi terbesar yaitu 21,24% dengan nilai PDRB sebesar Rp 6.290,01 miliar kemudian Sector Industri Pengolahan dengan kontribusi sebesar 13,41% senilai Rp 3.971,11 miliar). Sektor jasa lainnya lain yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian adalah Sektor Konstruksi yang berkontribusi 15,19% senilai Rp 4.498,26 miliar, Sektor Transportasi dan Pergudangan berkontribusi 10,85% senilai Rp 3.213,26 miliar, dan Jasa Keuangan dan Asuransi berkontribusi 10,22% senilai Rp 3.025,16 miliar.

Kuat dan konsistennya dominasi sektor perdagangan, industri dan jasa ini mengukuhkan identitas Kota Tasikmalaya sebagai pusat komersial dan layanan regional. Peran ini sangat penting dalam memfasilitasi aktivitas ekonomi di wilayah Priangan Timur yang lebih luas. Kontribusi substansial dari sektor manufaktur ("Industri Pengolahan") menunjukkan adanya mesin ekonomi ganda, di mana baik sektor jasa maupun manufaktur berperan vital. Struktur ekonomi ini mengindikasikan bahwa pertumbuhan kota didorong oleh aktivitas yang berkaitan dengan konsumsi serta industri produktif, menawarkan tingkat diversifikasi ekonomi. Oleh karena itu, strategi pembangunan di masa depan perlu memprioritaskan penguatan sektor-sektor inti ini melalui investasi terarah pada infrastruktur, transformasi ekonomi digital (misalnya, *e-commerce* untuk perdagangan), dan pengembangan keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan sektor jasa dan manufaktur. Peningkatan keterkaitan antar-sektor antara manufaktur dan jasa dapat lebih lanjut meningkatkan ketahanan ekonomi secara keseluruhan.

B. Sektor Unggulan dan Potensi Ekonomi Lokal

Mempertimbangkan kontribusinya yang besar terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya, Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Sektor Konstruksi, Sektor Industri Pengolahan, Sektor Transportasi dan Pergudangan serta Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi menjadi sektor unggulan di Kota Tasikmalaya. Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor serta Sektor Konstruksi memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian Kota Tasikmalaya namun mengalami perlambatan pertumbuhannya di tahun 2024. Sector unggulan dengan pertumbuhan tinggi terjadi di sector Transportasi dan Pergudangan, Industri Pengolahan, Jasa Keuangan dan Asuransi dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum.

Tabel 3.2.
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku serta Laju Pertumbuhan PDRB Menurut Lapangan Usaha di Kota Tasikmalaya Tahun 2024

Lapangan Usaha	PDRB (Miliar Rupiah)	Kontribusi (%)	Laju Pertumbuhan
A. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1.490,28	5,03	7,06
B. Pertambangan dan Penggalian	1,97	~0	-0,04
C. Industri Pengolahan	3.971,11	13,41	5,46
D. Pengadaan Listrik dan Gas	3,51	0,01	6,08
E. Pengadaan Air; Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	116,53	0,39	8,93
F. Konstruksi	4.498,26	15,19	1,53
G. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	6.290,01	21,24	3,16
H. Transportasi dan Pergudangan	3.213,26	10,85	15,04
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	1.854,29	6,26	7,67
J. Informasi dan Komunikasi	1.217,91	4,11	8,66
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	3.025,16	10,22	6,61
L. Real Estat	487,02	1,64	2,21
M,N. Jasa Perusahaan	357,48	1,21	4,43
O. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	960,66	3,24	0,57
P. Jasa Pendidikan	629,26	2,12	0,68
Q. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	690,61	2,33	0,43
R.S.T.U Jasa Lainnya	805,46	2,72	3,46
PDRB	**29.612,46**		

Terdapat juga sektor potensial yaitu sektor yang tumbuh cepat walaupun kontribusi terhadap perekonomian masih kecil yaitu sektor Informasi dan Komunikasi serta Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Di lain pihak, Kota Tasikmalaya memiliki sejumlah komoditi unggulan yang menjadi ciri khas dan potensi ekonomi lokal. Industri-industri terkemuka yang dikembangkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan menjadi produk unggulan kota meliputi industri pakaian jadi bordir, makanan dan minuman, konveksi tekstil, alas kaki (sandal, sepatu, dan *kelom geulis*), batik, industri kayu dan furnitur kayu, serta industri pengolahan lainnya seperti *payung geulis* dan

kerajinan anyaman dari tanaman non-rotan dan non-bambu (*mendong*). Di antara industri kreatif, olahan makanan, konveksi, dan bordir adalah tiga sektor utama yang memiliki eksistensi sangat tinggi dan pengaruh besar terhadap perekonomian. Kota ini juga dikenal sebagai pusat kewirausahaan, dengan banyaknya lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan, industri, pendidikan, dan kesehatan.

Keunggulan industri lokal dan kreatif ini memberikan keunggulan kompetitif yang unik, yang berakar pada warisan budaya dan keahlian lokal kota. Hal ini tidak hanya menciptakan identitas yang khas tetapi juga dapat menarik pasar khusus, termasuk pariwisata. Basis kewirausahaan yang kuat bertindak sebagai inkubator alami bagi industri-industri ini, mendorong inovasi dan penciptaan lapangan kerja lokal, terutama dalam Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).

Potensi ekonomi lokal lainnya adalah sektor pertanian dan perikanan dengan luas lahan yang masih cukup luas. Sektor pertanian dan perikanan berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi secara cukup signifikan dan berperan dalam pengendalian inflasi dan ketahanan pangan daerah.

Ini menunjukkan potensi pertumbuhan nilai tambah yang sangat tertanam dalam komunitas lokal. Kebijakan ke depan harus berfokus pada pengembangan kekuatan lokal yang unik ini melalui perlindungan kekayaan intelektual, *branding*, akses ke pelatihan khusus, dan memfasilitasi akses pasar yang lebih luas untuk produk-produk khas ini, mungkin dengan memanfaatkan platform digital dan inisiatif pariwisata.

Pertumbuhan ekonomi Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 didukung oleh berbagai faktor, mulai dari kebijakan pemerintah yang proaktif hingga karakteristik demografi dan geografis kota.

A. Kebijakan Pemerintah Daerah dan Iklim Investasi

Pemerintah Kota Tasikmalaya memiliki kerangka kebijakan yang terarah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini tercantum jelas dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2026, yang menggarisbawahi prioritas seperti pengendalian inflasi daerah, peningkatan iklim usaha dan investasi, peningkatan kompetensi pencari kerja, pengembangan UMKM, serta peningkatan produktivitas sektor pertanian, pariwisata, perdagangan, dan industri berbasis sumber daya lokal. Pendekatan "Tematik, Holistik, Integratif, dan Spasial (THIS)" diterapkan untuk akselerasi pembangunan, termasuk penanggulangan kemiskinan. Selain itu, Rencana Pembangunan Industri Kota (RPIK) 2021-2041 menetapkan strategi jangka panjang untuk pengembangan industri unggulan, termasuk pengembangan sumber daya manusia industri dan sarana prasarana.

Pendekatan kebijakan yang multi-faceted dan terintegrasi ini menunjukkan upaya strategis untuk mengatasi berbagai dimensi ekonomi secara simultan, dengan tujuan mencapai efek sinergis. Tata kelola yang proaktif ini menciptakan lingkungan yang dapat diprediksi dan mendukung bagi dunia usaha. Meskipun data investasi spesifik untuk Kota Tasikmalaya pada tahun 2024 belum tersedia secara rinci dalam sumber yang diberikan, realisasi investasi Jawa Barat secara keseluruhan mencapai Rp 251,1 triliun pada tahun 2024, menempatkan Jawa Barat sebagai provinsi dengan capaian investasi tertinggi secara nasional, yang berhasil menyerap 383.707 tenaga kerja di 27 kota/kabupaten. Keberhasilan investasi di tingkat provinsi ini secara kuat mengindikasikan bahwa Kota

Tasikmalaya, sebagai salah satu kota besar di Jawa Barat, kemungkinan besar turut merasakan dampak positif dari iklim investasi yang kondusif ini, menarik modal dan menciptakan lapangan kerja. Momentum regional ini bertindak sebagai pendorong tidak langsung namun kuat bagi aktivitas ekonomi lokal. Penting bagi pemerintah kota untuk terus melacak dan melaporkan realisasi investasi spesifiknya guna mengukur dampak langsung dari pendorong ini dan mempromosikan keunggulan lokal untuk menarik lebih banyak investasi.

B. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pengembangan sumber daya manusia merupakan pilar utama pendorong pertumbuhan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Kebijakan pemerintah daerah secara eksplisit menargetkan peningkatan kompetensi pencari kerja dan optimalisasi *link and match* dengan dunia kerja melalui pelatihan dan pembinaan hubungan industrial. Misi pembangunan kota juga mencakup "Menghasilkan sumber daya manusia yang handal dan berkualitas". Peningkatan kualitas SDM ini tercermin dari capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya yang terus meningkat dan berada pada kategori "tinggi". Faktor sumber daya manusia yang melimpah juga diidentifikasi sebagai potensi kekuatan ekonomi yang penting bagi Kabupaten Tasikmalaya, yang dapat diasumsikan relevan juga untuk Kota Tasikmalaya sebagai pusatnya.

Tenaga kerja yang terampil dan berkualitas secara langsung meningkatkan produktivitas di semua sektor, menjadikan bisnis lebih kompetitif. Dalam ekonomi yang didominasi oleh sektor jasa dan industri kreatif, tenaga kerja terampil sangat penting untuk inovasi dan kualitas produk/layanan. Peningkatan IPM yang berkelanjutan menunjukkan bahwa investasi dalam pendidikan, kesehatan, dan standar hidup menghasilkan angkatan kerja yang lebih cakap dan mudah beradaptasi, yang merupakan aset jangka panjang yang sangat penting. Pendorong ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya tentang akumulasi modal tetapi juga tentang peningkatan potensi manusia, yang mengarah pada pembangunan yang lebih berkelanjutan dan tangguh. Investasi berkelanjutan dalam program pelatihan kejuruan yang selaras dengan kebutuhan industri unggulan dan yang sedang berkembang, serta promosi literasi digital di semua kelompok usia, akan memaksimalkan pengembalian ekonomi dari pengembangan modal manusia.

C. Peran Sektor Perdagangan, Jasa, dan Industri Kreatif

Sektor perdagangan, industri dan jasa, yang secara konsisten mendominasi struktur PDRB Kota Tasikmalaya, merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi. Kota Tasikmalaya dikenal sebagai pusat perdagangan, industri dan jasa di Priangan Timur, menarik mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi karena ketersediaan lapangan pekerjaan di bidang kewirausahaan, pendidikan, kesehatan, dan perkantoran, serta fasilitas umum yang memadai. Selain itu, industri kreatif, seperti bordir, konveksi, dan olahan makanan, telah menjadi sektor unggulan yang memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian dan menciptakan peluang usaha.

Kinerja kuat sektor perdagangan dan jasa diperkuat oleh peran Kota Tasikmalaya sebagai pusat regional, yang menarik konsumen dan bisnis dari daerah sekitarnya, sehingga memperluas ukuran pasar. Industri kreatif, yang berakar kuat pada budaya lokal dan semangat kewirausahaan, menyediakan produk bernilai tambah yang unik yang membedakan ekonomi kota. Sinergi ini menciptakan ekosistem ekonomi yang dinamis di mana produksi lokal menemukan pasar yang lebih luas

melalui saluran perdagangan yang mapan, dan daya tarik kota menarik talenta dan modal, mendorong siklus pertumbuhan dan inovasi yang positif. Kebijakan harus berfokus pada peningkatan konektivitas dan keterkaitan pasar antara produsen lokal (terutama UMKM di industri kreatif) dan pasar regional/nasional yang lebih luas, berpotensi melalui platform digital dan program fasilitasi perdagangan. Lebih lanjut mengembangkan peran Tasikmalaya sebagai pusat layanan dan logistik regional juga akan menjadi kunci.

D. Dukungan Infrastruktur

Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi yang memadai menjadi faktor pendorong mobilitas penduduk dan kegiatan ekonomi di Kota Tasikmalaya. Infrastruktur fisik, termasuk jalan raya, telekomunikasi, dan listrik, diidentifikasi sebagai industri pendukung yang krusial untuk meningkatkan daya saing daerah. Peningkatan kualitas layanan infrastruktur kota juga merupakan salah satu indikator kinerja utama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya, dengan target peningkatan indeks kemantapan jalan.

Infrastruktur yang kuat mengurangi biaya operasional bagi bisnis, meningkatkan efisiensi logistik untuk perdagangan dan manufaktur, serta meningkatkan konektivitas bagi barang dan manusia. Hal ini secara langsung berkontribusi pada iklim investasi yang lebih menarik dan memperluas jangkauan pasar untuk produk lokal. Fokus pemerintah pada peningkatan kualitas infrastruktur, sebagaimana dibuktikan oleh masuknya dalam dokumen perencanaan strategis, menunjukkan pengakuan akan peran fundamentalnya dalam mempertahankan dan mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan menciptakan lingkungan yang lebih efisien dan mudah diakses bagi semua pelaku ekonomi. Investasi berkelanjutan dalam peningkatan dan pemeliharaan infrastruktur penting, terutama yang mendukung koridor ekonomi utama dan zona industri, bersama dengan perluasan infrastruktur digital, akan sangat penting untuk ekspansi ekonomi di masa depan.

Meskipun menunjukkan tren pertumbuhan positif, Kota Tasikmalaya juga menghadapi sejumlah tantangan yang memerlukan perhatian serius dalam perencanaan pembangunan.

A. Dampak Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) terhadap UMKM

Kenaikan Upah Minimum Kota (UMK) Tasikmalaya, yang ditetapkan sebesar Rp 2.630.951 pada tahun 2024 dan diusulkan naik menjadi Rp 2.894.046 untuk tahun 2025, menimbulkan beban biaya operasional tambahan bagi pengusaha, khususnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). UMKM merupakan tulang punggung ekonomi lokal dan penyerap tenaga kerja yang signifikan. Situasi ini menghadirkan dilema kebijakan klasik: menyeimbangkan keharusan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja melalui upah yang lebih tinggi dengan memastikan keberlanjutan dan daya saing UMKM. Jika UMKM menghadapi beban biaya yang berlebihan tanpa peningkatan produktivitas atau akses pasar yang sepadan, hal itu dapat menghambat pertumbuhan mereka, berpotensi menyebabkan penurunan investasi, perlambatan penciptaan lapangan kerja, atau bahkan penutupan usaha. Hal ini pada akhirnya akan mengikis tren positif dalam LPE dan TPT. Tantangan ini menyoroti perlunya respons kebijakan yang nuansa yang mendukung baik tenaga kerja maupun dunia usaha. Pemerintah perlu menerapkan mekanisme dukungan yang terarah bagi UMKM, seperti program peningkatan produktivitas, akses ke pembiayaan yang terjangkau, insentif pajak, atau pelatihan efisiensi dan inovasi, untuk membantu mereka menyerap biaya tenaga kerja yang meningkat tanpa mengorbankan daya saing.

B. Isu Pemasaran dan Akses Pasar bagi Industri Lokal

Salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh pelaku industri kreatif di Kota Tasikmalaya adalah keterbatasan dalam pemasaran dan akses pasar. Banyak sektor industri masih menjual produk mereka hanya kepada pelanggan dengan jarak yang dekat atau di sekitar tempat usaha, tanpa mengetahui cara menjual produk dalam jangkauan pasar yang lebih luas. Hal ini menghambat potensi pertumbuhan dan skala usaha. Meskipun memiliki kemampuan produksi yang kuat dan semangat kewirausahaan yang hidup dalam industri kreatif, ketidakmampuan untuk secara efektif menembus pasar yang lebih luas bertindak sebagai hambatan signifikan terhadap realisasi potensi ekonomi penuh mereka. Hal ini membatasi pertumbuhan pendapatan, membatasi skala ekonomi, dan menghambat penciptaan lapangan kerja, mencegah komoditi unggulan ini berkontribusi secara optimal terhadap PDRB kota dan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Ini menunjukkan adanya kesenjangan dalam literasi digital untuk pemasaran dan distribusi, yang menghambat kemampuan mereka untuk memanfaatkan saluran pasar modern. Intervensi strategis diperlukan untuk meningkatkan kemampuan pemasaran digital, memfasilitasi akses ke platform e-commerce, membangun keterkaitan rantai pasokan yang lebih kuat, dan mempromosikan produk lokal melalui pameran dagang nasional dan internasional atau *marketplace* daring.

C. Penanganan Kemiskinan dan Isu Sosial Ekonomi Lainnya

Meskipun persentase penduduk miskin menunjukkan penurunan di tahun 2024, penanganan kemiskinan tetap menjadi prioritas utama pemerintah daerah dengan berbagai program yang komprehensif. Program-program ini mencakup pemenuhan kebutuhan pokok, peningkatan pelayanan sosial (termasuk program "Bageur" yang melibatkan partisipasi masyarakat), pelayanan pendidikan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, serta peningkatan pendapatan melalui pelatihan keterampilan dan sarana prasarana perdagangan. Selain kemiskinan, Kota Tasikmalaya juga menghadapi isu sosial ekonomi lainnya seperti *stunting* dan pengelolaan persampahan.

Persistensi kemiskinan, meskipun indikator makroekonomi positif, menunjukkan bahwa akar penyebabnya mungkin bersifat struktural atau bahwa manfaat pertumbuhan belum sepenuhnya meresap ke semua lapisan masyarakat. Adanya program pengentasan kemiskinan yang komprehensif menunjukkan pengakuan akan kompleksitas ini dan komitmen untuk mengatasi kemiskinan multi-dimensi. Lebih lanjut, isu-isu seperti *stunting* secara langsung memengaruhi pengembangan modal manusia dengan memengaruhi perkembangan kognitif dan fisik, sehingga membatasi produktivitas di masa depan. Pengelolaan sampah yang tidak memadai dapat menyebabkan degradasi lingkungan dan masalah kesehatan masyarakat, yang dapat menghambat investasi dan pariwisata, serta meningkatkan beban biaya kesehatan. Semua faktor ini secara tidak langsung menghambat pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan. Tantangan-tantangan ini saling terkait dan memerlukan pendekatan yang holistik dan terintegrasi. Oleh karena itu, penyempurnaan berkelanjutan dan implementasi program pengentasan kemiskinan yang terarah sangat penting. Bersamaan dengan itu, mengatasi isu-isu seperti *stunting* melalui perbaikan gizi dan intervensi kesehatan masyarakat, serta berinvestasi dalam solusi pengelolaan sampah yang berkelanjutan, sangat penting untuk menciptakan populasi yang lebih sehat dan lingkungan yang lebih menarik, yang merupakan prasyarat untuk pembangunan ekonomi jangka panjang yang adil.

3.1.5. Arah Kebijakan Ekonomi Nasional

Arah kebijakan ekonomi nasional Republik Indonesia pada Tahun 2026 merupakan bagian integral dari Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2026 dan selaras dengan visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029. Perumusan arah kebijakan ini bertujuan untuk mengakselerasi pertumbuhan ekonomi yang tinggi, produktif, dan inklusif, sekaligus menjaga stabilitas makroekonomi di tengah dinamika global dan domestik.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema "Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif". Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 "Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045".

Pemerintah berkomitmen untuk mewujudkan swasembada pangan, energi, dan air. Swasembada pangan diarahkan salah satunya melalui pengembangan KSPP untuk membangun lumbung pangan nasional dan pangan akuatik (*blue food*) dengan berbagai intervensi strategis yang berfokus pada peningkatan hasil produktivitas perikanan, peningkatan nilai tambah dan daya saing produk perikanan, keberlanjutan ekosistem perairan, dan kesejahteraan pelaku usaha perikanan. Untuk mencapai swasembada pangan, diperlukan juga penguatan tata kelola sistem pangan, termasuk melalui transformasi dan penguatan kelembagaan Perum BULOG, menjadi lembaga di bawah Presiden, guna mengelola cadangan pangan nasional secara terpadu, efektif, dan efisien.

Swasembada energi diarahkan melalui peningkatan bauran ethanol, biodiesel, serta energi terbarukan, yang difokuskan untuk meningkatkan kapasitas produksi biofuel, pemanfaatan biodiesel pada sektor transportasi, dan mendorong perubahan pola konsumsi energi dari sumber energi berbasis fosil menuju energi yang lebih bersih. Swasembada air diarahkan salah satunya melalui pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dari hulu ke hilir dalam rangka meningkatkan rumah tangga yang terlayani akses air minum yang disertai dengan pengelolaan dan pengawasan kualitas air minum dengan memperhatikan aspek teknis, kelembagaan, regulasi dan kebijakan, pendanaan, dan masyarakat.

RKP Tahun 2026 juga diarahkan untuk menciptakan ekonomi yang produktif dan inklusif. Ekonomi yang produktif didukung oleh sumber daya manusia berkualitas. Upaya dalam membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif, salah satunya dengan mengembangkan lebih lanjut dan memperluas ekosistem program MBG. Program ini mencakup pemenuhan gizi ibu hamil, ibu menyusui, balita, dan anak sekolah dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/MA/SMK/sederajat. Dampak positif yang diharapkan mencakup peningkatan prestasi siswa, kesejahteraan petani, lapangan kerja, dan pengurangan beban penduduk miskin.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 akan meningkat relatif tinggi didukung oleh stabilitas dan perbaikan capaian indikator ekonomi makro. Inflasi dan nilai tukar diarahkan untuk terjaga stabil dan terkendali didukung oleh stabilitas eksternal dan kinerja APBN. Kinerja sektor industri pengolahan yang menjadi

penggerak utama pertumbuhan ekonomi ditargetkan akan meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap PDB. Sementara itu, pertumbuhan investasi ditargetkan meningkat didukung akselerasi realisasi PMA dan PMDN.

Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan RPJMN Tahun 2025-2029. Meskipun di tengah gejolak ekonomi global, perekonomian Indonesia tahun 2026 ditargetkan mengalami percepatan pertumbuhan menjadi 5,80–6,30 persen. Peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan diharapkan dapat mendorong GNI per kapita Indonesia ke level US$5.870 serta mempertahankan status Indonesia pada kategori upper middle-income country. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 akan didorong melalui berbagai kebijakan yang transformatif di sisi pengeluaran dan sisi produksi, peningkatan peran BUMN dan sektor swasta.

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026 didukung oleh peningkatan konsumsi masyarakat. Selain melalui upaya pengendalian inflasi dalam rentang target BI, peningkatan daya beli masyarakat juga memerlukan strategi untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, termasuk penciptaan lapangan pekerjaan yang luas serta pencegahan peningkatan pemutusan hubungan kerja yang dapat menurunkan rata-rata pendapatan masyarakat dan berisiko meningkatkan tingkat pengangguran serta kemiskinan. Selain bertujuan untuk pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, program MBG juga berperan membentuk ekosistem yang mendukung penciptaan lapangan pekerjaan serta mengurangi biaya konsumsi harian, sehingga masyarakat memiliki ruang lebih besar untuk konsumsi barang atau jasa lainnya. Konsumsi pemerintah tahun 2026 ditargetkan meningkat untuk mendukung daya beli masyarakat serta pembiayaan infrastruktur.

Tabel 3.3.
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026
Sisi Pengeluaran (persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1	Konsumsi Rumah Tangga dan LNPRT	5,53 – 5,83
2	Konsumsi Pemerintah	6,85 – 6,96
3	Investasi (Pembentukan Modal Tetap Bruto/PMTB)	6,17 – 7,18
4	Ekspor Barang dan Jasa	7,05 – 7,17
5	Impor Barang dan Jasa	7,34 – 7,50
Pertumbuhan PDB		5,80 – 6,30

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Sektor industri pengolahan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,85–6,38 persen. Dengan pertumbuhan tersebut, kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDB diproyeksikan terus mengalami kenaikan sesuai *trajectory* jangka menengah dan panjang, yakni mencapai 21,20 persen di tahun 2026. Faktor-faktor pendorong kinerja industri pengolahan pada tahun 2026 antara lain (i) beberapa proyek investasi yang diharapkan sudah masuk tahap operasional di tahun 2026, seperti proyek investasi petrokimia di Banten, pabrik sel baterai kendaraan listrik di Jawa Barat, serta proyek hilirisasi nikel ke arah baterai di Maluku Utara dan Sulawesi Tengah; (ii) penerapan teknologi 4.0 yang lebih efisien dan ramah lingkungan; (iii) fasilitasi dan pendampingan sertifikasi industri hijau bagi 164 perusahaan untuk penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) di sektor *Industrial Process and Production Use* (IPPU) dan meningkatkan efisiensi produksi; serta (iv) penambahan kapasitas produksi industri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) mencapai 251.000 unit per tahun.

Selain itu, beberapa faktor *demand side* pun diprakirakan turut menjadi pendorong kinerja industri pengolahan, seperti (i) peningkatan permintaan barang konsumsi di beberapa mitra dagang, terutama di negara berkembang seperti India serta negara-negara di Timur Tengah dan Asia Pasifik; (ii) permintaan di dalam negeri yang diharapkan masih akan terjaga seiring dengan tingkat inflasi yang terkendali; (iii) perluasan program makan bergizi bagi anak dan ibu hamil yang mendorong permintaan subsektor industri makanan dan minuman; serta (iv) peningkatan kemandirian industri farmasi dan alat kesehatan yang didorong dengan kebutuhan untuk menunjang upaya peningkatan kesehatan, penanggulangan penyakit, dan akses pelayanan kesehatan dalam mewujudkan cakupan kesehatan semesta.

Sektor pertanian dalam arti luas pada tahun 2026 ditargetkan mengalami perbaikan dan tumbuh sebesar 3,09–3,33 persen. Pertumbuhan sektor pertanian utamanya didorong oleh peningkatan permintaan produk pertanian untuk program MBG dan program lumbung pangan yang bertujuan untuk swasembada pangan. Selain itu, program cetak sawah juga akan mendukung peningkatan produksi produk pertanian pada tahun 2026. Sektor konstruksi pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 7,80–7,91 persen, didorong oleh proyek-proyek seperti revitalisasi sekolah dan pembangunan sekolah unggulan serta rumah sakit daerah dan pembangunan KI dan KEK.

Sektor perdagangan pada tahun 2026 ditargetkan tumbuh sebesar 5,25–5,62 persen. Perdagangan dalam negeri diarahkan untuk dapat meningkatkan perdagangan antarwilayah, pengembangan rantai nilai domestik, stabilisasi harga, dan peningkatan konektivitas ke pasar global, melalui strategi (i) integrasi informasi keunggulan daerah serta permintaan dan penawaran setiap daerah; (ii) promosi dan misi dagang, serta kerja sama antardaerah di setiap provinsi; (iii) peningkatan akses pembiayaan di setiap daerah; (iv) stabilisasi harga bahan pangan dengan memperkuat sinergi dan kolaborasi antardaerah; (v) pendampingan adaptasi *e-commerce* bagi pelaku usaha di daerah termasuk UMKM serta pengembangan standardisasi dan regulasi teknis untuk penguatan *e-commerce* dan digitalisasi perdagangan; (vi) optimalisasi pemanfaatan sarana perdagangan untuk peningkatan perdagangan antardaerah; (vii) penguatan iklim persaingan usaha yang sehat untuk mendorong perdagangan domestik; (viii) peningkatan perlindungan konsumen untuk mendorong konsumen lebih berdaya; serta (ix) peningkatan jumlah pusat informasi dan fasilitas ekspor di daerah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah untuk mendorong perdagangan domestik dan ekspor.

Pada tahun 2026, rasio PDB pariwisata ditargetkan meningkat menjadi sebesar 4,60–4,70 persen serta diiringi oleh peningkatan nilai devisa pariwisata mencapai US$22,00–24,70 miliar. Arah kebijakan pariwisata difokuskan pada peningkatan nilai tambah pariwisata yang dilakukan melalui pembangunan pariwisata berkualitas dan berkelanjutan. Faktor-Faktor pendukung kinerja sektor pariwisata meliputi (i) peningkatan infrastruktur dan konektivitas melalui pengembangan bandara, pelabuhan dan transportasi darat yang mempermudah akses wisatawan serta peningkatan jumlah rute penerbangan langsung internasional ke Indonesia; (ii) kebijakan peningkatan kualitas SDM pariwisata; (iii) pengembangan atraksi dan *event* berkualitas meliputi peningkatan penyelenggaraan acara berskala internasional; (iv) penguatan pariwisata berkelanjutan melalui pelestarian budaya, pengembangan desa wisata berbasis komunitas, dan peningkatan sertifikasi dan regulasi untuk destinasi wisata yang

ramah lingkungan; serta (v) optimalisasi pemasaran pariwisata melalui AI dan digitalisasi sektor pariwisata (*Tourism 5.0*).

Tabel 3.4.
Sasaran Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Tahun 2026
Sisi Lapangan Usaha (persen)

No.	Komponen Pertumbuhan Ekonomi	Sasaran 2026
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	3,09–3,33
2	Pertambangan dan Penggalian	1,70–1,85
3	Industri Pengolahan	5,85–6,38
4	Pengadaan Listrik, Gas, dan Produksi Es	5,68–6,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2,22–2,38
6	Konstruksi	7,80–7,91
7	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,25–5,62
8	Transportasi dan Pergudangan	9,60–10,07
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	9,67–9,82
10	Informasi dan Komunikasi	8,22–8,82
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	6,88–7,08
12	Real Estate	2,78–2,98
13	Jasa Perusahaan	8,57–9,20
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib	3,87–4,15
15	Jasa Pendidikan	4,07–4,37
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9,18–9,31
17	Jasa lainnya	7,24–7,76
Pertumbuhan PDB		5,80–6,30

Sumber: Rancaangan RKP Tahun 2026

3.1.6. Arah Kebijakan Ekonomi Provinsi Jawa Barat

Memperhatikan kondisi saat ini serta tuntutan yang akan dihadapi ke depan, pertumbuhan ekonomi Jawa Barat didorong ke tingkat yang lebih tinggi, yaitu dari pertumbuhan 4,95 persen (*c-to-c*) pada tahun 2024 menjadi 5,15 - 6,20 persen pada tahun 2026. Proyeksi ini tidak terlepas dari trayektori ekonomi nasional untuk mencapai pertumbuhan 8 persen pada akhir periode RPJMN 2025-2029, tetapi tetap memperhatikan fenomena perlambatan pertumbuhan global dan nasional. Pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Jawa Barat yang masih terbilang tinggi di tengah resiliensi pertumbuhan ekonomi global, menjadi momentum yang perlu dimanfaatkan dalam melakukan perluasan pasar ekspor, peningkatan produksi sektor industri pengolahan, serta percepatan pembangunan yang melibatkan investasi dalam dan luar negeri.

Kinerja pertumbuhan ekonomi tahun 2025 dan 2026 diharapkan telah memasuki fase pemantapan dan stabilisasi pertumbuhan dalam menyongsong tahap pertama RPJPD Tahun 2025-2045. Pemantapan ekonomi tersebut diterjemahkan ke dalam komponen PDRB baik dari sisi pengeluaran maupun produksi. Dari sisi komponen pengeluaran, proyeksi pertumbuhan ekonomi tahun 2026 didukung oleh komponen pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga, Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB), dan Ekspor. Sedangkan dari sisi produksi, terdapat 3 (tiga) sektor lapangan usaha dengan kontribusi terbesar terhadap perekonomian Jawa Barat tahun 2024 yaitu Industri Pengolahan (41,39 persen), Perdagangan Besar dan Eceran (14,46 persen), serta sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan (8,42 persen). Ketiga sektor ini diharapkan dapat tumbuh di tingkat yang lebih tinggi, terutama pertumbuhan sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan yang ditargetkan tumbuh 2,16 - 2,60 persen pada tahun 2026. Target pertumbuhan tahun 2026 dapat diwujudkan melalui peran

Jawa Barat sebagai penumpu ketahanan pangan nasional, pengembangan komoditas unggulan, serta hilirisasi *blue economy*.

Tabel 3.5.
Target Indikator Makro Pembangunan Jawa Barat Tahun 2026

No.	Indikator Makro dan Pembangunan	Target 2026
1	Indeks Modal Manusia (Poin)	0,56
2	Persentase Penduduk Miskin (%)	5,51 - 6,02
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) (%)	6,30 - 6,65
4	Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) (%)	5,15 - 6,20
5	Pendapatan Perkapita (Juta Rupiah/Kapita)	64,60
6	Gini Ratio (Poin)	0,420 - 0,425
7	Penurunan Intensitas Emisi GRK (%)	2,62

Sumber: Ranhir RKPD Provinsi Jawa Barat, 2025

Kebijakan pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 diarahkan pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yaitu pertumbuhan yang menciptakan pemerataan pendapatan, pengentasan kemiskinan, membuka kesempatan kerja yang luas serta menerapkan prinsip-prinsip keberlanjutan sumber daya alam dan lingkungan.

Arah Kebijakan Pembangunan ekonomi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. penyiapan sentra pembibitan dan varietas unggul untuk komoditas pertanian unggulan yang bernilai tinggi yang dapat berpotensi masuk pasar ekspor/global;
2. penyediaan instrumen pengendali hama, pupuk, obat, dan pakan ramah lingkungan dan ekonomis;
3. penyediaan terintegrasi infrastruktur esensial bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan daya saing produk pertanian;
4. pengendalian kawasan pertanian pangan berkelanjutan;
5. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk pemenuhan industri serta peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN);
6. Pemetaan dan penataan potensi ekonomi lokal yang unik dan bernilai tinggi serta peningkatan insentif fiskal & non fiskal bagi investasi di daerah afirmasi 3TP (khususnya di Jawa Barat Selatan) guna memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
7. penguatan tata kelola perdagangan pada aspek sarana perdagangan, dukungan pada produk unggulan, serta perlindungan konsumen
8. penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, kultural, maupun wisata perkotaan secara kolaboratif dan partisipatif
9. penyiapan dan penataan government-induced activities dalam rangka peningkatan pergerakan orang dan barang ke daerah afirmasi 3 TP (Khususnya Jawa Barat Selatan) melalui bertambahnya demand;
10. pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK di daerah dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) nasional yang berdaya saing di tataran global
11. penguatan riset terkait sektor-sektor ekonomi produktif, antara lain melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas researcher, peningkatan pembiayaan riset sektor-sektor ekonomi produktif, serta penguatan kolaborasi riset sektor-sektor ekonomi produktif antara pemerintah, dunia akademik, DUDI, masyarakat, baik dalam dan luar negeri;

12. penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi dan inkubator bisnis;
13. Pemberdayaan ekonomi mikro, kecil dan menengah yang inklusif dan berbasis kerakyatan, terutama bagi masyarakat di daerah afirmasi 3 TP (di Jawa Barat Bagian Selatan);
14. penyiapan pemetaan dan peningkatan kualitas SDM pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling;
15. penguatan tata kelola pelatihan, penyaluran/penempatan dan perlindungan pekerja migran indonesia, serta pengembangan ekosistem PMI dan diaspora berkualifikasi menengah dan tinggi;
16. peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan;
17. peningkatan iklim investasi dan kemudahaan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM;
18. penataan dan penyiapan kelembagaan, pembiayaan koperasi bagi petani, nelayan, dan petambak serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi pertanian serta perikanan;
19. industrialisasi koperasi melalui hilirisasi komoditas unggulan daerah, penguatan proses bisnis kelembagaan, serta adopsi teknologi tepat guna;
20. penataan dan penyiapan instrumen kebijakan dan kelembagaan perdagangan karbon, offsetting dan pajak karbon, serta pembayaran berbasis kinerja (result base payment);
21. pemberian deregulasi kemudahan perizinan, akses ke green/low-cost financing, bantuan/subsidi operasional & ketenagakerjaan, dan insentif fiskal/non fiskal lainnya, baik di tingkat pusat dan daerah, terutama bagi investasi pada sektor-sektor ekonomi produktif dan inklusif (pertanian, perikanan, industri), sektor-sektor ekonomi biru dan hijau, dan energi baru dan terbarukan;
22. Penataan dan restrukturisasi BUMD.

3.1.7. Arah Kebijakan Ekonomi Kota Tasikmalaya

Berdasarkan Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dan memperhatikan arah kebijakan dan kondisi ekonomi nasional dan regional, maka sasaran dan target pembangunan ekonomi makro daerah Kota Tasikmalaya tahun 2026 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.6.
Target Indikator Makro Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Indikator Pembangunan	Satuan	Target
Indeks Pembangunan Manusia	Point	76,99
PDRB Perkapita	Juta Rp	43,00
PDRB ADH Berlaku	Triliyun RP	32,96
Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,45
Inflasi	%	2,29
Indeks gini	Point	0,350
Tingkat Kemiskinan	%	9,47
Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,34

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026

Untuk mencapai kondisi pembangunan ekonomi tahun 2026 sebagaimana Tema Pembangunan tahun 2026 yaitu “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat”, maka disusun strategi dan arah kebijakan perekonomian pada tahun 2026 sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi
   Pemerintah daerah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang tangguh, inklusif, dan berdaya saing. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan kualitas dan kapasitas usaha di sektor koperasi dan usaha mikro, Industri Kecil Menengah (IKM), perdagangan, pariwisata, ekonomi kreatif, pertanian dan perikanan, serta mendorong produksi produk unggulan berorientasi ekspor.
2. Peningkatan Investasi dan Penciptaan Lapangan Kerja
   Dengan tingkat pengangguran terbuka mencapai 6,49%, kebijakan diarahkan pada pengembangan investasi di sektor padat karya, pelatihan kompetensi, pendidikan vokasional, dan pemberdayaan ekonomi lokal. Usaha mikro dan IKM menjadi tulang punggung penciptaan lapangan kerja baru.
3. Penguatan Koperasi, Usaha Mikro dan IKM
   Pemerintah mendorong peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi termasuk di dalamnya Koperasi Merah Putih, digitalisasi koperasi, usaha mikro dan IKM, akses pembiayaan dan peningkatan kapasitas SDM pelaku usaha mikro dan IKM.
4. Pengendalian Inflasi dan Stabilitas Harga
   Pengendalian inflasi dilakukan melalui penguatan strategi pengendalian inflasi yang meliputi keterjangkauan dan stabilitas harga, ketersediaan dan stabilitas pasokan bahan pangan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif dengan Tim Pengendali Inflasi Pusat dan Daerah. Selain itu, perlu penguatan ketahanan pangan lokal dengan meningkatkan produktivitas sektor pertanian dan perikanan serta menjaga daya beli masyarakat.
5. Pengurangan Kemiskinan
   Dengan angka kemiskinan Kota Tasikmalaya sebesar 11,10%, untuk menurunkan angka kemiskinan tersebut, dilakukan melalui program perlindungan dan jaminan sosial, pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin, dan peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, serta penanganan kantong-kantong kemiskinan.

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah. Pada bagian ini menyajikan mengenai kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah selama satu tahun yang didukung oleh kebijakan yang akan ditempuh oleh pemerintah daerah berkaitan dengan pendapatan daerah, pembiyaan daerah dan balanja daerah.

Kebijakan keuangan tersebut memberikan gambaran tentang anggaran yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan pada tahun 2026 dengan memperhatikan kemampuan fiskal daerah dan APBD. Kapasitas keuangan daerah pada dasarnya ditempatkan sejauh mana daerah mampu mengoptimalkan penerimaan dari pendapatan daerah. Optimalisasi penerimaan dan pembiayaan daerah serta efisiensi dan efektifitas belanja daerah menjadi upaya prioritas dalam arah kebijakan keuangan daerah kedepan. Mengingat bahwa pengelolaan keuangan daerah diwujudkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

atau APBD maka analisis pengelolaan keuangan daerah dilakukan terhadap APBD dan laporan keuangan daerah pada umumnya.

Penganggaran dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 disusun dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029. Selain pendanaan yang bersumber dari APBD, dukungan APBD Provinsi dan APBN serta pendanaan non APBD seperti dana kemitraan swasta, swadaya masyarakat serta kontribusi pelaku usaha melalui program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSLP)/*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan potensi yang dapat menunjang pendanaan pembangunan di Kota Tasikmalaya.

Berikut ini disajikan realisasi dan proyeksi pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022 – 2026

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
4.	**PENDAPATAN**	**1.902.443.766.699,29**	**1.698.776.143.136,64**	**1.792.496.242.472,06**	**1.705.871.148.316,00**	**1.761.815.176.188,00**
4.1.	**PENDAPATAN ASLI DAERAH**	**341.362.213.701,29**	**364.302.263.151,64**	**351.777.584.751,06**	**440.084.336.839,00**	**436.708.545.381,00**
4.1.01	Pajak Daerah	159.043.569.254,00	165.183.534.730,00	168.952.023.618,00	231.050.294.492,00	236.022.841.751,00
4.1.02	Retribusi Daerah	11.877.941.377,00	12.333.653.274,00	168.040.917.264,06	201.913.388.213,00	194.631.548.867,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6.867.125.110,00	7.338.000.075,00	6.798.537.734,00	6.798.558.734,00	5.732.059.363,00
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	163.573.577.960,29	179.447.075.072,64	7.986.106.135,00	322.095.400,00	322.095.400,00
4.2.	**PENDAPATAN TRANSFER**	**1.475.175.680.746,00**	**1.334.473.879.985,00**	**1.440.718.657.721,00**	**1.265.786.811.477,00**	**1.325.106.630.807,00**
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.063.555.008.009,00	1.122.149.154.645,00	1.174.724.029.446,00	1.176.062.074.000,00	1.154.190.372.000,00
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.036.787.557.009,00	1.122.149.154.645,00	1.174.724.029.446,00	1.176.062.074.000,00	1.154.190.372.000,00
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah	26.767.451.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	411.620.672.737,00	212.324.725.340,00	265.994.628.275,00	89.724.737.477,00	170.916.258.807,00
4.2.02.01	*Pendapatan Bagi Hasil*	*134.992.856.376,00*	*137.139.050.331,00*	*141.854.155.395,00*	*89.724.737.477,00*	*84.256.710.007,00*
4.2.02.02	*Bantuan Keuangan*	*276.627.816.361,00*	*75.185.675.009,00*	*124.140.472.880,00*	*0,00*	*86.659.548.800,00*
4.3.	**LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH**	**85.905.872.252,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.3.03	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan	85.905.872.252,00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sumber: LRA Tahun 2022, 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, data diolah tahun 2025

Tabel 3.8.
Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2022 – 2026

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
5	**BELANJA DAERAH**	**1.912.313.365.226,68**	**1.716.186.584.365,88**	**1.790.597.242.391,64**	**1.738.123.837.429,00**	**1.770.742.958.130,00**
5.1	**BELANJA OPERASI**	**1.530.802.959.552,68**	**1.574.042.659.011,88**	**1.635.468.452.199,64**	**1.630.844.253.650,60**	**1.598.260.351.687,00**
5.1.01	Belanja Pegawai	789.777.565.972,00	778.692.539.495,00	796.214.695.004,00	796.866.225.283,00	826.984.875.283,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	648.183.496.775,00	702.956.600.470,00	739.471.162.696,00	759.747.461.868,60	696.499.236.404,00
5.1.03	Belanja Bunga	20.996.181,68	113.122.048,88	287.869.906,64	300.000.000,00	300.000.000,00
5.1.04	Belanja Subsidi	142.670.000,00	512.325.000,00	370.000.000,00	239.700.000,00	1.100.000.000,00
5.1.05	Belanja Hibah	91.980.930.624,00	88.968.071.998,00	97.664.724.593,00	72.170.866.500,00	70.696.240.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	697.300.000,00	2.800.000.000,00	1.460.000.000,00	1.520.000.000,00	2.680.000.000,00
5.2	**BELANJA MODAL**	**378.644.240.783,00**	**137.927.625.828,00**	**152.907.959.308,00**	**82.282.679.047,40**	**159.298.359.176,00**
5.2.01	Belanja Tanah	5.317.869.890,00	1.621.454.876,00	3.847.895.080,00	1.500.000.000,00	3.515.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	137.898.409.970,00	65.575.727.583,00	72.971.536.933,00	39.324.334.061,00	26.374.205.481,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	49.533.882.034,00	39.755.190.641,00	31.809.801.708,00	23.702.067.085,40	73.615.992.600,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	184.606.475.689,00	30.174.056.628,00	43.667.091.198,00	16.167.413.101,00	54.836.729.095,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.287.603.200,00	801.196.100,00	566.171.110,00	1.490.248.200,00	956.432.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	45.463.279,00	98.616.600,00	-
5.3	**BELANJA TIDAK TERDUGA**	**2.866.164.891,00**	**4.216.299.526,00**	**2.220.830.884**	**24.996.904.731,00**	**13.184.247.267,00**
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	2.866.164.891,00	4.216.299.526,00	2.220.830.884	24.996.904.731,00	13.184.247.267,00

Sumber: LRA Tahun 2022, 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, data diolah tahun 2025

Tabel 3.9.
Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Kota Tasikmalaya
Tahun Anggaran 2021 – 2025

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Realisasi 2024	Target 2025	Target 2026
	SURPLUS/DEFISIT	**(9.869.598.527,39)**	**(17.410.441.229,24)**	**1.899.000.080,42**	**(32.252.689.113,00)**	**(8.927.781.942,00)**
		(0,52)	**(1,01)**	**0,11**	**(1,86)**	**(0,51)**
6.	**PEMBIAYAAN DAERAH**	**32.372.401.818,40**	**29.753.908.942,07**	**18.206.326.669,70**	**32.252.689.113,00**	**8.927.781.942,00**
6.1	**PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**57.934.408.438,40**	**48.729.670.617,07**	**29.097.595.804,70**	**48.752.689.113,00**	**25.427.781.942,00**
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	49.866.901.438,40	22.502.803.290,07	12.343.467.712,70	33.752.689.113,00	10.427.781.942,00
6.1.02	Pencairan Dana Cadangan	0,00	18.676.776.100,00	1.831.404.624,00	0,00	0,00
6.1.04	Penerimaan Pinjaman Daerah	8.062.007.000,00	7.475.761.675,00	14.914.287.331,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.500.000,00	74.329.552,00	8.436.137,00	0,00	0,00
6.2	**PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH**	**25.562.006.620,00**	**18.975.761.675,00**	**10.891.269.135,00**	**16.500.000.000,00**	**16.500.000.000,00**
6.2.01	Pembentukan Dana Cadangan	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	7.499.999.620,00	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00
6.2.03	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	8.062.007.000,00	7.475.761.675,00	10.891.269.135,00	15.000.000.000,00	15.000.000.000,00
6.3	**SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)**	**22.502.803.291,01**	**12.343.467.712,83**	**20.105.326.750,12**	**0,00**	**0,00**

Sumber: LRA Tahun 2022, 2023 dan 2024, APBD Tahun 2025, Rancangan RPJMD Tahun 2025-2029, data diolah tahun 2025

Asumsi-asumsi yang mendasari proyeksi APBD tersebut diantaranya:

A. Pendapatan Daerah
   1. Pendapatan asli daerah mengalami kenaikan setiap tahun antara lain disebabkan:
      a. Bertambahnya objek dan wajib pajak serta retribusi hasil dari pendataan dan pemeriksaan lapangan;
      b. Adanya peningkatan nilai jual objek pajak (NJOP) pada subjek dan objek PBB-P2 dan BPHTB;
      c. Pengalihan Dana Bagi Hasil pajak TNKB dan BBNKB menjadi opsen pajak daerah.
      d. Tren pertumbuhan ekonomi yang positif tiap tahunnya di kota Tasikmalaya.
   2. Diasumsikan adanya kenaikan dana transfer setiap tahun, melalui bantuan keuangan untuk membantu percepatan pembangunan kabupaten/kota.

B. Belanja Daerah
   1. Pemenuhan belanja *mandatory spending*, alokasi anggaran Pendidikan sebesar 20% dari APBD;
   2. Besaran belanja pegawai paling tinggi sebesar 30% dari APBD tidak termasuk tunjangan guru, yang dilaksanakan secara bertahap selama 5 tahun sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, sehingga dimungkinkan pertumbuhan pegawai tidak ada penambahan (*zero growth*);
   3. Besaran belanja infrastruktur pelayanan publik paling sedikit sebesar 40% dari APBD secara bertahap;
   4. Belanja hibah dan bantuan sosial dialokasikan untuk mendukung penyelenggaraan pembangunan daerah;
   5. Kebutuhan belanja publik yang semakin meningkat untuk mendanai program prioritas daerah;
   6. Pemenuhan belanja yang bersumber dari DAU ditentukan;
   7. Penyesuaian terhadap kenaikan harga (inflasi) dengan kebutuhan belanja.

C. Pembiayaan Daerah
   1. Penganggaran defisit sesuai peraturan perundang-undangan;
   2. Proyeksi penerimaan SiLPA;
   3. Penambahan penyertaan modal untuk PT. BPRS Al-Madinah;
   4. Pembayaran Pokok Utang pada pinjaman yang dilakukan oleh BLUD.

3.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Arah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) diantarnya adalah:

1) Penggalian dan peningkatan potensi sumber-sumber pendapatan (intensifikasi dan ekstensifikasi) terutama bagi sumber pendapatan pajak dan retribusi yang potensial;
2) Optimalisasi peran dan fungsi kelembagaan Perangkat Daerah penghasil;
3) Optimalisasi penggunaan Teknologi dan Sistem Infomasi untuk pengelolaan pendapatan daerah;
4) Peningkatan koordinasi secara sinergis di bidang pendapatan daerah dengan Pemerintah Pusat. Pemerintah Provinsi. Perangkat Daerah Penghasil. Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan serta POLRI dan Kejaksaan;
5) Meningkatkan penyertaan modal pada BUMD dan Perusahaan Daerah untuk peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
6) Meningkatkan pendayagunaan aset dan keuangan daerah;
7) Menguatkan promosi investasi guna mendorong investasi swasta yang berkelanjutan dengan memberikan fasilitas dan insentif yang memadai;

8) Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Adapun kebijakan pendapatan untuk meningkatkan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagai upaya peningkatan kapasitas fiskal daerah adalah:

1) Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penghasilan dana bagi hasil baik dari pajak maupun bukan pajak lainnya;
2) Meningkatkan akurasi data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Transfer;
3) Meningkatkan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Dana Perimbangan.

Berdasarkan arah kebijakan perencanaan pendapatan daerah tersebut di atas, untuk dapat merealisasikan proyeksi penerimaan pendapatan daerah diperlukan strategi pencapaiannya, antara lain:

a. Strategi pencapaian target Pendapatan Asli Daerah, dapat ditempuh melalui:
    1. Penataan kelembagaan, penyempurnaan dasar hukum pemungutan dan regulasi penyesuaian tarif pungutan;
    2. Optimalisasi pemungutan atas pajak dan retribusi serta pengembangan sistem penagihan atas wajib pajak dan retribusi yang tidak memenuhi kewajibannya;
    3. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah;
    4. Peningkatan fasilitas dan sarana pelayanan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran;
    5. Melaksanakan pelayanan dan pemberian kemudahan kepada masyarakat dalam membayar pajak, seperti pengembangan gerai/outlet, dan kerjasama dengan pihak perbankan;
    6. Meningkatkan penyertaan modal untuk BUMD dan Perusahaan Daerah guna peningkatan penerimaan bagi hasil (deviden);
    7. Revitalisasi Perusahaan Daerah (PD) melalui berbagai upaya. antara lain: pengelolaan PD secara profesional. peningkatan sarana/prasarana;
    8. kemudahan prosedur pelayanan terhadap konsumen/nasabah. serta mengoptimalkan peran Badan Pengawas agar PD berjalan sesuai dengan peraturan sehingga mampu bersaing dan mendapat kepercayaan dari publik/perbankan;
    9. Optimalisasi pemberdayaan dan pendayagunaan aset yang diarahkan pada peningkatan Pendapatan Asli Daerah;
    10. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam operasional pemungutan dan pelayanan pendapatan daerah. terutama dengan perbankan sehingga mempermudah pelayanan pembayaran pajak daerah melalui layanan perbankan secara langsung;
    11. Mengembangkan sinergitas pelaksanaan tugas dengan perangkat daerah penghasil.

b. Strategi pencapaian target Dana Perimbangan, dapat ditempuh melalui:
    1. Mendorong upaya intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak penghasilan dan Pajak lainnya yang dilaksanakan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tasikmalaya, serta bukan pajak lainnya;
    2. Meningkatkan akurasi data-data dan sumber daya yang dijadikan instrumen dasar perhitungan Dana Perimbangan;
    3. Sosialisasi mengenai pungutan pajak dalam upaya peningkatan kesadaran

masyarakat dalam pembayaran pajak;
4. Peningkatan koordinasi dengan pemerintah pusat untuk mengupayakan peningkatan Dana Perimbangan (DAU, DAK, dan dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak).

c. Strategi pencapain target Pendapatan Transfer Antar Daerah dari Pemerintah Provinsi, dapat ditempuh melalui:
1. Sosialisasi mengenai pungutan pajak yang dikelola oleh provinsi seperti pajak kendaraan bermotor, pajak pengambilan dan pemanfaatan air permukaan, dan pajak metrologi, dalam upaya peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembayaran pajak;
2. Peningkatan koordinasi dengan Pemerintah Provinsi untuk mengupayakan peningkatan besaran Dana Bantuan Keuangan.

3.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang efektif, efisien, proporsional, fokus, transparan dan akuntabel, terutama untuk belanja daerah yang prioritas seperti:

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Kota Tasikmalaya sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Pemenuhan belanja yang bersifat reguler/rutin diutamakan untuk memenuhi belanja yang bersifat mengikat antara lain pembayaran gaji ASN, dan belanja operasional kantor dengan mengedepankan prinsip efisien dan efektif;
3. Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemeritahan Daerah bahwa terdapat 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yang terdiri dari bidang pendidikan. bidang kesehatan. bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman. bidang ketentraman. ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. dan bidang sosial;
4. Pemenuhan alokasi anggaran untuk urusan dan bidang tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan *(Mandatory Spending);*
5. Penganggaran belanja kegiatan dan program prioritas secara proporsional, rasional, efektif dan efisien berbasis program prioritas (*Money Follow Programs. Holistik-Tematik. Integratif dan Spasial*) untuk mendukung capaian target kinerja utama sebagaimana ditetapkan dalam rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan menganut prinsip akuntabilitas, efektif dan efisien dalam rangka mendukung penerapan anggaran berbasis kinerja;
6. Pemenuhan belanja untuk program dan kegiatan prioritas perangkat daerah dalam rangka pemenuhan target kinerja dan pelaksanaan urusan pemerintahan daerah;
7. Alokasi belanja untuk mendukung program dan kegiatan prioritas pemerintah pusat dan provinsi Jawa Barat;

3.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah meliputi penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Kebijakan pembiayaan daerah diarahkan pada:

1. Optimalisasi penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA);
2. Penyertaan Modal atau Investasi Daerah kepada perusahaan daerah;

3. Pengelolaan hutang terutama untuk menjaga arus kas pada BLUD.

Adapun rencana penggunaan SiLPA yang berasal dari SiLPA *earmarked* (DAK, DBHCHT, DBH dan BLUD) akan dialokasikan untuk program/kegiatan yang sesuai dengan pedoman penggunaannya sedangkan yang berasal dari SiLPA *non-earmarked* akan digunakan untuk menutup defisit.

3.2.4. Arah Kebijakan Pendanaan Pembangunan Daerah Lainnya

1. Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR)

Sumber alternatif lainnya yang dapat digunakan dalam membiayai pembangunan daerah adalah pelibatan pihak swasta melalui menggunaan Dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP/CSR).

Berkenaan dengan hal tersebut, Pemeritah Kota Tasikmalaya telah membentuk regulasi berupa Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pengelolaan Program Tanggung Jawab Sosial Dan Lingkungan Perusahaan dan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Di Kota Tasikmalaya

TJSL dan PKBL diarahkan untuk melaksanakan program pembangunan sebagai berikut:

a) Sosial, diarahkan pada kegiatan penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan perlindungan sosial terhadap Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS);
b) Lingkungan, yang diarahkan pada kegiatan pemberdayaan kondisi sosial masyarakat melalui peningkatan kapasitas, pendidikan lingkungan hidup dan konservasi, pencegahan polusi, penggunaan sumberdaya yang berkelanjutan, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim serta kampanye, proteksi dan pemulihan lingkungan;
c) Kesehatan, yang diarahkan agar seluruh wilayah Kota Tasikmalaya dapat menyelenggarakan kesehatan yang memadai, meliputi upaya kesehatan; pembiayaan kesehatan; sumberdaya kesehatan; sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan; serta pemberdayaan masyarakat;
d) Pendidikan, yang diarahkan untuk mencapai bebas putus jenjang sekolah pendidikan dasar dan menengah, beasiswa serta sarana dan prasarana pendidikan formal, non formal dan informal;
e) Peningkatan daya beli, yang diarahkan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sektor koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah, agribisnis, perikanan, dan pasar rakyat;
f) Infrastruktur dan sanitasi lingkungan, yang diarahkan untuk meningkatkan sarana dan prasarana lingkungan;
g) Sarana dan prasarana keagamaan; dan
h) Program pembangunan lainnya yang disepakati oleh perusahaan dengan Pemerintah Daerah.

Dalam rangka terus mendorong minat pihak swasta untuk berkerjasama dalam pembangunan daerah melalui Program TJSL dan PKBL dilakukan melalui upaya-upaya:

a) Sosialisasi program Program TJSL dan PKBL kepada pihak swasta dan perusahaan yang ada di wilayah Kota Tasikmalaya;
b) Meningkatkan koordinasi dan sinergi program pembangunan dengan perusahaan-perusahaan yang telah bermitra dengan Pemerintah Kota Tasikmalaya;

c) Memberikan penghargaan bagi pihak swasta dan perusahaan yang telah berkerjasama dan melaksanakan program Program TJSL dan PKBL;
d) Mengoptimalkan peran dan fungsi tim fasilitasi Program TJSL dan PKBL dalam meningkatkan kerjasama dengan pihak swasta dan perusahaan.

2. Pemanfaatan Dana Umat

Pemanfaatan dana umat yang himpun oleh lembaga-lembaga keuangan non pemerintah seperti BAZNAS, yayasan dan lembaga lainnya untuk mendukung pembangunan melalui cara mensinergikan sasaran program lembaga tersebut dengan sasaran pembangunan kota.

BAB IV
SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Rumusan perencanaan pembangunan Tahun 2026 disajikan dalam bentuk kerangka pikir perencanaan pembangunan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026, seperti terlihat pada Gambar 4.1 berikut:

Gambar 4.1
Kerangka Pikir Rumusan RKPD Kota Tasikmalaya

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya dirumuskan berdasarkan permasalahan dan isu strategis dengan berpedoman pada sasaran dan program prioritas rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029, hasil evaluasi RKPD, Rencana Tata Ruang Wilayah, evaluasi pencapaian SDGs, dengan memperhatikan prioritas nasional, prioritas daerah provinsi Jawa barat dan arah kerangka ekonomi dan keuangan daerah provinsi Jawa Barat. Selanjutnya permasalahan dan isu stretegis tersebut menjadi dasar dalam penentuan sasaran dan prioritas pembangunan yang diindikasikan dengan sasaran dan program pembangunan daerah yang selanjutnya diimplementasikan melalui program prioritas dan kegiatan prioritas tahun 2026.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya tahun 2026 merupakan pelaksanaan tahun kedua dari rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029 dimana tema atau fokus pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2026 adalah “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar Untuk Kemajuan dan Kesejahteraan Masyarakat”. Tema ini menjadi pedoman penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RPKD) Kota Tasikmalaya Tahun 2026.

Perencanaan pembangunan Kota Tasikmalaya pada tahun 2026 diimplementasikan dengan: (1) tetap menjaga kesinambungan melalui penyesuaian 5 (lima) prioritas pembangunan daerah, dengan 5 (lima) tujuan, dan 13 (tiga belas) sasaran pembangunan daerah yang ada di dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029; (2) memastikan konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas dan sasaran prioritas pembangunan kota dengan pendekatan penganggaran berbasis program (*money follows program*), serta program prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun 2026.

Rumusan sasaran dan prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya pada tahun 2026 mengacu pada (1) Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029, (2) hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya, (3) Rencana Tata Ruang Wilayah, (4) capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029, (5) Prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Rancangan RKP Tahun 2026, (6) Prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat yang tertuang dalam Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026, (7) identifikasi permasalahan pembangunan dan mempertimbangkan rancangan kerangka ekonomi dan keuangan daerah.

Guna mencapai target indikator kinerja sasaran pembangunan, maka dilakukan pengendalian dan evaluasi secara periodik dan berkesinambungan. Hasil pengendalian dan evaluasi memberikan gambaran riil mengenai kondisi capaian pembangunan di Kota Tasikmalaya. Kondisi ini menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan permasalahan pembangunan dan isu strategis, yang akan dijadikan sebagai salah satu masukan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya, selain berbagai pertimbangan lainnya seperti kebijakan pembangunan nasional tahun 2026, amanat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan dokumen perencanaan strategis lainnya, serta kondisi sosial dan ekonomi masyarakat di Kota Tasikmalaya.

Untuk meningkatkan capaian indikator makro pembangunan daerah, sejalan dengan prioritas pembangunan ekonomi nasional, maka konsentrasi prioritas pembangunan daerah untuk tahun 2026 berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pelayanan dasar. Demikian juga untuk mendorong percepatan pertumbuhan perekonomian daerah, pada tahun 2026 percepatan pertumbuhan ekonomi akan dikonsentrasikan pada pemberdayaan masyarakat dalam rangka mengurangi kemiskinan, peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, peningkatan kualitas dan produksi industri, penguatan koperasi, usaha mikro dan IKM, dan fasilitasi sarana dan prasarana perdagangan, serta peningkatan investasi dengan memperluas stimulus kemudahan perizinan dalam rangka mendukung penciptaan lapangan kerja.

4.1. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan dari upaya-upaya dalam mewujudkan visi pembangunan daerah. Arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan ini merupakan pengejawantahan dari strategi pembangunan daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.

4.1.1. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Nasional Tahun 2026

RPJPN Tahun 2025 - 2045 merupakan pedoman bagi perencanaan pembangunan jangka menengah guna mewujudkan Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan RPJPN Tahun 2025 – 2045 dimanifestasikan ke dalam 4 (empat) tema besar lima tahunan sebagai berikut:

1. Tahap 1 (2025-2029) Penguatan Fondasi Transformasi
2. Tahap 2 (2030-2034) Akselerasi Transformasi
3. Tahap 3 (2035-2039) Ekspansi Global
4. Tahap 4 (2040-2045) Perwujudan Indonesia Emas.

RPJMN 2025-2029 merupakan implementasi tahap pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045 sekaligus fondasi awal untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Rencana pembangunan nasional Tahun 2025-2029 dilaksanakan melalui 5 (lima) penguatan fondasi transformasi, sebagai berikut:

1. Transformasi sosial (pemenuhan pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial);
2. Transformasi ekonomi (Hilirisasi SDA serta penguatan riset inovasi dan produktivitas tenaga kerja);
3. Transformasi Tata Kelola (Kelembagaan tepat fungsi dan kolaboratif, peningkatan kualitas ASN, regulasi yang efektif, digitalisasi pelayanan publik, peningkatan integritas partai politik, dan pemberdayaan masyarakat sipil);
4. Supremasi Hukum, Stabilitas dan Kepemimpinan Indonesia (Memperkuat supremasi hukum dan stabilitas serta membangun kekuatan pertahanan berdaya gentar kawasan dan ketangguhan diplomasi);
5. Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi (Memperkuat ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai landasan dan modal dasar pembangunan).

Visi RPJMN 2025-2029 yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut dikelompokkan ke dalam delapan prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Prioritas nasional tersebut yaitu:

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);
2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya aiam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Arahan Presiden menekankan bahwa berbagai kebijakan pemerintah dalam dokumen perencanaan harus bisa menciptakan lapangan kerja berkualitas, mendukung swasembada pangan dan energi, mendorong terobosan teknologi dan aplikasinya, serta meningkatkan produktivitas. Dengan mempertimbangkan arahan presiden tersebut, kerangka ekonomi makro, kesinambungan pembangunan, hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun 2024, isu strategis dan kekinian, serta forum konsultasi publik, RKP Tahun 2026 mengangkat tema **“Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif”.** Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025-2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua

dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing-masing didukung oleh Prioritas Nasional spesifik.

Gambar 4.2.
Prioritas Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

Sasaran pembangunan tahun 2026 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca.

Pertumbuhan ekonomi tahun 2026 diarahkan untuk dapat mendorong pencapaian sasaran pembangunan lain yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, Indeks Modal Manusia, dan Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca melalui akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dengan tercapainya sasaran pertumbuhan ekonomi pada tahun 2026, diharapkan dapat mendorong tersedianya lapangan pekerjaan, peningkatan kesejahteraan, penurunan ketimpangan, dan pembangunan ramah lingkungan. Adapun target indikator sasaran pembangunan tahun 2026 sebagai berikut:

Gambar 4.3.
Sasaran Pembangunan RKP Tahun 2026

Sumber: Rancangan RKP Tahun 2026

4.1.2. Telaahan Tujuan dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026

RKPD Provinsi Jawa Barat tahun 2026 merupakan RKPD tahun kedua yang mengacu pada RPJMD Provinsi Jawa Barat tahun 2025-2029. Adapun Visi RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029 adalah "Jawa Barat Istimewa, Lembur diurus, Kota ditata", dengan Misi:

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif;
3. Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan, Pedesaan serta Miskin dan Kaya;
4. Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good* and *Clean Governance*.

Adapun tujuan dan sasaran pembangunan daerah provinsi Jawa Barat Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Sumber Daya Manusia yang *Cageur, Bageur, Bener, Pinter*, dan *Singer*, dengan sasaran:
   a) Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
   b) Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya;
   c) Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum;
   d) Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan;
   e) Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif
2. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan yang Berdaulat, Berkelanjutan, dan Berdaya Saing Tinggi Berbasis Sumber Daya Lokal dan Teknologi, dengan sasaran:
   a) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri;
   b) Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan;
   c) Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi Distribusi Barang dan Jasa;
   d) Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif.
3. Peningkatan dan Pemerataan Pendapatan Masyarakat, Kesempatan Kerja, Lapangan Berusaha, dengan sasaran:
   a) Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja;
   b) Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja;
   c) Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan.
4. Terwujudnya Pemerataan Pembangunan Kewilayahan, Sosial, dan Ekonomi yang berbasis lingkungan, dengan sasaran:
   a) Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan;
   b) Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil;
   c) Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat.
5. Terwujudnya Masyarakat Mandiri dan Adaptif Terhadap Perkembangan Sosial dan Teknologi, dengan sasaran:
   a) Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan;
   b) Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan.

6. Terwujudnya Birokrasi yang Gesit dan Berorientasi Pelayanan, dengan sasaran meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif.

Isu strategis RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yaitu:
1. Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia;
2. Pembangunan Ekonomi Berkualitas dan Berkelanjutan;
3. Pemerataan Pembangunan Wilayah yang didukung Infrastruktur Berkualitas dan Lingkungan yang berkelanjutan;
4. Peningkatan Kehidupan Berdemokrasi serta Reformasi Birokrasi dan Inovasi Daerah.

Adapun tema pembangunan provinsi Jawa Barat Tahun 2026 yaitu "Pemerataan Distribusi Akses Layanan Dasar".

4.1.3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan RKPD tahun kedua dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Tasikmalaya 2025-2029. Visi yang dirumuskan dalam RPJMD Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

"TASIKMALAYA SEBAGAI KOTA INDUSTRI, JASA DAN PERDAGANGAN YANG RELIGIUS, INOVATIF, MAJU DAN BERKELANJUTAN"

Visi tersebut mengandung makna:

Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan	:	Tasikmalaya yang perekonomiannya sebagian besar ditopang oleh sektor industri kecil dan menengah, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.
Religius	:	Masyarakat Kota Tasikmalaya terkondisikan secara psikologis dan sosiologis, dengan dasar nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang ditunjukkan dalam pembangunan secara fisik yang terintegrasi dengan pembangunan kesehatan mental dan ketangguhan karakter.
Inovatif		Masyarakat Kota Tasikmalaya yang memiliki kemampuan untuk menciptakan ide-ide baru dan orisinal, yang mencakup berbagai aspek meliputi produk, layanan, proses, atau metode kerja yang berbeda dari yang telah ada dari sebelumnya dan memberikan nilai tambah, berpikir di luar kebiasaan, menemukan solusi kreatif untuk memecahkan masalah dan terus mencari cara untuk meningkatkan sesuatu.
Maju	:	Kota Tasikmalaya yang berdaya, modern, tangguh, dan adil dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, maupun kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, serta mampu bersaing dalam aspek- aspek tersebut dalam wilayah yang lebih luas dan ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya.
Berkelanjutan	:	Kota Tasikmalaya memenuhi kebutuhan masyarakatnya tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya, serta memanfaatkan sumber daya dengan memperhatikan pelestarian lingkungan, keseimbangan ekonomi, sosial, dan budaya secara bijak.

Dari penjabaran makna visi di atas, secara umum visi tersebut mengandung makna bahwa seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya berkeinginan menjadikan Kota

Tasikmalaya sebagai Kota Industri, Jasa dan Perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian dengan kondisi masyarakatnya yang menjunjung tinggi nilai keagamaan, moral, dan budaya dalam kehidupan sehari-hari yang inovatif, berdaya saing, modern, tangguh, adil dan seimbang dalam aspek ekonomi, infrastruktur, teknologi, politik, sosial dan budaya untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan, tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.

Adapun misi dalam upaya pencapaian visi tersebut di atas adalah sebagai berikut:

Misi ke-1 : **Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya**

Misi ini dimaksudkan bahwa masyarakat Kota Tasikmalaya adalah masyarakat yang mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kehidupan sosial yang religius, menjaga dan memelihara kearifan lokal dan kebudayaan daerah yang luhur.

Misi ke-2: **Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan perekonomian daerah Kota Tasikmalaya yang berkeadilan, kuat, berdaya saing, memperhatikan nilai-nilai religius dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan serapan tenaga kerja dan peningkatan daya saing daerah di tingkat regional, nasional, dan global. Pembangunan ekonomi berbasis pada pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang ditunjang oleh lembaga koperasi, penerapan ekonomi syariah, peningkatan investasi daerah dan kerja sama serta kolaborasi dengan sektor swasta. Selain itu, dilakukan upaya mendorong kewirausahaan lokal untuk memantapkan posisi Kota Tasikmalaya sebagai pusat pertumbuhan di Kawasan Priangan Timur dengan berbasis pada industri, jasa dan perdagangan yang didukung sektor ketahanan pangan dan pertanian.

Misi ke-3 : **Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih**

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berkomitmen pada penegakan hukum, kesetaraan dan responsif yang ditunjang oleh peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur yang profesional, adaptif dan inovatif, pengelolaan keuangan dan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efektif dan efisien serta didukung oleh sarana prasarana pemerintahan yang representatif dan pemanfaatan teknologi informasi komunikasi yang terintegrasi.

Misi ke-4 : **Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Bekualitas dan Merata**

Misi ini dimaksudkan bahwa pembangunan infrastruktur daerah di Kota Tasikmalaya dilaksanakan melalui peningkatan infrastruktur dasar perkotaan antara lain penyediaan air bersih dan drainase, sanitasi dan pengelolaan limbah, dan perumahan. Selain itu pembangunan infrastruktur daerah juga dilaksanakan pada infrastruktur publik perkotaan yang meliputi penyediaan jalan, jembatan, energi dan kelistrikan, teknologi informasi dan komunikasi, ruang terbuka hijau, dan fasilitas umum lainnya. Infrastruktur tersebut tersebar secara merata, representatif, aman, nyaman, ramah lingkungan, ramah bagi kelompok rentan (anak, disabilitas, dan lansia), serta mampu menunjang pertumbuhan dan

pemerataan ekonomi terutama pada sentra-sentra industri kecil dan menengah, pusat perdagangan dan jasa, pariwisata, dan pertanian.

Misi ke-5 : **Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan**
Misi ini menjelaskan bahwa pembangunan Kota Tasikmalaya mengutamakan pengelolaan dan pelestarian sumber daya alam dan lingkungan secara bijak, dengan memperhatikan rencana tata ruang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhannya.

Dari ke lima misi tersebut, tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

Misi ke-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya.

Tujuan 1: Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya, dengan sasaran:

Sasaran 1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat;
Sasaran 2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata;
Sasaran 3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat;
Sasaran 4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya;
Sasaran 5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan

Tujuan 2: Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan, dengan sasaran:

Sasaran 6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing;
Sasaran 7. Meningkatnya ketahanan pangan daerah.
Sasaran 8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja.

Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih

Tujuan 3: Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif, dengan sasaran:

Sasaran 9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih.
Sasaran 10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik.

Misi ke-4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Bekualitas dan Merata

Tujuan 4: Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata, dan inklusif, dengan sasaran:

Sasaran 11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif.

Misi ke-5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Tujuan 5: Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, dengan sasaran:

Sasaran 12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup.
Sasaran 13. Menurunnya Risiko bencana daerah dan Perubahan iklim

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi				Target Capaian	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi ke-1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya										
1	**T1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya**		**IT.1. Indeks Pembangunan Manusia**	**Poin**	**74,31**	**74,84**	**75,47**	**76,03**	**76,48**	**76,99**
		S1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	IS.1. Indeks Pembangunan Manusia	Poin	74,31	74,84	75,47	76,03	76,48	76,99
			IS.2. Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	74,52	74,80	75,08	75,31	75,56	75,81
			IS.3. Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	28,90	22,40	27,10	19,60	18,31	17,02
			IS.4. Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	79,40	94,42	100,00	100,00	100,00	100,00
		S2. Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	IS.5. Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,52	9,53	9,54	9,63	9,67	9,79
			IS.6. Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,46	13,47	13,49	13,50	13,51	13,53
		S3. Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	IS.7. Tingkat Kemiskinan	%	13,13	12,72	11,53	11,10	9,20-10,16	9,47
		S4. Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	IS.8. Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%				96,53	97,73	97,84
			IS.9. Persentase Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	%				13,46	24,91	35,80
			IS.10. Persentase Intensitas Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	%				100	100	100
		S5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	IS.11. Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	-	52,66	59,78	60,51	61,21	61,91
			IS.12. Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,473	0,482	0,390	0,354	0,319	0,284
			IS.13. Persentase Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan	%				29,01	29,02	29,11

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi				Target Capaian	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
Misi ke-2: Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan										
2	**T2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan**		**IT.2. Indeks Daya Saing Daerah**	**Poin**	**-**	**3,20**	**3,67**	3,96	3,97	3,98
		S6. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing	IS.14. Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	3,57	5,01	5,96	5,22	5,43-6,17	5,45
			IS.15. Indeks Gini	Poin	0,414	0,405	0,439	0,359	0,348-0,405	0,350
			IS.16. Inflasi	%	1,17	6,65	2,84	1,94	2,30	2,29
			IS.17. Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	-	-	58,46	58,46	58,54	59,78
			IS.18. Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	13,83	13,82	13,39	13,41	13,00	12,95
			IS.19. Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	-	-	-	N/A	36,15	36,84
		S7. Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	IS.20. Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,35	7,92	5,14	5,31	4,61	4,44
		S8. Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja	IS.21. Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	-	-	-	30,65	32,79	32,85
			IS.22. Tingkat Pengangguran Terbuka	%	7,66	6,62	6,55	6,49	6,37 - 6,45	6,34
Misi ke-3: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih										
3	**T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif**		**IT.3. Indeks Reformasi Birokrasi**	**Poin**	-	-	-	**85,16**	**86,53**	**87,88**
		S9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	IS.23. Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	-	-	-	85,16	86,53	87,88

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Satuan	Realisasi				Target Capaian	
					2021	2022	2023	2024	2025	2026
		S10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	IS.24. Indeks Inovasi Daerah	Poin	36,43	38,70	46,70	49,46	46,70	55,00
Misi ke-4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Bekualitas dan Merata										
4	**T.4. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif**		**IT.4. Indeks Infrastruktur Daerah**	**Poin**	**-**	**-**	**-**	**59,05**	**60,40**	**61,19**
		S11. Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	IS.25. Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	-	-	-	59,05	60,40	61,19
Misi ke-5: Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan										
5	**T5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan**		**IT.5. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah**	**Poin**	**63,54**	**51,94**	**57,02**	**58,52**	**61,62**	**61,79**
		S12. Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	IS.26. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	63,54	51,94	57,02	58,52	61,62	61,79
		S13. Menurunnya Risiko bencana daerah dan Perubahan iklim	IS.27. Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO2 eq	-	-	-	1,05	2,17	2,36
			IS.28. Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	117,37	114,69	106,93	97,13	93,61	90,10

Sumber: Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2025
RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2025
Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026

Dalam pelaksanaannya, sasaran pembangunan tersebut juga diarahkan untuk mendukung pelaksanaan sasaran pembangunan nasional. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui sinergi dengan mengerahkan seluruh sumberdaya yang ada, baik dari pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, serta dengan mendorong partisipasi masyarakat, dunia usaha, media, dan akademisi.

4.2. Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

4.2.1. Telaahan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Nasional

Arah kebijakan pembangunan nasional merupakan pedoman untuk merumuskan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta rencana program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang dilakukan melalui pendekatan politik, teknokratik, partisipatif, *bottom up* dan *top down*. Keberhasilan pembangunan nasional adalah keberhasilan dari pencapaian semua sasaran dan prioritas serta program, kegiatan, sub kegiatan pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RKPD dan dilaksanakan secara nyata oleh semua pemangku kepentingan.

Untuk menciptakan fondasi yang kuat dalam mengawal pencapaian Indonesia Emas 2045, serta untuk mencapai target sasaran pembangunan tahun 2025, ditetapkan prioritas nasional sebagai berikut:

1. Prioritas Nasional 1, Memperkokoh ideologi pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia, dengan indikator sasaran pembangunan Indeks Demokrasi Indonesia.
2. Prioritas Nasional 2, Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru, dengan indikator sasaran pembangunan: Asia Power Index (Military Capability); Asia Power Index (Diplomatic Influence); Proporsi Penduduk yang Merasa Aman; Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (PoU) Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya; Indeks Ketahanan Energi; Kapasitas tampungan air; Akses rumah tangga perkotaan terhadap air siap minum perpipaan; Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman; Indeks Daya Saing Digital di Tingkat Global; Indeks Ekonomi Hijau; Porsi EBT dalam Bauran Energi Primer; Timbulan sampah terolah di fasilitas pengolahan sampah; Indeks Pengelolaan Keanekaragaman Hayati; Indeks Kualitas Lingkungan Hidup; Persentase Penurunan Emisi GRK.
3. Prioritas Nasional 3, Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi, dengan indikator sasaran pembangunan: Proporsi jumlah usaha kecil dan menengah; Rasio Kewirausahaan; Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDB; Rasio PDB Pariwisata; Devisa Pariwisata; Proporsi PDB Ekonomi Kreatif; Aset Perbankan/PDB; Aset Dana Pensiun/PDB; Aset Asuransi/PDB; Kapitalisasi Pasar Modal/PDB; Total Kredit/PDB; Inklusi Keuangan.
4. Prioritas Nasional 4, Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas, dengan indikator sasaran pembangunan: Hasil Pembelajaran terdiri dari Rata-rata nilai PISA Membaca, Matematika dan Sains, Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas dan Harapan lama sekolah; Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Tinggi;

Persentase pekerja lulusan pendidikan menengah dan tinggi yang bekerja di bidang keahlian menengah tinggi; Tingkat Penguasaan Iptek terdiri dari Pengeluaran Iptek dan Inovasi dan Peringkat Indeks Inovasi Global; Tingkat Pengangguran Terbuka; Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan; Usia Harapan Hidup; Kesehatan Ibu dan Anak terdiri dari Angka Kematian Ibu dan Prevalensi Stunting; Insidensi Tuberkulosis; Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional; Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK); Indeks Ketimpangan Gender (IKG).

5. Prioritas Nasional 5, Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri, dengan indikator sasaran pembangunan: Rasio PDB Industri Pengolahan; Pembentukan Modal Tetap Bruto; Ekspor Barang dan Jasa; Biaya Logistik.
6. Prioritas Nasional 6, Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan, dengan indikator sasaran pembangunan: Terbangunnya sistem perlindungan sosial yang adaptif bagi seluruh penduduk; Cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan; Persentase penyandang disabilitas yang bekerja di sektor formal; Proporsi kontribusi PDRB Wilayah Metropolitan terhadap nasional; Persentase desa mandiri; Rumah tangga dengan akses hunian layak, terjangkau, dan berkelanjutan.
7. Prioritas Nasional 7, Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan, dengan indikator sasaran pembangunan: *Return on Asset* (ROA) BUMN; Indeks Integritas Nasional; Indeks Materi Hukum; Indeks Pelayanan Publik; Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; Indeks Persepsi Korupsi; Indeks Pembangunan Hukum; Rasio Perpajakan terhadap PDB; Tingkat Inflasi.
8. Prioritas Nasional 8, Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur, dengan indikator sasaran pembangunan: Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK); Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB); Proporsi Kerugian Ekonomi Langsung Akibat Bencana Relatif terhadap PDB.

4.2.2. Telahaan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Provinsi Jawa Barat

Prioritas Pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 meliputi:

1. Prioritas 1, Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul;
2. Prioritas 2, Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif;
3. Prioritas 3, Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya;
4. Prioritas 4, Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance*.

Keempat prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada Rancangan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indikator sasaran pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dituangkan pada tabel berikut:

Tabel 4.2.
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target		
			2024	2025	2026	2027
Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	Meningkatnya derajat kesehatan individu	Usia Harapan Hidup (UHH)	75,16	75,29	75,56	75,84
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	15,52	19,00	17,86	16,79
	Terbentuknya Individu Beretika dan Berbudaya	Indeks Kerukunan Umat Beragama (IKUB)	76,47	74.79 - 74.85	75.13 - 75.22	75.48 - 75.60
		Indeks Pembangunan Kebudayaan	Belum Rilis	54,70 - 54,73	55.29 - 55.33	55.89 - 55.95
	Terbentuknya individu Berintegritas dan Taat Hukum	Tingkat Kriminalitas	Belum dihitung	Belum dihitung	Belum dihitung	Belum dihitung
		Proporsi Penduduk yang Merasa Aman Berjalan Sendirian di Area Tempat Tinggalnya	Belum Rilis	51,78	52,53	53,3
		Indeks Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum	N/A	N/A	50,01 (74,51)	50,26 (74,76)
		Indeks Ketahanan Nasional Daerah Jawa Barat	Belum Rilis	3,02	3,08	3,14
	Terbentuknya Individu Berpengetahuan dan Berwawasan	Rata-rata Lama Sekolah diatas 15 Tahun	8,87*	9,52 - 9,53	9,64 - 9,66	9,75 - 9,77
		Harapan Lama Sekolah	12,80	12,87 – 12,88	12,88 - 12,96	12,91 - 13
	Terbentuknya individu Kreatif dan Inovatif	Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)	51,17*	63,36	65,63	67,6
		Indeks Pembangunan Kualitas Keluarga (IPKK)	66,44*	69,71	70,61	71,29
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	0,482*	460	457	448
		Indeks Perlindungan Anak (IPA)	70,15*	71,95	73,12	73,87
Mengembangkan ekonomi kerakyatan dan Investasi berbasis kearifan lingkungan yang tidak eksploitatif	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Industri Pengolahan Untuk Pemenuhan Kebutuhan Dalam dan Luar Negeri	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	41,39	41,46	41,39	41,38
	Meningkatkan Produksi dan Produktivitas Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan untuk Swasembada Pangan	Kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	Belum dihitung	Belum dihitung	Belum dihitung	Belum dihitung
	Meningkatkan Sektor Perdagangan Melalui Optimalisasi	Kontribusi PDRB Sektor Perdagangan	14,5	14,4	14,3	14,3
	Distribusi Barang dan Jasa	Koefisien Variasi Harga Antarwilayah Tingkat Provinsi	3,15	7,88	7,7	7,53
		Tingkat Inflasi	2,25 (YoY per Juli 2024)	3,3 - 3,8	3,12 -3,77	2,95 -3,74
		Inklusi Keuangan	N/A	94,22	94,45	94,69
	Meningkatkan Produktivitas Sektor Pariwisata Melalui Pengembangan Destinasi Wisata dan Industri Kreatif	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif terhadap PDB Ekonomi Kreatif Nasional	Belum Rilis	22,81	22,58	22,36
		Rasio PDRB Penyediaan akomodasi makan dan minum	3,07	3,15	3,21-3,46	3,28-3,65

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Realisasi	Target		
			2024	2025	2026	2027
	Meningkatnya Penciptaan dan Perluasan Lapangan Kerja	Tingkat Pengangguran Terbuka	6,75	6,37 - 6,45	6,34	6,05 - 6,49
		Pembentukan Modal Tetap Bruto	Belum Rilis	24,72	23,84 - 24,73	24,00 - 24,77
		Proporsi Penciptaan Lapangan Kerja Formal	45			
	Meningkatnya Kualifikasi, Kompetensi, dan Keahlian Tenaga Kerja dan Calon Tenaga Kerja	Persentase Pekerja Lulusan Pendidikan Menengah dan Tinggi yang Bekerja di Bidang Keahlian Menengah Tinggi	84.31	68,19	68,52	68,84
	Meningkatnya Kesejahteraan Petani dan Nelayan	Nilai Tukar Petani	Belum Rilis	4,58	4,42	4,23
Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	Meningkatnya layanan Infrastruktur kewilayahan, infrastruktur dasar di perdesaan dan Sekitar Kawasan Konservasi, serta penataan perkotaan yang berbasis lingkungan	Indeks Kualitas Infrastruktur	Belum Rilis	59,51	62,28	63,78
		Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	56,25	56,95	58,11	59,26
		Indeks Desa	Belum Rilis	9,560,709	9,748,137	9,935,564
		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	66,02	64,06*	64,31	64,56
		Persentase Penurunan Emisi GRK				
		a. Kumulatif	Belum Rilis	2,66	3,31	4,02
		b. Tahunan	Belum Rilis	9,27	10,63	12,46
		Indeks Risiko Bencana	114,15	109,18	108	107
	Meningkatnya Keterampilan, Akses Permodalan dan Pemasaran Usaha Mikro dan Kecil	Rasio Kewirausahaan Daerah	Belum Rilis	3,5	3,79	3,97
	Meningkatnya ketahanan sosial masyarakat	Persentase Penduduk Miskin	7,08	5,85 - 6,46	5,51 - 6,02	4,78 - 5,44
		Indeks Kesejahteraan Sosial	44,57	45,07	46,57	48,27
Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif,	Meningkatnya penerapan Iptek, riset, dan inovasi dalam pembangunan	Indeks Inovasi Daerah	81,27	71,76	72,26	72,76
Berorientasi Pelayanan sesuai dengan Prinsip Good dan Clean Governance	Meningkatnya Partisipasi Publik dalam Pengambilan Keputusan Kebijakan	Indeks Demokrasi Indonesia	Belum Rilis	Tinggi (83,55)	83,79	89,02
	Meningkatnya pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif	Indeks Pelayanan Publik	Belum Rilis	4,6	4,62	4,64

Sumber: Rancangan Akhir RKPD Provinsi Jawa Barat Tahun 2025

Prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 diimplementasikan melalui langkah-langkah, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program prioritas yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan Jawa Barat.

4.2.3. Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031. RTRW ini harus menjadi acuan dan sejalan dengan rencana pembangunan daerah.

1. Tujuan Penataan Ruang Wilayah

Dengan mengacu kepada UU No.26/2007 tentang Penataan Ruang, khususnya Pasal 3, maka tujuan penataan ruang adalah untuk mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berdasarkan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional. Tujuan perwujudan tersebut diterjemahkan lebih lanjut dengan:

a. Terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
b. Terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia;
c. Terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Secara lebih operasional dalam PP No.26/2008 tentang RTRWN, khususnya Pasal 2 dikemukakan bahwa penataan ruang wilayah bertujuan untuk mewujudkan:

a. Ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan;
b. Keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
c. Keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota;
d. Keterpaduan pemanfaatan ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;
e. Keterpaduan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah dalam rangka perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang;
f. Pemanfaatan sumber daya alam secara berkelanjutan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat;
g. Keseimbangan dan keserasian perkembangan antar wilayah;
h. Keseimbangan dan keserasian kegiatan antar sektor; dan
i. Pertahanan dan keamanan negara yang dinamis serta integrasi nasional.

Selanjutnya dengan merujuk kepada Pedoman Penyusunan RTRW Kota, maka perumusan tujuan harus mempertimbangkan visi dan misi pembangunan kota bersangkutan. Dengan memperhatikan visi pembangunan jangka panjang Kota Tasikmalaya adalah “Dengan Iman dan Takwa Kota Tasikmalaya menjadi Pusat Perdagangan dan Industri Maju di Jawa Barat”, maka tujuan penataan ruang Kota Tasikmalaya adalah sebagai berikut : *Mewujudkan ruang wilayah Kota Tasikmalaya, sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) Priangan Timur - Pangandaran, yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan guna mendukung terwujudnya Kota Tasikmalaya sebagai pusat perdagangan, jasa, dan industri kreatif termaju di Jawa Barat.* Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (*Handycraft*).

Pusat industri dan perdagangan termaju disini adalah Industri Kreatif yang berbasis kerajinan (*Handycraft*). Berdasarkan cetak biru “Pengembangan Ekonomi Kreatif Indonesia 2025” Departemen Perdagangan RI, ada 14 (Empat Belas) elemen yang tergolong industri kreatif yaitu: periklanan, arsitektur pasar seni dan antik, kerajinan, desain fesyen, film, video dan fotografi, permainan interaktif, musik, seni pertunjukan, penerbitan, jasa komputer dan piranti lunak televisi dan radio serta riset dan pengembangan (R&D). Dari 14 (Empat Belas) jenis industri tersebut yang telah dimiliki dan berkembang di Kota Tasikmalaya adalah Industri Kerajinan (*Handycraft*). Jenis industri kreatif tersebut antara lain Batik, Bordir, berbagai rupa anyaman Mendong dan Bambu, Kelom dan Alas Kaki.

2. Kebijakan Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan penataan ruang Kota Tasikmalaya meliputi:

a. pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa;
b. peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat-pusat kegiatan;
c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum;
d. peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung;
e. pelestarian kawasan cagar budaya;
f. penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota;
g. pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup
h. pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien
i. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi
j. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup
k. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya; dan
l. pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

3. Strategi Penataan Ruang Wilayah

Kebijakan pengembangan struktur dan pola ruang wilayah Kota Tasikmalaya meliputi:

1. Kebijakan pemantapan fungsi pusat pelayanan yang memperkuat kegiatan perdagangan dan jasa dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. menetapkan hierarki sistem pusat pelayanan secara berjenjang; dan
   b. mengembangkan pusat perdagangan modern dan tradisional berskala regional.
2. Kebijakan peningkatan aksesibilitas dan keterkaitan antar pusat kegiatan dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. meningkatkan kapasitas jaringan jalan yang mendorong interaksi kegiatan antar pusat-pusat pelayanan;
   b. mengembangkan jalan lingkar dalam (inner ring road) dan jalan lingkar luar (outer ring road);
   c. meningkatkan pelayanan moda transportasi yang mendukung tumbuh dan berkembangnya pusat-pusat pelayanan;
   d. mengembangkan sistem transportasi massal;
   e. meningkatkan fungsi terminal angkutan umum; dan
   f. meningkatkan integrasi sistem antar moda transportasi.
3. Kebijakan peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sistem prasarana, sarana, dan utilitas umum dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. mendistribusikan sarana lingkungan di setiap pusat pelayanan sesuai fungsi kawasan dan hierarki pelayanan;
   b. mengembangkan sistem jaringan telekomunikasi dan informasi pada kawasan pertumbuhan ekonomi;
   c. mengembangkan prasarana sumber daya air;
   d. meningkatkan sistem pengelolaan persampahan dengan teknik- teknik yang berwawasan lingkungan;
   e. meningkatkan prasarana pengelolaan air limbah; dan
   f. mengembangkan sistem prasarana drainase secara terpadu.
4. Kebijakan peningkatan pengelolaan kawasan yang berfungsi lindung dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. menetapkan kawasan yang berfungsi lindung;

b. mengembalikan fungsi kawasan yang berfungsi lindung yang telah menurun; dan
c. meningkatkan konservasi kawasan yang berfungsi lindung.

5. Kebijakan pelestarian kawasan cagar dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. menetapkan kawasan yang memiliki nilai sejarah dan/atau bernilai arsitektur tinggi sebagai kawasan cagar budaya; dan
   b. memelihara kelestarian kawasan cagar budaya
6. Kebijakan penyediaan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas Wilayah Kota dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut::
   a. mempertahankan fungsi dan menata RTH yang telah ada;
   b. menetapkan persyaratan penyediaan RTH pada setiap fungsi kegiatan;
   c. mengembalikan RTH yang telah beralih fungsi; dan
   d. mengembangkan pola-pola kemitraan dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat/swasta dalam penyediaan dan pengelolaan RTH.
7. Kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. mengarahkan kawasan terbangun kepadatan rendah di kawasan pinggiran pusat kota; dan
   b. mengoptimalkan pengembangan kawasan pusat kota.
8. Kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
   a. mengembangkan kawasan budidaya terbangun secara vertikal di kawasan pusat kota; dan
   b. menerapkan insentif dan disinsentif.

4. Strategi Pengembangan Kawasan Strategis

Kawasan strategis dalam dokumen RTRW Kota Tasikmalaya 2011-2031 adalah kawasan-kawasan yang berpotensi untuk dikembangkan yang meliputi:

1) Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
2) Kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup;
3) Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya
4) Kawasan strategis dari sudut kepentingan aspek pertahanan keamanan negara

Kebijakan pengembangan kawasan strategis di Kota Tasikmalaya meliputi:

(1) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi, yang dilaksanakan melalui strategi:
   a) menetapkan kawasan pusat kota sebagai kawasan bisnis dengan kegiatan utama perdagangan jasa skala regional
   b) pengembangan kawasan industri dan pergudangan skala regional
   c) pengembangan sentra bisnis baru
   d) pengembangan dan penataan sentra-sentra produksi pertanian dan industri kecil dan menegah. Antara lain yaitu pengembangan kawasan minapolitan di Kecamatan Indihiang dan Kecamatan Bungursari, Kawasan pendidikan terpadu di Kecamatan Tamansari.

(2) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan lingkungan hidup yang dilaksanakan melalui strategi:
   a) mengatur pemanfaatan kawasan konservasi dengan memadukan perlindungan lingkungan hidup dan pengembangan kawasan, yaitu di Kawasan Situ Gede; dan

b) mengintegrasikan fungsi pelestarian lingkungan hidup dengan fungsi-fungsi lainnya tanpa mengganggu fungsi utama kawasan, yaitu di Kawasan Wisata Alam Urug.

(3) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
a) menetapkan kawasan strategis pendidikan; dan
b) mengintegrasikan kegiatan sosial budaya dengan fungsifungsi penunjangnya dan/atau fungsi-fungsi lain yang terkait.

(4) pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara, dilaksanakan melalui strategi sebagai berikut:
a) menata kawasan pertahanan dan keamanan negara; dan
b) mengoptimalkan fungsi kawasan dengan mengintegrasikan fungsi pertahanan dan keamanan negara dengan fungsi komersial tanpa mengganggu fungsi utama sebagai kawasan pertahanan dan keamanan negara, yaitu di kawasan Pangkalan Udara Wiriadinata.

5. Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya

Indikasi Program Utama RTRW Kota Tasikmalaya Tahun 2011-2031, pada Tahap III (2021-2025) adalah sebagai berikut:

A. Perwujudan Struktur Ruang
1. Perwujudan Pusat Pelayanan Kegiatan Kota
   1.1. Pengembangan Pusat Kegiatan Wilayah Priatim-Pangandaran (PKW)
      a. Pengembangan Pasar Induk Cikurubuk sebagai Pasar Induk Komoditi Regional.
      b. Pengembangan TPPAS Ciangir.
   1.2. Pengembangan Pusat Pelayanan Kota (PPK)
      a. Pengembangan Pusat pelayanan pemerintahan Kota Tasikmalaya.
      b. Pengembangan Pusat pelayanan kegiatan perdagangan dan jasa.
   1.3. Pengembangan Subpusat Pelayanan Kota (SPK), Penyediaan Sarana Pelayanan
   1.4. Pengembangan Pusat Lingkungan (PL), Penyediaan Sarana Pelayanan
2. Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota
   2.1. Perwujudan Sistem Jaringan Transportasi Di Wilayah Kota
      2.1.1. Pengembangan Sistem Jaringan Jalan Raya
         a. Pembangunan jaringan jalan arteri sekunder
         b. Peningkatan jaringan jalan kolektor
         c. Pembangunan jaringan jalan kolektor
         d. Pengembangan Flyover atau Interchange, dan atau Underpass
         e. Peningkatan Ruas Jalan Ibukota Kecamatan
         f. Rehabilitasi dan pemeliharaan prasarana dan fasilitas LLAJ
         g. Pengembangan Sistem Perparkiran Di Luar Ruang Milik Jalan (Off Street)
         h. Pembangunan Halte/ Shelter
         i. Pembangunan Jembatan Penyebrangan
      2.1.2. Pengembangan Angkutan Umum
         a. Pengembangan Angkutan Umum Trayek
         b. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal
   2.2. Pengembangan Sistem Angkutan Umum Massal

a. Pengembangan BTS Terpadu
b. Pengembangan Sistem Informasi
c. Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pemerintah Kota Tasikmalaya
d. Penyediaan Database Kota Tasikmalaya
e. Pembentukan dan Pembinaan Komunitas Informasi Masyarakat
f. Pengelolaan Website Pemerintah Kota Tasikmalaya
g. Pembinaan Pengelolaan Website OPD
h. Penyediaan Akses Internet di Ruang Publik

2.3. Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air

2.3.1. Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya
a. Rehabilitasi Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya
b. Peningkatan Jaringan Irigasi Kota Tasikmalaya

2.3.2. Program Penanggulangan Banjir
a. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cikalang-Cidongkol
b. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cicantel
c. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir Irigasi Bengkok - S. Closeh
d. Pengembangan Sistem Pengendali Banjir S. Cihideung- S. Ciromban
e. Penanggulangan Sungai Kota Tasikmalaya

2.4. Rencana Sistem Infrastruktur

2.4.1. Sistem Penyediaan Air Minum
a. Pengembangan pelayanan air minum
b. Perlindungan dan pemanfaatan mata air

2.4.2. Pengembangan Sistem Jaringan Prasarana Air Limbah
a. Pembuatan Tangki Septik Komunal/ SANIMAS
b. Rehabilitasi IPLT
c. Pembuatan IPAL
d. Pemasangan perpipaan SPAL
e. Pengembangan Kawasan Permukiman
f. Pengembangan IPAL industri di Kawasan Peruntukan Industri dan Pergudangan

2.4.3. Pengembangan Sistem Pengelolaan Persampahan
a. Pengadaan Pewadahan Sampah
b. Pengadaan Alat Transportasi dan Kendaraan operasional
c. Koordinasi Penilaian Kota/Adipura
d. Pemeliharaan TPS Mini, Bak Sampah, Transfer depo, Container, Roda Sampah
e. Pengadaan Pakaian Kerja

2.4.4. Sistem Jaringan Drainase
a. Pengembangan sistem jaringan drainase sekunder (drainase pengumpul) pada setiap sisi jalan utama dengan menggunakan lapis perkerasan (lining)
b. Pembuatan sistem saluran drainase tersier
c. Lanjutan Pembuatan Trotoar dan drainase
d. Pemeliharaan Trotoar dan drainase Kota Tasikmalaya

2.4.5. Pengembangan Sistem Evakuasi Bencana
a. Pengadaan Kendaraan Operasional Pemadam Kebakaran
b. Pengadaan Alat-alat Pemadam Kebakaran

B. Perwujudan Pola Ruang
1. Perwujudan Kawasan Lindung
   a. Pengembangan Kawasan Perlindungan Setempat
      i. Pengembangan Sempadan Sungai
         a. Rehabilisasi reboisasi dan konser√asi kawasan sempadan sungai
         b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan sungai
      ii. Pengembangan Sempadan Danau
         a. Rehabilitasi, reboisasi dan konser√asi kawasan sempadan danau
         b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan danau
      iii. Pengembangan Sempadan Mata Air
         a. Rehabilitasi, reboisasi dan konservasi kawasan sempadan mata air
         b. Pengawasan dan penertiban kawasan sempadan mata air
   b. Pengembangan Ruang Terbuka Hijau
      i. Pengembangan RTH jalur Hijau Jalan
         a. Rencana Jalan Lingkar Utara
   c. Pengembangan Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)
2. Perwujudan Kawasan Budi Daya
   a. Pengembangan kawasan permukiman
   b. Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa
      a). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Perumahan
      b). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Lingkungan/ Kelurahan
      c). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kecamatan
      d). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala SWK
      e). Pengembangan Kawasan Perdagangan dan jasa skala Kota / Regional
      f). Pengembangan Pasar Induk Agribisnis
   c. Pengembangan Perkantoran
      a). Bantuan Pengelolaan Teknis Bangunan Gedung
      b). Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Dinas Badan Lembaga Kantor (Dibaleka) Pemerintah Kota Tasikmalaya
   d. Pengembangan Industri, Penataan kawasan peruntukan industri dan pergudangan
   e. Pengembangan Kawasan Pariwisata, Pengembangan wisata belanja
   f. Pengembangan Ruang Terbuka Non Hijau (RTNH)
      a). Pengembangan RTNH pada Sub-Kawasan
      b). Pengembangan RTNH pada Wilayah Kota
      c). Pengembangan RTNH pada Fungsi Tertentu
      d). Pengembangan dan Penyediaan Lahan Parkir
   g. Pengembangan Ruang Peruntukan Sektor Informal, Pengawasan dan penertiban Ruang Peruntukan Sektor Informal
   h. Pengembangan Kawasan Pertanian
      a). Penetapan kawasan pertanian tanaman pangan berkelanjutan
      b). Pengembangan pertanian tanaman pangan
      c). Pengembangan kawasan pertanian hortikultura
      d). Pengembangan kawasan perkebunan
      e). Pengembangan Kawasan Perikanan
      f). Pengembangan Kawasan Peternakan.

C. Perwujudan Kawasan Strategis
1. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara yaitu dengan Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Pangkalan Udara Wiriadinata dan Industri Dahana

2. Perwujudan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan kepentingan ekonomi:
   a). Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Terminal Peti Kemas
   b). Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan Strategis Sentra Bisnis Baru

4.2.4. Telaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan RKPD harus memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD. Penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD yaitu penelaahan kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengan DPRD, seperti rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokok pikiran DPRD memuat pandangan dan pertimbangan DPRD. Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan pelaksanaan fungsi DPRD dalam mengejawantahkan kewajibannya sebagai represetasi masyarakat Kota Tasikmalaya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, demikian pula halnya ketentuan yang diatur pada Peraturan DPRD Kota Tasikmalaya Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kota Tasikmalaya, bahwa DPRD mempunyai kewajiban untuk menyerap dan menghimpun aspirasi masyarakat/konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat, dan memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen di daerah pemilihannya.

Kegiatan dalam rangka penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya dilakukan berdasarkan hasil kegiatan reses 45 Anggota DPRD, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Mitra kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kota Tasikmalaya dan hasil kunjungan kerja dalam daerah alat-alat kelengkapan DPRD Kota Tasikmalaya.

1. Kegiatan Reses

   Kegiatan reses dilaksanakan dilaksanakan dalam 3 kali masa reses yang disesuaikan dengan 3 kali masa sidang. Dimasa reses ini para anggota DPRD mendapatkan kesempatan melakukan kunjungan kerja ke Daerah Pemilihan (Dapil) masing-masing sambil menyerap informasi dan aspirasi rakyat yang diwakilinya sebagai bahan penyusunan laporan reses dan kemudian disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat Paripurna.

   Lokasi Wilayah Daerah Pemilihan (Dapil) anggota dewan terdiri dari 4 lokasi yaitu:
   a. Wilayah Dapil I meliputi: Kecamatan Cihideung; Kecamatan Tawang; dan Kecamatan Bungursari.
   b. Wilayah Dapil II meliputi: Kecamatan Cipedes; dan Kecamatan Indihiang.
   c. Wilayah Dapil III meliputi: Kecamatan Cibeureum; Kecamatan Tamansari; dan Kecamatan Purbaratu
   d. Wilayah Dapil IV meliputi: Kecamatan Mangkubumi; dan Kecamatan Kawalu.

   Tujuan pelaksanaan kegiatan reses adalah menyerap dan menindaklanjuti aspirasi konstituen dan pengaduan masyarakat guna memberikan pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan. Proses

pelaksanaannya dilakukan dengan mengundang peserta reses yaitu para penerima dampak langsung dari kelompok masyarakat kemudian anggota dewan memfasilitasi berbagai kebutuhan dan keinginan dalam bentuk masalah dan usulan kegiatan menjadi rekomendasi sebagai laporan reses setiap anggota dewan, disampaikan kepada pimpinan DPRD dalam rapat paripurna, sebagaimana dalam penyusunan pokok-pokok pikiran DPRD.

2. Rapat Dengar Pendapat

   Rapat Dengan Pendapat (RDP) dilakukan dengan mitra kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berdasarkan penyerapan aspirasi yang harus segera diselesaikan secara politis, pesertanya adalah kelompok masyarakat yang menyampaikan aspirasi, OPD yang terkait dan Komisi DPRD yang menjadi mitra kerjanya, serta pihak-pihak terkait yang dapat menyelesaikan masalah yang tersampaikan selama proses rapat dengar pendapat. Laporanya adalah hasil risalah rapat dengan kesimpulannya disajikan bahan rekomendasi dalam penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.

3. Kunjungan Kerja

   Kunjungan Kerja DPRD adalah kegiatan selain kegiatan reses anggota DPRD dalam pelaksanaan tugas Anggota Dewan di dapil dalam rangka menjaring, menampung aspirasi konstituen yang lebih ditekankan pada pelaksanaan fungsi pengawasan. Kunjungan kerja ini bisa dilakukan oleh Anggota Dewan secara perseorangan maupun secara berkelompok.

   Proses kunjungan kerja dilakukan dengan komunikasi dua arah dengan konstituen secara berkala, dengan melibatkan OPD mitra kerja Pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan politis kepada konstituen di Dapil sebagai bentuk perwujudan perwakilan rakyat dalam pemerintahan, membuat laporan sebagai bahan dalam penyusunan pokok-pokok pikiran dalam hubungan dengan pengawasan pembangunan.

Dokumen penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD diperoleh dari hasil sidang paripurna DPRD, hasil dengar pendapat, hasil audiensi, hasil reses atau penjaringan aspirasi masyarakat langsung yang dilakukan oleh anggota DPRD, yang diperoleh dari DPRD melalui sekretariat DPRD. DPRD telah menyampaikan dokumen pokok-pokok pikiran DPRD kepada Walikota yang telah ditetapkan dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Nomor: 100.3.2/Kep.09/DPRD/2025 tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kota Tasikmalaya terhadap Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026.

Gambar 4.4.
Skema sumber data Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025

Beberapa pokok pikiran DPRD diantaranya adalah:

1. Pada pembangunan bidang pendidikan, diperlukan arah kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan meliputi peningkatan sarana dan prasarana sekolah, mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan, peningkatan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah, meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan (*life skill*), mengembangkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta membangun kerjasama dan kemitraan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas pendidik;
2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan dokter, spesialis, psikolog, dan tenaga medis di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kota Tasikmalaya, peningkatan status dan fasilitas RSUD maupun puskesmas agar dapat memenuhi standar kualitas dan mengontrol, mengawasi dan memadukan program jaminan kesehatan nasional ini dengan jaminan kesehatan daerah dan jamkesos terutama kepada warga miskin yang belum sama sekali mendapatkan jaminan kesehatan dan menjamin total *coverage* kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya;
3. Pembangunan infrastruktur publik melalui tersedianya infrastruktur jalan yang baik merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi publik untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat. Disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi Kota Tasikmalaya untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud.
4. Dalam menyikapi kebutuhan pangan Kota Tasikmalaya yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertambahan penduduk dan industri perhotelan yang pesat dalam 2 tahun terakhir menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di Kota Tasikmalaya untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan Kota Tasikmalaya memiliki ketahanan pangan yang baik.
5. Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di Kota Tasikmalaya selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas. Menurut catatan kami, masih terdapat koperasi yang kurang sehat dan sebagian kecil lainnya malah mati. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di Kota Tasikmalaya ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya;
6. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun 2026. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka;
7. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan iklim usaha dan mampu meng-agregasi sejumlah kepentingan kalangan dunia usaha dalam kerangka pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan perannya yang strategis diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan usaha perdagangan dan industri. Hal ini penting karena dengan akselerasi dan terobosan yang

dilakukan dapat meningkatkan perkembangan perekonomian Kota Tasikmalaya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya;

8. Mendorong pembentukan raperda tentang pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah kepada stakeholders terkait dan masyarakat. Dengan adanya perda pelayanan publik ini juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sektor pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang memadai maka kepercayaan publik terhadap program-program pembangunan juga semakin membaik;
9. Tahun 2026 harus mampu dijadikan momentum untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di Kota Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya kapital sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Tasikmalaya lebih besar.
10. Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak kalah urgensinya dengan persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu, evaluasi terhadap keadaan IPAL yang ada di TPA Ciangir mutlak diperlukan apakah kapasitasnya memadai atau sudah over load serta bagaimana instalasi untuk pengelolaan limbah B3-nya dan seterusnya.

4.2.5. Isu Strategis, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Tasikmalaya

Perumusan isu strategis Kota Tasikmalaya tahun 2026 disusun berdasarkan beberapa aspek, antara lain hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan, kondisi tahun 2025, arah kebijakan RPJMD, arah kebijakan RKP dan arah kebijakan RKPD Provinsi Jawa Barat serta memperhatikan dinamika isu strategis global dan nasional, seperti ancaman resesi global. Secara umum permasalahan pembangunan daerah dapat dikelompokkan pada:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial.
   Pertambahan penduduk yang diproyeksikan akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang. Kondisi di atas merupakan tantangan besar bagi Kota Tasikmalaya untuk dapat mengoptimalkan potensi sumber daya manusia melalui perbaikan kualitas kehidupan, penyiapan sumber daya manusia, peningkatan pelayanan pendidikan dan kesehatan, serta pelayanan sosial bagi penduduk untuk menyediakan pelayanan yang inklusif. Untuk mendukung pembangunan inklusif dan berkelanjutan diperlukan karakter sosial budaya yang terbuka, ramah dan saling menghargai, religius serta memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sosial budaya yang inklusif memiliki peran penting untuk membentuk identitas suatu masyarakat dan individu, serta berperan dalam pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi, perumahan dan pemukiman serta infrastuktur informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan.
   Produktifitas ekonomi dan daya saing daerah merupakan perekonomian daerah yang produktif berbasis industry, jasa dan perdagangan yang dapat bertahan dari hambatan dan tantangan ekonomi global dan nasional serta mampu bersaing dengan daerah lainnya. Selain itu perekonomian harus memperhatikan keberkelanjutan mencakup pergeseran sektor-sektor perekonomian menjadi lebih bersih dan pengarusutamaan green economy. Perekonomian yang bersih atau "clean economy" mengacu pada sistem ekonomi yang mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan, mempromosikan penggunaan sumber daya yang terbarukan, serta mengurangi emisi gas rumah kaca dan polusi. Sedangkan pembangunan ekonomi yang inklusif adalah pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan serta mengurangi kesenjangan antarkelompok dan wilayah.

3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
   Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, atau yang sering disebut dengan good governance dan clean governance, merupakan konsep yang berkaitan dengan bagaimana pemerintahan seharusnya dijalankan dengan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi karena tata kelola yang buruk dapat menyebabkan ketidakadilan, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan ketimpangan sosial. Secara keseluruhan, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih memerlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, baik pemerintah, lembaga pengawasan, maupun masyarakat. Hal ini juga membutuhkan waktu dan usaha yang konsisten untuk menciptakan sistem pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
   Pembangunan infrastruktur yang berkualitas di Kota Tasikmalaya seperti infrastruktur jalan, sumberdaya air dan irigasi, energi, perumahan dan pemukiman serta infrastuktur informasi dan komunikasi dalam rangka meningkatkan pemerataan pembangunan sosial dan ekonomi. Untuk pemerataan pembangunan, dibutuhkan akselerasi pembangunan infrastruktur layanan dasar terutama di wilayah sub urban. Sementara di wilayah perkotaan, pertumbuhan yang pesat dalam jangka panjang perlu diimbangi dengan layanan infrastruktur fasilitas perkotaan yang lebih berkualitas dan berkelanjutan.

5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan
   Pertumbuhan penduduk dan perkembangan pembangunan wilayah dalam jangka panjang pada akhirnya akan mendorong pertumbuhan wilayah perkotaan dengan sarana dan prasarananya, peningkatan pemenuhan kebutuhan tempat tinggal, serta energi dan pangan. Pemanfaatan sumber daya alam dan meningkatnya kebutuhan lahan akan berpotensi meningkatkan tekanan terhadap sumber daya alam dan lahan. Pengelolaan lingkungan hidip serta upaya pengendaliannya diantaranya pemanfaatan ruang menjadi tantangan dalam memastikan daya dukung dan daya tampung lingkungan dapat menopang pembangunan secara berkelanjutan.

Berdasarkan permasalahan yang perlu penanganan prioritas dan memperhatikan isu strategis baik ditingkat provinsi, nasional maupun internasional, analisis gambaran umum dan capaian kinerja pembangunan, maka

isu strategis pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial
2. Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan
3. Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
4. Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata
5. Lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Berdasarkan isu strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2026, maka perlu ditetapkannya strategi dan kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2026 guna mencapai tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Strategi dan arah kebijakan pembangunan Tahun 2026, mengacu pada strategi dan arah kebijakan pada rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025 - 2029. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih untuk pencapaian target sasaran pembangunan tahun 2026 adalah sebagai berikut.

Tabel 4.3.
Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 1: Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya			
T.1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya	S.1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Penguatan Sistem Kesehatan Masyarakat	1. Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat
			2. Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting
			3. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan
			4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan
			5. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama
			6. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan
	S.2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Transformasi Sistem Pendidikan	1. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya
			2. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren
			3. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai
			4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan
			5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter
			6. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat	1. Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan
			2. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi
			3. Peningkatan Konvergensi/Intergrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulanan kemiskinan
	S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Peningkatan kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	1. Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila
			2. Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya
			3. Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan
			4. Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa
	S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Peningkatan ketahanan Keluarga, Pengarusutamaan gender, Perlindungan Anak dan peningkatan partisipasi aktif pemuda.	1. Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan
			2. Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
			3. Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga
			4. Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 2 : Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan			
T.2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan	S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Peningkatan produktivitas, kualitas dan daya saing produk barang dan jasa serta perluasan sumber pertumbuhan ekonomi baru	1. Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan berbasis kewilayahan
			2. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis
			3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna
			4. Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi
			5. Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan dan perlindungan konsumen
			6. Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri
			7. Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik
			8. Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok
			9. Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui e-commerce dan digital marketing
			10. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional
			11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri unggulan daerah
			12. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan
			13. Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan
			14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata olahraga (sport tourism) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif
			15. Peningkatan implementasi perekonomi dan keuangan syariah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			16. Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan
			17. Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian
			18. Pengendalian inflasi daerah
			19. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global
			20. Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD
	S.7. Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Peningkatan ketahanan pangan daerah	1. Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan
			2. Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya
			3. Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan
			4. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan
			5. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi Pangan regional
			6. Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan.
	S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Peningkatan penanaman modal serta perluasan kesempatan kerja	1. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM
			2. Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan Kerjasama investasi
			3. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling (vocational)

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan
Misi 3: Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih			
T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif	S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Percepatan implementasi Reformasi Birokrasi	1. Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko
			2. Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel
			3. Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja
			4. Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah
			5. Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
			6. Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional
			7. Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan *blended finance*
			8. Peningkatan bangunan Gedung pemerintahan
			9. Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional
	S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Peningkatan pemanfaaan Teknologi Informasi dan Inovasi dalam pelayanan publik	1. Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan *smart city*
			2. Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan
			3. Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Misi 4: Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata			
T.4. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Pemerataan dan peningkatan penyediaan sarana dan prasarana infrastruktur	1. Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya
			2. Peningkatan infrastruktur sumber daya air, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota
			3. Penyediaan drainase perkotaan yang terintegrasi
			4. Peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik
			5. Peningkatan elektrifikasi dan telekomunikasi
		Penyediaan perumahan dan kawasan permukiman yang berkualitas dan terjangkau	1. Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air
			2. Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, perluasan IPLT, penyediaan sarana dan prasarana IPLT, penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja, perencanaan pengelolaan air limbah terjadwal
			3. Peningkatan prasarana limbah domestik, industri dan medis serta penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga
			4. Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat
			5. Penanganan kawasan kumuh
Misi 5: Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan			
T.5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan	S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan pengelolaan dan pelestarian lingkungan hidup secara berkelanjutan	1. Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup
			2. Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir
			3. Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: pembangunan prasarana persampahan, penyediaan sarana persampahan dan kerja sama pengelolaan persampahan
			4. Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			5. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan
			6. Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup
	S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Peningkatan mitigasi bencana dan resilience terhadap iklim	1. Implementas Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim
			2. Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan
			3. Peningkatan ketahanan air di Kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.
			4. Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan diantaranya infrastruktur yang tahan iklim, resilience terhadap bencana, dan ramah lingkungan
			5. Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim
			6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana

Sumber: Hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025

Berdasarkan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 serta mempertimbangkan kondisi dinamis yang terjadi, maka fokus pembangunan Kota Tasikmalaya atau Tema Pembangunan Tahun 2026 adalah:

"Percepatan Pertumbuhan Ekonomi dan Peningkatan Pelayanan Dasar Untuk Kemajuan Dan Kesejahteraan Masyarakat"

Untuk mencapai tema pembangunan tersebut, arah kebijakan pembangunan Kota Tasikmalaya diharapkan dapat mendukung pencapaian beberapa indikator pembangunan sebagai berikut:

A. Tingkat Pengangguran Terbuka

Berdasarkan hasil capaian Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya, ditargetkan angka TPT Kota Tasikmalaya Tahun 2026 sebesar 6,34 persen. Realisasi pencapaian pada tahun 2024 tercatat sebesar 6,49 persen. Angka ini merepresentasikan perbaikan yang berkelanjutan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, di mana TPT tercatat 7,66 persen pada tahun 2021, 6,62 persen pada tahun 2022 dan 6,55 persen pada tahun 2023.

Tren penurunan TPT yang konsisten ini, beriringan dengan LPE yang positif, mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dialami Kota Tasikmalaya semakin inklusif. Ini berarti ekspansi ekonomi berhasil menciptakan lapangan kerja dan menyerap tenaga kerja secara efektif, sehingga berdampak pada penurunan angka pengangguran dan peningkatan kesejahteraan sosial. Penurunan TPT menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang terjadi tidak hanya bersifat kapital-intensif, tetapi juga mampu menghasilkan peluang kerja yang memadai bagi angkatan kerja.

Arah kebijakan pembangunan yang berkaitan dengan indikator Tingkat Pengangguran Terbuka pada tahun 2026, antara lain:

1. Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan *link and match* industri besar dengan IKM/UMKM;
2. Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan Kerjasama investasi;
3. Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling (vocational); dan
4. Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan.

B. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya pada tahun 2026 ditargetkan dapat mencapai angka 5,45 persen. Pada tahun 2024, Kota Tasikmalaya mencatat LPE sebesar 5,22 persen. Angka ini menunjukkan pertumbuhan yang solid dan positif dalam aktivitas ekonomi kota. Apabila dibandingkan dengan LPE Provinsi Jawa Barat yang tumbuh sebesar 4,95 persen (Y-on-Y) pada Triwulan II-2024, kinerja ekonomi Kota Tasikmalaya berada di atas rata-rata provinsi. Kondisi ini menunjukkan bahwa perekonomian Kota Tasikmalaya tidak hanya tumbuh secara positif, tetapi juga melampaui kinerja ekonomi provinsi secara keseluruhan. Hal ini dapat diinterpretasikan sebagai indikasi adanya kekuatan internal yang spesifik, efektivitas kebijakan lokal, atau komposisi sektoral yang lebih tangguh dan dinamis di Kota Tasikmalaya dibandingkan dengan rata-rata provinsi.

Keunggulan ini menempatkan Kota Tasikmalaya sebagai salah satu mesin pertumbuhan potensial di Jawa Barat.

Pada tahun 2024, sektor ekonomi yang mengalami laju pertumbuhan di atas LPE Kota Tasikmalaya terjadi di sektor transportasi dan pergudangan 15,04%, disusul sektor pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah, dan daur ulang 8,93%, informasi dan komunikasi 8,66%, penyediaan akomodasi dan makan minum 7,67%, pertanian, kehutanan dan perikanan 7,06%, jasa keuangan dan asuransi 6,61%, pengadaan listrik dan gas 6,06% dan industri pengolahan 5,46%.

Arah kebijakan pembangunan terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) pada tahun 2026, antara lain:

1. Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan berbasis kewilayahan;
2. Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis;
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna;
4. Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi;
5. Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan dan perlindungan konsumen;
6. Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri;
7. Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik;
8. Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok;
9. Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui *e-commerce* dan *digital marketing*;
10. Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional;
11. Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri unggulan daerah;
12. Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan;
13. Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan;
14. Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata olahraga (*sport tourism*) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif;
15. Peningkatan implementasi perekonomian dan keuangan syariah;
16. Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan;
17. Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian;
18. Pengendalian inflasi daerah;
19. Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global;
20. Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD.

C. Kemiskinan

Persentase penduduk miskin di Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 9,47 persen pada tahun 2026. Penetapan target tersebut diproyeksikan berdasarkan capaian pada tahun 2024 sebesar 11,10 persen. Angka ini menunjukkan penurunan dari 11,53 persen pada tahun 2023, melanjutkan tren positif dalam upaya pengentasan kemiskinan di kota ini. Penurunan tingkat kemiskinan yang terjadi bersamaan dengan pertumbuhan ekonomi yang kuat dan penurunan pengangguran, mengisyaratkan bahwa pembangunan ekonomi di Kota Tasikmalaya memiliki dampak nyata dalam meningkatkan taraf hidup penduduknya.

Arah kebijakan pembangunan untuk menurunkan angka Kemiskinan pada tahun 2026, antara lain:

1. Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan;
2. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi;
3. Peningkatan Konvergensi/Intergrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulanan kemiskinan

D. Indeks Gini

Indeks Gini Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 0,350 poin pada tahun 2026. Perkembangan indeks gini Kota Tasikmalaya selama tiga tahun terakhir berkembang secara fluktuatif, dengan posisi terakhir pada tahun 2024 mencapai 0,359. Arah kebijakan pembangunan untuk menurunkan Indeks Gini Kota Tasikmalaya tahun 2026, antara lain:

1. Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat miskin dan rentan miskin;
2. Perluasan akses layanan Pendidikan dan kesehatan;
3. Pemerataan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik terutama di wilayah kantong-kantong kemiskinan;
4. Penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

E. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 76,99 poin pada tahun 2026. Sejak tahun 2020, Pembangunan manusia di Kota Tasikmalaya terus menunjukkan kemajuan signifikan, dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mencapai 76,03 pada tahun 2024. Peningkatan IPM tahun 2024 terjadi pada semua dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Umur harapan hidup (UHH) warga Kota Tasikmalaya meningkat menjadi 75,31 tahun pada tahun 2024, dan rata-rata pengeluaran riil per kapita juga meningkat menjadi Rp.11,431 Juta pada tahun 2024. Untuk memanfaatkan potensi ini secara maksimal, investasi berkelanjutan dalam pendidikan berkualitas (termasuk pelatihan kejuruan), layanan kesehatan yang mudah diakses, dan program perlindungan sosial akan sangat penting sebagai pendorong utama kemakmuran ekonomi jangka panjang dan ketahanan kota.

Arah kebijakan pembangunan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya pada tahun 2026, antara lain:

1. Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah)

melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya
2. Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren;
3. Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai;
4. Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan;
5. Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter;
6. Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital
7. Perluasan uptiaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat;
8. Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan;
9. Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan;
10. Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama;
11. Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan.

F. Prevalensi Stunting

Angka Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya ditargetkan mencapai 17,02 persen pada tahun 2026. Berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia tahun 2024, Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya mencapai 19,60 persen.

Arah kebijakan pembangunan yang mendukung penurunan angka prevalensi stunting pada tahun 2026 adalah penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting melalui intervensi spesifik dan sensitif, serta kolaborasi lintas sektor.

4.2.6. Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2026

Penetapan prioritas dan sasaran pembangunan daerah bertujuan untuk mengutamakan dan memfokuskan rencana pembangunan dalam rangka percepatan mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah serta indikator kinerja pembangunan. Rumusan dan sasaran prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya mengacu dan memperhatikan visi dan misi Wali Kota Tasikmalaya tahun 2025-2029. Prioritas pembangunan daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 disusun dengan mempertimbangkan permasalahan dan isu strategis pembangunan, arah kebijakan RPJMD serta memuat pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2026.

Prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2026, meliputi:
1. Prioritas 1, yaitu Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya;
2. Prioritas 2, yaitu Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan;
3. Prioritas 3, yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih;
4. Prioritas 4, yaitu Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata;
5. Prioritas 5, yaitu Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan.

Kelima prioritas pembangunan daerah tahun 2026 dijabarkan ke dalam sasaran prioritas pembangunan daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan sasaran pembangunan daerah pada rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029. Prioritas, sasaran dan indikator sasaran

pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2026 dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 4.4.
Prioritas, Sasaran Pembangunan dan Indikator Sasaran Pembangunan Daerah Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian	
				2024	2025	2026
Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,03	76,48	76,99
		Usia Harapan Hidup (UHH)	Tahun	75,31	75,56	75,81
		Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita (SSGI)	%	19,60	18,50	17,02
		Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	100,00	100,00	100,00
	Meningkatnya Pendidikan yang Berkualitas dan Merata	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,67	9,79
		Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,51	13,53
	Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat	Tingkat Kemiskinan	%	11,10	9,20-10,16	8,67-9,47
	Meningkatnya Kehidupan Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	96,53	97,73	97,84
		Persentase Pelestarian Kebudayaan Kota Tasikmalaya	%	13,46	24,91	35,80
		Persentase Intensitas Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	%	100	100	100
	Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Indeks Pembangunan Keluarga (iBangga)	Poin	60,51	61,21	61,91
		Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	0,354	0,319	0,284
		Persentase Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan	%	29,01	29,02	29,11
Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berkeadilan Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif, Berkelanjutan dan Berdaya Saing	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,43-6,17	5,37-6,15
		Indeks Gini	Poin	0,359	0,350-0,404	0,349-0,403
		Inflasi	%	1,94	2,30	2,29
		Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	58,46	58,54	59,78
		Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	13,41	13,00	12,95
		Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	N/A	36,15	36,84

Prioritas Pembangunan Daerah	Sasaran Pembangunan Daerah	Indikator Sasaran Pembangunan Daerah	Satuan	Realisasi	Target Capaian	
				2024	2025	2026
	Meningkatnya Ketahanan Pangan Daerah	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	5,31	4,61	4,44
	Meningkatnya investasi Daerah dan lapangan Kerja	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB)	%	30,65	32,79	32,85
		Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	6,37 - 6,45	6,34
Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	85,16	86,53	87,88
	Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Indeks Inovasi Daerah	Poin	49,46	46,70	52,00
Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Bekualitas dan Merata	Meningkatnya Infrastruktur Daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	N/A	N/A	73,60
Mewujudkan Pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	58,52	61,62	61,79
	Menurunnya Risiko bencana daerah dan Perubahan iklim	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) Kumulatif	Ton CO2 eq	1,05	2,17	2,36
		Indeks Risiko Bencana (IRB)	Poin	97,13	93,61	90,10

Sumber: Analisa Bappelitbangda, 2025

Perumusan prioritas pembangunan disajikan dengan tetap menjaga keterkaitan antara prioritas pembangunan daerah dengan arah kebijakan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, permasalahan dan isu strategis pembangunan tahun 2026, serta mempertimbangkan pokok-pokok pikiran DPRD untuk tahun 2026. Keterkaitan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan Daerah dengan Permasalahan Pembangunan Daerah, Isu Strategis dan Arah Kebijakan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
1	Pertumbuhan jumlah penduduk yang perlu diantisipasi untuk persiapan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM), dan kebutuhan akan sarana prasarana umum untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat;	Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan Kesejahteraan Sosial	Perluasan upaya promotif-preventif dan pembudayaan perilaku hidup sehat	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
2	Pertambahan penduduk yang akan berimplikasi terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta meningkatnya tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang;		Penyiapan dan peningkatan penuntasan stunting dan pencegahan stunting	
3	Urbanisasi penduduk ke kawasan pusat perkotaan dapat meningkatkan kebutuhan akan sarana prasarana serta dapat menyebabkan terjadinya permasalahan sosial;		Peningkatan kualitas dan penyediaan sarana- prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan	
4	Masih tingginya angka beban ketergantungan (dependency ratio).		Pemerataan dan peningkatan kompetensi tenaga Kesehatan	
5	Masih tingginya AKI/ AKB;		Pencegahan dan pengendalian penyakit melalui pemberdayaan masyarakat dan imunisasi dasar lengkap dengan pendekatan budaya dan agama	
6	Masih tingginya prevalensi stunting;		Pemberdayaan masyarakat lokal untuk mendukung pelayanan kesehatan	
7	Kualitas dan penyediaan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan primer dan rujukan belum optimal;		Peningkatkan partisipasi pendidikan wajib belajar 13 tahun (1 tahun pra sekolah dan 12 tahun pendidikan dasar dan pendidikan menengah) melalui pendidikan formal maupun non formal dan penguatan karakter berbasis nilai religi dan budaya	
8	Belum optimalnya pemerataan tenaga kesehatan dan fasilitas kesehatan;		Penguatan sekolah terbuka dan fasilitasi pendidikan keagamaan dan pesantren	
9	Masih tingginya angka penyakit menular dan tidak menular;		Peningkatan akses pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar yang memenuhi standar serta didukung oleh sarana prasarana yang memadai	
10	Belum optimalnya pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial;		Pemerataan dan peningkatan kompetensi guru dan tenaga kependidikan	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
11	Belum optimalnya perlindungan dan jaminan sosial;		Penguatan kurikulum pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar berbasis pengembangan talenta dan karakter	
12	Masih rendahnya pemberdayaan fakir miskin dan PMKS;		Meningkatkan minat dan budaya baca masyarakat, serta literasi digital	
13	Belum optimalnya pemeberdayaan gender;		Peningkatan penyediaan perlindungan dan jaminan sosial bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi pada bidang kesehatan, pendidikan, sosial, ketenagakerjaan, perumahan dan sanitasi terutama bagi kelompok marjinal dan rentan	
14	Masih rendahnya ketahanan keluarga;		Pemberdayaan dan peningkatan ekonomi bagi masyarakat berbasis sistem basis data terpadu yang terintegrasi	
15	Belum optimalnya perlindungan perempuan dan anak.		Peningkatan Konvergensi/Intergrasi Program dan sinergi stakeholder dalam penanggulanan kemiskinan	
16	Belum optimalnya upaya pemajuan kesenian dan kebudayaan;		Penguatan nilai luhur kebudayaan lokal dalam sendi kehidupan masyarakat berbasis religi dan jati diri bangsa, serta berasaskan kepada Pancasila	
17	Masih kurangnya sarana dan prasarana kesenian dan olahraga;		Perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan dalam kelestarian serta pemajuan budaya	
18	Masih kurangnya skala dan promosi event seni budaya dan olahraga;		Peningkatan kerukunan antar etnis, agama, dan golongan	
19	Belum optimalnya pembangunan kepemudaan;		Peningkatan komitmen seluruh lapisan masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa	
20	Belum optimalnya capaian rata-rata lama sekolah dan Harapan Lama Sekolah;		Pemenuhan hak dan perlindungan anak, perempuan, penyandang disabilitas, dan lansia melalui pengasuhan dan perawatan, pembentukan resiliensi, dan perlindungan dari kekerasan, termasuk perkawinan anak dan perdagangan orang dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam pembangunan	
21	Masih rendahnya kualitas tenaga kerja baik dari segi pendidikan maupun keahlian;		Pemberdayaan perempuan, pemuda, penyandang disabilitas, dan lansia melalui penguatan kapasitas, kemandirian, kemampuan dalam pengambilan keputusan, serta peningkatan partisipasi di berbagai bidang pembangunan dalam rangka pemenuhan pengarusutamaan gender dan inklusi sosial dalam Pembangunan; Penguatan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	
22	Masih rendahnya angka partisipasi angkatan kerja;		Peningkatan pembinaan dan fasilitasi terhadap pemuda dan olahraga	
23	Belum optimalnya link and match antara dunia pendidikan dengan dunia kerja;		Pemenuhan akses informasi, edukasi, sosialisasi, dan pelayanan ketahanan keluarga	
24	Masih rendahnya budaya literasi.			

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
1	Masih terdapat ketidakstabilan harga barang pokok dan penting	Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Daerah yang Inklusif dan berkeadilan	Pemberdayaan ekonomi mikro dan kecil yang inklusif dan berbasis kerakyatan berbasis kewilayahan	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
2	Masih rendahnya daya beli masyarakat		Penguatan proses bisnis UMKM melalui perluasan peran ekosistem digital disertai perluasan akses pelaku usaha terhadap ruang inovasi, kreasi, dan inkubator bisnis	
3	Masih rendahnya indeks ketahanan pangan;		Peningkatan kuantitas dan kualitas koperasi, penguatan proses bisnis dan kelembagaan serta adopsi teknologi tepat guna	
4	Pertumbuhan ekonomi yang belum berkualitas dan rentan terhadap guncangan eksternal;		Penataan dan penyiapan kelembagaan pembiayaan bagi pelaku usaha serta penguatan kolaborasi dengan market, bank, dan asuransi	
5	Terbatasnya lapangan pekerjaan		Penguatan tata kelola perdagangan serta dukungan terhadap produk unggulan dan perlindungan konsumen	
6	Belum optimalnya informasi ketenagakerjaan;		Mendorong ekspor daerah melalui pengembangan komoditas unggulan yang potensial untuk ekspor dan membuka pasar luar negeri	
7	Masih terdapat kesenjangan ketersediaan peluang kerja dengan latar belakang pendidikan pencari kerja		Penguatan infrastruktur distribusi perdagangan dan logistik	
8	Masih rendahnya jumlah koperasi sehat;		Pengendalian perdagangan domestik dalam rangka menjaga stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok	
9	Belum optimalnya pembinaan dan pengawasan koperasi;		Pemanfaatan teknologi digital dalam perdagangan melalui e-commerce dan digital marketing	
10	Masih rendahnya pemberdayaan usaha mikro;		Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi regional	
11	Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;		Peningkatan kualitas dan optimalisasi sumber daya lokal untuk industri unggulan daerah	
12	Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro;		Percepatan penyediaan infrastruktur transportasi dan logistik untuk mendukung tumbuhnya sektor industri pengolahan	
13	Masih rendahnya daya saing Usaha Mikro baik dari kapasitas SDM, maupun standarisasi dan mutu produk;		Penyiapan infrastruktur industri dan pengembangan industri pengolahan berbasis keunggulan daerah termasuk industri kriya dan ekonomi kreatif, serta industri pengolahan hasil pertanian dan perikanan yang halal dan ramah lingkungan	
14	Rendahnya akses pasar bagi produk usaha mikro;		Penataan dan penguatan daya tarik wisata, baik wisata alam, wisata religi, wisata olahraga (sport tourism) maupun wisata kultural secara kolaboratif dan partisipatif	
15	Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam aktivitas ekonomi mikro;		Peningkatan implementasi perekonomi dan keuangan syariah	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
16	Rendahnya rasio wirausahaan (enterpreneurship);		Pengembangan kawasan strategis ekonomi perkotaan	
17	Belum optimalnya penataan dan pengelolaan pasar rakyat;		Peningkatan tata kelola sektor jasa dalam mendukung aktivitas perekonomian	
18	Belum optimalnya pengendalian harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;		Pengendalian inflasi daerah	
19	Belum optimalnya penataan, pembinaan dan pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;		Pengembangan ekosistem riset dan inovasi IPTEK dalam rangka mendukung percepatan tumbuh kembang Dunia Usaha dan Dunia Industri (DUDI) daerah yang berdaya saing di tataran global	
20	Belum optimalnya penataan pergudangan;		Pembentukan, penataan dan restrukturisasi BUMD	
21	Belum optimalnya digitalisasi pasar rakyat;		Penyediaan benih, pupuk, instrumen pengendali hama, obat dan pakan yang ramah lingkungan dan ekonomis dalam aktivitas budidaya pertanian dan perikanan	
22	Masih minimnya Industri Kecil Menengah yang terdaftar di Sistem Informasi Industri Nasional;		Pengembangan kapasitas dan akses informasi bagi petani dan pembudidaya guna meningkatkan produktivitasnya	
23	Masih rendahnya kualitas dan produktivitas IKM;		Penyediaan infrastruktur esensial yang terintegrasi bagi upaya peningkatan produktivitas pertanian dan perikanan, kualitas serta daya saing produk pertanian dan perikanan	
24	Rendahnya akses pemasaran, promosi dan daya saing IKM;		Peningkatan produktivitas dan daya saing produk pertanian dan perikanan yang terintegrasi dengan upaya penguatan ketahanan dan kemandirian pangan	
25	Belum optimalnya digitalisasi dan teknologi dalam pengembangan IKM;		Kerjasama daerah dengan daerah lain guna membangun sinergi antar daerah untuk memperkuat rantai pasok dan distribusi Pangan regional	
26	Masih rendahnya produktivitas pertanian dan perikanan;		Pengelolaan susut dan sisa pangan dalam rangka ketahanan pangan.	
27	Krisis regenerasi pengrajin, petani dan pembudidaya muda;		Peningkatan iklim investasi dan kemudahan berusaha yang mempertimbangkan link and match industri besar dengan IKM/UMKM	
28	Masih Rendahnya nilai tambah usaha pertanian dan perikanan;		Penyediaan database dan roadmap investasi, fasilitasi promosi investasi dan Kerjasama investasi	
29	Terdapat ancaman perubahan iklim serta aktivitas di sektor pertanian dan perikanan banyak menyumbang terhadap emisi gas rumah kaca (contoh: penggunaan pupuk dan pestisida anorganik);		Penyiapan, pemetaan dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia pada usia produktif dan angkatan kerja terutama bagi masyarakat umum baik melalui upskilling maupun reskilling (vocational)	
30	Belum optimalnya pengendalian harga produk pertanian dan perikanan;		Peningkatan mutu dan kompetensi tenaga kerja, kewirausahaan, teknologi, serta akses terhadap layanan keuangan dan permodalan	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
1	Belum optimalnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bersih dan berintegritas;	Tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Peningkatan pengendalian pembangunan melalui penerapan manajemen risiko	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
2	Belum optimalnya pelayanan publik yang adaptif dan responsif;		Peningkatan tata kelola keuangan dan barang milik daerah yang transparan dan akuntabel	
3	Belum optimalnya penggunaan TIK dalam layanan pemerintah;		Penataan kelembagaan dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) aparatur daerah yang adaptif, sesuai dengan kebutuhan daerah, dan berintegritas dalam upaya pencegahan korupsi; Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, reward and punishment, termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja	
4	Belum optimalnya sistem inovasi daerah;		Penataan dan peningkatan kualitas regulasi daerah	
5	Pelakanaan program dan kegiatan pemerintah belum sepenuhnya menerapkan manajemen resiko;		Penguatan kelembagaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	
6	SDM Aparatur belum sepeuhnya memenuhi kapasitas dan kapabilitas sesuai dengan kebutuhan daerah;		Peningkatan kapasitas fiskal daerah melalui intensifikasi pendapatan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD), penguatan potensi pembiayaan alternatif dan kreatif daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, optimalisasi pemanfaatan transfer ke daerah (TKD), serta sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas provinsi dan nasional	
7	Belum optimalnya penerapan penerapan manajemen talenta, reward and punishment dalam pengembangan karir ASN;		Pengembangan pembiayaan inovatif termasuk KPBU dan blended finance	
8	Belum optimalnya pemenuhan kualitas sarana dan prasrana serta kelembagaan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;		Peningkatan bangunan Gedung pemerintahan	
9	Belum optimalnya hasil kerja sama daerah yang dilaksanakan oleh Kota Tasikmlaya;		Peningkatan kerja sama daerah, regional dan internasional	
10	Belum kuatnya komitmen seluruh masyarakat dalam membangun integritas, persatuan dan kesatuan bangsa;		Peningkatan pelayanan publik berbasis ekosistem digital dalam rangka perwujudan smart city	
11	Belum optimalnya sistem inovasi daerah;		Peningkatan utilisasi dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sektor pemerintahan	
12	Belum optimalnya penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);		Penataan kelembagaan dan regulasi sistem riset dan inovasi daerah	
13	Keamanan dan ketertiban umum belum sepenuhnya ditegakkan untuk seluruh masyarakat;			
14	Belum optimalnya kehidupan demokrasi daerah;			
15	Belum optimalnya penegakan peraturan daerah.			

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
1	Masih terdapatnya kawasan permukiman kumuh;	Pembangunan infrastruktur perkotaan yang berkualitas dan merata	Peningkatan konektivitas antar wilayah dengan memperhatikan RTRW Kota Tasikmalaya	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
2	Masih terdapat rumah tidak layak huni;		Peningkatan infrastruktur sumber daya air, meliputi pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan jaringan irigasi kewenangan kota	
3	Masih terdapat jalan yang belum dilengkapi bangunan pelengkap jalan;		Penyediaan drainase perkotaan yang terintegrasi	
4	Belum optimalnya konektivitas dan kemantapan jalan;		Peningkatan sarana dan prasarana transportasi publik	
5	Belum optimalnya pemeliharaan serta peningkatan jalan, jembatan dan drainase;		Peningkatan elektrifikasi dan telekomunikasi	
6	Belum optimalnya pengelolaan parkir		Penyediaan prasarana air minum meliputi: pembangunan SPAM perkotaan, pembangunan perlindungan dan pemanfaatan mata air	
7	Belum terpenuhinya penyediaan perlengkapan jalan;		Penyediaan prasarana air limbah meliputi: pembangunan SPAL, perluasan IPLT, penyediaan sarana dan prasarana IPLT, penyediaan sarana pengangkut lumpur tinja, perencanaan pengelolaan air limbah terjadwal	
8	Belum optimalnya penyediaan perlengkapan jalan dan perpakiran;		Peningkatan prasarana limbah domestik, industri dan medis serta penanganan Buang Air Besar Sembarangan (BABS) di rumah tangga	
9	Belum tersedianya pelayanan transportasi massal terintegrasi.		Pembangunan perumahan dan permukiman yang layak huni, aman dan terjangkau masyarakat	
			Penanganan kawasan kumuh	
1	Belum optimalnya perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang	Lingkungan hidup yang berkelanjutan	Pengendalian pencemaran dan kerusakan serta konservasi lingkungan hidup	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
2	Belum optimalnya pengelolaan kawasan rawan bencana;		Peningkatan pengelolaan sampah terpadu di hulu dan hilir	
3	Belum optimalnya pengendalian pencemaran dan penanganan kerusakan lingkungan		Transformasi pengelolaan persampahan meliputi: pembangunan prasarana persampahan, penyediaan sarana persampahan dan kerja sama pengelolaan persampahan	
4	Belum optimalnya upaya pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup		Peningkatan pemanfaatan, pengendalian dan pengawasan tata ruang	
5	Daya tampung dan debit air danau/situ kurang optimal		Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya alam yang efisien dan ramah lingkungan	

Permasalahan Pembangunan Tahun 2026		Isu Strategis Tahun 2026	Arah Kebijakan RPJMD Tahun 2025-2029	Prioritas Pembangunan
6	Peningkatan tekanan terhadap sumber daya alam dan ruang akibat pertambahan penduduk		Pelibatan masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup	
7	Belum optimalnya Ruang Terbuka Hijau (RTH)		Implementas Pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim	
8	Kurangnya kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam mengelola sampah dari sumber		Pembangunan ekonomi hijau melalui pembangunan ekonomi yang rendah karbon, hemat energi dan berbasis pada energi terbarukan	
9	Belum optimalnya ketersediaan sarana dan prasarana untuk pengelolaan sampah		Peningkatan ketahanan air di Kawasan rawan dan rentan terhadap bencana hidrometeorologi dan/atau ketersediaan air.	
10	Kurang seimbangnya antara SDM pengangkut sampah dengan luas wilayah pengangkutan sampah dan jumlah penduduk		Pembangunan Infrastruktur yang berwawasan lingkungan diantaranya infrastruktur yang tahan iklim, resilience terhadap bencana, dan ramah lingkungan	
11	Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang dapat mengakses infrastruktur pelayanan dasar air minum		Perencanaan tata ruang dengan mempertimbangkan risiko bencana, daya dukung, daya tampung lingkungan hidup, dan perubahan iklim	
12	Belum optimalnya capaian Kepala Keluarga yang memiliki akses terhadap sarana pengelolaan air limbah domestik		Meningkatkan kapasitas kelembagaan pemerintah dan peran serta masyarakat, dunia usaha dalam penanggulangan bencana	

Sumber: hasil analisa Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025.

Selain berkaitan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan, prioritas pembangunan tahun 2026 juga memperhatikan pokok-pokok pikiran DPRD Kota Tasikmalaya sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel 4.6.
Keterkaitan Prioritas Pembangunan dengan Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
1. Pada pembangunan bidang pendidikan, diperlukan arah kebijakan untuk peningkatan akses dan kualitas pendidikan meliputi peningkatan sarana dan prasarana sekolah, mengoptimalkan teknologi komunikasi dan informasi untuk tujuan pendidikan, peningkatan manajemen pendidikan, antara lain kebijakan penerimaan siswa, partisipasi biaya sekolah, meningkatkan pendidikan berbasis ketrampilan (*life skill*), mengembangkan pendidikan anak usia dini dan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus serta membangun kerjasama dan kemitraan perguruan tinggi dengan pendidikan dasar dan menengah dalam pengembangan jejaring dan peningkatan kapasitas pendidik; 2. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan dan mutu layanan kesehatan melalui penyediaan dokter, spesialis, psikolog, dan tenaga medis di seluruh rumah sakit dan puskesmas di Kota Tasikmalaya, peningkatan status dan fasilitas RSUD maupun puskesmas agar dapat memenuhi standar kualitas dan mengontrol, mengawasi dan memadukan program jaminan kesehatan nasional ini dengan jaminan kesehatan daerah dan jamkesos terutama kepada warga miskin yang belum sama sekali mendapatkan jaminan kesehatan dan menjamin total *coverage* kepada seluruh masyarakat Kota Tasikmalaya; 3. Penyandang masalah kesejahteraan dan pengurangan kemiskinan diharapkan menjadi arah kebijakan yang dibangun pada tahun 2026. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan persoalan yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada political will yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka;	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
1. Pembangunan infrastruktur publik melalui tersedianya infrastruktur jalan yang baik merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi publik untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat. Disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi Kota Tasikmalaya untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud. 2. Dalam menyikapi kebutuhan pangan Kota Tasikmalaya yang semakin besar pada tahun-tahun mendatang ditandai dengan laju pertambahan penduduk dan industri perhotelan yang pesat dalam 2 tahun terakhir menjadikan komoditas-komoditas primer dan unggulan di Kota Tasikmalaya untuk ditingkatkan. Produksi hasil pertanian perlu dijaga dan mendapat perhatian yang cukup sehingga diharapkan Kota Tasikmalaya memiliki ketahanan pangan yang baik. 3. Peran koperasi sebagai soko guru perekonomian dan usaha kecil menengah sebagai denyut nadi perekonomian di Kota Tasikmalaya selayaknya mendapatkan perhatian yang kuat dan luas. Menurut catatan kami, masih terdapat koperasi yang kurang sehat dan sebagian kecil lainnya malah mati. Oleh karena itu, diperlukan pendampingan yang bersifat berkesinambungan agar koperasi dapat kembali tumbuh subur di Kota Tasikmalaya ini. Salah satu langkah yang dapat dilakukan yaitu pendampingan pra koperasi, koperasi pemula dan koperasi mantap dengan sistem manajemen yang berbeda sehingga mereka bisa naik tingkatan sesuai kemampuannya; 4. Pemerintah daerah diharapkan mampu meningkatkan iklim usaha dan mampu meng-agregasi sejumlah kepentingan kalangan dunia usaha dalam kerangka pembangunan daerah. Pemerintah daerah dengan perannya yang strategis diharapkan mampu menjadi akselerator pertumbuhan usaha perdagangan dan industri. Hal ini penting karena dengan akselerasi dan terobosan yang dilakukan dapat meningkatkan perkembangan perekonomian Kota Tasikmalaya dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Tasikmalaya; 5. Tahun 2026 harus mampu dijadikan momentum untuk mengakselerasi perekonomian daerah sekaligus mengurangi pengangguran secara signifikan di Kota Tasikmalaya. Pertumbuhan ekonomi harus ditingkatkan dengan membawa lebih besar lagi sumber daya kapital sehingga dapat menyerap tenaga kerja di Kota Tasikmalaya lebih besar.	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan

Pokok-Pokok Pikiran DPRD	Prioritas Pembangunan
6. Mendorong pembentukan raperda tentang pelayanan publik yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pemerintah daerah kepada stakeholders terkait dan masyarakat. Dengan adanya perda pelayanan publik ini juga diharapkan mampu menyelesaikan masalah-masalah yang ada pada sektor pelayanan publik. Dengan pelayanan publik yang memadai maka kepercayaan publik terhadap program-program pembangunan juga semakin membaik;	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
1. Pembangunan infrastruktur publik melalui tersedianya infrastruktur jalan yang baik merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang yang baik dan mulus maka transportasi publik untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat. Disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat sehingga visi Kota Tasikmalaya untuk menjadi destinasi favorit bagi wisatawan domestik maupun mancanegara bisa terwujud. 2. Disamping jalan-jalan yang berstatus jalan propinsi tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir, disamping semakin lancarnya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa.	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak kalah urgensinya dengan persoalan-persoalan lain, diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu, evaluasi terhadap keadaan IPAL yang ada di TPA Ciangir mutlak diperlukan apakah kapasitasnya memadai atau sudah over load serta bagaimana instalasi untuk pengelolaan limbah B3-nya dan seterusnya	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan

Sumber: Hasil Analisa Bappelitbangda, 2025.

Prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Tasikmalaya tahun 2026 diimplementasikan melalui program prioritas dan program pembangunan daerah yang dilaksanakan oleh seluruh stakeholder pembangunan. Penjabaran Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya pada RKPD Tahun 2026 ke dalam Program Prioritas dan Program Pembangunan Daerah disajikan pada tabel berikut.

Tabel 4.7.
Penjabaran Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2026 kedalam Program Prioritas Daerah dan Program Perangkat Daerah

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
1.	P.1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	**Program Tasik Gemas** Program pembangunan daerah bidang kesehatan yang menitikberatkan pada upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, diantaranya: a. Pemberian makanan tambahan dan suplemen bagi ibu hamil, balita, dan remaja putri, melalui: 1) pemberian makanan tambahan bagi balita gizi buruk, balita stunting, balita gizi kurang dan ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK); 2) Pemberian tablet penambah darah/vitamin bagi ibu hamil dan remaja putri. b. Peningkatan pelayanan kesehatan anak melalui pemberian kartu anak sehat bagi anak balita; c. Peningkatan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS), melalui: 1) Sosialisasi Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS); 2) Regulasi dan penegakan Keluhan Trimester (KTR). d. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan, melalui: 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana kesehatan; 2) Pengembangan Puskesmas; 3) Peningkatan alat kesehatan dan alat penunjang kesehatan lainnya. e. Pemenuhan jaminan kesehatan nasional, terutama dalam penyediaan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kegiatan dilaksanakan melalui: 1) Verifikasi dan validasi data kepesertaan BPJS kesehatan; 2) Peningkatan pelayanan jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin;	• Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat • Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan • Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	▪ Dinas Kesehatan	• Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak • Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman • Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata • Kecamatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		3) Koordinasi dengan BPJS kesehatan dan stakeholder lainnya dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan.			
		Program Tasik Pintar Program Pembangunan dalam bidang pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan, diantaranya: a. Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, melalui; 1) Pembangunan ruang kelas baru; 2) Rehabilitasi ruang kelas; 3) Pembangunan/rehabilitasi perpustakaan; 4) Pembangunan/rehabilitasi laboratorium; 5) Pembangunan/rehabilitasi utilitas sekolah. b. Bantuan Pendidikan, melalui: 1) Pemberian beasiswa bagi mahasiswa berprestasi dari keluarga tidak mampu; 2) Pemberian peralatan dan perlengkapan sekolah terutama bagi siswa dari keluarga tidak mampu. c. Peningkatan kapasitas pemuda dan prestasi olah raga, melalui: 1) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana olahraga; 2) Pembangunan/rehabilitasi sarana dan prasarana pemuda; 3) Pembinaan organisasi keolahragaan dan kepemudaan; 4) Pembinaan atlet.	• Program Pengelolaan Pendidikan • Program Pengembangan Kurikulum • Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan • Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	▪ Dinas Pendidikan	• Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah • Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
		Program Tasik Religius Program Tasik Religius merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan karakter masyarakat Kota Tasikmalaya yang religius melalui peningkatan pemahaman dan pengamalan nilai-nilai keagamaan, diantaranya: a. Fasilitasi pondok pesantren; b. One Kelurahan One Hafidz, melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri hafidz Al-Quran;	• Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	• Sekretariat Daerah	• Dinas Pendidikan • Badan Kesatuan Bangsa dan Politik • Kecamatan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		Program One Kelurahan One Hafizh (OHAN Hafizh) adalah program yang ditujukan untuk mencetak kader hariz dan hafizah yang tersebar di seluruh wilayah Kota Tasikmalaya melalui pemberian beasiswa bagi siswa/santri. Peserta OHAN Hafizh adalah masyarakat/penduduk Kota Tasikmalaya baik yang sedang belajar di sekolah formal maupun yang sudah tidak bersekolah, serta memiliki kemampuan dalam membaca al-Qur'an sesuai dengan standar LPTQ, memiliki keinginan dan motivasi yang kuat untuk mengikuti program. Tahapan pelaksanaan program ini adalah: 1) Pembentukan tim penyusun regulasi pelaksanaan program; 2) Penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan program; 3) Perencanaan pelaksanaan program; 4) Rekruitmen peserta program; 5) Pelaksanaan program. c. Fasilitasi pendidikan diniyah; d. Perbaikan sarana dan prasarana keagamaan; e. Optimalisasi tata kelola zakat, infaq, sodaqoh dan wakaf.			

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
2.	P.2. Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	**Program Tasik Pelak** Program Tasik Pelak adalah program yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian daerah melalui peningkatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat terutama dari sektor industri, perdagangan, jasa, pertanian, perikanan dan ekonomi kreatif berbasis potensi ekonomi lokal yang didukung oleh pelaku usaha dan koperasi yang sehat, perkembangan usaha mikro kecil dan menengah yang berkualitas dengan iklim investasi yang kondusif. Selain itu, salah satu tujuan program ini adalah dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin. Program Pelak ini diantaranya dilaksanakan dengan: a. Pemberdayaan dan pengembangan usaha mikro, melalui: 1) Penyusunan regulasi; 2) Pembentukan kelembagaan pengelola; 3) Identifikasi potensi ekonomi lokal; 4) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, dan pendampingan usaha mikro; 5) Pemanfaatan aset daerah; 6) Fasilitasi legalitas usaha; 7) Fasilitasi dukungan teknologi dan branding; 8) Fasilitasi kemitraan, promosi dan pemasaran; 9) Fasilitasi akses permodalan. b. Pemberdayaan dan perlindungan koperasi, melalui: 1) Pelatihan, pemberdayaan, pengembangan, pendampingan, dan pengawasan koperasi; 2) Fasilitasi bantuan permodalan; 3) Fasilitasi usaha mikro peserta program PELAK. c. Pengembangan ekonomi kreatif, melalui: 1) Optimalisasi Gedung Creative Center	• Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi • Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian • Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi • Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM) • Pengembangan UMKM • Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan • Program Pengembangan Ekspor • Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri • Program Perencanaan dan Pembangunan Industri • Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota • Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	• Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang • Dinas Perhubungan

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
		(GCC) dan Pusat Pengembangan Industri Kerajinan (PPIK); 2) Pengembangan komunitas kreatif berbasis budaya dan kearifan lokal; 3) Pekan ekonomi kreatif; 4) Kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk dengan perguruan tinggi dalam pengembangan ekonomi kreatif; d. Investasi dan penciptaan lapangan kerja, melalui: 1) Pelatihan kompetensi tenaga kerja; 2) Bursa kerja; 3) Fasilitasi kerjasama perusahaan dengan sekolah kejuruan dan perguruan tinggi; 4) Rintisan pembentukan Balai Latihan Kerja (BLK); 5) Peningkatan Iklim investasi daerah; 6) Promosi investasi daerah; 7) Penyusunan Peta Potensi Investasi.			
			• Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal • Program Promosi Penanaman Modal • Program Pelayanan Penanaman Modal • Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal • Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal	• Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	
			• Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata • Program Pemasaran Pariwisata • Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	• Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	
			• Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja • Program Penempatan Tenaga Kerja • Program Hubungan Industrial	• Dinas Tenaga Kerja	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
			• Program Perekonomian dan Pembangunan	• Sekretariat Daerah	
			• Program Pengelolaan Perikanan Budidaya • Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan • Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian • Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	• Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	
3.	P.3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	**Program Tasik Melayani** Program Tasik Melayani merupakan program pembangunan daerah dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang prima dan berkualitas, diantaranya dilaksanakan melalui: a. Penguatan manajemen ASN, melalui penerapan merit sistem; b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan publik, melalui: 1) Pembangunan/rehabilitasi gedung kantor; 2) Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan; 3) Penyediaan media layanan publik. c. Optimalisasi Managemen pendataan Pendapatan Asli daerah (PAD) melalui teknologi informasi, dengan kegiatan utama antarlain: 1) Pemutakhiran data objek pajak dan retribusi; 2) Pengawasan dan pengendalian pengelolaan pajak daerah serta retribusi; 3) Pengembangan sistem informasi PAD; 4) Optimalisasi pemanfaatan aset daerah sebagai sumber PAD.	• Program Pembangunan/ Rehabilitasi Bangunan Gedung Negara	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			• Program Pendaftaran Penduduk • Program Pencatatan Sipil • Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan • Program Pengelolaan Profil Kependudukan	• Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
			• Program Informasi dan Komunikasi/Publik • Program Aplikasi Informatika • Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral • Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	• Dinas Komunikasi dan Informatika	
			• Program Pengelolaan Keuangan Daerah • Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	• Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	
			• Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	• Badan Pendapatan Daerah	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
			• Program Kepegawaian Daerah • Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	• Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia	
			• Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	• Kecamatan	
6.	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata	**Program Tasik Nyaman** Program Tasik Nyaman merupakan salah satu program prioritas Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk memberikan pelayanan infrastruktur dasar perkotaan kepada masyarakat Kota Tasikmalaya. Pemantapan infrastruktur di Kota Tasikmalaya diperlukan untuk menangani permasalahan yang terkait dengan infrastruktur, dan menjawab tantangan isu strategis yang ada. Selain itu, pemantapan infrastruktur merupakan pendukung pengimplementasian rencana pengembangan wilayah menurut Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), serta untuk mendorong pembangunan sektor ekonomi dan sosial dalam rangka pencapaian kesejahteraan masyarakat. Program ini dilaksanakan diantaranya: a. Peningkatan infrastruktur jalan, melalui: 1) Pemeliharaan, rehabilitasi, dan rekonstruksi jalan dan kelengkapannya; 2) Peningkatan infrastruktur perhubungan. b. Peningkatan infrastruktur air minum, melalui: 1) Pembangunan dan pengembangan SPAM; 2) Pembentukan kelembagaan pengelola layanan air minum. c. Peningkatan infrastruktur air limbah domestik, melalui: 1) Pembangunan dan pengembangan SPALD; 2) Peningkatan pelayanan UPTD SPALD	• Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Limbah • Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase • Program Penyelenggaraan Jalan	• Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
			• Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	• Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	
			• Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	• Dinas Perhubungan	

No.	Prioritas Pembangunan Daerah	Program Prioritas Daerah	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Perangkat Daerah Pendukung
7.	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan	**Program Tasik Resik** Program Tasik Resik dengan semangat untuk mewujudkan Kota Tasikmalaya yang bersih, indah, hijau, dan layak huni, sehingga dapat menujang peningkatan kualitas sumberdaya manusia yang sehat, maju dan kreatif, diantaranya: a. Peningkatan pengelolaan persampahan, melalui: 1) Pengurangan sampah; 2) Sosialisasi pengelolaan sampah; 3) Optimalisasi dan pembentukan bank sampah; 4) Pengadaan lahan untuk TPS3R dan TPST; 5) Pembangunan TPS3R dan TPST. b. Penanganan Sampah 1) Optimalisasi pengelolaan sampah di TPA Ciangir; 2) Penyediaan armada pengangkut sampah, alat berat, dan alat pengolahan sampah; 3) Pengadaan lahan untuk TPST; 4) Penyediaan TPS; 5) Penanganan sampah di sungai; 6) Kerjasama pengelolaan persampahan. c. Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau, melalui: 1) Pemeliharaan taman kota; 2) Pemeliharaan dan pembangunan taman warga; 3) Pembangunan taman keanekaragaman hayati. d. Peningkatan kualitas lingkungan, melalui: 1) Pembebasan gunung atau lahan sumber air; 2) Penanganan pencemaran lingkungan; 3) Reboisasi/penanaman pohon; 4) Pengendalian pemanfaatan ruang.	• Program Pengelolaan Persampahan • Program Perencanaan Lingkungan Hidup • Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup • Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	• Dinas Lingkungan Hidup	• Dinas PUTR • Dinas Perawaskim • Kecamatan

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, 2025.

Selain program prioritas pembangunan tersebut di atas, dalam rangka mencapai sasaran pembangunan tahun 2026 maka disusun program perangkat daerah sebagai berikut:

Tabel 4.8.
Program Perangkat Daerah dalam Rangka Pencapaian Sasaran Pembangunan Tahun 2026

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif
1.	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya	T.1. Terwujudnya sumber daya manusia yang berkualitas dan masyarakat yang religius dan berbudaya				
			S.1. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Dinas Kesehatan	137.376.907.979,00
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Dinas Kesehatan	1.522.577.000,00
				Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	Dinas Kesehatan	997.798.000,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Dinas Kesehatan	3.278.200.259,00
			S.2. Meningkatnya pendidikan yang berkualitas dan merata	Program Pengelolaan Pendidikan	Dinas Pendidikan	121.826.166.739,00
				Program Pengembangan Kurikulum	Dinas Pendidikan	30.000.000,00
				Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Dinas Pendidikan	6.628.460.000,00
				Program Pengembangan Bahasa dan Sastra	Dinas Pendidikan	87.500.000,00
				Program Pembinaan Perpustakaan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	553.000.000,00
				Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	10.000.000,00
			S.3. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat	Program Pemberdayaan Sosial	Dinas Sosial	745.000.000,00
				Program Rehabilitasi Sosial	Dinas Sosial	6.280.000.000,00
				Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Dinas Sosial	810.000.000,00
				Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	Dinas Sosial	60.000.000,00
			S.4. Meningkatnya kehidupan masyarakat yang religius dan berbudaya	Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekretariat Daerah	32.017.243.170,00
				Program Pengembangan Kebudayaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	875.000.000,00
				Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	815.000.000,00
				Program Pembinaan Sejarah	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	30.000.000,00
			S.5. Meningkatnya kualitas keluarga, pemuda, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Program Pengendalian Penduduk	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	317.560.000,00
				Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3.850.538.000,00

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif
				Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	4.574.800.000,00
				Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	25.000.000,00
				Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	435.000.000,00
				Program Perlindungan Perempuan	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	150.000.000,00
				Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	200.000.000,00
				Program Perlindungan Khusus Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	250.000.000,00
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	1.352.500.000,00
				Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	6.937.572.128,00
2.	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan	T.2. Terwujudnya perekonomian daerah yang berkeadilan, kuat dan berdaya saing berbasis industri, jasa dan perdagangan				
			S.6. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan dan berdaya saing	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	2.000.000,00
				Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	2.000.000,00
				Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	2.000.000,00
				Program Pendidikan dan Latihan Perkoperasian	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	200.000.000,00
				Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	248.535.000,00
				Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro (UMKM)	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	1.593.965.000,00
				Program Pengembangan UMKM	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	752.000.000,00
				Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	10.000.000,00
				Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	6.363.835.530,00
				Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	338.000.000,00
				Program Pengembangan Ekspor	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	1.193.251.993,00
				Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	231.000.000,00
				Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	152.000.000,00

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif
				Program Perencanaan dan Pembangunan Industri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	1.391.500.000,00
				Program Pengendalian Izin Usaha Industri	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	1.000.000,00
				Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Dinas KUKM Perindustrian dan Perdagangan	32.000.000,00
				Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	105.000.000,00
				Program Pemasaran Pariwisata	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	900.000.000,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata	2.452.500.000,00
			S.7. Terwujudnya ketahanan pangan daerah	Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	525.000.000,00
				Program Penanganan Kerawanan Pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	960.000.000,00
				Program pengawasan Keamanan pangan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	30.000.000,00
				Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	2.335.500.000,00
				Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	483.000.000,00
				Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	497.500.000,00
				Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	4.747.500.000,00
				Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	926.000.000,00
				Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	150.000.000,00
				Program Penyuluhan Pertanian	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	564.273.010,00
			S.8. Meningkatnya investasi daerah dan lapangan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	740.000.000,00
				Program Penempatan Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja	1.011.592.800,00
				Program Hubungan Industrial	Dinas Tenaga Kerja	625.000.000,00
				Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja	57.500.000,00
				Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	120.000.000,00
				Program Promosi Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	250.000.000,00
				Program Pelayanan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	140.000.000,00
				Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	Dinas Penanaman Modal, Perijinan Terpadu Satu Pintu	20.000.000,00
3.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih	T.3. Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif, bersih dan inovatif				
			S.9. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik, adaptif dan bersih	Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Satuan Polisi Pamong Praja	4.654.875.100,00
				Program Penguatan Ideologi Pancasila dan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	1.915.000.000,00

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif
				Karakter Kebangsaan		
				Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika, serta Budaya Politik	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.171.530.000,00
				Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	4.483.500.000,00
				Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	300.000.000,00
				Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri	3.270.000.000,00
				Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	1.241.799.660,00
				Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Bappelitbangda	933.531.723,00
				Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Bappelitbangda	1.017.736.863,00
				Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	20.000.000,00
				Program Perizinan Penggunaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	25.000.000,00
			S.10. Meningkatnya penerapan IPTEK, Riset dan Inovasi dalam pelayanan publik	Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Dinas Komunikasi dan Informatika	1.432.500.000,00
				Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	Dinas Komunikasi dan Informatika	7.850.000.000,00
				Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Dinas Komunikasi dan Informatika	225.000.000,00
				Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Dinas Komunikasi dan Informatika	425.000.000,00
				Program Pendaftaran Penduduk	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	406.800.000,00
				Program Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	391.000.000,00
				Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	331.642.215,00
				Program Pengelolaan Profil Kependudukan	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	33.000.000,00
				Program Pengelolaan Arsip	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah	205.000.000,00
				Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	17.339.947.267,00
				Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.667.100.000,00
				Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Badan Pengelola Pendapatan Daerah	5.768.720.942,00
				Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Sekeratriat Daerah	32.017.243.170,00

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif
				Program Perekonomian dan Pembangunan	Sekeratriat Daerah	2.386.586.523,00
				Program Penyelenggaraan Pengawasan	Inspektorat	2.451.831.337,00
				Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Inspektorat	1.248.049.478,00
				Program Kepegawaian Daerah	BKPSDM	1.440.600.000,00
				Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	BKPSDM	1.035.000.000,00
				Program Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	Sekretariat DPRD	15.623.391.975,00
				Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Kecamatan	3.533.638.805,00
				Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Kecamatan	47.415.732.040,00
				Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Kecamatan	968.800.000,00
				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Seluruh SKPD	1.109.594.951.416,00
4.	Mewujudkan infrastruktur daerah yang berkualitas dan merata	T.4. Terwujudnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif				
			S.11. Meningkatnya infrastruktur daerah yang berkualitas, merata dan inklusif	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	8.442.000.000,00
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	16.985.000.000,00
				Program Penyelenggaraan Jalan	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	41.814.729.095,00
				Program Penataan Bangunan Gedung	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	14.970.000.000,00
				Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	310.000.000,00
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	12.025.000.000,00
				Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	1.594.400.000,00
				Program Penatagunaan Tanah	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	13.624.885,00
				Program Pengembangan Perumahan	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	525.000.000,00
				Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.002.000.000,00
				Program Kawasan Permukiman	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	3.301.071.505,00
				Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	1.680.000.000,00
				Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Dinas Perhubungan	29.960.126.900,00
5.	Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan	T.5. Terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan				
			S.12. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	410.000.000,00
				Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	366.000.000,00

No.	Misi	Tujuan	Sasaran	Program Perangkat Daerah	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Pagu Indikatif
				Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Dinas Lingkungan Hidup	4.522.000.000,00
				Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Dinas Lingkungan Hidup	12.000.000,00
				Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Dinas Lingkungan Hidup	75.000.000,00
				Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	10.000.000,00
				Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Dinas Lingkungan Hidup	55.000.000,00
				Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup	52.000.000,00
				Program Pengelolaan Persampahan	Dinas Lingkungan Hidup	17.238.959.425,00
			S.13. Menurunnya risiko bencana daerah dan perubahan iklim	Program Penanganan Bencana	Dinas Sosial	2.670.000.000,00
				Program Penanggulangan Bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2.529.500.000,00
				Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	1.193.004.368,00
				Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	990.000.000,00

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, diolah Tahun 2025.

4.2.6.1. Keselarasan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Tahun 2026

Prioritas pembangunan nasional dan prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat menjadi salah satu acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun Tahun 2026. Keselarasan antara Prioritas pembangunan Kota Tasikmalaya Tahun 2026, prioritas pembangunan Provinsi Jawa Barat tahun 2026 dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam RKP Tahun 2026 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.9.
Keselarasan Prioritas Pembangunan Daerah dalam RKPD Tahun 2026 dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2026 dan Prioritas Pembangunan Nasional RKP Tahun 2026

Prioritas Pembangunan Nasional		**Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat**		**Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya**	
PN 1	Memperkokoh ideologi pancasila, Demokrasi dan Hak Asasi Manusia	P 4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance.*	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
PN 2	Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat

Prioritas Pembangunan Nasional		Prioritas Pembangunan Provinsi Jawa Barat		Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya	
	Kemandirian Bangsa melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru	P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif		dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		
PN 3	Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi	P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	P 4	Mewujudkan Infrastruktur Daerah yang Berkualitas dan Merata
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		
PN 4	Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda, dan Penyandang Disabilitas	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
		P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif		
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		
PN 5	Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri	P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif	P 2	Mewujudkan Perekonomian Daerah yang Berkeadilan, Kuat dan Berdaya Saing Berbasis Industri, Jasa dan Perdagangan
PN 6	Membangun dari Desa dan dari Bawah untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan	P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Kehidupan Sosial Masyarakat yang Religius dan Berbudaya
PN 7	Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 3	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih
		P 2	Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan dan Investasi Berbasis Kearifan Lingkungan Yang Tidak Eksploitatif		
		P 4	Mewujudkan Masyarakat dan Birokrasi yang Adaptif, Berorientasi Pelayanan, sesuai dengan Prinsip *Good and Clean Governance.*		
PN 8	Memperkuat Penyelarasan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat yang Adil dan Makmur	P 1	Mewujudkan Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul	P 5	Mewujudkan Pembangunan yang Berkelanjutan
		P 3	Mengurangi Disparitas Pembangunan Daerah Perkotaan Pedesaan, serta Miskin dan Kaya		

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2025.

Tabel 4.10.
Tingkat Dukungan Program Prioritas Daerah Terhadap Masing-Masing Prioritas Nasional Tahun 2026

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
1	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	Meningkatnya ketahanan air untuk mendukung pencapaian swasembada pangan, energi, dan air	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)		1.03.02.2.02.0008	Peningkatan Jaringan Irigasi Permukaan	72.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
								1.03.02.2.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	2.300.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
							Pengembangan SPAM Terintegrasi Hulu Ke Hilir	1.03.03.2.01.0028	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	1.940.000.000,00	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
2	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.08	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Meningkatnya Kesetaraan Gender, Peran Perempuan, dan Perlindungan Anak	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN		2.08.07.2.02.0013	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Kabupaten/Kota	250.000.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
3	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.22	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	Peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK)	2.22.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	2.22.02.2.01.0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	675.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
							Pemanfaatan Khazanah Budaya dan Pengembangan Kawasan Pemajuan Kebudayaan	2.22.02.2.01.0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	200.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
4	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	Terakselerasinya transformasi pemerintah digital di daerah	2.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.16.02.2.01.0017	Pelayanan Informasi Publik	303.584.600,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	2.16.02.2.01.0019	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	39.600.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
								2.16.02.2.01.0021	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	480.010.940,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	2.16.03.2.02.0025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	50.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
								2.16.03.2.02.0034	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interopabilitas data dan integrasi layanan	6.687.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
							Transformasi Digital Layanan Publik Prioritas	2.16.03.2.02.0036	Penyediaan Akses Internet	2.421.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
								2.16.03.2.02.0038	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
5	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.14	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS) dan Keluarga Berkualitas (IPKK)	2.14.03	PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)		2.14.03.2.03.0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya	32.400.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								2.14.04.2.01.0016	Pengelolaan Ketahanan Keluarga Melalui Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS)	9.600.000,00	Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
								2.19.02.2.01.0011	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota	55.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
								2.19.02.2.02.0004	Koordinasi, Sinkronisasi, dan penyelenggaraan Pemberdayaan organisasi kepemudaan melalui kemitraan berbasis peneguhan kemandirian ekonomi pemuda tingkat Kabupaten/Kota	1.002.500.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
6	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.21	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		2.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		2.21.02.2.01.0007	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	200.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
								2.21.02.2.01.0008	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	100.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
7	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	2.20	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	2.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		2.20.02.2.01.0018	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	38.000.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
								2.20.02.2.01.0019	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	22.500.000,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
8	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN	Meningkatnya Kegemaran Membaca dan Literasi Masyarakat	2.23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		2.23.02.2.01.0013	Pembinaan Perpustakaan Umum dan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								2.23.02.2.01.0014	Pemanfaatan Koleksi Perpustakaan (Cetak/Digital) oleh Masyarakat	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								2.23.03.2.01.0003	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								2.23.03.2.01.0004	Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
9	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.06	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL	Penurunan Kemiskinan Melalui Graduasi	1.06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL		1.06.02.2.03.0004	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota	505.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								1.06.02.2.03.0014	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota	145.000.000,00	Dinas Sosial
								1.06.05.2.02.0004	Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	405.000.000,00	Dinas Sosial
								1.06.05.2.02.0006	Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	75.000.000,00	Dinas Sosial
10	Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN	Meningkatnya Tertib Arsip dan Mengembangkan Memori Kolektif Bangsa	2.24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		2.24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
								2.24.02.2.03.0001	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	25.000.000,00	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
11	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	3.26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA	Meningkatnya Kontribusi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dalam Mendukung Pertumbuhan Ekonomi Nasional	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Percepatan Pembangunan Destinasi Pariwisata Prioritas Labuan Bajo	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	105.000.000,00	Dinas Kepemudaan Olah Raga Kebudayaan dan Pariwisata
12	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	Kesehatan Untuk Semua	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.911.155.941,00	Dinas Kesehatan
							Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.911.155.941,00	Dinas Kesehatan
							Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.911.155.941,00	Dinas Kesehatan
							Penuntasan TBC	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.911.155.941,00	Dinas Kesehatan
							Penurunan Kematian Ibu dan Anak	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.911.155.941,00	Dinas Kesehatan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
							Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	11.911.155.941,00	Dinas Kesehatan
							Eliminasi Penyakit Kusta & Schistosomiasis	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	2.760.938.000,00	Dinas Kesehatan
							Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.900.459.010,00	Dinas Kesehatan
							Pencegahan dan Penurunan Stunting	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.900.459.010,00	Dinas Kesehatan
							Penurunan Kematian Ibu dan Anak	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.900.459.010,00	Dinas Kesehatan
							Penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Gratis	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	43.900.459.010,00	Dinas Kesehatan
							Investasi Pelayanan Kesehatan Primer	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	77.473.700,00	Dinas Kesehatan
13	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.12	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya kualitas layanan kependudukan dan pencatatan sipil, serta pemanfaatan data kependudukan berbasis digital	2.12.02	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK		2.12.02.2.03.0001	Koordinasi antar Lembaga Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah di Kabupaten/Kota dalam Penertiban Pelayanan Pendaftaran Penduduk	5.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
								2.12.02.2.03.0003	Fasilitasi Pendaftaran Penduduk	283.800.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
								2.12.03.2.02.0002	Koordinasi dengan Kantor Kementerian yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Agama Kabupaten/Kota dalam Memelihara Hubungan Timbal Balik Melalui Pembinaan Masing-Masing kepada Instansi Vertikal dan UPT Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota	10.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
								2.12.03.2.02.0006	Fasilitasi Terkait Pencatatan Sipil	123.000.000,00	Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
14	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	2.09	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN	Meningkatnya ketahanan pangan	2.09.03	PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT		2.09.03.2.01.0007	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	85.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								2.09.03.2.01.0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota	240.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								2.09.04.2.02.0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	660.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
								2.09.04.2.02.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	50.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan
15	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan.	1.04	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN	Terpenuhinya rumah layak, terjangkau, dan berkelanjutan	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.680.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
							Fasilitasi Penyediaan Perumahan Terintegrasi dengan PSU	1.04.05.2.01.0011	Perbaikan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan	2.477.000.000,00	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
16	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN	Meningkatnya Produksi Pertanian	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Pengembangan Kawasan Sentra Produksi Pangan (KSPP)/Lumbung Pangan Kalimantan Tengah	3.27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	70.000.000,00	Dinas Ketahanan Pangan Pertanian dan Perikanan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
17	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT	Terwujudnya manajemen bencana yang terintegrasi, pelayanan Satpol PP, Satlinmas, dan pelayanan pemadam kebakaran sesuai standar	1.05.03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	2.810.531.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
								1.05.04.2.01.0013	Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)	25.000.000,00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
18	Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.	2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP	Lingkungan Hidup Berkualitas	2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Peningkatan Pengelolaan Kualitas Air Sungai dan Danau	2.11.03.2.01.0007	Pelaksanaan pemantauan kualitas Lingkungan Hidup terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	25.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
							Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	2.11.11.2.01.0012	Penanganan sampah melalui pengangkutan	3.495.657.532,00	Dinas Lingkungan Hidup

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
							Peningkatan Pengumpulan dan Pengolahan Sampah Serta Pemrosesan Residu di TPA/LUR	2.11.11.2.01.0020	Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	2.900.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup
19	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	1.01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN	Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Pendidikan	1.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah	1.01.02.2.04.0010	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	100.000.000,00	Dinas Pendidikan
20	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	3.30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN	Meningkatnya Perdagangan melalui Integrasi Rantai Pasar Domestik dan Global	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN		3.30.02.2.06.0003	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Pelabelan Bahan Berbahaya Terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) maupun Produsen B2 (P-B2)	1.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
								3.30.05.2.01.0002	Pameran Dagang Nasional	700.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
								3.30.05.2.01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	50.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
21	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta	2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH	Peningkatan Produktivitas Koperasi dan UMKM	2.17.06	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	2.17.06.2.01.0003	Pembinaan dan Pendampingan Bagi Keluarga dan Kelompok Masyarakat yang Akan Membentuk Koperasi Dalam Pengembangan Ekonomi	40.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
	mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.										
							Pengembangan Koperasi Sektor Produksi	2.17.06.2.01.0009	Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota	1.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
								2.17.07.2.01.0015	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan	604.465.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
22	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.	2.18	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL	Pencapaian Target realisasi Penanaman Modal	2.18.05	PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL		2.18.05.2.01.0006	Pengawasan Penanaman Modal	20.000.000,00	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
								3.31.02.2.01.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
								3.31.02.2.01.0005	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	1.282.500.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan
								3.31.03.2.01.0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota	1.000.000,00	Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil Menengah Perindustrian dan Perdagangan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
23	Membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan. Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	2.07	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA	Meningkatnya kinerja pembangunan ketenagakerjaan dalam rangka produktivitas tenaga kerja, kesempatan kerja dan perlindungan pekerja	2.07.03	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA		2.07.03.2.01.0001	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	740.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
								2.07.05.2.02.0005	Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	200.000.000,00	Dinas Tenaga Kerja
24	Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri. Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2.15	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN	Terwujudnya Peningkatan Konektivitas Antar Wilayah dan Penurunan Angka Kecelakaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)		2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	2.926.139.500,00	Dinas Perhubungan

NO	ASTA CITA	KODE BIDANG	BIDANG URUSAN	OUTCOME PRIORITAS	KODE PROGRAM	PROGRAM	KEGIATAN PRIORITAS	KODE SUB KEGIATAN	SUB KEGIATAN	PAGU	PERANGKAT DAERAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(9)	(9)
25	Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM). Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur. Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	8.01	KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	Meningkatnya Kualitas Politik dan Demokrasi Indonesia serta Implementasi Nilai-Nilai ideologi Pancasila	8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	8.01.03.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	1.030.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
							Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa	8.01.04.2.01.0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	60.000.000,00	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Sumber: hasil analisis Bappelitbangda Kota Tasikmalaya, Tahun 2025

4.2.6.2. Standar Pelayanan Minimal

Prioritas pembangunan selanjutnya adalah pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal, ada 6 (enam) jenis SPM yang terdiri dari:

1. SPM Pendidikan
   Jenis pelayanan dasar pada SPM pendidikan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pendidikan anak usia dini;
   b. pendidikan dasar; dan
   c. pendidikan kesetaraan.
2. SPM Kesehatan;
   Jenis pelayanan dasar pada SPM kesehatan daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pelayanan kesehatan ibu hamil;
   b. pelayanan kesehatan ibu bersalin;
   c. pelayanan kesehatan bayi baru lahir;
   d. pelayanan kesehatan balita;
   e. pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar;
   f. pelayanan kesehatan pada usia produktif;
   g. pelayanan kesehatan pada usia lanjut;
   h. pelayanan kesehatan penderita hipertensi;
   i. pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus;
   j. pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat;
   k. pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
   l. pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus), yang bersifat peningkatan/promotif dan pencegahan/ preventif.
3. SPM Pekerjaan umum
   Jenis pelayanan dasar pada SPM pekerjaan umum daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari;
   b. penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik.
4. SPM Perumahan rakyat
   Jenis pelayanan dasar pada SPM perumahan rakyat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota;
   b. fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah kabupaten/kota.
5. SPM Ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat;
   Jenis pelayanan dasar pada SPM ketenteraman, ketertiban umum, dan pelindungan masyarakat daerah kabupaten/kota terdiri atas:
   a. pelayanan ketenteraman dan ketertiban umum;
   b. pelayanan informasi rawan bencana;
   c. pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
   d. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana;
   e. pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.
6. SPM Sosial
   Jenis pelayanan dasar pada SPM sosial daerah kabupaten/kota terdiri atas:

a. rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas telantar di luar panti;
b. rehabilitasi sosial dasar anak telantar di luar panti;
c. rehabilitasi sosial dasar lanjut usia telantar di luar panti;
d. rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti;
e. perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

Upaya yang dilakukan dalam rangka pencapaian SPM:

1. Dalam rangka pencapaian pencapaian SPM Pendidikan dialokasikan anggaran khusus yang dialokasikan untuk pemenuhan indikator SPM bidang pendidikan. pemenuhan capaian SPM melalui program kegiatan yang memuat indikator serta sasaran yang bertujuan untuk PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan pemenuhan standar pendidikan yang telah ditetapkan yaitu pemenuhan sarana dan prasarana peserta didik jenjang PAUD, SD, SMP dan Kesetaraan. Selain itu juga dilakukan peningkatan kualitas data sasaran SPM bidang pendidikan.
2. Untuk pemenuhan SPM bidang kesehatan, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam pemenuhan pelayanan terhadap 12 kelompok penerima layanan kesehatan;
3. Untuk pemenuhan SPM bidang perumahan Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam penyediaan infrastruktur perumahan korban bencana dan program pemerintah;
4. Untuk pemenuhan SPM bidang Pekerjaan umum, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran dalam peningkatan penyediaan infrastruktur air minum dan air limbah domestik;
5. Peningkatan pelayanan keamanan dan ketertiban umum Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran melalui peningkatan sarana dan prasarana keamanan dan ketertiban umum. Adapun untuk pemenuhan dalam sub bidang kebencanaan dilaksanakan melalui peningkatan ketersediaan informasi pengurangan risiko bencana pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana, pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran;
6. Peningkatan Pemenuhan SPM bidang Sosial, Pemerintah Kota Tasikmalaya mengalokasikan anggaran yang dilaksanakan melalui rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar diluar panti; rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti; rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti; dan perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota.

4.2.6.3. Inovasi Pembangunan Daerah

Inovasi pembangunan daerah merupakan semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Inovasi daerah pada hakikatnya ditujukan untuk mendukung peningkatan kinerja Pemerintah Daerah dan pelayanan publik dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Sasaran inovasi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan publik; pemberdayaan dan peran serta masyarakat; dan peningkatan daya saing Daerah. Sejalan dengan itu, usulan inovasi daerah tentunya tidak dibatasi hanya berasal dari Pemerintah Daerah, melainkan dibuka kesempatan yang seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengusulkan inovasi daerah. Untuk itu inovasi di daerah perlu terus didorong dan dikembangkan karena inovasi di daerah akan menunjang peningkatan daya saing

daerah dan diharapkan dapat menjawab isu strategis daerah dan tantangan yang dihadapi.

Pada pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah, disebutkan bahwa Menteri melakukan penilaian terhadap Daerah yang melaksanakan inovasi daerah berdasarkan laporan dari Kepala Daerah. Penilaian terhadap penerapan hasil inovasi daerah untuk memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah. Adapun penilaian inovasi daerah yang dilaksanakan antara lain:

1) Inovation Government Award (IGA);
2) Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik (KIPP);
3) Indeks Daya Saing Daerah (IDSD);
4) Kompetisi Inovasi Jawa Barat (KIJB).

Pada Tahun 2024 Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah pada *Inovation Government Award* (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.11-4898 Tahun 2024 tentang Indeks Inovasi Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota Tahun 2024), Kota Tasikmalaya berapa pada peringkat 66 dari 93 Kota di Indonesia dengan skor **49,36** dengan kategori **INOVATIF**.

Dalam perkembangannya inovasi-inovasi yang lahir dan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di Kota Tasikmalaya masih memerlukan dukungan dan pembinaan, karena secara kuantitas masih sangat kurang jumlahnya dan inovasi yang dihasilkan belum berkualitas dan masih belum matang. Inovasi yang diciptakan banyak yang belum didukung oleh data-data yang memadai. Hal ini menjadi tanggung jawab semua pihak untuk berkomitmen memperbaiki dan meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasinya. Dengan semakin banyak jenis inovasi dari perangkat daerah dengan kualitas inovasi yang matang, akan meningkatkan Indeks Inovasi Daerah.

Komitmen Pemerintah Kota Tasikmalaya dalam rangka meningkatkan Indeks Inovasi Daerah adalah:

1. Agar setiap Perangkat Daerah minimal mempunyai satu inovasi sesuai urusannya atau *One Agent One Innovation*;
2. Menetapkan Indeks Inovasi Daerah sebagai target kinerja dalam RPD Tahun 2023 – 2026.

Berbagai inovasi telah dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya dan dikembangkan Tahun 2022-2023 dengan total jumlah 18 inovasi. Sedangkan untuk tahun 2026 inovasi yang akan dikembangkan untuk menjawab isu strategi Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

1. INOVASI DAERAH DALAM MENINGKATKAN KETERSEDIAAN PANGAN UNTUK PERTUMBUHAN EKONOMI

1) Paranje Tasik

PARANJE TASIK merupakan kegiatan Pengembangan Agribisnis Ayam Sentul di Kandang Paranje dengan Pakan Alternatif Maggot dan Azola di Kelompok Tani Ternak Kota Tasikmalaya. Kegiatan PARANJE TASIK diharapkan menjadi solusi untuk memenuhi kebutuhan pasar terhadap daging ayam kampung dan berkontribusi dalam penanganan masalah persampahan. Sebagai salah satu pengembangan model sirkular ekonomi dengan mengintegrasikan pemeliharaan ayam sentul dan penanganan sampah organik. Model Sirkular Ekonomi Ayam Sentul dimulai dari Sampah Organik yang diproses menjadi pakan maggot. Maggot menjadi pakan alternatif untuk ayam. Maggot menghasilkan kasgot yang menjadi

pakan cacing. Cacing merupakan pakan ayam. Cacing menghasilkan kascing. Kascing menjadi pupuk tanaman sayuran dan Azolla. Tanaman azolla dan sayuran menjadi pakan alternatif ayam. Dengan demikian sirkular ekonomi ayam sentul ini menjadi salah satu alternatif penanggulangan sampah yang menjadi permasalahan khususnya di Kota Tasikmalaya. Kegiatan PARANJE TASIK diharapkan dapat memotivasi masyarakat baik peternak maupun masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan pendapatannya sekaligus melestarikan lingkungan. Dengan cara mengelola sampah organik dengan baik dan dijadikan pakan ternak yang berkualitas tinggi juga menciptakan lingkungan yang bersih dan resik.

2) Setaman Cinta (Sejuta Tanaman Pangan Cegah Inflasi Kota Tasikmalaya)

Inovasi Setaman Cinta dengan fokus pada sejuta tanaman pangan merupakan langkah strategis dalam upaya mencegah inflasi dan meningkatkan ketahanan pangan di Kota Tasikmalaya. Melalui kolaborasi yang erat antara masyarakat, pemerintah, dan pihak terkait lainnya, program ini diharapkan dapat memberikan solusi yang komprehensif terhadap tantangan pangan dan ekonomi saat ini. Dengan komitmen serta partisipasi aktif dari seluruh lapisan masyarakat, Inovasi Setaman Cinta bisa menjadi cetak biru bagi daerah lain dalam mencapai ketahanan pangan dan stabilitas ekonomi. Inovasi Setaman Cinta terdiri dari beberapa elemen utama: 1) Edukasi dan Pelatihan; 2) Pemberian Bibit Tanaman; 3) Komunitas Pertanian Perkotaan; dan 4) Pemasaran Hasil Pertanian.

Tantangan dalam implementasi program ini termasuk kurangnya pengetahuan masyarakat tentang pertanian modern, keterbatasan lahan, dan hambatan dalam hal pemasaran hasil pertanian. Oleh karena itu, kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan sektor swasta, sangat penting untuk memastikan keberhasilan program ini.

Inovasi Setaman Cinta diharapkan dapat memberikan dampak positif sebagai berikut:

1. Peningkatan Ketahanan Pangan: Dengan meningkatnya produksi pangan lokal, masyarakat akan memiliki akses yang lebih baik terhadap bahan makanan, sehingga dapat mengurangi dampak inflasi.
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat: Dengan memanfaatkan pekarangan rumah untuk bercocok tanam, masyarakat tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan pangan mereka tetapi juga memiliki potensi untuk menjual surplus hasil panen.
3. Pelestarian Lingkungan: Menanam tanaman pangan di lahan terbuka atau pekarangan dapat membantu mengurangi pencemaran dan memanfaatkan lahan secara berkelanjutan.
4. Pembangunan Kesadaran Sosial: Melalui keterlibatan dalam komunitas pertanian, masyarakat akan merasa lebih terhubung dan berpartisipasi aktif dalam pengembangan kota mereka.

3) Kembang Ranting Puskesmas Panglayungan (Kemandirian Pangan Demi Raih Keluarga Bebas Stunting)

Inovasi KEMBANG RANTING diharapkan dapat mengatasi permasalahan kesehatan yang banyak terjadi di wilayah Posyandu Kencana RW 11.

Implementasi ini menjadi langkah nyata dalam penanggulangan masalah gizi pada ibu hamil dan balita, juga menjadi sarana edukasi bagi seluruh masyarakat dalam bidang gizi terutama pemilihan makanan asli dalam pencegahan stunting.

Kebaruan dari inovasi ini adalah masyarakat dapat bergotong royong untuk mewujudkan mandiri pangan guna pencegahan terhadap stunting dan masalah gizi ibu hamil, dan menanamkan pemahaman bagi masyarakat bahwa makanan bergizi tidak harus mahal dan sulit di dapat. Terbukti dengan menanam sayuran di lahan sempit bisa menjadi salah satu penghasil *real food* yang murah dan mudah di dapat. Kerjasama yang solid antar dinas terkait juga menjadikan inovasi ini saling melengkapi sehingga penegtahuan masyarakat bertambah tidak hanya pada penegetahuan kesehatan tetapi pada bidang pertanian.

Hasil inovasi ini dapat memberikan setidaknya satu bulan sekali contoh makanan yang sehat pada semua keluarga yang ada di lingkungan rw 11. Hasil yang diharapkan adalah menurunya angka permasalah gizi pada balita dan ibu hamil serta meningkatnya pengetahuan masyrakat tentang makanan bergizi.

Inovasi ini dapat diterapkan pada daerah pedesaaan maupun perkotaan karena kegiatan ini tidak memerlukan lahan yang luas. setiap daerah dapat menerapkan kegiatan ini sebagai salah satu upaya dalam ketahanan pangan dan sebagai edukasi gizi untuk pencegahan masalah Kesehatan jangka panjang

2. INOVASI DAERAH DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DAN PERMASALAHAN SOSIAL

1) BAKUL TASIK

Inovasi Bakul Tasik bertujuan meningkatkan akses pangan bagi kelompok rentan di Kota Tasikmalaya melalui pemanfaatan makanan layak konsumsi dari sektor perhotelan dan usaha kuliner secara sistematis dan berkelanjutan. Output yang diharapkan:

1. Terdistribusinya minimal 1.000 paket makanan per bulan secara rutin.
2. Terlibatnya minimal 20 mitra hotel, restoran, dan pelaku usaha makanan sebagai donatur aktif.

Outcome yang diharapkan:

1. Penurunan tingkat kekurangan pangan pada kelompok sasaran sebesar 30% dalam 12 bulan.
2. Peningkatan kesadaran sosial pelaku usaha dan masyarakat terhadap pengelolaan pangan secara bertanggung jawab.
3. Munculnya kolaborasi baru dalam penanganan isu sosial berbasis makanan.

Program Bakul Tasik dilaksanakan melalui mekanisme pengumpulan makanan dari hotel, restoran, dan pelaku usaha makanan setiap hari atau sesuai jadwal. Makanan dikumpulkan oleh tim relawan (Tagana, TKSK, PSM, PPKH) yang sudah mendapat pembinaan teknis, kemudian langsung disalurkan kepada penerima manfaat berdasarkan data verifikasi dan DTKS. Program ini bersifat dinamis dan adaptif dengan mempertimbangkan waktu, lokasi, dan potensi mitra yang tersedia.

2) MESIN WAKTU (Melawat Sepuh-Sepuh Idaman Sebagai Wujud Pelayanan Kasih Yang Terpadu Dan Terjangkau)

Inovasi MESIN WAKTU dikemas dengan layanan *Home care* dan *Home Visite* yang juga membawa misi kemanusiaan berupa bantuan sosial untuk kepentingan lansia. selain untuk mengoptimalkan pelayanan khusus geriatrik di RSUD dr. Soekardjo, Inovasi MESIN WAKTU juga berkontribusi memberikan manfaat dalam peningkatan mutu pelayanan kepada lansia serta menyiapkan lansia yang sehat, mandiri dan produktif. Inovasi MESIN WAKTU mulai dilaksanakan pada Mei 2023.

MESIN WAKTU bertujuan untuk Meningkatkan derajat kesehatan dan mutu pelayanan usia lanjut, sebagai bagian proses deteksi dini dan peningkatan kesehatan serta pencegahan penyakit lansia melalui pendekatan komprehensif agar mencapai masa tua yang bahagia juga berdaya guna dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.

Renstra RSUD dr. Soekardjo tentang Peningkatan Kualitas pelayanan publik dengan indikator Promosi Kesehatan internal eksternal dan indeks kepuasan masyarakat telah selaras dengan Inovasi Mesin Waktu, terlihat dari hasil IKM yang meningkat dan edukasi yang terlaksana dengan baik.

3. INOVASI DALAM PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA

1) KITA PANTAU DIA (Kegiatan Terpadu Pemantauan Kesehatan Ibu Dan Anak)

Puskesmas Sukalaksana membentuk Inovasi KITA PANTAU DIA (Kegiatan Terpadu Pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak) dengan tujuan mencegah kematian Ibu dan Anak dengan layanan Gemancik (Gerakan Masyarakat Cinta Ibu dan Anak), layanan USG *mobile,* Jebol Ladu (Jemput Bola Ibu Hamil Pemeriksaan Lab Di Posyandu, Temu Psikolog, SETIA (Skrining PTM Ibu dan Anak), Katasik (Kader Laktasi Asi Ekslusif), Kupas Tuntas (Kunjungan Ibu Nifas dan Neonatus), Si Badut Mata Elang (Sasaran Imunisasi Bayi Balita).

PANTAU DIA (Kegiatan Terpadu Pemantauan Kesehatan Ibu dan Anak) bekerja dengan sistem layanan terpadu yang responsif, implementatif, dan kolabooratif. Layanan ini memungkinkan ibu dan anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif.

2) SARANG WALET (Sambongpari Perang Lawan dan Kendalikan Diabetes)

Inovasi SARANG WALET diluncurkan oleh Puskesmas Sambongpari dengan harapan dapat meningkatkan jumlah penderita diabetes yang terlayani sesuai standar secara komprehensif, berkualitas, dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya komplikasi dan kematian akibat diabetes.

Inovasi SARANG WALET bertujuan untuk meningkatkan angka pencegahan dan pengendalian penyakit diabetes di wilayah kerja Puskesmas Sambongpari secara komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan.

3) GENTING (Gerakan Masyarakat Cegah Stunting)

Inovasi GENTING bertujuan menurunkan prevalensi stunting pada Balita di wilayah kerja Puskesmas Cihideung dengan memprioritaskan kegiatan pemberdayaan masyarakat menggunakan pendanaan swadaya masyarakat

Inovasi GENTING bekerja melalui kegiatan terpadu yang responsif, implementatif, dan kolaboratif. Kegiatan ini dengan memprioritaskan Pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan anggaran swadaya masyarakat, Dana sehat RW, Donator-donatur yang ada di ke RW-an. Dari pihak swasta yaitu RS TMC, RS UMMI, Klinik Natasya, Gereja.

4) SIAP NO DIABETES (Sistem Aplikasi Pengingat Minum Obat Pada Pasien Degeneratif Dengan Aman, Benar Dan Sehat)

Inovasi **SIAP NO DIABETES** (**Sistem Aplikasi Pengingat Minum Obat pada Pasien Degeneratif dengan Aman, Benar dan Sehat)** ini mengedepankan kesadaran dan peran aktif keluarga mengenai pengingat minum obat secara benar, aman dan pola hidup yang sehat.

Inovasi SIAP NO DIABETES bertujuan meningkatkan Kesadaran Pasien/keluarga dalam pemahaman dan kepatuhan minum obat serta menurunkan nilai kadar gula dan tekanan darah.

Inovasi SIAP NO DIABETES bekerja melalui sistem layanan terpadu yang responsive, implementatif, dan kolaboratif. Layanan ini memungkinkan pasien/keluarga pasien untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan minum obat teratur.

5) JIWA SEDATIF PANTO TOBAT STABIL (Jiwa Sehat Dengan Administrasi Tertib Dan Produktif, Pemantauan Obat Serta Pemberdayaan Odgj Stabil)

Inovasi ini merupakan kegiatan yang komperhensif mulai dari mendata kelengkapan administrasi kependudukan, pembuatan KIS, pemantauan obat dan pemberdayaan ODGJ stabil bersama *stakeholder* lainnya demi ODGJ menjadi mandiri dan produktif.

Inovasi Jiwa Sedatif Panto Tobat Stabil merupakan layanan Komprehensif bersama *stakeholder* lainnya untuk penanganan ODGJ berat mulai dari mengurus KTP, KIS, akses pelayanan kesehatan, pemantauan minum obat, dan pemberdayaan ODGJ berat stabil. Mereka di berikan akses untuk menjadi mandiri dan produktif dengan pemberian pengarahan lapangan pekerjaan, pelatihan dan pemberian modal usaha sesuai kebutuhan.

a. Pelaporan kasus: Menerima laporan ODGJ berat kasus baru dari masyarakat melaluai berbagai kanal termasuk laporan kader, whats app puskesmas dan media sosial seperti facebook dan instagram puskesmas.
b. Penjangkauan dan Tatalaksana: Kunjungan lapangan bersama tim kerja untuk penatalaksanaan ODGJ, pengecekan kelengkapan keadministrasian kependudukan dan jaminan kesehatan.
c. Pelayananan dan Penanganaan kasus: ODGJ berat mendapatktan pelayanan kesehatan, administrasi kependudukan dan jaminan kesehatan.
d. Reintegrasi sosial dan Pemberdayaan: Setelah ODGJ berat stabil, mereka di berikan akses untuk menjadi mandiri dan produktif dengan

pengarahan lapangan pekerjaan, pelatihan dan pemberian modal usaha sesuai kebutuhan.

4. INOVASI DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

1) GEDONG RESIK

Kegiatan Gedong Resik penanganan sampah dilakukan dengan benar mulai dari sumbernya, dengan melibatkan masyarakat yaitu dengan memberikan edukasi dan mengajak kepada masyarakat untuk menerapkan hidup sehat di antaranya mengumpulkan sampah secara terpilah dari sumbernya. Tim Gedong Resik akan menyalurkan sampah yang terkumpul kepada tempat-tempat sesuai jenis sampahnya, yaitu ke bank sampah (untuk sampah anorganik), ke penggiat maggot (untuk sampah organik), dan ke pengepul (untuk jelantah). Selanjutnya sampah tersebut dikonversi menjadi dana yang kemudian dana tersebut kembali ke masyarakat yang digunakan untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup. Dengan begitu, masyarakat telah melakukan donasi dengan sampah dan berkontribusi pada pembangunan di Kota Tasikmalaya. Untuk lebih memudahkan dalam pelayanan pengangkutan sampah dari masyarakat, maka dilengkapi dengan sistem informasi (aplikasi) yang dapat diakses oleh masyarakat.

Dari kegiatan Gedong Resik ini diharapkan target pengurangan sampah Kota Tasikmalaya sebesar 30% dapat tercapai. Adapun rencana lokasi (CPCL) dari kegiatan ini tersebar di 69 kelurahan di wilayah Kota Tasikmalaya.

Selanjutnya manfaat yang diharapkan dari kegiatan ini adalah terwujudnya kesadaran masyarakat akan pengelolaan sampah, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan hidup, melatih masyarakat berbagi dan bersedekah, adanya program pelatihan pemberdayaan masyarakat, serta dana dari hasil pengumpulan & penjualan sampah digunakan untuk kepentingan pengelolaan lingkungan hidup.

2) KOMPOS JUARA

Kegiatan Kompos Juara: Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpadu Dengan Produksi Kompos Cepat dan Pengolahan Lumpur Tinja Rendah Karbon di IPLT Singkup dilaksanakan dengan maksud sebagai upaya dalam mitigasi terhadap dampak perubahan iklim yang diakibatkan oleh emisi gas rumah kaca melalui pembangunan rendah karbon dan berketahanan iklim pada sektor air limbah domestik dan energi. Tujuannya untuk menurunkan emisi gas rumah kaca pada sektor pengelolaan limbah domestik dan Meningkatkan cakupan pelayanan air limbah domestik. Keunggulan dari inovasi pada kegiatan ini adalah pemanfaatan teknologi dalam untuk pengolahan air limbah domestik di IPLT untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Teknologi yang digunakan dalam kegiatan ini berupa DAF (Dissolved Air Flotation) sebagai pretreatment untuk mengurangi beban polutan lumpur tinja sebelum diolah di IPLT, mesin Kompos BCM-100 GEC untuk mengolah lumpur hasil olahan IPLT Singkup menjadi Kompos secara cepat (24 jam) dan penggunaan tenaga surya (solar cell) sebagai sumber energi.

Indikator kinerja (output) kegiatan ini adalah terbangun dan beroperasinya IPLT Singkup dengan teknologi DAF berkapasitas 5 m3/jam,

beroperasinya produksi Kompos Juara dengan kapasitas 100 kg/hari dengan menggunakan sumber energi tenaga surya. Kegiatan ini berlokasi di IPLT Singkup Kota Tasikmalaya. Dengan hal ini diharapkan penggunaan energi lebih efisien, berkontribusi terhadap penurunan emisi gas rumah kaca, dan berkontribusi terhadap pemulihan lahan pertanian melalui pemanfaatan kompos hasil olahan IPLT sehingga meningkatkan produktifitas lahan pertanian, meningkatkan kinerja IPLT, dan meningkatnya akses sanitasi aman.

3) PENTAS BERSERI (Panglayungan Bersedekah Sampah Setiap Hari)

Inovasi Panglayungan Berseri dikembangkan karena keadaan sampah yang darurat berwal dari lingkungan kerja sekitar dan masyarakat yang masih kurang akan pentingnya pemilahan sampah. Pengelolaan sampah seiring dengan pertumbuhan penduduk dan perkembangan kota telah menjadi agenda permasalahan utama yang dihadapi oleh hampir seluruh perkotaan di seluruh Indonesia tidak terkecuali di UPTD Puskesmas Panglayungan Kota Tasikmalaya. Permasalahan pengelolaan sampah tidak akan pernah dapat diselesaikan jika hanya bertumpu pada pemerintah saja tanpa ada keterlibatan dari masyarakat dan lingkungan sekitar sebagai sumber penghasil sampah itu sendiri. Oleh karena itu, pengolahan sampah perlu dilakukan secara komprehensif dan terintegrasi dengan inovasi – inovasi baru yang lebih memadai ditinjau dari segala aspek, baik aspek sosial, aspek ekonomi maupun aspek teknis dari hulu sampai ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat sehingga penanganan sampah perlu dilakukan sejak dari sumbernya. Timbulan sampah jika tidak dikelola dan ditangani secara baik dan berkelanjutan akan berdampak terhadap kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya serta dapat menyebabkan kerusakan lingkungan hidup. Kondisi ini menuntut agar masyarakat bisa meminimalisir cemaran lingkungan akibat sampah. Karena itu UPTD Puskesmas Panglayungan brinisiatif meluncurkan inofasi "PANGLAYUNGAN BERSERI" Panglayungan bersedekah Sampah Setiap hari dan mempunyai selogan "Sampahku Sedekahku!"

Inovasi "PANGLAYUNGAN BERSERI" terdiri dari:

1. Pembatasan timbunan sampah
2. Pendauran ulang sampah
3. Pemilahan sampah
4. Pengumpulan sampah dengan cara dimasukan ke dalam tempat sampah yang nantinya sudah di sediakan dan diberi selogan "Sampahku, Sedekahku!"
5. Pengangkutan sampah
6. Pengolahan sampah
7. Pemerosesasan akhir sampah dengan cara dijual dan dimanfaatkan kembali hasil penjualan sampah tersebut.
8. Hasil sampah yang dijual nanti akan di gunakan untu kegiatan sosial seperti "Sedekah jumat" yang nantinya akan dibagikan ke orang yang membutuhkan.

5. INOVASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

1) SIPANGLING (Sistem Pelayanan Pengajuan Akta Kelahiran Secara Daring)

Dokumen Kependudukan sebagaimana termaksud dalam Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Terkait dengan hal tersebut di atas, sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 bahwa Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan Instansi Pelaksana di lingkungan Pemerintah Kota Tasikmalaya yang diberikan kewenangan dalam menyelenggarakan Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerbitkan dokumen administrasi kependudukan sebanyak 24 (dua puluh empat) jenis, yang dikelompokan dalam 4 (empat) kategori, yaitu sebagai berikut:

1. Pencatatan Biodata Penduduk, 1 jenis;
2. Berupa Kartu, 3 jenis;
3. Berupa Surat, 14 jenis;
4. Berupa Akta, 6 jenis.

Diperlukan suatu inovasi layanan yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan baik dari sisi pola layanan yang selama ini berbasis konvensional (pemohon datang langsung ke Disdukcapil/Kecamatan) maupun dari produk layanan yang didapat. Adapun Inovasi dimaksud diarahkan melalui pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi sehingga berbasis online serta pola layanan satu berkas pengajuan mendapatkan 2 produk yaitu kartu keluarga dan akta kelahiran (layanan 2 in 1). Selanjutnya nama inovasi layanan dimaksud adalah "***Sistem Pelayanan Pengajuan Akta Kelahiran Secara Daring***" disingkat **SIPANGLING.**

2) PROTASIK Ver.2.0

Inovasi PROTASIK Ver. 2.0 bertujuan meningkatkan akuntabilitas pemanfaatan barang milik daerah berupa tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya.

Inovasi PROTASIK Versi 2.0 diimplementasikan melalui kolaborasi seluruh stakeholders. Inovasi ini memungkinkan informasi pemanfaatan tanah milik Pemerintah Kota Tasikmalaya diperoleh secara transparan dan akuntabel.

3) TEBAR JALA DARAH UTDRS

UTDRS UPTD Khusus RSUD dr Soekardjo melakukan optimalisasi dalam merekrutmen donor darah sukarela melalui program inovasi "Tebar Jala Darah", yakni program jemput bola yang terencana dan terjadwal mendatangi berbagai lokasi untuk menjaring dan mengedukasi calon pendonor. Inovasi ini mengutamakan pelayanan ramah, nyaman, aman, profesional, serta melibatkan berbagai pihak dalam memperluas jejaring

donor darah sukarela di Kota Tasikmalaya. Program inovasi "Tebar Jala Darah mulai dilaksanakan sejak 12 April 2023.

Inovasi "Tebar Jala Darah" UTDRS bertujuan meningkatkan jumlah donor darah sukarela dan rutin untuk memenuhi kebutuhan darah di rumah sakit. Inovasi dilaksanakan menggunakan sistem jemput bola terencana dan terjadwal mendatangi berbagai lokasi untuk menjaring dan mengedukasi calon pendonor darah

4) STUDIO INOVASI DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Studio inovasi daerah Kota Tasikmalaya merupakan manajemen inovasi terpadu yang berfokus untuk menumbuh kembangkan ekosistem inovasi di Kota Tasikmalaya. Studio ini merupakan wadah diskusi, konsultasi, pendampingan, serta wahana evaluasi untuk meningkatkan kualitas inovasi daerah sehingga berkontribusi terhadap akselerasi pembangunan daerah Kota Tasikmalaya dan meningkatkan indeks inovasi daerah Kota Tasikmalaya.

Tujuan Studio Inovasi Kota Tasimalaya diantaranya:

a. Studio Inovasi Daerah ditujukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dengan menghasilkan solusi yang berbasis pada masalah yang dihadapi oleh masyarakat sehari-hari, studio ini berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. Proyek-proyek yang dihasilkan dapat mencakup inisiatif yang berfokus pada berbagai bidang.
b. Membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan adalah salah satu tujuan strategis Studio Inovasi Daerah. Ini melibatkan penciptaan kemitraan antara berbagai pemangku kepentingan di daerah, termasuk pemerintah, masyarakat, dunia usaha, media dan akademisi. Dengan bekerja sama, mereka dapat menciptakan platform yang mendukung pengembangan ide-ide inovatif serta mengurangi risiko kegagalan dalam implementasi.
c. Studio Inovasi Daerah bertujuan untuk meningkatkan daya saing daerah melalui pengembangan produk dan jasa yang inovatif. Melalui pelatihan dan pendampingan, pelaku usaha lokal dapat memanfaatkan teknologi baru dan metode bisnis yang lebih efisien. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kontribusi sektor UMKM terhadap perekonomian daerah
d. Sumber daya lokal sering kali tidak dimanfaatkan secara optimal. Salah satu tujuan dari Studio Inovasi Daerah adalah untuk mengeksplorasi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya tersebut. Dengan pendekatan yang kreatif, studio ini dapat menemukan cara baru dalam pemanfaatan sumber daya yang ada, baik itu berupa sumber daya alam maupun sumber manusia.
e. Sebagai wadah diskusi, konsultasi, pendampingan, serta wahana evaluasi untuk meningkatkan kualitas inovasi sehingga menjadi lebih baik.
f. Sarana hub innovation untuk inovasi pemerintah daerah, pihak swasta/komunitas, akademisi, media maupun masyarakat.

5) SISTEM INFORMASI PERIZINAN KOTA TASIKMALAYA (SIPENTAS)

Sistem Informasi Perizinan Kota Tasikmalaya yang selanjutnya disebut Sipentas adalah Inovasi Sistem Informasi Perizinan Kota Tasikmalaya yang merupakan aplikasi berbasis secara online untuk menyelenggarakan pengurusan perizinan dan/atau nonperizinan. Kondisi

sebelum ada SIPENTAS pemohon harus mengajukan dulu rekomendasi ke dinas teknis (rekomendasi bagian dari persyaratan) kemudian mengajukan lagi ke DPMPTSP untuk diterbitkan izinnya. Dengan SIPENTAS yang sekarang pemohon tidak perlu ke dinas teknis untuk mengajukan rekomendasi, tetapi langsung melalui SIPENTAS (rekomendasi bagian dari alur) sehingga pemohon tidak perlu lagi datang ke dinas teknis ataupun DPMPTSP, cukup mengajukan melalui aplikasi SIPENTAS dan permohonan akan berjalan otomatis melalui sistem hingga terbit SK Izin. Setelah terbit SK izin pemohon dapat langsung mendownload secara mandiri SK tersebut dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

BAB V
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Usulan rencana kebutuhan pembangunan untuk tahun 2026 yang tertuang dalam program dan kegiatan disusun dengan sumber pendanaan dari dana APBN, APBD Provinsi dan APBD Kota serta sumber lainnya. Penyusunan rencana program dan kegiatan dilakukan melalui pendekatan perencanaan komprehensif yang meliputi pendekatan teknokratis, politik, atas bawah (*top down*), bawah atas (*bottom up*) dan partisipatif melalui serangkaian mekanisme Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, kota, provinsi dan nasional, kemudian diverifikasi dan disepakati sebagai usulan prioritas program dan kegiatan untuk tahun 2026.

Rencana program dan kegiatan dalam RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 sebanyak 193 program, 638 kegiatan dan 2.682 sub kegiatan dengan total anggaran yang direncanakan sebesar Rp.1.770.742.958.130,00. Rekapitulasi rencana program, kegiatan, sub kegiatan serta pendanaan indikatif berdasarkan Perangkat Daerah tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 5.1.
Rekapitulasi Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan
serta Pendanaan Indikatif Tahun 2026

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Dinas Pendidikan	6	18	156	491.356.657.506,00
2	Dinas Kesehatan	5	25	114	466.403.241.026,00
3	Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	10	23	73	111.806.908.266,00
4	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman	5	15	39	13.584.827.000,00
5	Satuan Polisi Pamong Praja	2	11	74	16.203.850.690,00
6	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	3	16	81	10.377.394.602,00
7	Dinas Sosial	6	16	72	16.058.926.000,00
8	Dinas Tenaga Kerja	5	19	80	7.870.666.800,00
9	Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan	13	39	161	26.401.736.510,00
10	Dinas Lingkungan Hidup	10	19	65	43.003.683.025,00
11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	5	17	53	10.650.341.915,00
12	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	10	31	107	14.931.437.000,00
13	Dinas Perhubungan	2	17	78	41.499.626.450,00

No	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Jumlah Kegiatan	Jumlah Sub Kegiatan	Pagu Indikatif
14	Dinas Komunikasi dan Informatika	5	14	63	16.787.728.000,00
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	17	33	165	23.805.013.343,00
16	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	6	14	61	7.026.097.000,00
17	Dinas Kepemudaan, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata	11	26	72	21.213.675.000,00
18	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah	6	18	84	6.108.860.000,00
19	Sekretariat Daerah	3	20	83	83.420.882.839,00
20	Sekretariat DPRD	2	17	71	64.674.689.600,00
21	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah	4	18	79	16.083.423.007,00
22	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	3	13	82	46.365.616.696,00
23	Badan Pendapatan Daerah	2	9	50	28.680.462.684,00
24	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	3	15	98	13.226.607.000,00
25	Inspektorat	3	12	41	21.857.834.171,00
26	Kecamatan Cihideung	4	15	51	12.217.166.380,00
27	Kecamatan Cipedes	4	15	52	9.654.518.605,00
28	Kecamatan Tawang	4	15	52	11.221.185.154,00
29	Kecamatan Indihiang	4	15	53	11.817.482.816,00
30	Kecamatan Kawalu	4	15	49	18.699.466.950,00
31	Kecamatan Cibeureum	4	15	39	15.799.589.909,00
32	Kecamatan Tamansari	4	15	53	14.101.141.846,00
33	Kecamatan Mangkubumi	4	15	54	16.133.732.573,00
34	Kecamatan Bungursari	4	15	51	12.682.933.156,00
35	Kecamatan Purbaratu	4	15	54	10.926.824.611,00
36	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	6	13	72	18.088.730.000,00
JUMLAH		**193**	**638**	**2.682**	**1.770.742.958.130,00**

Rancangan pagu sebagaimana tertuang pada tabel (5.1) diatas, telah memuat Belanja Pegawai, belanja *fixed cost*, prioritas perangkat daerah, belanja hibah, belanja bantuan keuangan dan belanja prioritas lainnya. Sedangkan untuk

rincian program, kegiatan, dan subkegiatan pada setiap Perangkat Daerah Kota Tasikmalaya beserta pagu pendanaannya dijabarkan pada matriks Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2026 secara terperinci disajikan dalam Lampiran 1.

Penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas disusun dalam rangka menjawab permasalahan dan mendukung pencapaian target sasaran pembangunan melalui prioritas dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD Tahun 2026. Selain itu penyusunan rencana program dan kegiatan prioritas daerah dilaksanakan guna mendukung pencapaian prioritas pembangunan nasional sebagaimana telah dijelaskan pada bab IV dan pencapaian prioritas pembangunan daerah Provinsi Jawa Barat tahun 2026.

Pada tahun 2026, Kota Tasikmalaya menjalankan 7 Program Prioritas Pembangunan, yang terdiri dari beberapa Kegiatan Prioritas yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sebagaimana tertuang pada tabel berikut.

Tabel 5.2
Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Kota Tasikmalaya
Tahun 2026

Program Prioritas	Pagu Indikatif (Rp.)	Perangkat Daerah
TASIK GEMAS	104.911.313.000,00	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
TASIK PINTAR	15.440.000.000,00	Dinas Sosial, Dinas Pendidikan
TASIK RELIGIUS	17.662.100.000,00	Sekretariat Daerah (Bagian Kesejahteraan Rakyat)
TASIK PELAK	10.197.865.810,00	Dinas KUMKM PERINDAG, DKP3, DISPORABUDPAR, Sekretariat Daerah, Dinas Tenaga Kerja, BPKAD
TASIK MELAYANI	17.200.000.000,00	BKPSDM, Dinas PUTR, DISKOMINFO, Disdukcapil, BAPENDA
TASIK NYAMAN	54.900.000.000,00	Dinas PUTR, Dinas Perhubungan, DISPERAWASKIM
TASIK RESIK	22.500.000.000,00	Dinas Lingkungan Hidup

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, diolah 2025

Untuk mencapai tema pembangunan pada tahun 2026, indikator-indikator pembangunan didukung oleh program dan anggaran sebagai berikut:

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

   Pada tahun 2026 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 6,34 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.3.
Program dan Anggaran terkait Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No.	Program	Anggaran (Rp)
1	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	740.000.000,00
2	Program Penempatan Tenaga Kerja	1.011.592.800,00
3	Program Hubungan Industrial	625.000.000,00
	Total	**2.376.592.800,00**

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

2. Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Pada tahun 2026 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 5,45 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.4.
Program dan Anggaran terkait Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.000.000,00
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2.000.000,00
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2.000.000,00
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	248.535.000,00
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.593.965.000,00
6	Program Pengembangan UMKM	752.000.000,00
7	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000,00
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.363.835.530,00
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	338.000.000,00
10	Program Pengembangan Ekspor	1.193.251.993,00
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	152.000.000,00
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.391.500.000,00
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1.000.000,00
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	32.000.000,00
15	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	231.000.000,00
16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.363.835.530,00
17	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000,00
18	Program Pelayanan Penanaman Modal	140.000.000,00
19	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	20.000.000,00
20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	105.000.000,00
21	Program Pemasaran Pariwisata	900.000.000,00
22	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.452.500.000,00
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
24	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	483.000.000,00
25	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
26	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	483.000.000,00
	Total	**28.051.423.053,00**

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

3. Kemiskinan

Pada tahun 2026 angka kemiskinan Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 9,47 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.5.
Program dan Anggaran terkait Kemiskinan
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat (Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat)	43.900.459.010,00
2	Program Pemberdayaan Sosial	745.000.000,00
3	Program Rehabilitasi Sosial	6.280.000.000,00
4	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	810.000.000,00
5	Program Penanganan Bencana	2.670.000.000,00
6	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	200.000.000,00
7	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
8	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	4.747.500.000,00
9	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	926.000.000,00
10	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.452.500.000,00
11	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan	4.183.535.000,00
12	Program Kawasan Permukiman	3.301.071.505,00
13	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh	1.680.000.000,00
	Total	**74.231.565.515,00**

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

4. Indeks Gini

Pada tahun 2026 Indeks Gini Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 0,350 poin. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.6.
Program dan Anggaran terkait Indeks Gini
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	2.000.000,00
2	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	2.000.000,00
3	Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	2.000.000,00
4	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	248.535.000,00
5	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)	1.593.965.000,00
6	Program Pengembangan UMKM	752.000.000,00
7	Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan	10.000.000,00
8	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.363.835.530,00
9	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting	338.000.000,00
10	Program Pengembangan Ekspor	1.193.251.993,00
11	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	152.000.000,00
12	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri	1.391.500.000,00
13	Program Pengendalian Izin Usaha Industri	1.000.000,00

No	Program	Anggaran (Rp.)
14	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	32.000.000,00
15	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen	231.000.000,00
16	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan	6.363.835.530,00
17	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	120.000.000,00
18	Program Pelayanan Penanaman Modal	140.000.000,00
19	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	20.000.000,00
20	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	105.000.000,00
21	Program Pemasaran Pariwisata	900.000.000,00
22	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	2.452.500.000,00
23	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
24	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	483.000.000,00
25	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
26	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	483.000.000,00
	Total	**28.051.423.053,00**

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

5. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Pada tahun 2026 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 76,99 poin. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.7.
Program dan Anggaran terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pengelolaan Pendidikan	121.826.166.739,00
2	Program Pengembangan Kurikulum	30.000.000,00
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	6.628.460.000,00
4	Program Pengembangan Bahasa Dan Sastra	87.500.000,00
5	Program Pembinaan Perpustakaan	553.000.000,00
6	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.376.907.979,00
7	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	1.522.577.000,00
8	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.278.200.259,00
9	Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian	200.000.000,00
10	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
11	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	483.000.000,00
12	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	2.335.500.000,00
13	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan	483.000.000,00
14	Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	1.352.500.000,00
	Total	**278.492.311.977,00**

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

6. Prevalensi Stunting

Pada tahun 2026 Prevalensi Stunting Kota Tasikmalaya ditargetkan dapat mencapai 17,02 persen. Program dan anggaran yang direncanakan untuk mendukung pencapaian target tersebut dituangkan pada tabel berikut.

Tabel 5.8.
Program dan Anggaran terkait Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No	Program	Anggaran (Rp.)
1	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	137.376.907.979,00
2	Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB)	3.850.538.000,00
3	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	4.574.800.000,00
4	Program Peningkatan Kualitas Keluarga	435.000.000,00
5	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	12.025.000.000,00
6	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah	1.594.400.000,00
7	Program Kawasan Permukiman	3.301.071.505,00
	Total	**163.157.717.484,00**

Sumber: Bappelitbangda, diolah 2025

BAB VI
KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Penetapan indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pembangunan daerah pada akhir periode perencanaan. Indikator ini merupakan akumulasi pencapaian indikator outcome atau impact dari pelaksanaan sasaran, program dan kegiatan pembangunan daerah. Penetapan indikator dan target kinerja didasarkan pada hasil evaluasi capaian kinerja pemerintahan daerah masa lalu dan proyeksi yang disertai perhitungan atas hasil pelaksanaan program dan kegiatan kedepan.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang perencanaan pembangunan daerah dan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, penetapan indikator kinerja daerah dibagi kedalam dua kelompok, yaitu Indikator Kinerja Utama (IKU) Daerah dan Indikator Kinerja Daerah (IKD). IKU Daerah merupakan gambaran ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan IKD merupakan indikator kinerja pemerintahan daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Kepala Daerah dan Kepala Perangkat Daerah.

Selain penetapan IKU Daerah dan IKD, untuk menggambarkan kemajuan pembangunan daerah digunakan Indikator Makro Pembangunan sebagaimana disajikan pada table 6.1. berikut.

Tabel 6.1.
Proyeksi Capaian Indikator Makro Kota Tasikmalaya Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	Kondisi Awal (2024)	TAHUN	
				2025	2026
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	76,03	76,48	76,99
	Rata-rata Lama Sekolah	Tahun	9,63	9,67	9,79
	Harapan Lama Sekolah	Tahun	13,50	13,51	13,53
	Usia Harapan Hidup	Tahun	75,31	75,56	75,81
	Pengeluaran per Kapita	Juta Rp	11,43	11,576	11,745
2.	PDRB Perkapita	Juta Rp	39,45	39,50-41,61	43,00
3.	PDRB ADH Berlaku	Triliyun Rp	29,61	31,21-31,43	32,96
4.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	5,22	5,43-6,17	5,45
5.	Inflasi	%	1,94	2,30	2,29
6.	Indeks gini	Poin	0,359	0,348-0,405	0,350
7.	Tingkat Kemiskinan	%	11,1	9,20-10,16	9,47
8.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,49	6,37 - 6,45	6,34
9.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	1,05	2,17	2,36

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029, Berita Acara Kesepakatan Target Indikator Makro Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2026

Tabel 6.2.
Kesesuaian Indikator Kinerja Utama RKPD Tahun 2026
dengan RPJMD Tahun 2025-2029

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Indikator	**Satuan**	**Indikator**	**Satuan**
1.	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia	Poin
2.	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun
3.	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%
4.	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%
5.	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	Rata-Rata lama sekolah	Tahun
6.	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah	Tahun
7.	Tingkat Kemiskinan	%	Tingkat Kemiskinan	%
8.	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%
9.	Persentase pelestarian kebudayaan Kota Tasikmalaya	%	Persentase pelestarian kebudayaan Kota Tasikmalaya	%
10.	Persentase Intensitas Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	%	Persentase Intensitas Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	%
11.	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin
12.	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin
13.	Persentase Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan	%	Persentase Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan	%
14.	Indeks Daya Saing Daerah	Poin	Indeks Daya Saing Daerah	Poin
15.	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
16.	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini	Poin
17.	Inflasi	%	Inflasi	%
18.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin
19.	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%
20.	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Indikator	**Satuan**	**Indikator**	**Satuan**
21.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%
22.	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB Adhb)	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB Adhb)	%
23.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
24.	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin
25.	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin
26.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin
27.	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO_2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO_2 eq/2010 IDR Milyar
28.	Indeks Risiko Bencana	Poin	Indeks Risiko Bencana	Poin

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Tabel 6.3.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Utama Kota Tasikmalaya Tahun 2026

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2024)	Target		Penanggung Jawab
					2025	2026	
1	Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,03	76,48	76,99	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas KUKM Perindag, DKP3
2	Umur Harapan Hidup (UHH)	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,31	75.56	75.81	Dinas Kesehatan
3	Prevalensi Stunting (pendek dan sangat pendek) pada balita	%	Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	19,60	18,31	17,02	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A, Dinas PUTR, Dinas Perawaskim
4	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,28	100	100	Dinas Kesehatan
5	Rata-Rata lama sekolah	Tahun	Rata-Rata lama sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	Dinas Pendidikan
6	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13.50	13,51	13,53	Dinas Pendidikan
7	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	11,1	9,20-10,16	9,47	Dinas Sosial
8	Persentase Literasi Al-Qur'an (SD/SMP)	%	Jumlah murid SD/SMP yang bisa membaca Al Quran/Jumlah seluruh murid SD/SMP yang beragama islam x 100	96,53	97,73	97,84	Dinas Pendidikan
9	Persentase pelestarian kebudayaan Kota Tasikmalaya	%	(persentase program pengembangan kebudayaan, sejarah dan cagar budaya / jumlah program pelestarian kebudayaan) x 100	13,46	24,91	35,80	Disporabudpar

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2024)	Target		Penanggung Jawab
					2025	2026	
10	Persentase Intensitas Koordinasi Kerukunan Umat Beragama	%	(jumlah koordinasi antar umat beragama/ jumlah koordinasi) x 100	100	100	100	Bakesbangpol
11	Indeks Pembangunan Keluarga	Poin	Indeks Pembangunan Keluarga yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	60,51	61,21	61,91	DPPKBP3A
12	Indeks Ketimpangan Gender (IKG)	Poin	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,354	0,319	0,284	DPPKBP3A
13	Persentase Partisipasi Pemuda dan Olahraga dalam Pembangunan	%	(Persentase partisipasi pemuda dan prestasi olahraga / jumlah program pembangunan kepemudaan dan olahraga) x 100	29,01	29,02	29,11	Disporabudpar
14	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Persentase Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,22	5,43-6,17	5,45	Dinas KUKM Perindag, DKP3, DPMPTSP
15	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	0,359	0,348-0,405	0,350	Dinas Sosial
16	Inflasi	%	Persentase inflasi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	1,94	2,3	2,29	Sekretariat Daerah, Dinas KUKM Perindag, DKP3
17	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	Poin	Indeks Ekonomi Hijau Daerah pada Pilar Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi Jawa Barat	58,46	58,54	59,78	DKP3
18	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan dalam PDRB	%	Kontribusi Sektor Industri, Jasa dan Perdagangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	13,41	13,00	12,95	Dinas KUKM Perindag, Disporabudpar
19	Persentase Penerapan Ekonomi Syariah	%	(Jumlah Lembaga Keuangan Syariah Per Jumlah Total Lembaga Keuangan Dikali 100%) ditambah (jumlah produk ikm bersertifikat halal per jumlah produk ikm dikali 100%) ditambah (jumlah hotel menerapkan prinsip Syariah perjumlah hotel dikali 100%)/3	N/A	36,15	36,84	Sekretariat Daerah

NO.	INDIKATOR	SATUAN	FORMULASI	Kondisi Awal (2024)	Target		Penanggung Jawab
					2025	2026	
20	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,31	4,61	4,44	DKP3
21	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) (% PDRB Adhb)	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	30,65	32,79	32,85	DPMPTSP
22	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Penangguran terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,49	6,37 - 6,45	6,34	Dinas Tenaga Kerja
23	Indeks Reformasi Birokrasi	Poin	Hasil evaluasi reformasi birokrasi yang dikeluarkan oleh Kementerian PAN-RB	85,16	86,53	87,88	Sekretariat Daerah
24	Indeks Inovasi Daerah	Poin	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri	49,46	46,70	55,00	Bappelitbangda
25	Indeks Infrastruktur Daerah	Poin	Hasil analisis Tim Penyusun Tingkat Daerah*	N/A	72,59	73,60	Dinas PUTR, Dinas Perawaskim, Dinas Perhubungan
26	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Daerah	Poin	IKLH = (0,376 x IKA) + (0,405 x IKU) + (0,219 x IKL)	58,52	61,62	61,79	Dinas Lingkungan Hidup
27	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,05	2,17	2,36	Dinas Lingkungan Hidup
28	Indeks Risiko Bencana	Poin	Tingkat krbencanaan dinilai berdasarkan komponen penyusunannya yaitu bahaya, keterpaparan dan kapasitas pemerintah serta komonitas dalam menghadapi bencana dan dikeluarkan oleh BNPB	97,13	93,6	90,1	BPBD

Sumber : Hasil Analisis Bappelitbangda, diolah 2025.

Tabel 6.4.

Kesesuaian Indikator Kinerja Kunci RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029 dengan RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI				
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Indeks Ketahanan Pangan	Angka
2	Prevelensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan	%	Prevelensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan	%
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh Kapita	Konsumsi Listrik Per Kapita	kwh Kapita
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%
5	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	Indeks	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	Indeks
6	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO_2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO_2 eq/2010 IDR Milyar
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	Indeks Resiko Bencana	Poin
9	Indeks Ketahanan daerah	%	Indeks Ketahanan daerah	%
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Laju Pertumbuhan Penduduk	%
11	Rasio Penduduk	%	Rasio Penduduk	%
12	Kepadatan Penduduk	Orang per Km^2	Kepadatan Penduduk	Orang per Km^2
ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT				
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi				
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%
2	Tingkat Kemiskinan	%	Tingkat Kemiskinan	%
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	PDRB Per Kapita	Rp Juta
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka	%
5	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini	Poin
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Poin
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup	Tahun
8	Prevalensi Stunting	%	Prevalensi Stunting	%
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah	Tahun
11	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Nilai Rapor Pendidikan	Poin
12	lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%
14	lndeks Ketimpangan Gender	Poin	lndeks Ketimpangan Gender	Poin
15	Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender	Poin

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
Fokus Kesejahteraan Masyarakat				
1	**Pendidikan**		**Pendidikan**	
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun
2	**Kesehatan**		**Kesehatan**	
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point
2.3	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%
2.4	Prevalensi Stunting	%	Prevalensi Stunting	%
ASPEK DAYA SAING DAERAH				
1	Angka Ketergantungan	%	Angka Ketergantungan	%
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%
6	lndeks Inovasi Daerah	Poin	lndeks Inovasi Daerah	Poin
7	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	Indeks Ekonomi Hijau	Poin
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%
11	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Lavak	%	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Lavak	%
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%
15	Tingkat Inflasi	%	Tingkat Inflasi	%
Fokus Layanan Urusan Wajib				
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar		**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**	
1	**Pendidikan**		**Pendidikan**	
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun
1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah	Tahun
1.3	Nilai Rapor Pendidikan	Persen	Nilai Rapor Pendidikan	Persen
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	Persen	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	Persen
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	Persen	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	Persen
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	Persen	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	Persen
1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	Persen	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	Persen

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
2	**Kesehatan**		**Kesehatan**	
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Poin	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Poin
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000	Poin	Angka Kematian Ibu (per 100.000	Poin
2.3	Prevalensi Stunting	%	Prevalensi Stunting	%
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan		Indeks Pencapaian SPM kesehatan	
2.5	Indeks Pencapaian SPM 9ocial9ka masyarakat	%	Indeks Pencapaian SPM 9ocial9ka masyarakat	%
2.6	Persentase SPM Kesmas	%	Persentase SPM Kesmas	%
2.7	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%
2.8	Persentase SPM PM dan PTM	%	Persentase SPM PM dan PTM	%
2.9	Presentase Sarana Sesuai Standar	%	Presentase Sarana Sesuai Standar	%
2.10	Presentase prasarana ambulance transportasi sesuai Standar	%	Presentase prasarana ambulance transportasi sesuai Standar	%
2.11	Presentase prasarana kendaraan puskesmas keliling sesuai Standar	%	Presentase prasarana kendaraan puskesmas keliling sesuai Standar	%
2.12	Presentase luas lahan puskesmas sesuai standar	%	Presentase luas lahan puskesmas sesuai standar	%
2.13	Persentase tenaga 9ocial9ka yang tersertifikasi	%	Persentase tenaga 9ocial9ka yang tersertifikasi	%
2.14	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%
2.15	Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persayaratan HS	%	Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persayaratan HS	%
2.16	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**		**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**	
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Persentase jalan dalam kondisi baik	%
3.2	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%
3.3	Capaian Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	%	Capaian Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	%
3.4	Capaian Rumah Tangga Yang Terlayani Akses SPAM Dan SPALD	%	Capaian Rumah Tangga Yang Terlayani Akses SPAM Dan SPALD	%
3.5	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%
3.6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
3.7	Persentase PKKPR Tanah Aset Pemkot Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial	%	Persentase PKKPR Tanah Aset Pemkot Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial	%
3.8	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%
3.9	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	%	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	%
3.10	Persentase Panjang Jaringan Sungai Yang Berfungsi Optimal	%	Persentase Panjang Jaringan Sungai Yang Berfungsi Optimal	%
3.11	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%
3.12	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis	%	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis	%
3.13	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	%	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	%
3.14	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%
3.15	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%
3.16	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	%	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	%
3.17	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Spald Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	%	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Spald Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	%
3.18	Ikm Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Katagori	Ikm Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Katagori
3.19	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Terhadap Kkpr Yang Telah Diterbitkan	%	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Terhadap Kkpr Yang Telah Diterbitkan	%
3.20	Persentase Kesesuaian Luas Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Dengan Rencana Tata Ruang	%	Persentase Kesesuaian Luas Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Dengan Rencana Tata Ruang	%
4	**Perumahan Dan Kawasan Permukiman**		**Perumahan Dan Kawasan Permukiman**	
4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%
4.2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%
4.3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
4.4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	%
4.5	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%
4.6	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh	%	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh	%
4.7	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%
4.8	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%
4.9	Persentase Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Persentase Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%
5	**Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**		**Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**	
5.1	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%
5.2	Persentase Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%	Persentase Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%
5.3				
5.4	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%
5.5	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%
5.6	Persentase Anggota Linmas aktif	%	Persentase Anggota Linmas aktif	%
5.7	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Manajemen Risiko Bencana	Nilai (Kelas)	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Manajemen Risiko Bencana	Nilai (Kelas)
	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	%	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	%
	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	%	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	%
5.8	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%
6	**Sosial**		**Sosial**	
6.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%
6.2	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
6.3	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%
6.4	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%
6.5	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%
6.6	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar		**Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar**	
7	**Tenaga Kerja**		**Tenaga Kerja**	
7.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%
7.2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%
7.3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	Orang
7.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%
7.5	Rasio kewirausahaan	%	Rasio kewirausahaan	%
7.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%
7.7	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	Orang
7.8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%
7.9	Persentase disabilitas yang bekerja di 12ocial formal	%	Persentase disabilitas yang bekerja di 12ocial formal	%
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**		**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**	
8.1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%
8.2	Persentase kasus yang tertangani	%	Persentase kasus yang tertangani	%
8.3	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%
8.4	Persentase 12ocial12 pemenuhan 12ocial12k yang aktif	%	Persentase 12ocial12 pemenuhan 12ocial12k yang aktif	%
8.5	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%
9	**Ketahanan Pangan**		**Ketahanan Pangan**	
9.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin
9.2	Persentase cadangan pangan	%	Persentase cadangan pangan	%
9.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Skor Pola Pangan Harapan (PPH)	
9.4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	Persentase daerah rentan rawan pangan	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
9.5	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%)	%	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%)	%
10	**Pertanahan**		**Pertanahan**	
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%
10.2	Persentase PKKPR tanah 13ocia pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	Persentase PKKPR tanah 13ocia pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%
10.3	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas 13ocial dengan rencana tata ruang	%	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas 13ocial dengan rencana tata ruang	%
11	**Lingkungan Hidup**		**Lingkungan Hidup**	
11.1	Indeks Kualitas Udara	Poin	Indeks Kualitas Udara	Poin
11.2	Indeks Kualitas Air	Poin	Indeks Kualitas Air	Poin
11.3	Indeks Kualitas Lahan	Poin	Indeks Kualitas Lahan	Poin
11.4	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengelolaan Sampah	%
11.5	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%
11.6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%
11.7	Persentase Penurunan Pencemaran	%	Persentase Penurunan Pencemaran	%
11.8	Persentase RTH yang Dikelola	%	Persentase RTH yang Dikelola	%
11.9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%
11.10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%
11.11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%
11.12	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Terselesaikan	%	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Terselesaikan	%
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**		**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**	
	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang terlayani sesuai standar	%	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang terlayani sesuai standar	%
12.2	Persentasi Kepemilikan Dokumen permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	%	Persentasi Kepemilikan Dokumen permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	%
12.3	Persentasi Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	Persentasi Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
12.4	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan ssuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	%	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan ssuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	%
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**		**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**	
13.1	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%
13.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%
13.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Un Met Need*)	%	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (*Un Met Need*)	%
13.4	Persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga	%	Persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga	%
14	**Perhubungan**		**Perhubungan**	
14.1	Rasio Konektivitas	poin	Rasio Konektivitas	poin
14.2	V/C Rasio	poin	V/C Rasio	poin
14.3	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	Tingkat Keselamatan Transportasi	%
14.4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%
14.5	Konektivitas Darat	km	Konektivitas Darat	km
15	**Komunikasi dan Informatika**		**Komunikasi dan Informatika**	
15.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin
15.2	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital	%	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital	%
15.3	Peningkatan Implementasi Smart City	%	Peningkatan Implementasi Smart City	%
15.4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin
15.5	Nilai Kualitas Informasi	%	Nilai Kualitas Informasi	%
15.6	Nilai Pelayanan Informasi	%	Nilai Pelayanan Informasi	%
16	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**		**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**	
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%
16.2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%
16.3	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	%	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	%
16.4	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin	%	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin	%
16.5	Persentase Koperasi Aktif	%	Persentase Koperasi Aktif	%
16.6	Persentase koperasi sehat	%	Persentase koperasi sehat	%
16.7	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi	%	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi	%
16.8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%
16.9	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
16.10	Pertumbuhan wirausaha	%	Pertumbuhan wirausaha	%
16.11	Proporsi usaha mikro yang menjalin kemitraan dan ekspor	%	Proporsi usaha mikro yang menjalin kemitraan dan ekspor	%
17	**Penanaman Modal**		**Penanaman Modal**	
17.1	Persentase peningkatan investasi	%	Persentase peningkatan investasi	%
17.2’	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%
17.4	Persentase Peningkatan Investor	%	Persentase Peningkatan Investor	%
17.5	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%
17.6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%
17.7	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%
17.8	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%
17.9	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%
18	**Kepemudaan dan Olahraga**		**Kepemudaan dan Olahraga**	
18.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	%	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	%
18.2	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%
18.3	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	%	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	%
18.4	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%
18.5	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%
18.6	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina	%	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina	%
19	**Statistik**		**Statistik**	
19.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin
19.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data 15ocial15ka dalam 15ocial15k perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data 15ocial15ka dalam 15ocial15k perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%
20	**Persandian**		**Persandian**	
20.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin
20.2	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Poin	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Poin
20.3	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Poin	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Poin

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
21	**Kebudayaan**		**Kebudayaan**	
21.1	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan sejarah Daerah	%	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan sejarah Daerah	%
21.2	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	%	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	%
21.3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%
21.4	Persentase sejarah 16ocia yang dilestarikan	%	Persentase sejarah 16ocia yang dilestarikan	%
21.5	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%
22	**Perpustakaan**		**Perpustakaan**	
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin
22.2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Naskah	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Naskah
22.3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin
23	**Kearsipan**		**Kearsipan**	
23.1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	Tingkat Ketersediaan Arsip	%
23.2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%
23.2	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%
Fokus Layanan Urusan Pilihan				
1	**Kelautan dan Perikanan**		**Kelautan dan Perikanan**	
1.1	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton
1.3	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun
2	**Pariwisata**		**Pariwisata**	
2.1	Persentase Peningkatan Objek Daya Tarik Wisata	%	Persentase Peningkatan Objek Daya Tarik Wisata	%
2.2	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	%	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	%
2.3	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	%	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	%
2.4	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%
3	**Pertanian**		**Pertanian**	
3.1	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	Produksi Komoditas Peternakan	Ton

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
3.2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Produksi Tanaman Pangan	Ton
3.3	Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton
3.4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha
3.5	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%
3.6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol veteriner)	%	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol veteriner)	%
3.7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	Persentase penanganan bencana pertanian	%
3.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%
3.9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%
3.10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%
3.11	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	%	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	%
4	**Perdagangan**		**Perdagangan**	
4.1	Kontribusi 17ocial perdagangan terhadap PDRB	%	Kontribusi 17ocial perdagangan terhadap PDRB	%
4.2	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%
4.3	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%
4.4	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%
4.5	Nilai ekspor barang	(Juta)US$	Nilai ekspor barang	(Juta)US$
4.6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%
4.7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi	%	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi	%
5	**Perindustrian**		**Perindustrian**	
5.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%
5.2	Pertambahan Jumlah Industri kecil	%	Pertambahan Jumlah Industri kecil	%
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	%	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	%
5.4	Tersedianya informasi 17ocial17k secara lengkap dan terkini		Tersedianya informasi 17ocial17k secara lengkap dan terkini	
	Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan		**Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan**	

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**		**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**	
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai
1.2	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai
1.3	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai
1.5	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%
1.6	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai
1.7	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai
1.8	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Indeks Reformasi Hukum	Nilai
1.9	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai
1.10	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai
1.11	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangungan yang Ditindklanjuti	%	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangungan yang Ditindklanjuti	%
1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor
1.13	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%
1.14	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N	
1.15	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%
1.16	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%
2	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**		**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**	
2.1	**Perencanaan Pembangunan**		**Perencanaan Pembangunan**	
2.1.1	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin
2.1.2	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin
2.1.3	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin
2.1.4	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin
2.1.5	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
2.1.6	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin
2.1.7	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan	Poin	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan	Poin
2.1.8	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan	Poin	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan	Poin
2.2	**Keuangan**		**Keuangan**	
2.2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini
2.2.2	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%
2.2.3	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%
2.2.4	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%
2.2.5	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%
2.3	**Kepegawaian serta 19ocial19kan dan pelatihan**		**Kepegawaian serta 19ocial19kan dan pelatihan**	
2.3.1	Indeks Sistem Merit	Nilai/ Kategori	Indeks Sistem Merit	Nilai/ Kategori
2.3.2	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai/ Kategori
2.3.3	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai/ Kategori
2.3.4	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai/ Kategori
2.3.5	Nilai kriteria kualitas 19ocial informasi	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas 19ocial informasi	Nilai/ Kategori
2.3.6	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai/ Kategori
2.3.7	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai/ Kategori
2.3.8	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai/ Kategori
2.3.9	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai/ Kategori	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai/ Kategori
2.3.10	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Nilai/ Kategori	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Nilai/ Kategori
2.4	**Penelitian dan Pengembangan**		**Penelitian dan Pengembangan**	
2.4.1	Persentase hasil riset yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	Persentase hasil riset yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%
2.4.2	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi	%	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
2.4.3	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%
2.4.4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%
3	**Unsur Pengawasan Pemerintahan**		**Unsur Pengawasan Pemerintahan**	
3.1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level (Poin)	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level (Poin)
3.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	%	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	%
3.3	Capaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Poin	Capaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Poin
3.4	Tingkat keberhasilan pembangunan zona Integritas	Unit Kerja	Tingkat keberhasilan pembangunan zona Integritas	Unit Kerja
3.5	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin
3.6	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Poin	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Poin
3.7	Persentase Laporan fasilitasi penyelesaian TLHP APIP dan BPK yang berhasil disusun	%	Persentase Laporan fasilitasi penyelesaian TLHP APIP dan BPK yang berhasil disusun	%
3.8	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban I yang diverifikasi	%	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban I yang diverifikasi	%
3.9	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban II yang diverifikasi	%	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban II yang diverifikasi	%
3.10	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban III yang diverifikasi	%	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban III yang diverifikasi	%
3.11	Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	level (Poin)	Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	level (Poin)
3.12	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban I	Skor	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban I	Skor
3.13	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban II	Skor	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban II	Skor
3.14	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban III	Skor	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban III	Skor
3.15	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaiakan sesuai standar	%	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaiakan sesuai standar	%
3.16	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikan sesuai standar	%	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikan sesuai standar	%
3.17	Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
3.18	Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%
3.19	Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%
3.20	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban I	%	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban I	%
3.21	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban II	%	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban II	%
3.22	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban III	%	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban III	%
3.23	Capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	Capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level
3.24	Capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kota	Level	Capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kota	Level
3.25	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil survey penilaian integritas	%	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil survey penilaian integritas	%
3.26	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	%	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	%
3.27	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	%	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	%
3.28	Persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	%	Persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	%
3.29	Nilai hasil MCP	%	Nilai hasil MCP	%
3.30	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	%	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	%
4	**Unsur Kewilayahan**		**Unsur Kewilayahan**	
4.1	Persentase permohonan 21ocial21kan21ive Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	%	Persentase permohonan 21ocial21kan21ive Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	%
4.2	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	%	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	%
4.3	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	%	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	%
4.4	Persentase permohonan 21ocial21kan21ive Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	%	Persentase permohonan 21ocial21kan21ive Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	%
4.5	Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	%	Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	%
4.6	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	%	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	%

No.	RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029		RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026	
	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	**Satuan**	**Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah**	**Satuan**
4.7	Persentase permohonan 22ocial22kan22ive Kelurahan yang terlayani sesuai standar	%	Persentase permohonan 22ocial22kan22ive Kelurahan yang terlayani sesuai standar	%
4.8	Persentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	%	Persentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	%
4.9	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	%	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	%
4.10	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	%	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	%
4.11	Persentase permohonan 22ocial22kan22ive Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	%	Persentase permohonan 22ocial22kan22ive Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	%
4.12	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	%	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	%
4.13	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%
4.14	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%
4.15	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%
5	**Urusan Pemerintahan Umum**		**Urusan Pemerintahan Umum**	
5.1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%
5.2	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 22ocial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, 22ocial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%
5.3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%
5.4	Persentase 22ocial22kan politik pada kader partai politik	%	Persentase 22ocial22kan politik pada kader partai politik	%
5.5	Persentase konflik 22ocial yang diselesaikan	%	Persentase konflik 22ocial yang diselesaikan	%

Sumber: Rancangan RPJMD Kota Tasikmalaya Tahun 2025-2029.

Tabel 6.5.
Proyeksi Capaian Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan
Kota Tasikmalaya Tahun 2026

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
	ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI						
1	Indeks Ketahanan Pangan	Angka	Ukuran dari beberapa indikator yang digunakan untuk menghasilkan skor komposit kondisi ketahanan pangan di suatu wilayah	74,37	75,00	75,00	DKP3
2	Prevelensi Ketidakcukupan konsumsi Pangan	%	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,31	4,61	4,44	DKP3
3	Konsumsi Listrik Per Kapita	Kwh Kapita	Pengukuran yang digunakan untuk mengukur penggunaan energi listrik oleh populasi	489.291.096	524.896.315	683.147.329	Dinas PUTR
4	Akses Rumah Tangga Terhadap Konsumsi Air Minum	%	(Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan Akses Air Minum dibagi total jumlah rumah tangga) x 100%	69,93	69,93	70,43	Dinas PUTR
5	Indeks Kualitas lingkungan Hidup Daerah	Indeks	Gambaran kualitas lingkungan hidup suatu wilayah pada waktu tertentu, yang merupakan nilai komposit dari Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU) dan Indeks Kualitas Lahan (IKL)	57,02	61,62	61,79	Dinas Lingkungan Hidup
6	Rumah tangga dengan Akses Sanitasi Aman	%	(Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap SPALD berupa akses layak, dan akses aman dibagi total jumlah rumah tangga) x 100%	63,14	66,26	66,56	Dinas PUTR
7	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)	Ton CO2 eq/2010 IDR Milyar	Penurunan Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang dihitung melalui aplikasi Aksara Bappenas	1,05	2,17	2,36	Dinas Lingkungan Hidup
8	Indeks Resiko Bencana	Poin	Pengukuran yang digunakan untuk mengetahui tingkat kerentanan suatu wilayah terhadap bencana	97,13	93,60	90,10	BPBD
9	Indeks Ketahanan daerah	%	Kapasitas penanggulangan bencana di wilayah administrasi, baik di tingkat kabupaten/kota dan provinsi	0,52	0,54	0,56	BPBD
10	Laju Pertumbuhan Penduduk	%	Angka yang menunjukkan rata-rata tingkat pertambahan penduduk per tahun dalam jangka waktu tertentu	0,38	0,81	1,27	DPPKBP3A
11	Rasio Penduduk	%	Perbandingan jumlah penduduk dalam kelompok tertentu, misalnya perbandingan jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan, atau perbandingan	102,65	102,28	102,09	DPPKBP3A

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
			jumlah penduduk usia muda dengan penduduk usia tua				
12	Kepadatan Penduduk	Orang per km^2	Banyaknya jumlah penduduk untuk setiap kilometer persegi luas wilayah	4.209	4.256	4.299	DPPKBP3A
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT						
	Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi						
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi	%	Laju Pertumbuhan Ekonomi berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	5,22	5,43-6,17	5,45	Dinas KUKM Perindag, DKP3 DPMPTSP
2	Tingkat Kemiskinan	%	Persentase penduduk miskin yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	11,10	9,20-10,16	9,47	Dinas Sosial
3	PDRB Per Kapita	Rp Juta	PDRB Per Kapita berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	39,45	38,99-39,35	43,63	Dinas KUKM Perindag, DKP3 DPMPTSP
4	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	Tingkat Pengangguran Terbuka berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	6,49	6,37 - 6,45	6,34	Dinas Tenaga Kerja
5	Indeks Gini	Poin	Indeks Gini berdasarkan hasil penghitungan dan dikeluarkan oleh BPS	1,94	0,351-0,405	0,350	Dinas Sosial
6	Indeks Modal Manusia/Indeks Pembangunan Manusia	Poin	Indeks Pembangunan Manusia yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	76,03	76,48	76,99	Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas KUKM Perindag, DKP3
7	Usia Harapan Hidup	Tahun	Usia Harapan Hidup yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	75,31	75,56	75,81	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
8	Prevalensi Stunting	%	Hasil Survey Status Gizi Indonesia (SSGI)	19,60	18,50	17,02	Dinas Kesehatan DPPKBP3A Dinas PUTR Dinas Perawaskim
9	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	Dinas Pendidikan
10	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,50	13,51	13,53	Dinas Pendidikan
11	Nilai Rapor Pendidikan	Poin	Kondisi satuan pendidikan berdasarkan data dari hasil asesmen dan survei-survei nasional yang melibatkan satuan pendidikan dan daerah		68,21	68,22	Dinas Pendidikan
12	lndeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/ Swasta	72,84	76,55	77,01	Dipusipda
13	Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	%	Persentase Cakupan Kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional	102,28	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
14	lndeks Ketimpangan Gender	Poin	Indeks Ketimpangan Gender yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	0,35	0,32	0,28	DPPKBP3A
15	Indeks Pembangunan Gender	Poin	Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah rasio antara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) perempuan dan IPM laki-laki. IPG digunakan untuk mengukur kesenjangan pencapaian pembangunan antara laki-laki dan perempuan dalam tiga dimensi utama: kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Formulasi IPG: IPG = (IPM Perempuan) / (IPM Laki-laki) * 100 (Dikeluarkan oleh BPS)	92,98	92,98	93,00	DPPKBP3A
	Fokus Kesejahteraan Masyarakat						
1	**Pendidikan**						
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-rata Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Point	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu/ Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	7,65	7,70	7,30	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000)	Point	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	139,96	269,10	251,70	Dinas Kesehatan
2.3	Persentase masyarakat miskin mendapat jaminan kesehatan	%	Realisasi jaminan kesehatan daerah masyarakat miskin terhadap masyarakat miskin yang ditetapkan oleh pemerintah x 100		100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.4	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/ Jumlah anak x 100	19,60	18,50	17,02	Dinas Kesehatan, DPPKBP3A
	ASPEK DAYA SAING DAERAH						
1	Angka Ketergantungan	%	Angka Ketergantungan yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	45,30	45,40	45,50	Dinas Tenaga Kerja
2	Rasio PDRB Industri Pengolahan	%	Kontribusi sektor industri pengolahan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,41	13,03	12,95	Dinas KUKM Perindag
3	Rasio PDRB Akomodasi Makan dan Minum	%	Kontribusi sektor Akomodasi Makan dan Minum terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	6,26	6,46	6,71	Disporabudpar
4	Proporsi PDRB Ekonomi Kreatif	%	∑ PDRB 17 sektor ekonomi kreatif regional/PDRB x 100% yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,66	1,68	1,71	Disporabudpar
5	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	%	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	68,92	69,42	69,92	Dinas Tenaga Kerja
6	lndeks Inovasi Daerah	Poin	Hasil Penilaian Indeks Inovasi Daerah dari Kementerian Dalam Negeri	49,46	46,70	52,00	Bappelitbangda
7	Indeks Ekonomi Hijau	Poin	Indeks Ekonomi Hiiau pilar ekonomi yang dihitung dan dikeluarkan oleh Bappeda Provinsi	58,46	58,54	59,78	DKP3
10	Pembentukan Modal Tetap Bruto	%	Pembentukan Modal Tetap Bruto (% PDRB) = PMTB/PDRB ADHB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	30,66	32,79	32,85	DPMPTSP
11	Ekspor Barang dan Jasa	Rp.	Ekspor Barang dan Jasa (%PDRB) = total Ekspor Barang dan Jasa berdasarkan PDRB sisi pengeluaran (Milyar Rupiah) / PDRB ADHB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	-14,51	-14,11	-13,71	Dinas KUKM Perindag

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
12	Indeks Infrastruktur Daerah	Angka	Penjumlahan dari (0,67 x Indeks Kepuasan Layanan lnfrastruktur (IKLI) ditambah (0,25 x Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan) ditambah (0,08 x Rasio Konektivitas)	-		73,60	Dinas PUTR
13	Rumah Tangga dengan Akses Hunian Lavak	%	Jumlah rumah layak huni/ Total rumah x 100	96,52	96,84	97,15	Dinas Perawaskim
14	Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB	%	Indikator yang digunakan untuk mengukur kontribusi pajak daerah terhadap perekonomian daerah	0,57	0,60	0,61	Bapenda
15	Tingkat Inflasi	%	Tingkat Inflasi yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	1,94	2,30	2,29	Sekretariat Daerah
	Fokus Layanan Urusan Wajib						
	Urusan Wajib Pelayanan Dasar						
1	**Pendidikan**						
1.1	Rata-Rata Lama Sekolah	Tahun	Rata-Rata lama sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	9,63	9,67	9,79	Dinas Pendidikan
1.2	Harapan Lama Sekolah	Tahun	Harapan Lama Sekolah yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	13,50	13,51	13,53	Dinas Pendidikan
1.3	Nilai Rapor Pendidikan	Persen	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	68,28	68,21	68,22	Dinas Pendidikan
1.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 5-6 (PAUD)	Persen	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	80,39	80,45	80,51	Dinas Pendidikan
1.5	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-12 (SD)	Persen	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	97,35	97,41	97,45	Dinas Pendidikan
1.6	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13-15 (SMP)	Persen	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	97,35	97,42	97,51	Dinas Pendidikan
1.7	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7-18 (Kesetaraan)	Persen	Nilai Mutu dari Rapor Pendidikan	14,82	17,30	20,00	Dinas Pendidikan
2	**Kesehatan**						
2.1	Angka Kematian Bayi (per 1.000)	Poin	Jumlah Kematian Bayi (berumur kurang 1 tahun) pada satu tahun tertentu/ Jumlah Kelahiran Hidup pada satu tahun tertentu x 1.000	7,65	7,70	7,30	Dinas Kesehatan
2.2	Angka Kematian Ibu (per 100.000	Poin	Jumlah ibu hamil yang meninggal karena hamil, bersalin, dan nifas di suatu wilayah tertentu selama 1 tahun/ Jumlah kelahiran hidup di wilayah tersebut dan pada kurun waktu yang sama x 100.000	139,96	269,10	251,70	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
2.3	Prevalensi Stunting	%	Jumlah kasus stunting/ Jumlah anak x 100	19,60	18,50	17,02	Dinas Kesehatan
2.4	Indeks Pencapaian SPM kesehatan		Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima	96,57	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.5	Indeks Pencapaian SPM kesehatan masyarakat	%	Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima Bidang Kesehatan masyarakat	96,57	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.6	Persentase SPM Kesmas	%	Rata-rata nilai capaian SPM Kesehatan masyarakat	96,57	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.7	Indeks Pencapaian SPM Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular	%	Rata-rata Nilai Persentase pencapaian mutu minimal layanan dasar dikalikan bobot mutu dengan persentase penerima layanan dasar dikalikan dengan bobot penerima Bidang P2P (SPM PM dan PTM)	96,48	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.8	Persentase SPM PM dan PTM	%	Rata-rata nilai capaian SPM PM dan PTM	96,48	100,00	100,00	Dinas Kesehatan
2.9	Persentase Sarana Sesuai Standar	%	Jumlah Puskesmas yang telah memiliki ruangan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada	0,59	68,18	77,27	Dinas Kesehatan
2.10	Persentase prasarana ambulance transportasi sesuai Standar	%	Jumlah Puskesmas yang telah memiliki ambulance transportasi sesuai standar dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada	22,72	22,72	54,54	Dinas Kesehatan
2.11	Persentase prasarana kendaraan puskesmas keliling sesuai Standar	%	Jumlah Puskesmas yang telah memiliki kendaraan puskesmas keliling sesuai standar dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada	9,09	9,09	40,90	Dinas Kesehatan
2.12	Persentase luas lahan puskesmas sesuai standar	%	Jumlah puskesmas yang memiliki lahan sesuai standar dibandingkan dengan jumlah puskesmas yang ada	68,18	72,72	81,81	Dinas Kesehatan
2.13	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	%	Persentase tenaga kesehatan yang tersertifikasi	65,00	70,00	75,00	Dinas Kesehatan
2.14	Persentase sarana kefarmasian dan Makanan Minuman Sesuai Standar	%	Persentase sarana kefarmasian dan makanan minuman sesuai standar dibagi jumlah sarana kefarmasian dan makanan minuman yang diperiksa	0,76	0,77	0,78	Dinas Kesehatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
2.15	Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persayaratan HS	%	Rata-rata Nilai Persentase TPM, Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan yang memenuhi persayaratan Higiene Sanitasi	0,44	0,75	0,80	Dinas Kesehatan
2.16	Persentase Keluarga berperilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)	%	Jumlah Keluarga ber-PHBS dibagi jumlah keluarga dikali 100	0,49	0,70	0,71	Dinas Kesehatan
3	**Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**						
3.1	Persentase jalan dalam kondisi baik	%	Panjang jalan dan jembatan dalam kondisi baik (bobot 70%) + panjang drainase dalam kondisi baik (bobot 30%) / Total panjang jalan dan jembatan x 100%		0,92	92,128 %	Dinas PUTR
3.2	Persentase Bangunan Gedung yang Memenuhi Standar Teknis	%	Persentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan yang ditingkatkan sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)		18.19%	22.47%	Dinas PUTR
3.3	Capaian Pelaksanaan Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang (Air Minum Dan Air Limbah Domestik)	%	Permukiman yang Layak Huni/ Luas Permukiman x 100%		100 %	100 %	Dinas PUTR
3.4	Capaian Rumah Tangga Yang Terlayani Akses SPAM Dan SPALD	%	Target capaian RT yang berakses SPALD dan RT yang berakses Air Minum tahun exsisting / Target pertahun capaian RT yang berakses	63,14	66,26 %	66,56 %	Dinas PUTR
3.5	Persentase Infrastruktur Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Yang Ditingkatkan Kualitasnya	%	Jumlah Infrastruktur yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Infrastruktur di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%		56,65 %	0,60	Dinas PUTR
3.6	Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Terhadap RTR	%	(Jumlah Kegiatan yang Sesuai dengan RTR / Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan) x 100%		99 %	99.50 %	Dinas PUTR
3.7	Persentase PKKPR Tanah Aset Pemkot Untuk Pembangunan Fasilitas Umum Fasilitas Sosial	%	Jumlah penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum/Jumlah kebutuhan tanah untuk pembangunan fasilitas umum x 100%		100 %	100 %	Dinas PUTR
3.8	Persentase Peningkatan Jaringan Jalan	%	Panjang jalan yang dibangun dan dipelihara / Total panjang jalan kota x 100%	2,99		4,13	Dinas PUTR
3.9	Persentase Peningkatan Jaringan Drainase Jalan Kota	%	Panjang jaringan drainase jalan kota yang dibangun + direhabilitasi + dipelihara/ Total jalan kota x 100	-		0,18	Dinas PUTR
3.10	Persentase Panjang Jaringan Sungai Yang Berfungsi Optimal	%	Panjang jaringan sungai yang berfungsi optimal / Panjang jaringan sungai x 100%	25,44		28,76	Dinas PUTR

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
3.11	Persentase Panjang Jaringan Irigasi Kondisi Baik	%	Prosentase bangunan gedung kewenangan pemda yang ditangani (70%) + Persentase Kawasan/ Lingkungan Yang di Tingkatkan Sesuai dengan RTBL nya (10%) + persentase jumlah penyedia jasa yang mendapatkan pembinaan (20%)	41,41		38,80	Dinas PUTR
3.12	Persentase Bangunan Gedung Kewenangan Pemda Yang Sesuai Standar Teknis	%	Jumlah tenaga kerja jasa konstruksi yang bersertifikat / jumlah tenaga kerja jasa konstruksi keseluruhan x 100%			50,00	Dinas PUTR
3.13	Persentase Jasa Konstruksi Yang Bersertifikat Jasa Konstruksi	%	Panjang jalan lingkungan permukiman di luar kawasan Permukiman kumuh dalam kondisi baik dan sedang / total panjang jalan lingkungan permukiman x 100%	32,43		41,34	Dinas PUTR
3.14	Persentase Infrastruktur Jalan Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Panjang Jalan dalam Kondisi Baik / Total Panjang Jalan Lingkungan Permukiman di Luar Kawasan Permukiman Kumuh) x 100%	67,19		54,00	Dinas PUTR
3.15	Persentase Infrastruktur Drainase Lingkungan Permukiman Di Luar Kawasan Permukiman Kumuh Dalam Kondisi Baik	%	(Jumlah Unit Drainase yang Berfungsi Baik / Total Jumlah Unit Drainase) x 100% atau (Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi Baik / Total Panjang Saluran Drainase) x 100%	66,85		64,97	Dinas PUTR
3.16	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Air Minum Melalui Spam Jaringan Perpipaan Dan Bukan Jaringan Perpipaan Terlindungi Terhadap Rumah Tangga Di Seluruh Kota Tasikmalaya	%	Jumlah kumulatif masyarakat yang rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi di dalam sebuah kabupaten/kota/ Jumlah total proyeksi rumah tangga di seluruh Kota Tasikmalaya x 100%	58,31		70,43	Dinas PUTR
3.17	Persentase Jumlah Rumah Tangga Yang Mendapatkan Akses Terhadap Spald Berupa Akses Layak, Dan Akses Aman	%	KK/RT yang berakses SPLD/ Jumlah KK/RT x 100%	63,14		62,69	Dinas PUTR
3.18	IKM Pelayanan Pengelolaan Air Limbah Domestik	Katagori	Nilai IKM	83,54		85,00	Dinas PUTR
3.19	Persentase Kepatuhan Pemanfaatan Ruang Terhadap KKPR Yang Telah Diterbitkan	%	Luas area pemanfaatan lahan yang sesuai dengan dokumen KKPR terhadap seluruh luas lahan yang diberikan KKPR x 100%	98,00		99,00	Dinas PUTR
3.20	Persentase Kesesuaian Luas Tanah Yang Dimanfaatkan Untuk Fasilitas Umum Fasilitas Sosial Dengan Rencana Tata Ruang	%	Luas tanah aset pemkot untuk pembangunan fasum fasos yang sesuai PKKPR / Luas tanah ases pemkot yang diperlukan untuk pembangunan fasum fasos	100,00		100,00	Dinas PUTR
4	**Perumahan Dan Kawasan Permukiman**						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
4.1	Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan Berkelanjutan	%	Jumlah rumah layak huni/ Total rumah x 100	96,52	96,84	97,15	Dinas Perawaskim
4.2	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	%	(total RTLH-penanganan RTLH)/ Total rumah x 100	3,48	3,25	3,03	Dinas Perawaskim
4.3	Persentase Warga Negara Korban Bencana yang Memperoleh Rumah Layak Huni	%	Realisasi penyediaan rumahbagi korban bencana/ Target penyediaan rumah bagi korban bencana x 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Perawaskim
4.4	Fasilitasi Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	%	Realisasi penyediaan rumah bagi korban relokasi/ Target penyediaan rumah x 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Perawaskim
4.5	Persentase Penanganan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Bawah 10 Ha	%	Luas penanganan kawasan kumuh kewenangan kota/ Total kawasan kumuh kewenangan kota x 100	15,89	19,52	23,15	Dinas Perawaskim
4.6	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di kawasan kumuh-penanganan RTLH di kawasan kumuh)/ Total RTLH di kawasan kumuh x 100	73,46	62,04	59,19	Dinas Perawaskim
4.7	Persentase Berkurangnya Jumlah Unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni) di Luar Kawasan Permukiman Kumuh	%	(Total RTLH di luar kawasan kumuh-penanganan RTLH diluar kawasan kumuh)/ Total RTLH di luar kawasan kumuh x 100	92,24	90,80	90,12	Dinas Perawaskim
4.8	Persentase Perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	%	Jumlah unit rumah di perumahan yang tersedia PSU/ Total unit rumah di perumahan x 100	47,35	47,65	47,95	Dinas Perawaskim
4.9	Persentase Peningkatan Pelayanan, Sertifikasi, Kualifikasi, Klasifikasi, dan Registrasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman	%	Realisasi pelayanan, sertifikasi, kualifikasi perumahan dan kawasan permukiman/ Target pelayanan, sertifikasi, kualifikasi perumahan dan kawasan permukiman x 100	-	-	100,00	Dinas Perawaskim
5	**Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat**						
5.1	Persentase Penurunan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	%	Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikurangi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada Tahun n) dibagi Gangguan Ketenteraman dan ketertiban umum yang dilaporkan masyarakat dan temuan yang ditangani oleh satpol PP pada tahun n-1 dikali 100 %	3,00	3,50	4,00	Satpol PP

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
5.2	Persentase Penurunan Pelanggar Perda dan Perkada yang Memuat Sanksi	%	Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 dikurangi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n) dibagi Pelanggaran Perda dan Perkada yang memuat sanksi Tahun n-1 x 100%	4,50	5,50	6,00	Satpol PP
5.3	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	%	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum dibagi Jumlah Gangguan Trantibum yang diselesaikan dikali 100%	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
5.4	Persentase Perda dan Perkada yang Ditegakkan	%	jumlah pelanggaran Perda dan Perkada dibagi Jumlah Perda dan Perkada yang memuat sanksi dikali 100%	100,00	100,00	100,00	Satpol PP
5.5	Persentase Anggota Linmas aktif	%	Jumlah anggota linmas yang melaksanakan tugas dibagi jumlah anggota linmas aktif dikali 100%			50,00	Satpol PP
5.6	Meningkatnya Kapasitas Daerah dalam Manajemen Risiko Bencana	Nilai (Kelas)	R (Risiko Bencana) ≈ H (Bahaya) x V (Kerentanan) / C (Kapasitas)	0,52	0,54	0,56	BPBD
5.7	Meningkatnya Layanan Pemadaman, Penyelamatan, dan Evakuasi Korban Kebakaran Secara Terpadu dan Inklusif	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan yang Sesuai Respon Time / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan x 100%	70,13%	100,00	100,00	BPBD
5.8	Indeks Kesiapsiagaan Masyarakat	%	Jumlah (Si), untuk i=n 1 sampai 165 / 165		0,46	0,51	BPBD
5.9	Persentase Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran	%	Jumlah Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran yang dilaksanakan / Jumlah Layanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran x 100%	100,00	100,00	100,00	BPBD
6	**Sosial**						
6.1	Persentase Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani	%	Jumlah Aduan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang dilayani / Jumlah Aduan PPKS Yang diterima X 100%		100%	100%	Dinas Sosial
6.2	Persentase Rehabilitasi Sosial terhadap PPKS	%	Jumlah PPKS yang terlayani/ Jumlah PPKS yg membutuhkan layanan rehabilitasi sosial × 100%		100%	100%	Dinas Sosial
6.3	Persentase Bansos Kesejahteraan Keluarga Tepat Sasaran	%	Jumlah Masarakat miskin penerima bantuan / Jumlah masyarakat miskin terdata x 100 %		100%	100%	Dinas Sosial
6.4	Persentase Korban Bencana yang Mendapatkan Perlindungan Sosial	%	Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diberi bantuan / Jumlah korban bencana alam dan sosial yang diusulkan kelurahan x 100%		100%	100%	Dinas Sosial

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
6.5	Persentase PSKS Aktif dan Mendapatkan Bimbingan Teknis	%	Jumlah Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang diberdayakan & mendapat pembinaan / Jumlah PSKS Aktif dan Terdaftar x 100%		100%	100%	Dinas Sosial
6.6	Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan yang Terstandar	%	Jumlah Makam yang terperlihara sesuai standar pada Taman Makam Pahlawan / Jumlah Makam di TMP Kusuma Bangsa x 100%		100%	100%	Dinas Sosial
	Urusan Wajib Non Pelayanan Dasar						
7	**Tenaga Kerja**						
7.1	Tingkat produktivitas tenaga kerja	%	PDRB tahun berjalan (atas dasar harga konstan)/ Jumlah tenaga kerja	53,74	56,15	58,70	Dinas Tenaga Kerja
7.2	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	%	Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan yang mengacu pada RTKD/Jumlah kegiatan keseluruhan yang dilaksanakan di kabupaten/Kota x 100%	100,00	100,00	100,00	Dinas Tenaga Kerja
7.3	Jumlah lulusan pelatihan vokasi yang bersertifikat	orang	Lulusan pelatihan vokasi yang lulus uji kompetensi (termasuk Calon Pekerja Migran Indonesia)	-	0	16	Dinas Tenaga Kerja
7.4	Persentase tenaga kerja yang ditempatkan di dalam negeri	%	Jumlah pencaker yang bekerja di dalam negeri/ Jumlah pencaker yang terdaftar x 100 %		40,00	40,00	Dinas Tenaga Kerja
7.5	Rasio kewirausahaan	%	Berusaha dibantu buruh tetap daerah / Total angkatan kerja daerah x 100%	4,94	5,10	5,26	Dinas Tenaga Kerja
7.6	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan	%	Jumlah angkatan kerja perenpuan/ Jumlah penduduk perempuan usia 15 tahun keatas x 100%	48,25	53,05	58,35	Dinas Tenaga Kerja
7.7	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak pekerja dan dialog sosial	orang	Jumlah pekerja pada perusahaan yang menerapkan perlindungan hak-hak dasar pekerja dan dialog social di perusahaan diwujudkan melalui penyusunan Peraturan Perusahaan (PP), Perjanjian Kerja Bersama (PKB), penyusunan struktur dan skala upah, atau menjadi peserta pada program jaminan sosial ketenagakerjaan, atau pembentukan Lembaga Kerjasama bipartit. Perusahaan yang dimaksud adalah perusahaan yang terdaftar pada WLKP Online	-	10.000	10.000	Dinas Tenaga Kerja
7.8	Cakupan Kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan	%	Jumlah pekerja yang memiliki program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan terhadap semesta penduduk bekerja x 100%	38,75	42,65	46,95	Dinas Tenaga Kerja

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
7.9	Persentase disabilitas yang bekerja di sektor formal	%	Pekerja Penyandang Disabilitas Sektor Formal/ Angkatan Kerja Penyandang Disabilitas x 100%	-	1,00	1,00	Dinas Tenaga Kerja
8	**Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**						
8.1	Persentase perangkat daerah yang menerapkan program PUG	%	Jumlah perangkat daerah yang menerapkan ARG/ Jumlah perangkat daerah x 100	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
8.2	Persentase kasus yang tertangani	%	Jumlah pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti / Jumlah laporan/pengaduan yang masuk x 100	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
8.3	Persentase keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender	%	Jumlah keluarga yang aktif dalam pengarusutamaan gender/ Jumlah keluarga x 100	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
8.4	Persentase lembaga pemenuhan hak anak yang aktif	%	Jumlah lembaga yang melakukan melaksanakan pemenuhan hak anak/ Jumlah lembaga yg ada x 100	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
8.5	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap anak	%	Cakupan anak korban kekerasan yang mendapatkan penanganan pengaduan adalah bentuk layanan yang diberikan oleh petugas unit pelayanan terpadu dalam merespon aduan atau pelaporan oleh masayarakat dan/atau lembaga lain. Jika pelapor adalah bukan korban, maka petugas diwajibkan untuk melakukan penjangkauan dengan tetap menggunakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kerahasiaan yang harus tetap dijaga	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
9	**Ketahanan Pangan**						
9.1	Indeks Ketahanan Pangan (IKP)	poin	Publikasi Bapanas	74,37	75,00	75,00	DKP3
9.2	Persentase cadangan pangan	%	Jumlah CPP kab/kota / Jumlah target CPP kab/kota yang ditetapkan	100,00	100,00	100,00	DKP3
9.3	Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		Persentase Angka Kecukupan Energi (AKE) tingkat konsumsi dikali dengan bobot setiap kelompok pangan yang telah ditetapkan. Hasil perkalian ini kemudian dijumlahkan untuk setiap kelompok pangan	95,10	95,10	95,20	DKP3
9.4	Persentase daerah rentan rawan pangan	%	Jumlah daerah rentan rawan pangan/ Jumlah Kelurahan x 100%	4,35	4,35	4,35	DKP3
9.5	Persentase pangan segar yang memenuhi persyaratan dan mutu Keamanan Pangan (%)	%	Jumlah sampel pangan yang aman dikonsumsi/ Jumlah pangan yang disampel x 100%	100,00	100,00	100,00	DKP3

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
10	**Pertanahan**						
10.1	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah	%	Persentase Pengelolaan dan Penatagunaan Tanah				Dinas PUTR
10.2	Persentase PKKPR tanah aset pemkot untuk pembangunan fasilitas umum fasilitas sosial	%	Jumlah tanah aset pemkot yang sesuai dengan peruntukan ruang/ Luas tanah aset pemkot yang diberikan PKKPR x 100%	100,00	100,00	100,00	Dinas PUTR
10.3	Persentase Kesesuaian Luas Tanah yang dimanfaatkan untuk fasilitas umum fasilitas sosial dengan rencana tata ruang	%	Luas tanah aset pemkot untuk pembangunan fasum fasos yang sesuai PKKPR/ Luas tanah ases pemkot yang diperlukan untuk pembangunan fasum fasos	100,00		100,00	Dinas PUTR
11	**Lingkungan Hidup**						
11.1	Indeks Kualitas Udara	Poin	IKU=100-(50/0,9 x(Ieu-0,1))	86,64	63,64	63,84	Dinas Lingkungan Hidup
11.2	Indeks Kualitas Air	Poin	IKA=∑_(i=I)^n W_i×I_i W= Bobot Parameter i I = Nilai dari Parameter i	39,33	65,09	65,29	Dinas Lingkungan Hidup
11.3	Indeks Kualitas Lahan	Poin	$\boldsymbol{DKK = \sum Rumus\ W\ di\ Tutupan\ Hutan + Rumus\ W\ di\ Tutupan\ Belukar}$ $\boldsymbol{IKL = 100 - ((84,3 - ((LTL\ /\ LW) - DKK)\ x100))\ 50\ /\ 54,3}$	39,45	51,91	51,98	Dinas Lingkungan Hidup
11.4	Persentase Pengelolaan Sampah	%	Persentase Pengurangan Sampah + Persentase Penanganan Sampah	86,13	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.5	Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH	%	Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang taat Terhadap Persetujuan Lingkungan dan PUU LH dibagi Jumlah Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan yang diawasi pada tahun berjalan x 100	100,00	10,00	10,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.6	Persentase Rekomendasi Kajian Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti	%	Jumlah rekomendasi kajian lingkungan hidup yang ditindaklanjuti pada tahun berjalan dibagi total rekomendasi kajian lingkungan hidup yang harus dilaksanakan pada tahun berjalan x 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.7	Persentase Penurunan Pencemaran	%	Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Berjalan dikurangi Persentase Penurunan Pencemaran Air dan Udara Tahun Sebelumnya (Persentase penurunan adalah Nilai Indeks Kualitas	0,15	0,20	0,20	Dinas Lingkungan Hidup

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
			yang diperoleh dibagi dengan nilai indeks kualitas kategori baik (70) x 100				
11.8	Persentase RTH yang Dikelola	%	Luas Ruang Terbuka Hijau yang dikelola milik Pemerintah / Total luas Ruang Terbuka Hijau eksisting milik pemerintah x 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.9	Persentase Limbah B3 yang Terkelola	%	Jumlah limbah B3 yg dikelola pihak ketiga berizin pada tahun berjalan/ Jumlah limbah B3 yang dihasilkan dan dilaporkan pada tahun berjalan x 100		50,00	55,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.10	Persentase Penyuluh Lingkungan Hidup yang Ditingkatkan Kompetensinya	%	Jumlah penyuluh yang melaksanakan peningkatan kompetensi dibagi total penyuluh aktif x 100		100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.11	Persentase Partisipasi Masyarakat dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	%	Jumlah masyarakat yang berpartisipasi dalam kegiatan lingkungan hidup/ Jumlah target partisipasi masyarakat dibagi 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
11.12	Persentase Pengaduan Lingkungan Hidup yang Terselesaikan	%	Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang diselesaikan pada tahun berjalan/ Jumlah Pengaduan Lingkungan Hidup yang teregistrasi pada tahun berjalan dikali 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Lingkungan Hidup
12	**Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil**						
	Persentase Masyarakat yang memiliki Dokumen Administrasi Kependudukan	%	Dokumen Pendaftaran Penduduk + Dokumen Pencatatan Sipil/2 x 100%	98,28	98,28	98,50	Disdukcapil
	Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan	%	Jumlah Lembaga pengguna yang menandatangani Perjanjian Kerjasama Pemanfaatan data Kependudukan nasional untuk pelayanan publik dan pengguna hak akses + Jumlah lembaga pengguna atau perangkat daerah yang memanfaatkan data kependudukan/ Target x 100%	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
12.1	Persentase Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk yang terlayani sesuai standar	%	Perekaman KTP El + Pencetakan KTP El + Pencetakan KIA + Pencetakan Biodata+ Pencetakan Kartu Keluarga + Pencetakan SKPWNI + Pencetakan SKDWNI/target x 100	101,68	100,00	100,00	Disdukcapil
12.2	Persentasi Kepemilikan Dokumen permohonan Pencatatan Sipil yang terlayani sesuai standar	%	Kepemilikan Akte Kelahiran + kepemilikan Akte Kematian + kepemilikan Akte Perceraian +kepemilikan Akte Perkawinan/target x 100%	99,03	99,05	99,07	Disdukcapil
12.3	Persentasi Kualitas Sistem Informasi Administrasi Kependudukan	%	Pengelolaan SIAK + Pengolahan Data Kependudukan/2 x 100	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
12.4	Persentase Dokumen Kependudukan yang dihasilkan ssuai kewajiban OPD berdasarkan Permendagri	%	Jumlah Buku Profil Data Perkembangan dan Proyeksi Kependudukan serta Kebutuhan yang Lain + Pengelolaan Aplikasi Website Profil Data Perkembangan Kependudukan (SIMANTAP WEB GIS)/ 3 x 100%	100,00	100,00	100,00	Disdukcapil
13	**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**						
13.1	Persentase rencana aksi pengendalian penduduk yang diterapkan	%	Laporan hasil pemutakhiran data keluarga	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
13.2	Angka Prevalensi Kontrasepsi Modern (mCPR)	%	Jumlah perempuan usia 15an-49 tahun yang menggunakan kontrasepsi modern / Jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang sudah menikah atau sedang berhubungan x 100	67,67	67,67	68,50	DPPKBP3A
13.3	Persentase Kebutuhan Ber-KB yang tidak terpenuhi (Un Met Need)	%	Jumlah perempuan usia 15an-49 tahun yang ingin menunda atau tidak ingin ber-KB / Jumlah total perempuan usia 15an-49 tahun yang menikah atau sedang berhubungan x 100	12,50	12,50	12,40	DPPKBP3A
13.4	Persentase keluarga yang memenuhi delapan fungsi keluarga	%	Jumlah keluarga yang dilatih orientasi ketahanan keluarga/ Jumlah keluarga x 100	100,00	100,00	100,00	DPPKBP3A
14	**Perhubungan**						
14.1	Rasio Konektivitas	Poin	(Jumlah Trayek yg dilayani x Bobot Trayek)/ Jumlah Kebutuhan Trayek	0,62	0,64	0,66	Dinas Perhubungan
14.2	V/C Rasio	Poin	Volume Lalu Lintas/ Kapasitas Jalan	0,35	0,35	0,34	Dinas Perhubungan
14.3	Tingkat Keselamatan Transportasi	%	(Persentase Kendaraan Wajib Uji + Persentase Angkutan Umum Laik Jalan + Persentase Penyedian Faslalin)/3	63,02	64,76	66,72	Dinas Perhubungan
14.4	Persentase Kelengkapan Jalan yang telah Terpasang terhadap Kondisi Ideal	%	Fasilitas Perlengkapan Jalan yang tersedia / Fasilitas Perlengkapan Jalan yang dibutuhkan	48,00	50,32	53,40	Dinas Perhubungan
14.5	Konektivitas Darat	Km	Jumlah Trayek yang Tersedia + Rencana Trayek Yang Akan Dilayani	420,00	448,00	487,00	Dinas Perhubungan
15	**Komunikasi dan Informatika**						
15.1	Indeks Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks SPBE berdasarkan Peraturan Presiden No 95 Tahun 2018 dan Permenpan RB No. 5 Tahun 2018	3,96	4,00	4,10	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
15.2	Peningkatan Kematangan Penerapan Pemerintah Digital	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun berjalan dengan NilaiKematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya terrhadap Nilai Kematangan Penerapan SPBE tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal x 100	21,85	1,00	2,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.3	Peningkatan Implementasi Smart City	%	Persentase Perbandingan Hasil pengurangan Nilai Implementasi Smart City tahun berjalan dengan Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya terrhadap Nilai Implementasi Smart City tahun sebelumnya (Nilai Akhir - Nilai Awal)/Nilai Awal x 100	3,60	1,00	1,60	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.4	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik Bersasarkan UU No 14 Tahun 2008, PP No 61 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Informasi No.1 tahun 2021 yang diselenggaraan oleh Komisi Informasi	94,08	94,10	94,50	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.5	Nilai Kualitas Informasi	%	Hasil Nilai Kualitas Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
15.6	Nilai Pelayanan Informasi	%	Hasil Nilai Pelayanan Informasi pada LHE Capaian Keterbukaan Informasi	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	**Koperasi Usaha Kecil dan Menengah**						
16.1	Persentase koperasi yang memiliki NIK (Nomor Induk Koperasi)	%	Jumlah Koperasi yang bersertifikat NIK/ Jumlah Koperasi Aktif x 100%	11,20	12,00	13,00	Dinas KUKM Perindag
16.2	Rasio Volume Usaha Koperasi terhadap PDRB (%)	%	Rasio volume usaha koperasi terhadap PDRB merupakan perbandingan antara volume usaha koperasi terhadap PDRB masing-masing daerah 1. Volume usaha koperasi merupakan nilai penjualan atau penerimaan barang dan jasa serta penyaluran pinjaman dan pembiayaan dalam satu periode atau tahun buku tertentu. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. PDRB atas dasar harga	1,00	1,02	1,04	Dinas KUKM Perindag

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
			berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun				
16.3	Persentase Peningkatan Omzet Usaha Mikro	%			2,00	2,10	Dinas KUKM Perindag
16.4	Persentase koperasi simpan pinjam yang memiliki ijin	%	Jumlah KSP yang memiliki izin/ Jumlah total KSP x 100%	100,00	100,00	100,00	Dinas KUKM Perindag
16.5	Persentase Koperasi Aktif	%	Jumlah koperasi aktif/ Jumlah seluruh koperasi x 100%	4,00	5,00	6,00	Dinas KUKM Perindag
16.6	Persentase koperasi sehat	%	Jumlah KSP/USP sehat/ Jumlah total KSP/USP x 100%	24,00	30,00	35,00	Dinas KUKM Perindag
16.7	Persentase koperasi yang bersertifikat uji kompetensi	%	Jumlah koperasi yang bersertifikat kompetensi/ Jumlah total koperasi x 100%	10,00	11,00	12,00	Dinas KUKM Perindag
16.8	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	%	Jumlah koperasi yang meningkat kualitasnya (berdasarkan RAT, volume usaha dan aset) dibagi jumlah seluruh koperasi aktif	37,50	39,00	41,00	Dinas KUKM Perindag
16.9	Persentase usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal	%	Jumlah usaha mikro yang bertransformasi dari informal ke formal/ Total usaha mikro		0,50	1,00	Dinas KUKM Perindag
16.10	Pertumbuhan wirausaha	%	Jumlah wirausaha tahun n - jumlah wirausaha tahun n-1/ Jumlah wirausaha tahun n-1		0,50	1,00	Dinas KUKM Perindag
16.11	Proporsi usaha mikro yang menjalin kemitraan dan ekspor	%	Jumlah usaha mikro yang menjalin kemitraan dan ekspor / Total usaha mikro		3,00	3,50	Dinas KUKM Perindag
17	**Penanaman Modal**						
17.1	Persentase peningkatan investasi	%	Jumlah investasi tahun n - jumlah investasi n-1/ Jumlah investasi n-1 x 100%	-	2,10%	9,84	DPMPTSP
17.2'	Capaian penerbitan perijinan terpadu tepat waktu sesuai SOP	%	Persentase capaian penerbitan perijinan terpadu sesuai SOP terhadap pengajuan perijinan dengan persyaratan yang lengkap	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
17.3	Persentase realisasi RUPM Kota Tasikmalaya	%	Realiasi RUPM/Jumlah tahapan dalam RUPM x 100%	0,00		5,00	DPMPTSP
17.4	Persentase Peningkatan Investor	%	Jumlah investor tahun n - jumlah investor n-1 dibagi Jumlah investor n-1 x 100	0,00		20,00	DPMPTSP
17.5	IKM Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	%	Hasil Survei Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	88,59	89,00	90,00	DPMPTSP

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
17.6	Persentase pengendalian pelaksanaan penanaman modal	%	Jumlah investor yang dibina/ Jumlah total investor x 100%	5,00		10,00	DPMPTSP
17.7	Persentase pengelolaan basis data potensi Penanaman Modal sesuai SOP	%	Jumlah basis data potensi penanaman modal yang dikelola sesuai SOP/Jumlah total basis data potensi investasi x 100%			80,00	DPMPTSP
17.8	Persentase data dan informasi PMPTSP yang dimanfaatkan	%	Jumlah Data dan Informasi yang dimanfaatkan / Jumlah Total Data dan Informasi yang tersedia x100	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
17.9	Persentase pengelolaan data perijinan sesuai SOP	%	Jumlah data perijinan yang dikelola sesuai SOP/ Jumlah total data perijinan x 100%	100,00	100,00	100,00	DPMPTSP
18	**Kepemudaan dan Olahraga**						
18.1	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Pembangunan	%	Rata-rata Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri dan Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	-	57,55	57,67	Disporabudpar
18.2	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Ekonomi Mandiri	%	(Jumlah pemuda berwirausaha/ Jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	33,17	38,43	38,65	Disporabudpar
18.3	Persentase Partisipasi Pemuda dalam Organisasi Kepemudaan dan Sosial Kemasyarakatan	%	(Jumlah pemuda aktif di organisasi/ Jumlah pemuda di Kota Tasikmalaya) x 100	67,64	76,55	76,69	Disporabudpar
18.4	Persentase sarana dan prasarana olahraga dalam kondisi baik	%	(Jumlah intervensi sarpras olahraga/ Target intervensi terhadap sarpras olahraga) x 100	54,54	20,00	20,00	Disporabudpar
18.5	Persentase Prestasi Olahraga Tingkat Provinsi	%	(Jumlah cabang olahraga berprestasi pada event provinsi / Jumlah cabang olahraga) x 100	50,00	53,66	50,00	Disporabudpar
18.6	Persentase cabang olahraga masyarakat yang dibina	%	(Jumlah induk olahraga masyarakat atau [INORGA] yang dibina / Jumlah INORGA) x 100	13,80	15,38	17,24	Disporabudpar
19	**Statistik**						
19.1	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral (EPSS) berdasarkan Penilaian dari Badan Pusat Statistik	3,01	3,10	3,20	Dinas Komunikasi dan Informatika
19.2	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah	%	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dlm penyusunan perencanaan Pembangunan Daerah/Jumlah OPD yang ada di Pemerintah Kota x 100	100,00	100,00	100,00	Dinas Komunikasi dan Informatika

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
20	**Persandian**						
20.1	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Poin	Laporan Hasil Evaluasi Indeks KAMI (Keamanan Informasi) ISO 270001	297,00	350,00	400,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.2	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi	Poin	Nilai Tata Kelola Keamanan Informasi yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	91,00	120,00	140,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
20.3	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM)	Poin	Nilai Pengelolaan Resiko, Teknologi dan Aset Keamanan Informasi (CSM) yang dihasilkan pada Penilaian Indeks KAMI	204,00	230,00	260,00	Dinas Komunikasi dan Informatika
21	**Kebudayaan**						
21.1	Persentase Pelestarian Objek Pemajuan Kebudayaan, Cagar Budaya dan sejarah Daerah	%	Rata-rata persentase capaian program urusan kebudayaan	-	16,31	16,32	Disporabudpar
21.2	Persentase Intervensi Pengelolaan dan Pelestarian Kebudayaan Daerah	%	(Jumlah Persentase Pengelolaan Kebudayaan tahun N-Persentase Kebudayaan tahun N-1)/ Persentase Kebudayaan tahun N-1	64,65	30,77	30,77	Disporabudpar
21.3	Persentase Peningkatan Pengembangan Kesenian Tradisional	%	(Jumlah Persentase Kesenian Tradisional tahun N - Persentase Kesenian Tradisional tahun N-1)/ Persentase Kesenian Tradisional tahun N-1	25,00	5,71	6,67	Disporabudpar
21.4	Persentase sejarah lokal yang dilestarikan	%	(Jumlah sejarah lokal yang dilestarikan/ Target pelsetarian) x 100	10,00	20,00	20,00	Disporabudpar
21.5	Persentase Cagar Budaya yang Dilestarikan	%	(Jumlah cagar budaya yang dilestarikan/ Jumlah cagar budaya) x 100	20,00	20,00	20,00	Disporabudpar
22	**Perpustakaan**						
22.1	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)	Poin	Nilai yang diperoleh dari Perpustakaan RI/ Swasta	72,84	76,55	77,01	Dispusipda
22.2	Persentase koleksi nasional dan naskah kuno yang dilestarikan	Naskah	Ukuran perbandingan antara jumlah koleksi yang tergolong sebagai Koleksi Nasional dan/atau Naskah Kuno dengan jumlah seluruh koleksi perpustakaan yang tercatat	1	-	1	Dispusipda

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
22.3	Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	Poin	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat adalah ukuran yang menunjukkan intensitas, frekuensi, durasi, dan jenis aktivitas membaca yang dilakukan oleh masyarakat, baik melalui bahan bacaan cetak maupun digital, yang diperoleh dari berbagai sumber termasuk perpustakaan, toko buku, maupun media daring	0,00	82,09	82,40	Dispusipda
23	**Kearsipan**						
23.1	Tingkat Ketersediaan Arsip	%	Persentase jumlah arsip dinamis, statis, dan sikn/jikn yang sudah dibuatkan daftar dibagi dengan jumlah keseluruhan arsip dinamis, statis, dan sikn/jikn	100,00	100,00	100,00	Dispusipda
23.2	Persentase Cakupan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip	%	Nilai capaian aspek PAS + PAI dibagi nilai standar dalam LAKE x 100 %	61,33	61,33	61,58	Dispusipda
23.2	Persentase Akses Masyarakat terhadap Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	%	Jumlah kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup yang terselesaikan(dipenuhi)/ Jumlah permohonan kegiatan penerbitan izin penggunaan arsip bersifat tertutup	-	100,00	100,00	Dispusipda
	Fokus Layanan Urusan Pilihan						
1	**Kelautan dan Perikanan**						
1.1	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB	%	Kontribusi Kategori Pertanian dan Perikanan terhadap PDRB yang dihitung dan dikeluarkan oleh BPS	5,05	5,00	5,00	DKP3
1.2	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya	Ton	Angka produksi perikanan budidaya	9.989,71	10.000,00	10.000,00	DKP3
1.3	Angka konsumsi ikan	Kg/Kap/Tahun	Jumlah Ikan yang dikonsumsi (Setara Utuh Segar) dibagi jumlah penduduk pada Pemerintah Daerah Provinsi pada periode satu tahun	43,95	44,00	44,00	DKP3
2	**Pariwisata**						
2.1	Persentase Peningkatan Objek Daya Tarik Wisata	%	(Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara tahun N-Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara tahun N-1) / Jumlah wisatawan nusantara dan mancanegara tahun N-1	-	0,12	0,14	Disporabudpar
2.2	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikembangkan	%	(Jumlah destinasi pariwisata yang diintervensi / Jumlah destiasi pariwisata pada Ripparkot) x 100	40,82	42,86	42,86	Disporabudpar
2.3	Persentase Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Daerah	%	(Jumlah pelaksanaan pemasaran dalam dan luar daerah / Jenis pemasaran) x 100	40,00	40,00	40,00	Disporabudpar

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
2.4	Persentase Usaha Pariwisata dan Subsektor ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	%	(Jumlah usaha pariwisata dan sub sekor ekraf yang dikembangkan / Jumlah usaha pariwisata dan sub sektor ekraf) x 100	20,00	23,33	23,33	Disporabudpar
3	**Pertanian**						
3.1	Produksi Komoditas Peternakan	Ton	Angka produksi Peternakan	13.148,00	13.149,00	13.150,00	DKP3
3.2	Produksi Tanaman Pangan	Ton	Angka produksi tanaman pangan	61.364,40	61.400,00	61.500,00	DKP3
3.3	Produksi Hortikultura dan perkebunan	Ton	Angka produksi hortikultura dan perkebunan	5.587,81	5.750,00	5.900,00	DKP3
3.4	Cakupan luas lahan pertanian yang ditetapkan menjadi LP2B	Ha	Perda LP2B	855,39	855,39	855,39	DKP3
3.5	Tingkat Pengendalian penyakit hewan menular strategis (PHMS)	%	Persentase penanganan kejadian kasus penyakit hewan menular	100,00	100,00	100,00	DKP3
3.6	Persentase Unit Usaha Pangan Asal Hewan yang memiliki Sertifikat Pra NKV atau NKV (Nomor Kontrol veteriner)	%	(Jumlah Unit Usaha dengan Sertifikat Pra NKV atau NKV / Total Jumlah Unit Usaha Pangan Asal Hewan) x 100%	0,00	0,00	1,00	DKP3
3.7	Persentase penanganan bencana pertanian	%	Jumlah areal terdampak bencana yang ditanggulangi/ Jumlah total areal terdampak bencana x 100	100,00	75,00	75,00	DKP3
3.8	Persentase penanganan dampak perubahan iklim terhadap pertanian	%	(Jumlah Kegiatan Penanganan Dampak Perubahan Iklim yang Dilakukan / Total Jumlah Kegiatan yang Direncanakan) x 100%	0,00	75,00	75,00	DKP3
3.9	Persentase izin usaha pertanian yang diterbitkan	%	Jumlah Izin Usaha Pertanian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan perizinan	100,00	100,00	100,00	DKP3
3.10	Persentase SDM Penyuluh Pertanian yang ditingkatkan	%	Jumlah kelompok naik kelas / Jumlah kelompok x 100%	5,68	5,70	5,70	DKP3
3.11	Persentase kelembagaan tani yang dibentuk dan beroperasi	%	Persentase kelembagaan tani yang aktif beroperasi dari total kelembagaan tani yang terbentuk		60,00	60,00	DKP3
4	**Perdagangan**						
4.1	Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	(PDRB sektor perdagangan n – PDRB sektor perdagangan n-1)/ PDRB sektor Perdagangan n-1 x 100 %	21,24	21,39	21,44	Dinas KUKM Perindag
4.2	Persentase ijin usaha perdagangan yang difasilitasi	%	(Jumlah Ijin Usaha Perdagangan yang Difasilitasi / Total Jumlah Permohonan Ijin Usaha Perdagangan) x 100%		100,00	100,00	Dinas KUKM Perindag

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
4.3	Persentase sarana perdagangan yang ditingkatkan kualitasnya	%	(Jumlah Sarana Perdagangan yang Ditingkatkan Kualitasnya / Total Jumlah Sarana Perdagangan yang Direncanakan untuk Ditingkatkan) x 100%		20,00	20,00	Dinas KUKM Perindag
4.4	Persentase stabilitasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting	%	(Jumlah Hari dengan Harga Stabil / Total Jumlah Hari dalam Periode Tertentu) x 100%		100,00	100,00	Dinas KUKM Perindag
4.5	Nilai ekspor barang	(Juta)US$	Jumlah Barang yang Diekspor x Harga Barang per Unit atau Total Nilai FOB (*Free On Board*) dari Barang yang Diekspor	19,80	20,00	22,00	Dinas KUKM Perindag
4.6	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	%	Jumlah UTTP bertanda tera yang berlaku pada tahun berjalan dibagi Jumlah potensi UTTP yang wajib ditera dan ditera ulang		100,00	100,00	Dinas KUKM Perindag
4.7	Persentase peningkatan omset pelaku usaha yang difasilitasi promosi	%	((Omset Setelah Promosi - Omset Sebelum Promosi) / Omset Sebelum Promosi) x 100%		1,00	1,00	Dinas KUKM Perindag
5	**Perindustrian**						
5.1	Kontribusi Sektor Industri terhadap PDRB	%	(PDRB sektor Industri n – PDRB sektor Industri n-1)/ PDRB sektor Industri n-1 x 100 %	13,41	13,44	13,47	Dinas KUKM Perindag
5.2	Pertambahan Jumlah Industri kecil	%	Jumlah industri kecil dan menengah tahun n – Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1 x 100% dibagi Jumlah industri kecil dan menengah tahun n-1	46,00	46,50	47,00	Dinas KUKM Perindag
5.3	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan	%	Jumlah izin yang dipantau dan dianalisis dalam laporan hasil pemantauan dibagi Jumlah izin yang dikeluarkan	100,00	100,00	100,00	Dinas KUKM Perindag
5.4	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini		1) Informasi Industri: - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 0-6 bulan (50%); - Tersedianya informasi industri dengan batas waktu 7-12 bulan (25%); - Tidak menyampaikan informasi industri (0%). 2) Kelengkapan informasi industri meliputi: - Informasi produksi dan kapasitas produksi (10%); - Informasi bahan baku dan bahan penolong (10%); - Informasi bahan bakar/ energy (10%); - Informasi tenaga kerja (10%); - Informasi investasi (10%).		100,00	100,00	Dinas KUKM Perindag

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
			Nilai akhir adalah akumulasi dari kelengkapan dan keterkinian informasi industri (1 + 2)				
	Layanan Pendukung dan Penunjang Pemerintahan						
1	**Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan**						
1.1	Indeks Reformasi Birokrasi General	Nilai	Nilai Indeks Reformasi Birokrasi General yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi	76,62	76,55	77,00	Sekretariat Daerah
1.2	Nilai Komposit Kelembagaan	Nilai	Hasil Evaluasi Kelembagaan Berdasarkan Permenpan RB Nomor 20 tahun 2018	82,47	84,00	84,00	Sekretariat Daerah
1.3	Nilai Dimensi Pelaporan Kinerja dalam Penilaian SAKIP Pemerintah Daerah	Nilai	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Dimensi Pelaporan Kinerja yang Dinilai Oleh Kemenpan-RB	10,55	10,58	10,60	Sekretariat Daerah
1.4	Indeks Kepuasan Masyarakat Tingkat Kota	Nilai	(Nilai Total IKM Pemerintah Daerah yang menerapkan Kebijakan Standar Pelayanan Publik / Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	88,10	85,50	88,75	Sekretariat Daerah
1.5	Persentase Pemenuhan Eviden Indikator Kinerja Kunci (IKK) dalam SILPPD	%	(Jumlah Eviden IKK yang Terpenuhi / Jumlah Eviden IKK yang Harus Dipenuhi) x 100%	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
1.6	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Pemerintahan	69,00	69,00	69,00	Sekretariat Daerah
1.7	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Rakyat	74,00	74,00	74,00	Sekretariat Daerah
1.8	Indeks Reformasi Hukum	Nilai	Hasil Penilaian Indeks Reformasi Birokrasi Hukum Pemerintah Daerah dari Tim Penilai Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia	98,00	98,00	98,00	Sekretariat Daerah
1.9	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	89,00	89,00	89,00	Sekretariat Daerah
1.10	Nilai Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	Nilai	Hasil Penilaian Kualitas Kebijakan Bidang Administrasi Pembangunan	80,00	80,00	80,00	Sekretariat Daerah
1.11	Persentase Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangungan yang Ditindklanjuti	%	(Jumlah Tindak Lanjut Hasil Evluasi Pembangungan yang Dilaksanakan / Jumlah Saran Tindak Lanju) x 100%	100,00	100,00	100,00	Sekretariat Daerah
1.12	Indeks Tata Kelola Pengadaan	Skor	Hasil Penilaian dari LKPP	68,48	71,00	72,00	Sekretariat Daerah
1.13	Tingkat Kepuasan Anggota DPRD terhadap Pelayanan Sekretariat DPRD	%	Target fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD/Realisasi fasilitasi penyelenggaraan tugas dan fungsi DPRD x 100%				Sekretariat Daerah

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
1.14	Ketepatan Penetapan Perda APBD Tahun N		(Jumlah Hari Penetapan Perda APBD yang Tepat Waktu / Jumlah Hari yang Ditentukan) x 100%		Tepat Waktu	Tepat Waktu	Sekretariat Daerah
1.15	Persentase Penetapan Ranperda Tahun N	%	Jumlah Ranperda yang Ditetapkan / Jumlah Ranperda yang Direncanakan) x 100%		100,00	100,00	Sekretariat Daerah
1.16	Persentase Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	%	(Jumlah Kegiatan Pengawasan yang Efektif / Total Jumlah Kegiatan Pengawasan) x 100% atau (Jumlah Rekomendasi yang Dilaksanakan / Total Jumlah Rekomendasi) x 100%		100,00	100,00	Sekretariat Daerah
2	**Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan**						
2.1	**Perencanaan Pembangunan**						
2.1.1	Nilai Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Perencanaan Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	23,82	24,05	24,15	Bappelitbangda
2.1.2	Nilai Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja dalam penilaian SAKIP Kota	Poin	Poin Pencapaian Komponen Pengukuran Kinerja pada SAKIP Kota dari Kementerian PANRB	19,52	20,14	20,24	Bappelitbangda
2.1.3	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah) / (Jumlah Perangkat Daerah)	24,43	25,71	25.81	Bappelitbangda
2.1.4	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah	Poin	Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah / Jumlah Perangkat Daerah	24,16	24,08	24.18	Bappelitbangda
2.1.5	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	24,51	25,63	25,73	Bappelitbangda
2.1.6	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PPM)	24,29	23,99	24,09	Bappelitbangda
2.1.7	Capaian Komponen Perencanaan Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Perencanaan SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	24,11	25,99	26,09	Bappelitbangda
2.1.8	Capaian Komponen Pengukuran Kinerja SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Infrastrukur Kewilayahan	Poin	(Total Pencapaian Komponen Pengukuran SAKIP Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK) / (Jumlah Perangkat Daerah lingkup Bidang PIK)	23,70	24,41	24,51	Bappelitbangda
2.2	**Keuangan**						

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
2.2.1	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini	Opini dari BPK atas LKPD Kota Tasikmalaya	WTP	WTP	WTP	BPKAD
2.2.2	Persentase Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/ Target Dokumen Penganggaran Keuangan Daerah) x 100	100,00	100,00	100,00	BPKAD
2.2.3	Persentase Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/ Target Dokumen Penatausahaan Keuangan Daerah) x 100	100,00	100,00	100,00	BPKAD
2.2.4	Persentase Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah yang selesai Tepat Waktu/ Target Dokumen Pertanggungjawaban Keuangan Daerah) x 100	100,00	100,00	100,00	BPKAD
2.2.5	Persentase Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar	%	(Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah Sesuai Standar/ Target Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah) x 100	100,00	100,00	100,00	BPKAD
2.3	**Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan**						
2.3.1	Indeks Sistem Merit	Nilai/ Kategori	Penilaian mandiri sistem merit yang diverifikasi dan ditetapkan oleh KASN, meliputi aspek: a. perencanaan kebutuhan; b. pengadaan; c. pengembangan karier d. promosi dan mutasi; e. manajemen kinerja; f. penggajian, penghargaan dan disiplin; g. perlindungan dan pelayanan; dan h. sistem informasi (Peraturan KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen ASN di Lingkungan Instansi Pemerintah)	371,00	305,00	309,00	BKPSDM
2.3.2	Nilai kriteria kualitas perencanaan kebutuhan ASN	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas perencanaan kebutuhan ASN oleh BKN	40	37,5	37,5	BKPSDM
2.3.3	Nilai kriteria kualitas pengadaan ASN	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas pengadaan ASN oleh BKN	40	36	38	BKPSDM

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
2.3.4	Nilai kriteria kualitas perlindungan dan pelayanan	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas perlindungan dan pelayanan oleh BKN	16	12	12	BKPSDM
2.3.5	Nilai kriteria kualitas sistem informasi	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas sistem informasi oleh BKN	20	22	24	BKPSDM
2.3.6	Nilai kriteria kualitas evaluasi kinerja	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas evaluasi oleh BKN	75	67,5	67,5	BKPSDM
2.3.7	Nilai kriteria kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas kualitas penggajian, penghargaan dan disiplin oleh BKN	37,5	35	35	BKPSDM
2.3.8	Nilai kriteria kualitas pengelolaan promosi dan mutasi	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas kualitas pengelolaan promosi dan mutasi oleh BKN	37,5	35	35	BKPSDM
2.3.9	Nilai kriteria kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas pengembangan karir dimensi manajemen talenta oleh BKN	75	60	60	BKPSDM
2.3.10	Persentase ASN yang mengikuti Pengembangan Kompetensi	Nilai/ Kategori	Hasil penilaian kualitas pengembangan karir dimensi pengembangan kompetensi oleh BKN	30	30	30	BKPSDM
2.4	**Penelitian dan Pengembangan**						
2.4.1	Persentase hasil riset yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	%	(Hasil riset yang menjadi dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan / Total Seluruh Hasil Riset) x 100%			50	Bappelitbangda
2.4.2	Persentase Peningkatan Inovasi Daerah yang terverifikasi	%	Jumlah Inovasi Daerah Terverifikasi Tahun Berjalan - Jumlah Inovasi Tahun Sebelumnya) / Jumlah Inovasi Tahun Sebelumnya x 100%			16	Bappelitbangda
2.4.3	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%	(Total kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan / Total kajian yang disusun) x 100%	100	100	100	Bappelitbangda
2.4.4	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan daerah	%	((Total inovasi di IGA tahun ini) - (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya)) / (Total inovasi di IGA tahun sebelumnya) x 100%	100	100	100	Bappelitbangda
3	**Unsur Pengawasan Pemerintahan**						
3.1	Level Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP)	Level (Poin)	Level Kapabilitas APIP yang telah dilakukan Penilaian oleh BPKP	Level 3 (3,060)	Level 3 (3,065)	Level 3 (3,100)	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
3.2	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	%	Rumusan Capaian Penyelesaian TLHP internal dan eksternal	78,50%	81,00%	81,25%	Inspektorat
3.3	Capaian Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi	Poin	Penilaian Unsur dan Sub Unsur Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi yang dilakukan oleh Tim PK SPIP	3,144	Level 3 (3,231)	Level 3 (3,221)	Inspektorat
3.4	Tingkat keberhasilan pembangunan zona Integritas	Unit Kerja	Hasil penilaian Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK / WBBM yang dilaksanakan oleh Tim Penilai Internal (TPI) untuk diajukan ke TPN	1	1	1	Inspektorat
3.5	Nilai Komponen Evaluasi Internal Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Poin	Nilai Unsur Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal Pemerintah Tingkat Kota yang dikeluarkan oleh evaluator PAN RB	17,22	17,25	17,50	Inspektorat
3.6	Indeks Reformasi Birokrasi Inspektorat Daerah	Poin	Nilai Hasil Evaluasi Reformasi Birokrasi Inspektorat yang dilaksanakan oleh Tim Evaluator Tingkat Kota	Sangat Baik 81,88	81,00	81,20	Inspektorat
3.7	Persentase Laporan fasilitasi penyelesaian TLHP APIP dan BPK yang berhasil disusun	%	(Jumlah Laporan TLHP yang Berhasil Disusun / Total Jumlah Laporan TLHP yang Direncanakan) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.8	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban I yang diverifikasi	%	(Jumlah Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban I yang Diverifikasi / Total Jumlah Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban I yang Diterima) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.9	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban II yang diverifikasi	%	(Jumlah Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban II yang Diverifikasi / Total Jumlah Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban II yang Diterima) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.10	Persentase Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban III yang diverifikasi	%	(Jumlah Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban III yang Diverifikasi / Total Jumlah Laporan TLHP APIP lingkup wilayah Itban III yang Diterima) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.11	Level Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP	Level (Poin)	(Skor Penilaian Mandiri / Skor Maksimal) x 100%	Level 3	Level 3	Level 3	Inspektorat
3.12	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban I	Skor	(Skor Implementasi Manajemen Risiko pada Perangkat daerah lingkup Itban I / Skor Maksimalpada Perangkat daerah lingkup Itban I) x 100%	0	2	2	Inspektorat
3.13	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban II	Skor	(Skor Implementasi Manajemen Risiko pada Perangkat daerah lingkup Itban II / Skor Maksimalpada Perangkat daerah lingkup Itban II) x 100%	0	2	2	Inspektorat
3.14	Nilai komponen MRI (area Proses Manajemen Risiko) pada Perangkat daerah lingkup Itban III	Skor	(Skor Implementasi Manajemen Risiko pada Perangkat daerah lingkup Itban III / Skor Maksimalpada Perangkat daerah lingkup Itban III) x 100%	0	2	2	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
3.15	Persentase pengaduan masyarakat yang diselesaiakan sesuai standar	%	(Jumlah Pengaduan yang Diselesaikan Sesuai Standar / Total Jumlah Pengaduan yang Diterima) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.16	Persentase kejadian kerugian keuangan yang diselesaikan sesuai standar	%	(Jumlah Kasus Kerugian Keuangan yang Diselesaikan Sesuai Standar / Total Jumlah Kasus Kerugian Keuangan) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.17	Persentase perangkat daerah wilayah irban I yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti LHE SAKIP / Total Jumlah Perangkat Daerah Wilayah Irban I) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.18	Persentase perangkat daerah wilayah irban II yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti LHE SAKIP / Total Jumlah Perangkat Daerah Wilayah Irban II x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.19	Persentase perangkat daerah wilayah irban III yang menindaklanjuti LHE SAKIP	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menindaklanjuti LHE SAKIP / Total Jumlah Perangkat Daerah Wilayah Irban III) x 100%	100	100	100	Inspektorat
3.20	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban I	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Mencapai Level 3 / Total Jumlah Perangkat Daerah Wilayah Itban I) x 100%	0	100	100	Inspektorat
3.21	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban II	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Mencapai Level 3 / Total Jumlah Perangkat Daerah Wilayah Itban II) x 100%	0	100	100	Inspektorat
3.22	Persentase capaian hasil Penilaian mandiri Perangkat Daerah level 3 wilayah Itban III	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Mencapai Level 3 / Total Jumlah Perangkat Daerah Wilayah Itban III) x 100%	0	100%	100%	Inspektorat
3.23	Capaian penjaminan kualitas atas penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi	Level	(Jumlah Penilaian Mandiri yang Memenuhi Standar Kualitas / Total Jumlah Penilaian Mandiri) x 100%	3,221	Level 3 (3,231)	Level 3 (3,241)	Inspektorat
3.24	Capaian penilaian mandiri maturitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi tingkat Kota	Level	(Skor Total Penilaian Mandiri / Skor Maksimal) x 100%	3,471	Level 3 (3,471)	Level 3 (3,481)	Inspektorat
3.25	Persentase tindak lanjut rekomendasi hasil survey penilaian integritas	%	(Jumlah Rekomendasi yang Ditindaklanjuti / Total Jumlah Rekomendasi) x 100%	0	100	100	Inspektorat
3.26	Persentase Perangkat Daerah yang membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Membangun Zona Integritas / Total Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	0	100	100	Inspektorat
3.27	Persentase Perangkat daerah yang menerapkan RADPK	%	(Jumlah Perangkat Daerah yang Menerapkan RADPK / Total Jumlah Perangkat Daerah) x 100%	0	100	100	Inspektorat

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
3.28	Persentase ASN yang melaporkan LHKAN (LHKPN dan SPT Tahunan)	%	(Jumlah ASN yang Melaporkan LHKPN dan SPT Tahunan / Total Jumlah ASN Wajib Lapor) x 100%	0	100	100	Inspektorat
3.29	Nilai hasil MCP	%	Skor Capaian / Skor Maksimal) x 100% Skor Capaian dihitung berdasarkan beberapa indikator, seperti: 1. Capaian program pembangunan 2. Efektivitas pelaksanaan program 3. Efisiensi penggunaan sumber daya 4. Kualitas *output* dan *outcome*	0		0	Inspektorat
3.30	Persentase evaluasi Perencanaan dan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tingkat Kota	%	(Skor Evaluasi / Skor Maksimal) x 100%	0	100	100	Inspektorat
4	**Unsur Kewilayahan**						
4.1	Persentase permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar/ Target permohonan administratif Bidang Kesra yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.2	Persentase sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan/ Target sarana dan prasarana di Kecamatan yang dimanfaatkan) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.3	Persentase data dan informasi kecamatan yang dilaporkan	%	(Realisasi data dan informasi kecamatan yang dilaporkan/ Target data dan informasi kecamatan yang dilaporkan) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.4	Persentase permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar/ Target permohonan administratif Bidang Pemerintahan yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.5	Persentase Peningkatan Kelurahan berprestasi	%	(Realisasi Peningkatan Kelurahan berprestasi/ Target Peningkatan Kelurahan berprestasi) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.6	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam pembangunan Kesra, Ekbang, Pemerintahan dan Tantribum	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang, Kesra, Pemerintahan dan Tantribum/ Target Realisasi Kelurahan yang	100	100	100	Kecamatan

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
			Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Ekbang, Kesra, Pemerintahan dan Tantribum) x 100				
4.7	Persentase permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar/ Target permohonan administratif Kelurahan yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.8	Persentase bidang kesekretariatan Kelurahan yang terpenuhi sesuai standar	%	(Realisasi bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar/ Target bidang sekretariatan yang terpenuhi sesuai standar) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.9	Persentase infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan	%	(Realisasi infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan/ Target infrastruktur kelurahan yang dimanfaatkan) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.10	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Ekbang	%	(Realisasi permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar/ Target permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.11	Persentase permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar	%	(Realisasi permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar/ Target permohonan administratif Bidang Ekbang yang terlayani sesuai standar) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.12	Persentase Kelurahan yang Masyarakatnya Aktif dalam Pemberdayaan Bidang Kesra	%	(Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra/ Target Realisasi Kelurahan yang Masyarakatnya aktif dalam pemberdayaan bidang Kesra) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.13	Persentase penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum	%	(Realisasi penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum/ Target penurunan gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum) x 100	100	100	100	Kecamatan
4.14	Persentase Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum di wilayah Kecamatan	%		100	100	100	Kecamatan
4.15	Persentase pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	%		100	100	100	Kecamatan
5	**Urusan Pemerintahan Umum**						
5.1	Cakupan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	%	Jumlah masyarakat terbina bidang ideologi pancasila dan karakter kebangsaan / Jumlah masyarakat terbina yang ditargetkan x 100%	100	100	100	Bakesbangpol

No.	Aspek/Fokus/Bidang/Urusan/ Indikator Kinerja Daerah	Satuan	Formulasi	Kondisi Awal (2024)	Target Kinerja		Penanggung Jawab
					2025	2026	
5.2	Persentase kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan	%	Jumlah kebijakan di bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di daerah yang dilaksanakan / Jumlah kebijakan yang ditargetkan x 100%	100	100	100	Bakesbangpol
5.3	Persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	Jumlah Ormas yang aktif / Jumlah Ormas x 100%	65	65	65	Bakesbangpol
5.4	Persentase pendidikan politik pada kader partai politik	%	Jumlah masyarakat terbina di bidang Pendidikan Politik/ Jumlah masyarakat yang ditargetkan x 100%	100	100	100	Bakesbangpol
5.5	Persentase konflik sosial yang diselesaikan	%	Jumlah potensi konflik yang diselesaikan/ Jumlah potensi konflik x 100%	100	100	100	Bakesbangpol

Sumber: Hasil Analisis Bappelitbangda, diolah 2025

Dari indikator-indikator tersebut, indikator yang mendukung transformasi pembangunan (Indikator Emas) sebagai berikut.

Tabel 6.6.
Indikator Utama Pembangunan: Transformasi Sosial

No.	Indikator	2025	2026
1.	Usia Harapan Hidup (Tahun)	75.44	75.63
2.	Jumlah Kasus Kematian Ibu per Tahun	26	24
3.	Prevalensi Stunting pada Balita (%)	23.73	22.3
4.	Cakupan Penemuan dan Pengobatan Kasus Tuberkulosis (%)	91	91
5.	Angka Keberhasilan Pengobatan Tuberkulosis (%)	91	91
6.	Cakupan Kepesertaan JKN (%)	100	100
7.	Harapan Lama Sekolah (Tahun)	13.52	13.56
8.	Tingkat Kemiskinan (%)	9.2 - 10.16	9.47

Sumber: Target Imperatif Indikator Makro Kab/Kota di Jawa Barat.

Tabel 6.7.
Indikator Utama Pembangunan: Transformasi Ekonomi

No.	Indikator	2025	2026
1.	Rasio PDRB Industri pengolahan (%)	13.03	12.95
2.	Rasio Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum (%)	6.11	6.14
3.	Rasio Kewirausahaan Daerah (%)	4.94	5.17
4.	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,37 - 6,45	6,34
5.	Indeks Ekonomi Hijau Daerah (Pilar Ekonomi)	58.54	59.78
6.	Rasio Pembentukan Modal Tetap Bruto (%)	32.79	32.85
7.	RT dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau, dan Berkelanjutan (%)	51.83	53.04
8.	Persentase Desa Mandiri (%)	-	-

Sumber: Target Imperatif Indikator Makro Kab/Kota di Jawa Barat.

Tabel 6.8.
Indikator Utama Pembangunan: Ketahanan Sosial Budaya Dan Ekologi

No.	Indikator	2025	2026
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	61.62	61,79
2.	Rumah Tangga dengan Akses Sanitasi Aman (Persen)	8.67	14.05
3	Timbunan Sampah Terolah di Fasilitas Pengolahan Sampah (Persen)	80.75	91.51
4.	Proporsi Rumah Tangga (RT) dengan Layanan Penuh Pengumpulan Sampah (Persen)	72.77	76.15
5.	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Persen)	4.61	4.44
6.	Kapasitas Air Baku (m^3/detik)	1.06	1.29
7.	Akses Rumah Tangga Perkotaan terhadap Air Siap Minum Perpipaan (Persen)	25.43	29.15
8.	Penurunan Emisi GRK Kumulatif (Ton CO_2Eq)	70.105,43	77,823.00

Sumber: Target Imperatif Indikator Makro Kab/Kota di Jawa Barat.

BAB VII

PENUTUP

Rencana Keja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Tasikmalaya Tahun 2026 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat serta RKPD Provinsi Jawa Barat.

Dalam mengawal RKPD, kebijakan Manajemen Risiko Pembangunan Daerah menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam mengelola risiko secara kolaboratif. Sinergi pengelolaan risiko tersebut menjadi unsur penting dalam meningkatkan keyakinan yang memadai oleh semua pihak dalam pencapaian sasaran RKPD.

Dalam rangka menjamin terlaksananya prioritas dan sasaran daerah serta untuk terwujudnya sinergitas dan tercapainya target kinerja pembangunan, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

1. Perangkat Daerah dan pemangku kepentingan pembangunan di Kota Tasikmalaya, melaksanakan RKPD Tahun 2026 secara sinergis, terintegrasi, efektif, efisien dan akuntabel sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
2. RKPD Tahun 2026 menjadi dasar penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-APBD) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2026 dan RAPBD Tahun Anggaran 2026.
3. Dalam rangka sinkronisasi, sinergitas dan integrasi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang pendanaannya bersumber dari APBD Kota/APBD Provinsi/APBN/PHLN dan sumber-sumber lainnya yang sah, maka setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang RKPD Tahun 2026.
4. Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan, agar difasilitasi melalui Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), sehingga aspirasi dan kepentingan masyarakat yang lebih luas dapat terakomodasi secara proporsional.
5. Berkaitan dengan pendanaan pembangunan, potensi sumber daya dari masyarakat dan dunia usaha perlu terus digali dan di dorong untuk dapat berperan serta secara maksimal dan sekaligus berperan sebagai pengawas pelaksanaan pembangunan daerah.
6. Untuk menjaga konsistensi dan efektivitas pelaksanaan RKPD tahun 2026, setiap Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2026 sesuai dengan tupoksi masing-masing dan melakukan koreksi yang diperlukan, serta melaporkannya secara berkala kepada Wali Kota melalui Kepala Bappelitbangda.

7. Kepala Bappelitbangda melakukan pengendalian, evaluasi, dan analisis lebih lanjut terhadap pelaksanaan RKPD Tahun 2026. Hasil evaluasi, kajian dan analisis RKPD Tahun 2026 menjadi bahan dasar penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Dalam rangka pencapaian sasaran dan target kinerja yang direncanakan dalam RKPD tahun 2026, seluruh jajaran Pemerintah Daerah Kota Tasikmalaya hendaknya melaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggungjawab, sesuai dengan kewenangan dan ketentuan yang berlaku serta menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026 berlaku pada tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2026. Apabila dalam pelaksanaannya terdapat ketidaksesuaian terhadap asumsi, target, sasaran, program dan kegiatan serta kondisi lainnya sebagaimana yang telah ditetapkan dalam dokumen RKPD Kota Tasikmalaya Tahun 2026, maka akan dilakukan perubahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN